



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan / Berkeadilan / Kompeten
Harmonis / Jaya / Dapat Kolaborasi

**#bangga
melayani
bangsa**

FOLU-COLL
OPERATION & COLLABORATION CENTER

SERI-A FOLU Net Sink 2030
Nomor: A-28/Renja-NTB/11/2023



RENCANA KERJA SUB NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



LAPORAN INDONESIA'S 20 FOLU NET SINK 30

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

HALAMAN SAMPUL

Renja Sub Nasional INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030 Provinsi NTB

Penulis:

Kelompok Kerja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi NTB

Tenaga Ahli:

Dr. Ir. Nandi Kosmaryandi, M.Sc., (Institut Pertanian Bogor)

Dr. Andi Chairil Ichsan, S.Hut., M.Si., C.EIA (Universitas Mataram)

Kornelia Webliana B, S.Hut., M.Sc., (Universitas Mataram)

ISBN:

000-000-0000-00-0

Perancang Sampul:

Rahmat Aji Akbar, S.Hut

Penelaah Konten:

Dr. Andi Chairil Ichsan, S.Hut., M.Si., C.EIA

Penata Letak:

Hayatus Sa'adiah, S.Hut

Lale Dini Ardiantari, S.Hut

Lutfia Azizah, S.Hut., M.Si

Rahmat Aji Akbar, S.Hut

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas kemudahan dan berkah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dapat tersusun dengan baik. *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui tingkat serapan gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi. Sektor kehutanan memiliki porsi terbesar di dalam target penurunan emisi GRK, dengan berkontribusi sekitar 60% dalam pemenuhan target netral karbon atau *net zero emission*.

Pemerintah Provinsi NTB sangat mendukung berbagai upaya mitigasi dampak perubahan iklim termasuk turut serta menyukseskan pencapaian target pengurangan emisi karbon yang telah ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dalam Persetujuan Paris. Pemerintah Provinsi NTB telah mempunyai rencana penurunan emisi GRK yang telah disinergikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2022. Pada Tahun 2021-2023, Provinsi NTB mengimplementasikan program NTB Asri dan Lestari.

Sasaran yang diinginkan melalui implementasi Renja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi NTB yaitu penurunan emisi GRK sebesar 41.045.749,39 juta ton CO₂e atau 32,98% pada tahun 2030 dalam upaya pemenuhan *Enhanced Nationally Determinant Contributions* (ENDC) dari Sub Nasional level sebagai pencapaian target *Indonesia's* ENDCs dan Komitmen *Paris Agreement*.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Pelaksana Penyusunan Renja Sub- Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi NTB atas kerja keras, kerja cerdas, dan dedikasinya dari awal pelaksanaan penyusunan hingga tersusunnya dokumen Renja ini.

Semoga dokumen Renja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi NTB dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun prioritas aksi penurunanemisi GRK di tingkat sub nasional sekaligus sebagai sumbangsih yang penting kepada ENDC Pemerintah Republik Indonesia.

Mataram, November 2023
Pj. Gubernur Provinsi NTB

Drs. H. LAILU GITA ARLADI, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Renja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi NTB merupakan Renja yang mendukung tercapainya target penurunan emisi GRK *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*, sehingga penyusunan Renja aksi mitigasi emisi GRK disesuaikan dengan Renja *Indonesia's FOLU Net Sink 2023-2030* pada tingkat nasional dan disesuaikan dengan potensi, kapasitas dan RPJMD Provinsi NTB. Tujuan penyusunan Renja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi NTB adalah sebagai berikut: 1) Menetapkan peta spasial untuk implementasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di Sub-nasional NTB, 2) Menetapkan Renja program penurunan emisi karbon untuk mempercepat ketercapaian *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Sub-nasional NTB, 3) Penguatan kebijakan untuk pengendalian emisi untuk mencapai *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Sub-nasional NTB, dan 4) Identifikasi peran para pihak, mitra-mitra dan kebijakan, program dan kegiatan terkait pengendalian emisi dalam mencapai *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Sub-nasional NTB.

Renja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi NTB meliputi 9 (sembilan) Rencana Operasional (RO) dengan total luasan sementara $\pm 770.040,66$ Ha yang meliputi:

- a) RO 1: Pencegahan deforestasi mineral seluas 165.144,20 Ha, yang terdistribusi pada semua fungsi kawasan hutan (kecuali cagar alam).
- b) RO 3: Pencegahan degradasi konsesi seluas 2.396,50 Ha, yang terdistribusi pada Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Tetap (HPT).
- c) RO 4: Pembangunan hutan tanaman seluas 1.606,14 Ha, yang keseluruhannya berada pada HP.
- d) RO 5: Penerapan pengayaan hutan alam seluas 6.550,01 Ha, yang terdistribusi pada semua fungsi kawasan hutan (kecuali cagar alam dan tahura) dan Areal Penggunaan Lainnya (APL).
- e) RO 6: Penerapan *Reduced Impact Logging-Carbon* (RIL-C) seluas 17.422,62 Ha, yang terdistribusi pada HP dan HPT.
- f) RO 7: Peningkatan cadangan karbon dengan rotasi seluas 80.344,17 Ha, yang terdistribusi pada HP, HPT dan APL.
- g) RO 8: Peningkatan cadangan karbon tanpa rotasi seluas 111.740,69 Ha, yang terdistribusi pada semua fungsi kawasan hutan dan APL.
- h) RO 11: Perlindungan areal konservasi tinggi seluas 381.748,21, yang terdistribusi pada Hutan Lindung (HL), HP, HPT dan APL .
- i) RO 12: Pengelolaan mangrove seluas 3.088,12 Ha, yang terdistribusi pada semua fungsi kawasan hutan (kecuali taman nasional (TN) dan taman hutan raya (Tahura)) dan APL.

Berdasarkan kategori Indeks Prioritas Lokasi (IPL) yang ditentukan oleh faktor pendorong terjadinya deforestasi, lahan tidak produktif dan kebakaran lahan dan hutan yang relatif tinggi, di Provinsi NTB menunjukkan kondisi IPL berada pada kategori agak tinggi dengan luasan terbesar pada kategori IPL Sedang (46.97%), selanjutnya diikuti Sangat Rendah (21.04%), dan Agak Tinggi (14.35%). Adapun Rencana Aksi Mitigasi dikelompokkan menjadi;

- a) Lingkup Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) yang meliputi di 15 BKPH dengan total areal arahan rencana operasional pelaksanaan aksi mitigasi seluas 603.333,11 Ha, dan
- b) Kawasan Konservasi dengan total areal arahan rencana operasional pelaksanaan aksi mitigasi adalah seluas 87.007,00 Ha yang terdiri dari: 1) TN Gunung Rinjani meliputi RO 1, seluas 15,57 Ha, 2) TN Tambora meliputi RO 1, RO 5, RO 8 seluas 78.677,03 Ha, dan 3) Tahura Nuraksa meliputi RO 1, RO 8 seluas 2.723,35 Ha.

Secara umum anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pencapaian *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di Provinsi NTB mencapai Rp. 8.563.927.000.000,-. Alokasi tersebut terdistribusi dalam berbagai program dan kegiatan yang diarahkan pada upaya peningkatan pencapaian target ENDC Indonesia dari sektor hutan dan lahan. Sumber pendanaan kegiatan aksi penurunan emisi GRK FOLU Net Sink 2030 Provinsi NTB dibiayai oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten/Kota, kemitraan pemerintah pusat dan daerah, kemitraan pemerintah dan swasta, hibah Luar Negeri/Dalam Negeri, serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundangan pendanaan yang berlaku. Dalam pelaksanaan Renops FOLU Net Sink 2030 Provinsi NTB diperlukan inovasi untuk melaksanakan arahan kebijakan yang telah ditetapkan dan dengan melakukan gerakan yang melibatkan semua stakeholder. Membangun Provinsi NTB berbasis sosio kultural dengan melibatkan semua lapisan masyarakat sehingga tujuan kegiatan *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 dapat tercapai tepat waktu dan bahkan bisa lebih cepat.

Meskipun komitmen dan peran masing masing aktor telah dipetakan, masih terdapat beberapa kendala dalam optimalisasi implementasinya di lapangan, beberapa kendala tersebut diantaranya terkait dengan keberlanjutan proses kolaborasi, kepastian anggaran dalam mengawal pelaksanaan kegiatan, serta cenderung bias sektor akibat adanya intervensi lain. Dengan demikian dibutuhkan formulasi kebijakan dalam rangka penguatan sistem kelembagaan yang kuat yang mampu mendorong stabilitas pelaksanaan kegiatan melalui peningkatan *co-ownership, co-responsibility, co-operation* dari masing masing pihak.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN SAMPUL	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Sasaran	3
1.2.1. Tujuan.....	3
1.2.2. Sasaran.....	4
1.3. Dasar Hukum.....	4
1.4. Struktur Organisasi.....	7
1.5. Tugas dan Tanggungjawab Kelompok Kerja.....	10
BAB II. DESKRIPSI WILAYAH PROVINSI NTB.....	14
2.1. Administratif Wilayah.....	14
2.2. Demografi.....	16
2.3. Iklim	17
2.4. Geologi.....	18
2.5. Jenis tanah	19
2.6. Kelerengan	19
2.7. Lahan Kritis.....	20
2.8. Penutupan Lahan	21
2.9. Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA)	22
2.10. Rehabilitasi Hutan dan Lahan	24
BAB III. RENJA AKSI MITIGASI 2023-2030 SUB-NASIONAL PROVINSI NTB	26
3.1. Kondisi FOLU Provinsi NTB (NTB).....	26
3.2. Analisis Spasial Penyusunan Peta Arahan Aksi Mitigasi <i>Indonesia's</i> FOLU	

<i>Net Sink</i> 2030 Provinsi NTB	27
3.3. Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi <i>Indonesia's FOLU Net Sink</i> 2030 Provinsi NTB Berdasarkan Fungsi Kawasan	38
3.4. Rencana Operasional Aksi Mitigasi <i>Indonesia's FOLU Net Sink</i> 2030 Provinsi NTB	39
3.5. Rencana Aksi Mitigasi di Lingkup BKPH dan Kawasan Konservasi Provinsi NTB	52
3.5.1. Lingkup BKPH	53
3.5.2. Lingkup Kawasan Konservasi	55
3.5.3. Lahan Mineral pada Areal Penggunaan Lain	58
3.5.4. Perhutanan Sosial	58
3.5.5. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	59
3.5.6. RTRW Provinsi NTB	61
3.6. Proyeksi Penyerapan Emisi CO ₂ Provinsi NTB Barat Tahun 2030	62
3.7. Strategi dalam Mendukung Implementasi <i>Indonesia's FOLU Net Sink</i> 2030	68
3.7.1. Provinsi NTB Menuju <i>Net Zero Emission</i>	68
3.7.2. Rencana Operasional <i>Indonesia's FOLU Net Sink</i> 2030 Provinsi Nusa Tenggara Barat	71
BAB IV. KELEMBAGAAN PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN	73
4.1. Analisis Stakeholder	73
4.2. Berbagi Peran, Sinergisitas dan Penguatan Hubungan Antar Pemangku Kepentingan	75
4.3. Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia	79
BAB V. PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	82
5.1. Rencana Kebutuhan Anggaran	82
5.2. Pembiayaan yang Teridentifikasi Untuk Pencapaian Rencana Operasional	90
5.3. Rencana Sumber Pendanaan yang Dapat Diakses	91
5.4. Skema Pendanaan Proyek yang Sedang Dikembangkan Sebagai Bentuk Kerjasama Pemerintah	93
BAB VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	96
5.1. Prinsip Monitoring dan Evaluasi	97
5.2. Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi	97
5.3. Tanggung Jawab dan Penilaian Capaian Kinerja	99
5.4. Pelaporan	99

BAB VII. PENUTUP	101
7.1. Kesimpulan.....	101
7.2. Rekomendasi	102
7.3. Disclaimer	102
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	110

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Luas Wilayah Provinsi NTB Berdasarkan Kabupaten / Kota.....	15
Tabel 2. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk NTB Tahun 2020-2022.....	16
Tabel 3. Persebaran Penduduk di Provinsi NTB	17
Tabel 4. Tren Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2022	17
Tabel 5. Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan	20
Tabel 6. Luas Penutupan Lahan di Provinsi NTB	22
Tabel 7. Realisasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Provinsi NTB	25
Tabel 8. Sumber dan Standar Data yang Dipergunakan untuk Penapisan Pemilihan Lokasi- lokasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim	27
Tabel 9. Pengelompokan Prioritas Lokasi untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengelolaan Hutan Berdasarkan Nilai IPL	29
Tabel 10. Indeks Prioritas Lokasi (IPL) Provinsi NTB	31
Tabel 11. Indeks Jasa Lingkungan (IJL) Provinsi NTB	33
Tabel 12. Daftar Tipologi Kelembagaan	35
Tabel 13. Indeks Kelembagaan (IK) Berdasarkan Unit Pengelolaan KPH Provinsi NTB	37
Tabel 14. Arahana Pelaksanaan Aksi Mitigasi <i>Indonesia's FOLU Net Sink</i> 2030 Provinsi NTB Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan	38
Tabel 15. Rencana Operasional (RO) Provinsi NTB	39
Tabel 16. Biofisik Pencegahan Deforestasi Mineral (RO 1)	40
Tabel 17. Pencegahan Degradasi Hutan Konsesi (RO 3)	41
Tabel 18. Biofisik Pembangunan Hutan Tanaman (RO 4)	43
Tabel 19. Biofisik Penerapan Pengayaan Hutan Alam (RO 5)	44
Tabel 20. Biofisik Penerapan RIL – C (RO 6)	45
Tabel 21. Biofisik Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi (RO 7)	46
Tabel 22. Biofisik Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi (RO 8)	47
Tabel 23. Biofisik Perlindungan Areal Konservasi Tinggi (RO 11)	48
Tabel 24. Biofisik Pengelolaan Mangrove (RO 12)	50
Tabel 25. Arahana Pelaksanaan Aksi Mitigasi <i>Indonesia's FOLU Net Sink</i> 2030 di Provinsi NTB Lingkup BPKH, Kawasan Konservasi dan APL	51

Tabel 26. Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi <i>Indonesia's FOLU Net Sink</i> 2030 di Provinsi NTB Berdasarkan Kawasan Konservasi dalam Taman Nasional dan Taman Hutan Raya	55
Tabel 27. Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi <i>Indonesia's FOLU Net Sink</i> 2030 di Provinsi NTB Berdasarkan Kawasan Konservasi di luar Taman Nasional dan Tahura	58
Tabel 28. Arahan Rencana Operasional pada Areal Penggunaan Lain di Provinsi NTB	58
Tabel 29. Persentase Capaian Perhutanan Sosial (PS) di Provinsi NTB.....	59
Tabel 30. Daftar Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang Memiliki Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu di Provinsi NTB.....	60
Tabel 31. Daftar PBPH yang Memiliki Izin Usaha Pengelolaan Jasa Lingkungan Wisata Alam di Provinsi NTB	60
Tabel 32. Daftar Rekomendasi PBPH di Provinsi NTB	60
Tabel 33. Pemetaan Peran Para Pihak dalam Mendukung Implementasi <i>Indonesia's FOLU Net Sink</i> 2030 di Provinsi NTB.....	74
Tabel 34. Peran Para Pihak dalam Implementasi <i>Indonesia's FOLU Net Sink</i> 2030 di Provinsi NTB	76
Tabel 35. Rincian Umum <i>Person in Charge</i> (PIC) dan Total Anggaran Rencana Operasional pada Setiap Unit Pengelolaan di Provinsi NTB.....	82
Tabel 36. Rincian Anggaran Setiap Rencana Operasional (RO) Provinsi NTB	89
Tabel 37. Rencana Pembiayaan Aksi Mitigasi Provinsi NTB	90
Tabel 38. Deskripsi Sub-sistem Kelembagaan Implementasi <i>Indonesia's FOLU Net Sink</i> Provinsi NTB	98

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Peta Wilayah Administratif Provinsi NTB.....	14
Gambar 2. Persentase Luas Wilayah Provinsi NTB Berdasarkan Kabupaten/Kota	15
Gambar 3. Peta Lahan Kritis Provinsi NTB 2023.....	21
Gambar 4. Kebakaran Hutan di Provinsi NTB 5 Tahun Terakhir	23
Gambar 5. Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi NTB.....	24
Gambar 6. Rata-Rata Emisi CO ₂ dari Karhutla Periode 2017-2021	24
Gambar 7. Data Lokasi dan Sebaran FOLU Provinsi NTB	26
Gambar 8. Skema Penapisan dalam Pemilihan Lokasi-Lokasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim	27
Gambar 9. Peta Indeks Prioritas Lokasi (IPL) Provinsi NTB	31
Gambar 10. Peta Indeks Jasa Lingkungan (IJL) Provinsi NTB	33
Gambar 11. Peta Indeks Kelembagaan (IK) Provinsi NTB	36
Gambar 12. Peta Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim <i>Indonesia's FOLU Net Sink</i> 2030 Provinsi NTB.....	39
Gambar 13. Lokasi Prioritas Program Kegiatan Pencegahan Deforestasi Mineral (RO 1) di Provinsi NTB	41
Gambar 14. Lokasi Prioritas Program Kegiatan Mitigasi Pencegahan Degradasi Hutan Konsesi (RO3) di Provinsi NTB	42
Gambar 15. Lokasi Prioritas Program Kegiatan Mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman (RO 4) di Provinsi NTB	43
Gambar 16. Lokasi Prioritas Program Kegiatan Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (RO 5) di Provinsi NTB	44
Gambar 17. Lokasi Prioritas Program Kegiatan Mitigasi Penerapan RIL - C (RO 6) di Provinsi NTB.....	45
Gambar 18. Lokasi Prioritas Program Kegiatan Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi (RO 7) di Provinsi NTB.....	46
Gambar 19. Lokasi Prioritas Program Kegiatan Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi (RO 8) di Provinsi NTB	47
Gambar 20. Lokasi Prioritas Program Kegiatan Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi (RO 11) di Provinsi NTB	49

Gambar 21. Lokasi Prioritas Program Kegiatan Mitigasi Pengelolaan Mangrove (RO 12) di Provinsi NTB	51
Gambar 22. Peta Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan untuk Rencana Operasional Pelaksanaan Aksi Mitigasi <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i> Provinsi NTB	53
Gambar 23. Peta Arahana Pelaksanaan Aksi Mitigasi <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i> di Provinsi NTB berdasarkan BKPH	54
Gambar 24. Peta Arahana Pelaksanaan Aksi Mitigasi <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i> di Provinsi NTB berdasarkan Kawasan Konservasi dalam Taman Nasional dan Taman Hutan Raya.....	56
Gambar 25. Peta Arahana Pelaksanaan Aksi Mitigasi <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i> di Provinsi NTB berdasarkan Kawasan Konservasi di luar Taman Nasional	57
Gambar 26. Emisi GRK dari Sektor Kehutanan Provinsi NTB (2010)	63
Gambar 27. Baseline Perkiraan Penurunan Emisi CO ₂ Sektor Kehutanan di NTB	64
Gambar 28. Proyeksi Penyerapan Emisi CO ₂ Sektor Kehutanan sampai dengan Tahun 2030.....	65
Gambar 29. Program <i>Renewable Energy</i> Provinsi NTB	69
Gambar 30. Capaian Program NTB Hijau sampai Tahun 2022	70
Gambar 31. Capaian Program NTB Zero Waste sampai Tahun 2022	71
Gambar 32. Ilustrasi Strategi Penguatan Peran Parapihak dalam Implementasi <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i>	73
Gambar 33. Lembaga Pelaksana Pelaksanaan Rencana Aksi Mitigasi Provinsi NTB.....	80
Gambar 34. Skema Pendanaan Menuju Pencapaian <i>FOLU Net Sink 2030</i>	91
Gambar 35. Sistem Pendanaan untuk Mendukung Implementasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim ...	92
Gambar 36. Potensi Pendanaan yang Dapat Diakses	93
Gambar 37. Skema Pendanaan	94

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1.	Keputusan Gubernur NTB tentang Pembentukan Pokja	111
Lampiran 2.	Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) <i>Indonesia's FOLU Net Sink</i> 2030 di BKPH Ampang Plampang	119
Lampiran 3.	Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) <i>Indonesia's FOLU Net Sink</i> 2030 di BKPH Ampang Riwo	129
Lampiran 4.	Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) <i>Indonesia's FOLU Net Sink</i> 2030 di BKPH Batulanteh	137
Lampiran 5.	Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) <i>Indonesia's FOLU Net Sink</i> 2030 di BKPH Brang Beh	150
Lampiran 6.	Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) <i>Indonesia's FOLU Net Sink</i> 2030 di BKPH Brang Rea Puncak Ngengas.....	156
Lampiran 7.	Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) I <i>Indonesia's FOLU Net Sink</i> 2030 di BKPH Madapangga Rompu Waworada.....	165
Lampiran 8.	Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) <i>Indonesia's FOLU Net Sink</i> 2030 di BKPH Maria Donggomasa.....	173
Lampiran 9.	Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) <i>Indonesia's FOLU Net Sink</i> 2030 di BKPH Orong Telu.....	182
Lampiran 10.	Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) <i>Indonesia's FOLU Net Sink</i> 2030 di BKPH Pelangan Tastura.....	188
Lampiran 11.	Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) <i>Indonesia's FOLU Net Sink</i> 2030 di BKPH Rinjani Barat.....	203
Lampiran 12.	Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) <i>Indonesia's FOLU Net Sink</i> 2030 di BKPH Rinjani Timur.....	211
Lampiran 13.	Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) <i>Indonesia's FOLU Net Sink</i> 2030 di BKPH Ropang	222
Lampiran 14.	Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) <i>Indonesia's FOLU Net Sink</i> 2030 di BKPH Sejong Mataiyang.....	228
Lampiran 15.	Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) <i>Indonesia's FOLU Net Sink</i> 2030 di BKPH Tambora	233
Lampiran 16.	Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) <i>Indonesia's FOLU Net Sink</i> 2030 di BKPH Toffo Pajo Soromandi.....	242

Lampiran 17. Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i> di Taman Nasional Gunung Rinjani	249
Lampiran 18. Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i> di Taman Nasional Tambora	252
Lampiran 19. Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i> di Tahura Nuraksa	256
Lampiran 20. Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i> di BKSDA	259
Lampiran 21. Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i> di Arahan Penggunaan Lain (APL)	264
Lampiran 22. Peta Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i> Provinsi Nusa Tenggara Barat	271

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan iklim merupakan isu yang paling hangat dan menjadi perhatian para pihak. Hal ini diungkapkan oleh Boateng dan Boateng (2015) bahwa perubahan iklim merupakan masalah kebijakan publik yang terbesar saat ini. Perubahan iklim juga sebagai ancaman bagi tatanan kehidupan dan sebagai salah satu aksi dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk pembangunan berkelanjutan rendah karbon dan berkeadilan. Perubahan iklim secara langsung akan berdampak negatif pada kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. Adanya musim kemarau yang berkepanjangan, pola curah hujan yang tidak menentu, hingga suhu ekstrim yang dapat mempengaruhi produksi pangan pada lahan pertanian, ekosistem hutan dan kesehatan serta menurunnya kuantitas air merupakan beberapa dampak negatif dari adanya perubahan iklim.

Peningkatan cadangan karbon yang secara tidak langsung merupakan strategi pengendalian perubahan iklim terkait dengan interelasi antara sektor kehutanan (*Forest*) dan penggunaan lahan lainnya (*Other Land Use-OLU*). *Forest and Other Land Use* (FOLU) memiliki urgensi yang tinggi baik pada tataran global maupun nasional dan sebagai langkah yang baik dalam upaya menjaga kondisi dan eksistensi baik pada bidang kehutanan maupun non kehutanan yang dapat berfungsi secara optimal. Pada bidang kehutanan akan berimplikasi langsung pada kemampuannya dalam meningkatkan cadangan karbon. Sedangkan pada sektor non-kehutanan yang memiliki potensi dalam menambah cadangan karbon seperti menggunakan pola intensifikasi pekarangan dan pertanian, pola tumpang sari kayu serta tanaman pangan. Disamping itu, upaya pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, pariwisata juga dapat menjadi sumber penghidupan yang baik, penyerapan tenaga yang akan menurunkan angka pengangguran serta menjadi pengaman bagi kemiskinan masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.

Indonesia memiliki komitmen dalam upaya pengendalian perubahan iklim global yang tercermin dalam partisipasi pada Perjanjian Paris yang kemudian dituangkan ke dalam *Enhanced Nationally Determined Contributions* (ENDC) yang berisi target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga tahun 2030. ENDC Indonesia menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 31,89 % dengan usaha sendiri dan 43,20 % dengan dukungan internasional. Terdapat 5 sektor dalam ENDC yang berperan dalam penurunan emisi GRK, yaitu sektor industri (0.10%), dan sektor limbah (0.38%), sektor energi (11%), sektor kehutanan (17,2%) dan sektor pertanian (0.32%). Untuk mencapai target ENDC yang diinginkan pemerintah telah menetapkan beberapa langkah strategi

yang dilakukan salah satunya yaitu *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*.

Indonesia's FOLU Net Sink 2030 merupakan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dilepas. Implementasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* mampu memenuhi ENDC yang menjadi komitmen nasional Indonesia di dalam agenda perubahan iklim global. Implementasi ini merupakan bagian untuk mencapai ENDC Indonesia bersama-sama dengan sektor lainnya. Pada dokumen tersebut disebutkan juga bahwa sektor *FOLU* diprediksi akan memberikan kontribusi sebesar 58% dari total target penurunan emisi GRK. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor kehutanan memiliki peranan strategis dalam menurunkan emisi dan merupakan bagian yang paling penting dalam agenda *climate actions global*. Berkenaan dengan hal tersebut maka implementasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* salah satunya dilaksanakan di Provinsi NTB.

Berdasarkan Analisis Data Aksara pada periode Tahun 2010 - 2022 di Provinsi NTB, menunjukkan terjadi gap yang cukup signifikan antara baseline kumulatif dan emisi aktual yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas kegiatan di lingkup pemerintah Provinsi NTB. Pada Data Aksara untuk sub-sektor kehutanan di tahun 2022 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah baseline estimasi emisi kumulatif tahun 2010 - 2022 mencapai rata-rata 55,478 ton CO₂ eq sementara kapasitas emisi aktual mencapai rata rata 18,216 Ton CO₂ eq (Aksara, 2023). Emisi yang dihasilkan oleh sektor kehutanan selama tahun 2010 - 2020 mengalami penurunan emisi kumulatif sekitar 982,367,27. Sektor kehutanan memiliki daya serap yang tinggi terhadap emisi sehingga berkontribusi dalam penurunan emisi di sektor lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, sektor kehutanan juga memiliki porsi terbesar di dalam target penurunan emisi GRK. *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* merupakan kondisi yang ingin dicapai pada tingkat serapan emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 terkait Aksi Penurunan GRK, bahwa pelaksanaannya tidak hanya dilakukan di tingkat pusat tetapi juga di tingkat pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 juga membahas terkait kontribusi dan peran pemerintah pusat serta pemerintah provinsi dalam menurunkan GRK. Kontribusi penurunan GRK di tingkat Provinsi NTB tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan GRK (RAD GRK) Provinsi NTB. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTB telah mengimplementasikan rencana aksi adaptasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 54 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API). Implementasi peraturan tersebut merupakan prioritas yang paling penting dalam percepatan

pembangunan Provinsi NTB. Selanjutnya implementasi tersebut secara periodik dilakukan Pemerintah Provinsi NTB melalui para pihak yang akan melakukan identifikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap capaian pelaksanaan RAD GRK di Provinsi NTB, sehingga dapat dilihat capaian tiap sektor penurunan emisi GRK dan juga dapat dilakukan penilaian terhadap capaian penurunan emisi apakah sesuai dengan target ataupun perlu dilakukan upaya-upaya optimalisasi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan melalui strategi atau rancangan yang diperlukan.

Tim Pelaksanaan RAD GRK Provinsi NTB melakukan evaluasi terhadap pencapaian target penurunan emisi GRK dalam RAD GRK serta untuk meningkatkan efektivitas implementasi aksi mitigasi adaptasi penurunan emisi GRK, diperlukan penyusunan Dokumen RAD GRK dan dapat dikaji ulang. Hal tersebut merupakan proses yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 pasal 9 yang menyebutkan bahwa RAD-GRK dapat dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan dinamika internasional maupun nasional. RAD-GRK ini tertuang dalam Renja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi NTB. Renja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi NTB merupakan sebuah dokumen perencanaan yang menjabarkan target dan kebijakan serta langkah kerja untuk penurunan emisi GRK sampai dengan tahun 2030.

Provinsi NTB memiliki kawasan hutan yang relatif luas dengan berbagai fungsi dan kegunaan. Kawasan hutan mencakup hutan lindung untuk pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati, serta hutan produksi yang dimanfaatkan untuk keperluan produksi kayu atau non-kayu. Upaya pelestarian dan pengelolaan hutan sangat penting untuk dilakukan guna mendukung keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam. Sehingga penyusunan dokumen Renja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi NTB diperlukan untuk ikut serta berpartisipasi dalam komitmen penurunan emisi GRK, mengingat kawasan hutan Provinsi NTB terus menghadapi tekanan yang menyebabkan terjadinya degradasi dan kerusakan lahan hutan.

1.2. Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan peta spasial untuk implementasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di Sub-nasional NTB.
2. Menetapkan Renja program penurunan emisi karbon untuk mempercepat ketercapaian *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Sub-nasional NTB.

3. Penguatan kebijakan untuk pengendalian emisi untuk mencapai *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Sub-nasional NTB.
4. Identifikasi peran para pihak, mitra-mitra dan kebijakan, program dan kegiatan terkait pengendalian emisi dalam mencapai *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Sub-nasional NTB.

1.2.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam implementasi Renja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* yaitu tercapainya tingkat emisi GRK sebesar -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030, mendukung *net zero emission* pada sektor kehutanan serta memenuhi NDC yang menjadi kewajiban nasional Indonesia sebagai kontribusi bagi agenda perubahan iklim global, dengan memperhatikan visi Indonesia yang lebih dalam dokumen LTS-LCCR.

1.3. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renja *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Sub-nasional NTB adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

- Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini;
 8. Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Peraturan Pemerintah; Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 5957);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6518) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 17. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 18. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
 19. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249)
 20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 338);
 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
 22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 6 Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
 23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan

- Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
 25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1387);
 26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.
 27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 457);
 28. Peraturan Gubernur NTB Nomor 54 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API)
 29. Peraturan Gubernur NTB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Percepatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 2019-2023)
 30. Komitmen Pemprov NTB di Climate Change Conference of Parties (COP) 26 Glasgow oleh Wakil Gubernur NTB - Menuju NTB Zero Emision 2050
 31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJM Provinsi NTB 2019 – 2023
 32. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah
 33. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan

1.4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Tim Penyusunan Renja Sub Nasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* Provinsi NTB ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor: 522 – 632 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renja *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* Wilayah (Sub- Nasional) Provinsi NTB Tahun 2023, dengan pertimbangan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan Surat Keputusan Nomor: SK.168/MENLHK/ PKTL/PLA.1/2/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* untuk pengendalian perubahan iklim; dan bahwa untuk kelancaran implementasi rencana operasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Renja Sub Nasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* Provinsi NTB. Struktur Organisasi Tim

Penyusunan Renja Sub Nasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* Provinsi NTB adalah sebagai berikut :

- A. Penanggung Jawab (PJ) : Sekretaris Daerah Provinsi NTB
- B. Tim Pengarah : 1. Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Provinsi NTB
2. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion(P3E) Bali dan Nusa Tenggara
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB
- C. Pelaksana
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
- Wakil Ketua I : Kepala Konsevasi Sumber Daya Alam NTB
- Wakil Ketua II : Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dodokan Moyosari
- Sekretaris : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar
- Sekretaris I : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
- D. Tim Ahli : 1. Dr. Ir. Nandi Kosmaryandi, M.Sc., (Institut Pertanian Bogor)
2. Dr. Andi Chairil Ichsan, S.Hut., (Universitas Mataram)
3. Kornelia Webliana B, S.Hut., M.Sc., (Universitas Mataram)
- E. Bidang – Bidang Pelaksanaan Bidang Pengelolaan Hutan Lestari
- 1.
- Ketua Bidang : Kepala Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
- 1.1 Kelompok Kerja I : Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Hutan
- Ketua : Kepala Seksi Wilayah III Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

- 1.2 Kelompok Kerja II : Pengelolaan Perhutanan Sosial
Ketua : Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara
- 1.3 Kelompok Kerja III : Multi Usaha Kehutanan dan Teknik Pengelolaan Produksi
Ketua : Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII Surabaya
2. Bidang Peningkatan Cadangan Karbon
Ketua Bidang : Kepala Bidang PDASRPM Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
- 2.1 Kelompok Kerja I : Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Ketua : Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi BPDAS Dodokan Moyosari
- 2.2 Kelompok Kerja II : Pengelolaan Ekosistem Mangrove Lestari
Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
- 2.3 Kelompok Kerja III : Replikasi Ekosistem, Ruang Terbuka Hijau dan Ekoriparian
Ketua : Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
3. Bidang Konservasi
Kepala Bidang : Kepala Bidang PHKA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
- 3.1. Kelompok Kerja I : High Conservation
Ketua : Kepala Balai Taman Nasional Tambora
- 3.2 Kelompok Kerja II : Intensifikasi Jasa Lingkungan
Ketua : Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani
- 3.3 Kelompok Kerja III : Kemitraan Konservasi
Ketua : Kepala SKW I BKSDA NTB
- 3.4 Kelompok Kerja IV : Kawasan dan Peningkatan Populasi Species
Ketua : Kepala SKW III BKSDA NTB
4. Bidang Instrumen dan Informasi
Kepala Bidang : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen LHK Mataram
- 4.1. Kelompok Kerja I : Sosialisasi dan Komunikasi Publik
Ketua : Koordinator PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

- 4.2 Kelompok Kerja II : *Law Enforcement*
Ketua : Danpos Gakkum Mataram Seksi Wilayah III Balai Gakkum
Jawa Bali Nusra
- 4.3 Kelompok Kerja III : Evaluasi Kebijakan RRE dan Standarisasi
Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Penerapan Standar
Instrumen LHK Mataram

1.5. Tugas dan Tanggungjawab Kelompok Kerja

Tugas dan fungsi kelompok kerja penyusunan dokumen Renja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi NTB diuraikan sebagai berikut:

1. Tugas dan tanggungjawab **Tim Pengarah** adalah memberikan arahan pelaksanaan kegiatan penyusunan Renja dan kebijakan, penyelesaian masalah, dan pengembangan kebijakan serta inovasi baru dalam pelaksanaan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi NTB.
2. Tugas dan tanggungjawab dari **Ketua dan Wakil Penanggungjawab**, yakni bertanggungjawab atas pelaksanaan dan hasil kerja pelaksana, dan melaporkan kepada Tim Pengarah serta menyusun Renja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi NTB.
3. Tugas dan tanggungjawab dari **Ketua Pelaksana** adalah melaksanakan arahan dari Pengarah; melakukan koordinasi keseluruhan kegiatan dengan dibantu oleh Wakil Ketua atau atau Ketua Bidang dalam pelaksanaan kerja semua agenda *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Sub Nasional Provinsi NTB.
4. Tugas dan tanggungjawab dari **Wakil Ketua Pelaksana** adalah melaksanakan tugas: a. mengoordinasi penyusunan rencana program kerja dan rencana operasional pelaksanaan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Sub Nasional Provinsi NTB; b. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan Tugas Tim Kerja *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Sub Nasional Provinsi NTB; c. membuat laporan kepada Penanggung Jawab; d. Wakil Ketua I mengoordinir pelaksanaan tugas-tugas penyusun Renja Bidang III (Konservasi) dan Bidang IV (Instrumen dan Informasi); dan e. Wakil Ketua II mengoordinir pelaksanaan tugas-tugas penyusunan Renja bidang I (Pengelolaan Hutan Lestari), dan Bidang II (Peningkatan Cadangan Karbon).
5. Tugas dan Tanggung jawab Sekretaris I dan II, yaitu (1) membantu pengurusan administrasi dan surat menyurat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Renja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi NTB; (2) menyiapkan dan menyediakan data dan bahan serta peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Renja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan (3) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua dan Wakil Ketua Pelaksana.

6. Ketua Bidang I (Pengelolaan Hutan Lestari) mempunyai tugas: a. Mengoordinasikan penyusunan rencana pengelolaan hutan lestari meliputi penerapan *reduced impact logging (RIL)*, dan penerapan teknik Silvikultur Intensif (SILIN), pengelolaan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), pengelolaan perhutanan sosial, multi usaha kehutanan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua Tim untuk selanjutnya disampaikan kepada Penanggung Jawab.
7. Ketua Bidang II (Peningkatan Cadangan Karbon) mempunyai tugas : a. Mengoordinasikan penyusunan rencana operasional peningkatan cadangan karbon, karbon dengan kegiatan utama meliputi penanaman hutan tanaman lahan mineral, penanaman hutan tanaman lahan gambut, serta pengayaan dan rehabilitasi hutan dan lahan, penanaman mangrove, restorasi ekosistem gambut dan mangrove, ruang terbuka hijau dan ekoriparian; dan b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua tim untuk selanjutnya disampaikan kepada Penanggung Jawab.
8. Ketua Bidang III (Konservasi) mempunyai tugas : a. Mengkoordinir penyusunan rencana operasional peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dengan kegiatan utama meliputi perlindungan, pelestarian, pengawetan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, pengelolaan kawasan dan peningkatan populasi spesies, *high conservation value forest* dan kelola fragmentasi habitat, kemitraan konservasi, pemilik kawasan dan peran serta masyarakat, intensifikasi jasa lingkungan, taman hutan raya dan kebun raya; dan b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim untuk selanjutnya disampaikan kepada Penanggung Jawab.
9. Ketua Bidang IV (Instrumen dan Informasi) mempunyai tugas: a. Mengkoordinir penyusunan rencana operasional penyebaran informasi publik melalui berbagai media (cetak, elektronik, media sosial), membuat website *Indonesia's FOLU Net Sink* Provinsi NTB, dan b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim untuk selanjutnya disampaikan kepada Penanggung Jawab.
10. Ketua Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari mempunyai 3 (tiga) Kelompok Kerja yang terdiri dari:
 - a. Kelompok Kerja Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pengendalian mempunyai tugas: 1) Membantu penyusunan Renja pengendalian kebakaran hutan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan ; dan 2) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.
 - b. Kelompok Kerja Perhutanan Sosial mempunyai tugas: 1) Membantu penyusunan Renja operasional perhutanan sosial; dan 2) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.
 - c. Kelompok Kerja Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi mempunyai tugas: 1) Membantu Penyusunan Renja operasional penerapan teknik *reduced impact logging*, dan penerapan teknik SILIN, pengelolaan perizinan berusaha pemanfaatan hutan; dan 2) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang

11. Ketua Bidang II Peningkatan Cadangan Karbon mempunyai 3 (tiga) Kelompok Kerja yang terdiri dari:
- Kelompok Kerja RHL mempunyai tugas: 1) Membantu penyusunan Renja operasional rehabilitasi hutan dan lahan; 2) Mengembangkan inovasi kebijakan bidang RHL dalam pola kerja KPBU dan kerjasama masyarakat; dan 3) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.
 - Kelompok Kerja Mangrove mempunyai tugas: 1) Membantu penyusunan Renja operasional mangrove; 2) Mengembangkan inovasi kebijakan bidang mangrove; dan 3) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.
 - Kelompok Kerja Restorasi, Replikasi Ekosistem, Ruang Terbuka Hijau dan Ekoriparian mempunyai tugas: 1) Membantu Penyusunan Renja operasional penanaman hutan lahan mineral, replikasi ekosistem, ruang terbuka hijau dan ekoriparian; 2) Mengembangkan inovasi kebijakan pola KPBU dan kerjasama masyarakat untuk replikasi ekosistem, RTH dan ekoriparian; dan 3) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.
12. Ketua Bidang III Konservasi mempunyai 4 (empat) Kelompok Kerja yang terdiri dari:
- Kelompok Kerja *High Conservation Forest* mempunyai tugas: 1) Membantu penyusunan rencana operasional pengelolaan kawasan dan peningkatan populasi species, *High Conservation Value Forest* (HCV) dan melakukan penataan, tata kelola habitat yang terfragmentasi dan pemulihannya; dan 2) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang
 - Kelompok kerja Intensifikasi Jasa Lingkungan mempunyai tugas: 1) Membantu penyusunan rencana operasional intensifikasi jasa lingkungan; 2) Mendorong dan memfasilitasi RTH dengan dukungan KPBU dan kerjasama masyarakat; dan 3) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.
 - Kelompok Kerja Kemitraan Konservasi mempunyai tugas: 1) Membantu penyusunan rencana operasional kemitraan konservasi; 2) Mendorong dan memberikan dukungan untuk upaya dan langkah kemitraan konservasi oleh Pemerintah Daerah dan para pihak; 3) Menyiapkan dan fasilitasi langkah kemitraan masyarakat; 4) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.
 - Kelompok Kerja Kawasan dan Peningkatan Populasi Spesies mempunyai tugas: 1) Membantu penyusunan Renja operasional perlindungan, pelestarian, pengawetan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, pengelolaan kawasan dan peningkatan populasi species; dan 2) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.
13. Ketua Bidang IV (Instrumen dan Informasi) mempunyai 2 (dua) Kelompok Kerja yang terdiri dari:

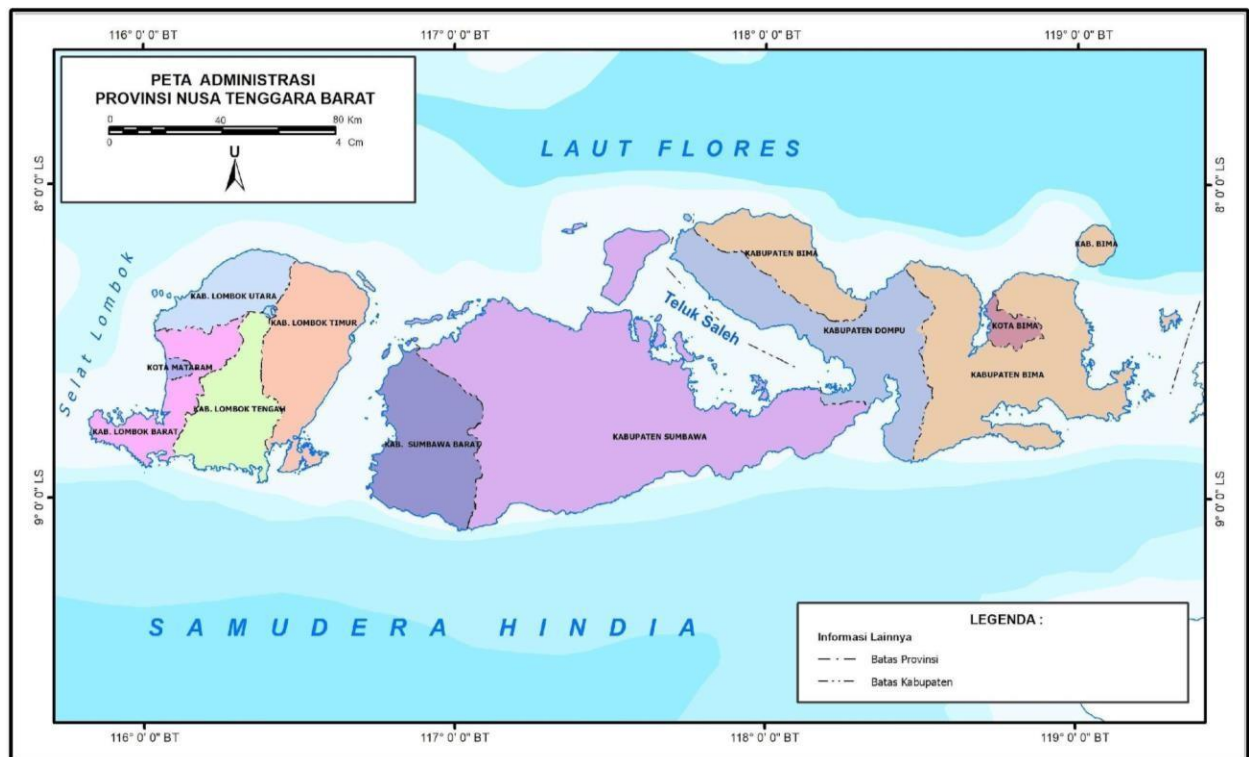
- a. Kelompok Kerja Humas dan Sosialisasi mempunyai tugas: 1) Membantu penyusunan rencana operasional Humas dan Sosialisasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*; 2) Melaksanakan kegiatan humas dan sosialisasi terkait *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*; dan 3) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.
- b. Kelompok kerja Sarana dan Prasarana mempunyai tugas: 1) Membantu penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*; 2) Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana dalam *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*; dan 3) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.

BAB II. DESKRIPSI WILAYAH PROVINSI NTB

2.1. Administratif Wilayah

Provinsi NTB terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang terletak di dua pulau besar yaitu di Pulau Lombok, meliputi Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara dan Kota Mataram, di Pulau Sumbawa meliputi Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima (Gambar 1). Berdasarkan data NTB dalam angka tahun 2023, luas Provinsi NTB adalah 1.967.589 Ha. Secara geografis, Provinsi NTB terletak antara 115°46' - 119°5' Bujur Timur dan 8°10' - 9°5' Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa dan Laut Flores
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Barat : Selat Lombok dan Provinsi Bali
- Sebelah Timur : Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur



Gambar 1. Peta Wilayah Administratif Provinsi NTB

Secara administratif Provinsi NTB terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota dengan 116 wilayah kecamatan dan 1.146 desa/kelurahan. Kabupaten Sumbawa memiliki jumlah wilayah kecamatan terbanyak, yaitu 24 kecamatan, sedangkan Kabupaten Lombok Timur memiliki wilayah administrasi

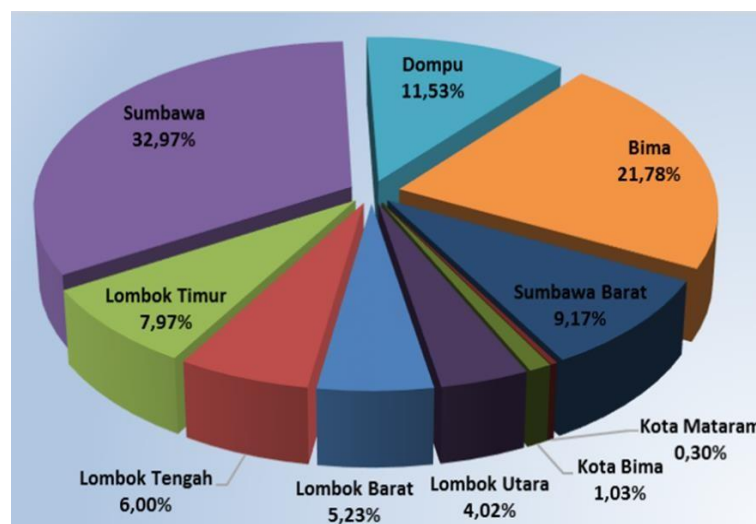
desa/kelurahan terbanyak dengan 254 desa/kelurahan dengan jumlah kecamatan sebanyak 20 kecamatan. Untuk lebih jelasnya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Wilayah Provinsi NTB Berdasarkan Kabupaten / Kota

No	Kabupaten / Kota	Ibu Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Luas Area (km ²)
1	Lombok Barat	Gerung	10	122	1.053,92
2	Lombok Tengah	Praya	12	139	1.208,40
3	Lombok Timur	Selong	20	254	1.605,55
4	Sumbawa	Sumbawa Besar	24	166	6.643,98
5	Dompu	Dompu	8	81	2.324,60
6	Bima	Raba	18	198	4.389,40
7	Sumbawa Barat	Taliwang	8	65	1.849,02
8	Lombok Utara	Tanjung	5	33	809,53
9	Kota Mataram	Mataram	6	50	61,30
10	Kota Bima	Raba	5	38	207,50
Jumlah / Total			116	1.146	20.153,15

Sumber: Diadaptasi dari BPS Provinsi NTB, 2022

Berdasarkan nilai luasan persentase dari setiap Kabupaten/Kota di NTB, disajikan pada grafik di dalam Gambar 2.



(Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022)

Gambar 2. Persentase Luas Wilayah Provinsi NTB Berdasarkan Kabupaten/Kota

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022, Provinsi NTB memiliki karakteristik sebagai berikut: a). Kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran rendah berupa pesisir dan pantai, kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan, kawasan taman nasional dengan kawasan kepulauan yang menjadi kawasan strategis pariwisata yang merupakan bagian dari potensi kewilayahan Provinsi NTB, b). Potensi sumber daya alam berupa kelautan dan perikanan,

pertambangan, serta pertanian, c). Suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan.

2.2. Demografi

Penduduk NTB tahun 2020-2022 cenderung meningkat disebabkan oleh kelahiran alamiah dan migrasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi NTB tahun 2022 sebanyak 5,47 juta jiwa, terdiri atas Pulau Lombok 3,87 juta jiwa (70,69%) dan Pulau Sumbawa 1,60 juta jiwa (29,31%). Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk NTB tahun 2020-2022 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk NTB Tahun 2020-2022

No	Kabupaten / Kota	Penduduk (Ribu)			Laju Pertumbuhan (%)		
		Pulau Lombok					
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Lombok Barat	721,4	731,8	744,3	1,80	1,91	1,80
2.	Lombok Tengah	1.034,9	1.049,7	1.067,7	1,80	1,92	1,80
3.	Lombok Timur	1.325,2	1.343,9	1.366,4	1,77	1,88	1,76
4.	Lombok Utara	247,4	251,5	256,4	2,08	2,19	2,07
5.	Mataram	429,7	432,0	434,3	0,63	0,74	0,62
Total		3.758,6	3.808,9	3.869,1	1,62	1,73	1,61
		Pulau Sumbawa					
6.	Sumbawa Barat	145,8	148,5	151,8	2,33	2,44	2,32
7.	Sumbawa	509,8	517,8	527,6	1,99	2,10	1,99
8.	Dompu	236,7	238,2	239,8	0,75	0,87	0,75
9.	Bima	514,1	520,4	528,0	1,53	1,65	1,53
10.	Kota Bima	155,1	156,2	157,4	1,82	1,93	0,82
Total		1.561,5	1.581,1	1.604,6	1,68	1,80	1,48
Jumlah		5.320,0	5.390,0	5,473,7	1,63	1,76	1,64

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2023

Persebaran penduduk di Provinsi NTB masih belum merata, di mana persentase penduduk yang tinggal di Pulau Lombok mencapai 70,69% sementara di Pulau Sumbawa sebesar 29,31%. Hal tersebut berbanding terbalik dengan luas wilayah pulau tersebut. Ketimpangan distribusi penduduk berdampak pada munculnya masalah, yaitu menurunnya kualitas lingkungan hidup seperti ketersediaan sumber air, kerusakan hutan dan lahan, alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan, pendangkalan sungai, dan lain-lain. Persebaran penduduk Provinsi NTB disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Persebaran Penduduk di Provinsi NTB

NTB	Total Penduduk 2022	Persentase(%)	Luas Total Area 2022	Persentase(%)
Pulau Lombok	3.869.100	70,69	4.570,66	23.23
Pulau Sumbawa	1.604.600	29,31	15.105,23	76.77
Total	5.473.700	100,00	19.675,89	100,00

Sumber: BPS NTB: Provinsi NTB Dalam Angka 2023

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan tahun 2022 sebanyak 2.731.814 jiwa sementara jumlah penduduk laki-laki sebesar 2.741.857 jiwa. Jika melihat tren jumlah penduduk perempuan mulai tahun 2017 sampai 2022, tahun 2017-2020 jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki, namun di tahun 2021-2022, terjadi sebaliknya yaitu jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Hal ini terlihat dari rasio jenis kelamin di mana tahun 2017 rasio jenis kelamin penduduk NTB sebesar 95,13 % dan tahun 2022 menjadi 100,37 % (Tabel 4). Rasio jenis kelamin 100 artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Berdasarkan rasio jenis kelamin penduduk NTB, menunjukkan bahwa ada tren peningkatan jumlah penduduk laki-laki. Data rasio jenis kelamin ini penting dalam pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender terutama yang berkaitan dengan pertimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Tren jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Tahun 2017 – 2022.

Tabel 4. Tren Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2022

Provinsi NTB	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
Jumlah	2,56 3,33 9	2,438,4 29	2,596,8 85	2,480,7 97	2,629,7 70	2,522,6 46	2,663,8 84	2,656,2 08	2,694,4 46	2,695,5 52	2,731,8 14	2,741,8 57
Rasio Jenis Kelamin	95.13		95.53		95.93		99.71		100.04		100.37	

Sumber: BPS NTB: Indikator Strategis Statistik Sosial Provinsi NTB 2017-2021; Provinsi NTB Dalam Angka 2023

2.3. Iklim

Iklim adalah salah satu sumber daya penggerak ekonomi yang paling penting karena iklim sangat menentukan efektivitas dan efisiensi dari berbagai kegiatan pembangunan dari berbagai sektor, baik yang sedang atau direncanakan pelaksanaannya. Masing-masing daerah memiliki iklim bervariasi serta dapat mengalami perubahan baik secara perlahan-lahan maupun secara dinamis, sesuai dengan dinamika atmosfer suatu daerah atau kawasan.

Pesatnya pembangunan di berbagai sektor telah berdampak terhadap peningkatan emisi GRK yang mana telah memicu peningkatan suhu udara. Suhu udara cenderung berubah dan semakin panas, efek pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim global dan meningkatnya anomali cuaca dan iklim di berbagai wilayah Indonesia termasuk Provinsi NTB. Gejala penyimpangan fenomena alam yang sering terjadi, menyebabkan terjadinya perubahan pola cuaca menjadi ekstrim dan sulit untuk diprediksi.

Menurut Suriadi *et al* (2014) terjadinya perubahan iklim telah berdampak terhadap berubahnya pola tanam, pola hujan dan produktivitas tanaman pertanian, debit dan sirkulasi air baik air tanah maupun air permukaan. Akibat dari hal tersebut menimbulkan efek terhadap kehidupan tanaman dan tumbuh-tumbuhan serta hewan. Kegagalan panen karena kekeringan atau banjir, timbulnya penyakit tanaman atau eksplosif akibat adanya perubahan iklim akan mempengaruhi ketahanan pangan dan jika tidak di tangani dengan baik maka dikhawatirkan akan berdampak terhadap terjadinya bencana bagi penduduk di wilayah NTB. Informasi terkait cuaca dan iklim sangat penting sebagai bahan perencanaan guna dapat mengantisipasi serta meminimalisir dampak adanya perubahan dan bencana yang terjadi akibat perubahan tersebut. Berikut disajikan perkembangan beberapa indikator iklim yaitu curah hujan, pola musim, fenomena El Nino dan La Nina serta suhu udara.

Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada tahun 2012 di NTB, temperatur maksimum berkisar antara 29.9°C-34.2°C dan temperatur minimum antara 17.4°C-22.6°C. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober dan temperatur terendah terjadi pada bulan Juni. Rata-rata kelembaban udara relatif tinggi, yaitu antara 77-85%, kelembaban terendah terjadi pada bulan Agustus sedangkan tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan kecepatan angin rata-rata mencapai kisaran 4 -7 knots dan kecepatan angin maksimum mencapai 26 knots yang terjadi pada bulan Maret dan kecepatan angin terendah 15 knots terjadi pada bulan November dan Desember. Tekanan udara berkisar 1.001,6 – 1.008,1 mb, tekanan udara terbesar terjadi pada bulan September dan terendah terjadi pada bulan Januari. Lamanya penyinaran matahari berkisar 37-88 %, lamanya penyinaran matahari terbesar terjadi pada bulan Agustus dan terendah terjadi pada bulan Januari. Jumlah hari hujan terendah yaitu 0 hari pada bulan Agustus dan September dan yang terbanyak adalah pada bulan Desember dengan jumlah 27 hari.

2.4. Geologi

Kondisi geologi wilayah NTB didominasi oleh batuan gunung api serta aluvium (resent). Batuan tertua berumur tersier sedangkan yang termuda berumur kuartar, batuan tersier di Pulau Lombok terdiri dari perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung, breksi, lava, tufa dengan lensa-lensa

batu gamping, batu gamping, dan dasit. Batuan tersier di Pulau Sumbawa terdiri dari lava, breksi, tufa, andesit, batu pasir tufan, batu lempung, dasit, tonalit, tufadasitan, batu gamping berlapis, batu gamping tufan, dan lempung tufan. Batuan kuarter di Pulau Lombok terdiri dari perselingan breksi gampingan dan lava, breksi, lava, tufa, batu apung, dan breksi lahar. Batuan kuarter di Pulau Sumbawa terdiri dari terumbu koral terangkat, epiklastik (konglomerat), hasil gunung api tanah merah, gunung api tua, gunung api Sangiang, gunung api Tambora, gunung api muda dan batu gamping koral, aluvium dan endapan pantai cukup luas terdapat di Pulau Sumbawa dan Lombok (RPJMD Provinsi NTB, 2019).

2.5. Jenis tanah

Jenis tanah yang terdapat pada lokasi kajian ini memiliki jenis yang kompleks yaitu aluvial, regosol, litosol dan mediteran. Jenis tanah aluvial merupakan jenis tanah muda hasil endapan, dimana tanah ini memiliki sifat kimia dan fisika yang relatif baik. Dalam pemanfaatan jenis tanah ini merupakan lahan potensial untuk pengembangan tanaman pangan. Sedangkan untuk jenis tanah regosol, yang terbentuk dari batuan induk muda hasil letusan gunung berapi, dicirikan oleh adanya batuan yang menyebar baik di permukaan tanah atau lapisan tanah bagian atas. Tanah regosol memiliki drainase tanah yang sangat cepat sehingga tidak potensial untuk pengembangan pertanian. Tanah ini merupakan hasil letusan gunung api Tambora yang ada di Pulau Sumbawa. Kemudian untuk jenis tanah litosol, dicirikan dengan kedalaman efektif tanah yang sangat dangkal dan langsung berada di atas batuan dan umumnya berada pada daerah pegunungan/perbukitan dengan kemiringan terjal. Selanjutnya untuk jenis tanah mediteran yang terbentuk pada wilayah berombak sampai bergelombang, mempunyai kedalaman efektif relatif dalam, memiliki drainase yang baik dan terbentuk pada itilin mediteran yang bertekstur halus. Untuk pengembangan pertanian jenis tanah ini potensial dikembangkan untuk tanaman perkebunan/tanaman keras.

2.6. Kelerengan

Topografi wilayah Provinsi NTB bervariasi dari 0 -3.726 m di atas permukaan laut (dpl) untuk Pulau Lombok, dan 0-2.755 m dpl untuk Pulau Sumbawa, dengan klasifikasi ketinggian wilayah 0 - 100 m dpl sekitar 23,76% atau luas 478.911 ha, ketinggian 100-500 m dpl sekitar 37,39% atau seluas 753.612 Ha, ketinggian 500- 1000 m dpl sekitar 15,25% atau seluas 307.259 ha dan lebih dari 1000 m dpl seluas 475.533 ha atau 23,60%. Kemiringan tanah didominasi oleh kemiringan antara 15 - 40% seluas 704.619 ha (34,96%), sedangkan yang paling sempit termasuk klasifikasi kemiringan tanah 0 - 2% seluas 338.552 ha (16,80%). Dari 7(tujuh) gunung yang ada di Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi dengan ketinggian 3.726 m dpl, sedangkan untuk Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumbawa dengan ketinggian 2.851 m dpl dari

sembilan gunung yang ada (NTB Dalam Angka 2013). Untuk Pulau Lombok klasifikasi kemiringan yang paling luas berkisar antara 2 - 15% seluas 198.616 ha (9,85%), sedangkan yang paling sempit klasifikasi kemiringan tanah lebihdari 40% seluas 20.175 ha (1,01%). Adapun Pulau Sumbawa memiliki klasifikasi kemiringan tanah yang paling luas berkisar antara 15 - 40% seluas 573.903 ha (28,48%) dan yang paling sempit kemiringan tanah 0 - 2% seluas 214.194 ha (10,63%).

2.7. Lahan Kritis

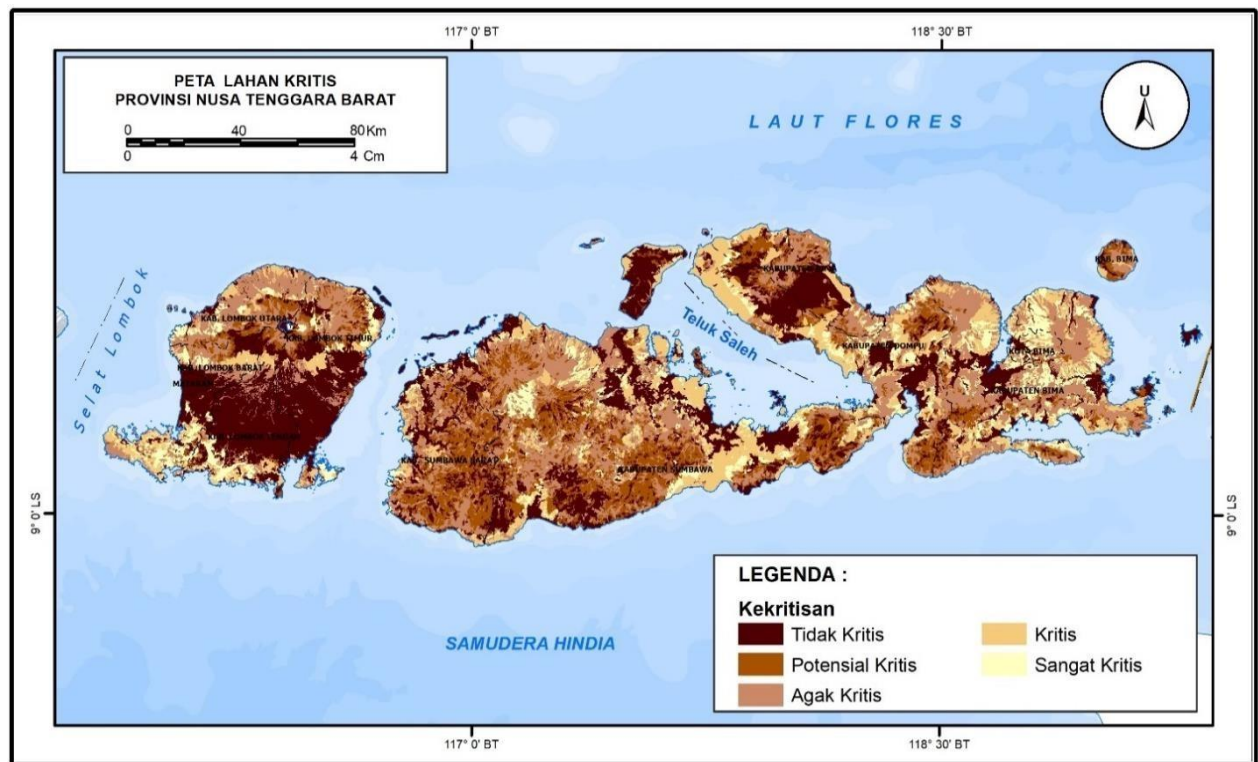
Lahan kritis merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan. Berdasarkan data Balai Pengelola DAS dan HL (BPDASHL) Dodokan Moyosari (2022), menunjukkan bahwa luas lahan kritis terbagi atas beberapa kategori agak kritis dengan luasan 587.391 ha, kategori kritis dengan luas lahan 324.899 ha, kategoripotensial kritis dengan luasan 336.954 ha, dan sangat kritis sebesar 165.415 ha. Adapun data luas lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan

Kabupaten	Luas (Ha)					
	Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	Total
Kota Mataram	6.030	-	-	-	-	6.030
Lombok Barat	27.518	5.320	24.348	19.952	15.001	92.139
Lombok Tengah	76.100	5.207	16.153	10.131	9.234	116.825
Lombok Timur	81.910	16.794	38.671	13.694	9.361	160.430
Lombok Utara	9.398	12.233	43.392	8.917	6.994	80.934
Sumbawa	166.895	148.366	190.081	113.582	44.939	663.864
Sumbawa Barat	42.397	62.821	53.336	12.505	4.309	175.368
Dompu	57.296	33.796	54.239	61.130	21.656	228.117
Kabupaten Bima	80.656	52.000	159.956	81.408	47.138	421.159
Kota Bima	2.753	417	7.215	3.578	6.781	20.745
Total	550.952	336.954	587.391	324.899	165.415	1.965.611

Sumber : BPDAS Dodokan Moyosari, 2022

Jika dilihat pada Tabel 5, Kabupaten Sumbawa masuk dalam kategori kritis paling tinggi yaitu 113.582 ha diikuti oleh Kota Bima sebesar 81.408 ha. Kabupaten yang memiliki lahan dengan kategori sangat kritis yaitu Kabupaten Bima dengan jumlah 47.138 ha. dan Kabupaten Sumbawa dengan luas 44.939 ha. Pada Gambar 3 berikut adalah Peta Lahan kritis di Provinsi NTB.



Gambar 3. Peta Lahan Kritis Provinsi NTB 2023

2.8. Penutupan Lahan

Lahan merupakan suatu wilayah daratan yang meliputi semua atribut tanah, geologi, atmosfer, biosfer, timbunan, hidrologi, populasi tumbuhan dan hewan, serta hasil kegiatan manusia di masa lalu dan masa kini yang bersifat mendaur, sehingga berpengaruh terhadap penggunaan lahan (FAO, 1977). Penetapan penggunaan lahan didasarkan pada daya dukung lingkungan karakteristik dan lahan. Bentuk penggunaan lahan dikaji melalui proses evaluasi sumber daya lahan, sehingga dapat diketahui potensi sumber daya lahan untuk berbagai penggunaan. Pengelolaan lahan yang ramah lingkungan dan penyusunan tata ruang yang tepat, dapat mengurangi adanya dampak negatif yang ditimbulkan seperti banjir, longsor dan kekeringan.

Sumber daya lahan memiliki peran dalam proses produksi kehutanan pertanian dan peternakan. Beberapa parameter sumber daya lahan seperti iklim dan air, tanah, topografi serta termasuk padang rumput dan hutan. Pada setiap kegiatan yang mengubah sumber daya alam termasuk bentang lahan untuk pembangunan seperti pertanian, pertambangan, industri, perumahan, infrastruktur yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan sumber daya lahan dan kemunduran pada produktivitasnya akibat hilangnya tanah lapisan atas yang subur (Balitbang Pertanian - Kementan, 2010). Menurut Data IKPLHD 2022, luas penggunaan lahan di wilayah kajian, bahwa hutan lahan kering primer/sekunder mendominasi di Kabupaten Sumbawa dengan luas penggunaan lahan 400.000 Ha dan luas penggunaan lahan paling kecil yaitu badan air di Kota Bima dengan luas di

bawah 50.000 Ha. Data luas penutupan lahan dibagi ke dalam 2 kategori yaitu lahan berupa hutan dan lahan dengan kelas non-hutan yang masing-masing memiliki luas seperti disajikan pada Tabel 6.

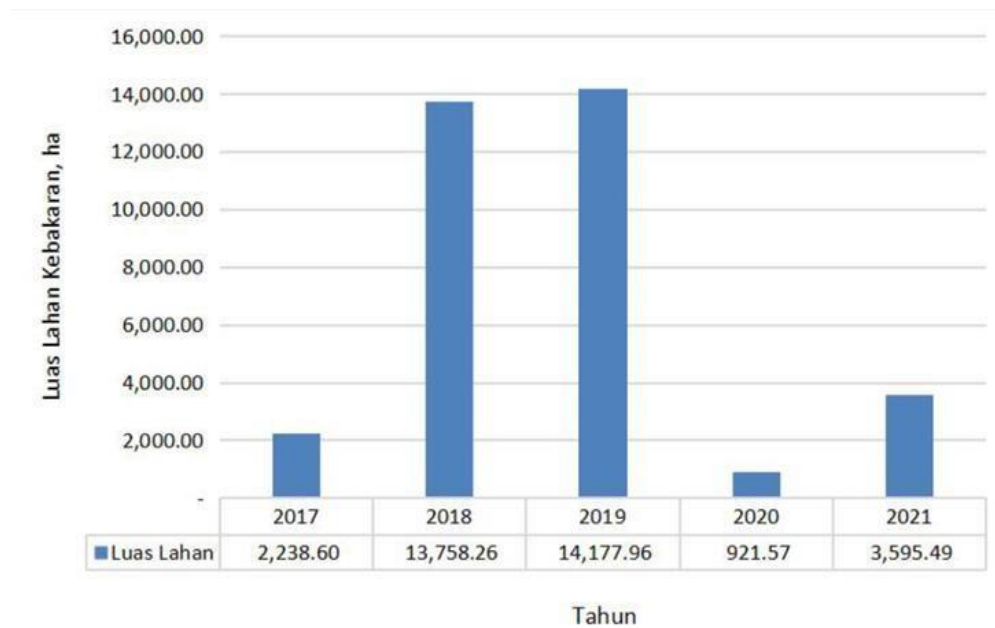
Tabel 6. Luas Penutupan Lahan di Provinsi NTB

Penutupan Lahan	Luas (Ha)	(%)
Kelas Hutan		
Hutan Lahan Kering Primer	304.383,96	15,47
Hutan Lahan Kering Sekunder	542.591,48	27,57
Hutan Mangrove Primer	1.723,57	0,09
Hutan Mangrove Sekunder	9.043,56	0,46
Hutan Tanaman	7.911,05	0,40
Total Kelas Hutan	865.653,62	43,99
Kelas Non Hutan		
Lahan Terbuka	9.180,32	0,47
Perkebunan	1.395,83	0,07
Permukiman	41.612,20	2,11
Pertambangan	1.986,41	0,10
Pertanian Lahan Kering	374.344,12	19,02
Pertanian Lahan Kering Campur	170.709,21	8,67
Savana/Padang Rumput	86.675,13	4,40
Sawah	267.121,43	13,57
Semak Belukar	125.476,91	6,38
Semak Belukar Rawa	879,96	0,04
Tambak	14.581,60	0,74
Tubuh Air	7.451,37	0,38
Bandara/Pelabuhan	832,51	0,04
Total Kelas Non Hutan	1.102.247,00	56,01
Luas Total	1.967.900,62	100,00

Sumber : BPKHTL (2023)

2.9. Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

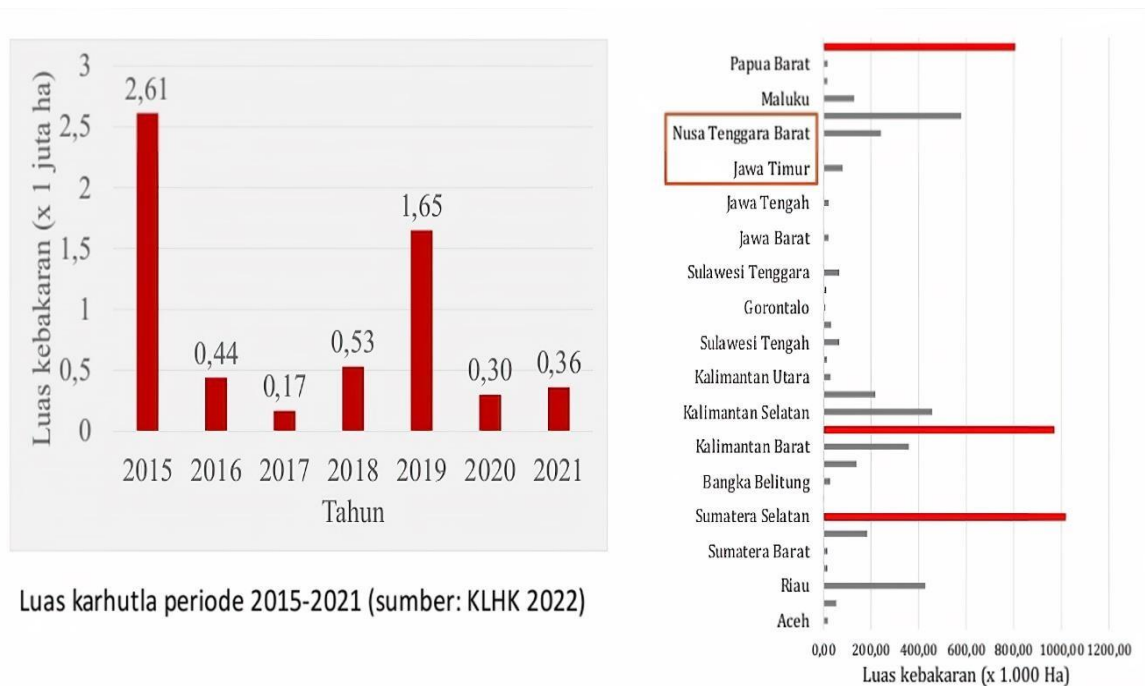
Proses perambahan hutan di NTB selalu disertai dengan pembakaran lahan, diduga sebagian besar kasus kebakaran kawasan hutan dan lahan yang terjadi di NTB disebabkan oleh oknum-oknum masyarakat yang ingin melakukan alih fungsi lahan hutan sebagai lahan penanaman tanaman semusim saat akan memasuki musim tanam. Data kebakaran hutan dan lahan lima tahun terakhir di wilayah kawasan hutan NTB terlihat pada grafik dalam Gambar 4.



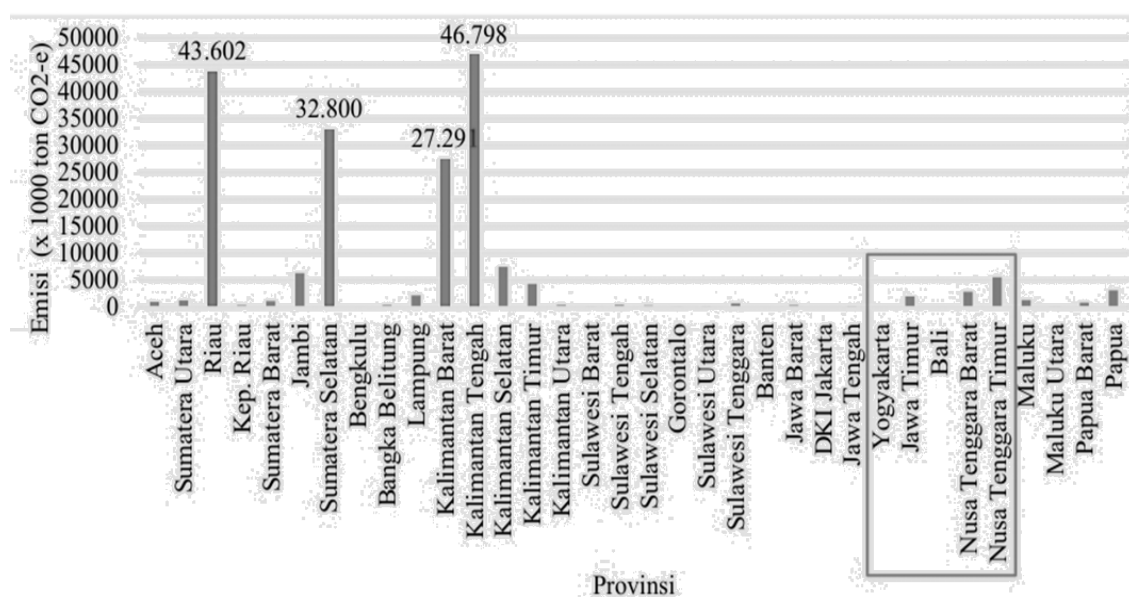
Gambar 4. Kebakaran Hutan di Provinsi NTB 5 Tahun Terakhir

Grafik di atas menunjukkan bahwa sepanjang lima tahun terakhir kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus terjadi di hampir seluruh Kabupaten di NTB, dimana tahun 2019 merupakan puncaknya. Pada tahun 2017 total luasan kebakaran mencapai 2.238,60 ha, tahun 2018 kasus meningkat menjadi 13.758,26 ha, tahun 2019 meningkat lagi menjadi 14.177,96 ha, tahun 2020 bertepatan dengan awal pandemi COVID 19 kasus kebakaran turun menjadi 921,57 ha, namun di tahun 2021 meningkat lagi menjadi 3.595,49 ha, dimana 656,99 ha merupakan kebakaran di wilayah hutan lindung (wilayah kerja BKPH se Provinsi NTB), dan sisanya merupakan kebakaran yang terjadi di wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani dan Tambora serta wilayah kerja BKSDA Provinsi NTB.

Menurut KLHK 2022 bahwa luas karhutla yang paling besar terjadi pada tahun 2015 dengan luas 2.61 juta ha dan pada tahun 2017 terjadi penurunan luas kebakaran hutan sekitar 0.17 juta ha. Berkenaan dengan hal tersebut, luas kebakaran hutan di Provinsi NTB sekitar 200 ha. Akibat dari adanya kebakaran hutan dan lahan, menyebabkan rata-rata emisi meningkat selama lima tahun terakhir. Rata-rata emisi di Provinsi NTB kurang lebih 5000 on CO₂-e. Data kebakaran hutan dan lahan serta rata-rata emisi di Provinsi NTB disajikan pada Gambar 5 dan 6.



Gambar 5. Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi NTB



Gambar 6. Rata-Rata Emisi CO₂ dari Karhutla Periode 2017-2021

2.10. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Upaya yang telah dilakukan dalam mengurangi luas lahan kritis diantaranya adalah dengan melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) kritis melalui kegiatan monitoring dan evaluasi persemaian, melakukan kegiatan pembinaan dan monitoring evaluasi RHL. Selain itu terdapat juga kegiatan pengelolaan DAS serta melakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Reboisasi atau rehabilitasi hutan bertujuan untuk menghidupkan kembali kawasan hutan yang kritis yang dilaksanakan bersama masyarakat secara partisipatif. Sedangkan penghijauan adalah penanaman pada lahan kosong diluar kawasan hutan. Dengan tujuan agar lahan tersebut dapat

dipulihkan, dipertahankan dan ditingkatkan kesuburannya, mencegah erosi, menjaga persediaan air dan mampu membantu pencegahan pemanasan global. Data realisasi RHL Provinsi NTB disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Realisasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Provinsi NTB

Tahun	Luas (hektar)	Lokasi
2019	3.100	Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa
2020	25	Lombok Timur
2021	1.500	Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa
2022	1.503	Bima, Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat

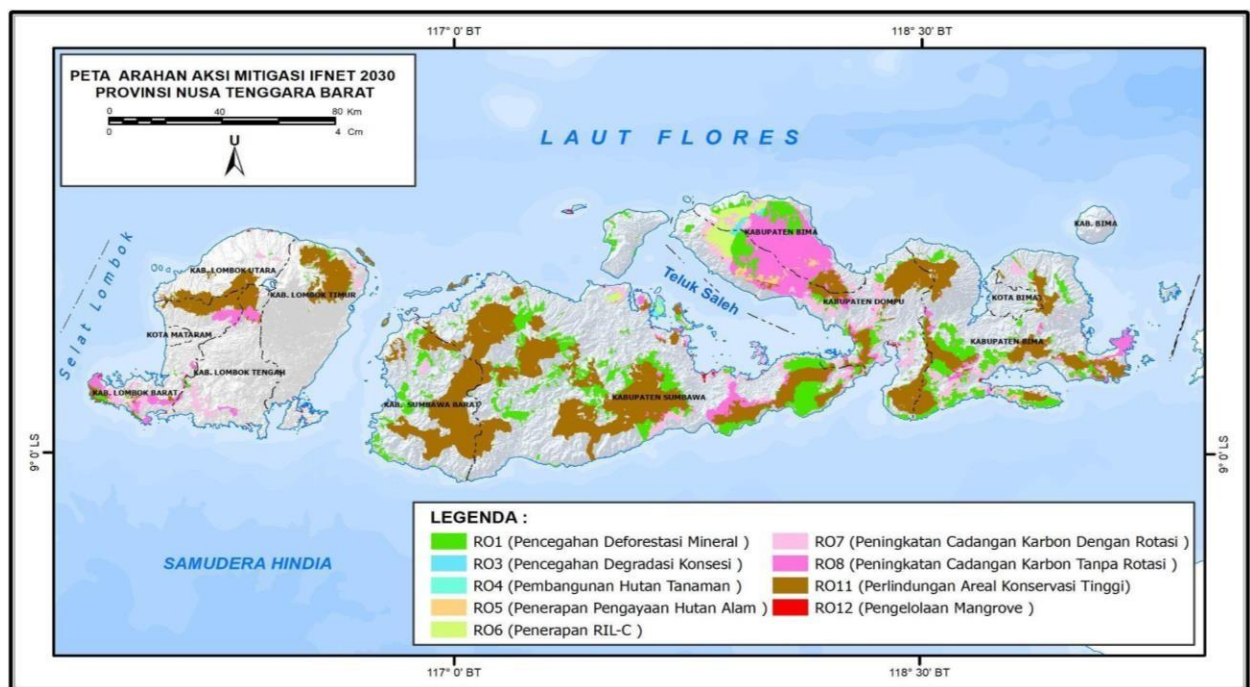
Sumber : BPDAS Dodokan Moyosari, 2023

Pada tahun 2019 hingga 2022, dilaksanakan kegiatan RHL melalui penanaman di dalam dan luar kawasan hutan seluas 6.128 ha melalui dana APBN dan APBD, serta pihak lainnya. Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa penghijauan dan reboisasi telah dilakukan di seluruh wilayah kabupaten di Provinsi NTB yang secara keseluruhan terealisasi sesuai target, di mana keberhasilan dari realisasi yang sudah dilaksanakan mencapai 75%.

BAB III. RENJA AKSI MITIGASI 2023-2030 SUB-NASIONAL PROVINSI NTB

3.1. Kondisi FOLU Provinsi NTB

Berdasarkan NTB dalam Angka Tahun 2023, luas Provinsi NTB adalah 19.675,89 km² atau seluas 1.967.589 Ha. Dengan luas lahan berhutan 865.653,62 Ha atau setara dengan 43,99% dari luas wilayah total Provinsi NTB. Data lokasi dan sebaran FOLU Net Sink Provinsi NTB dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



(Sumber: BPKHTL VIII Denpasar)

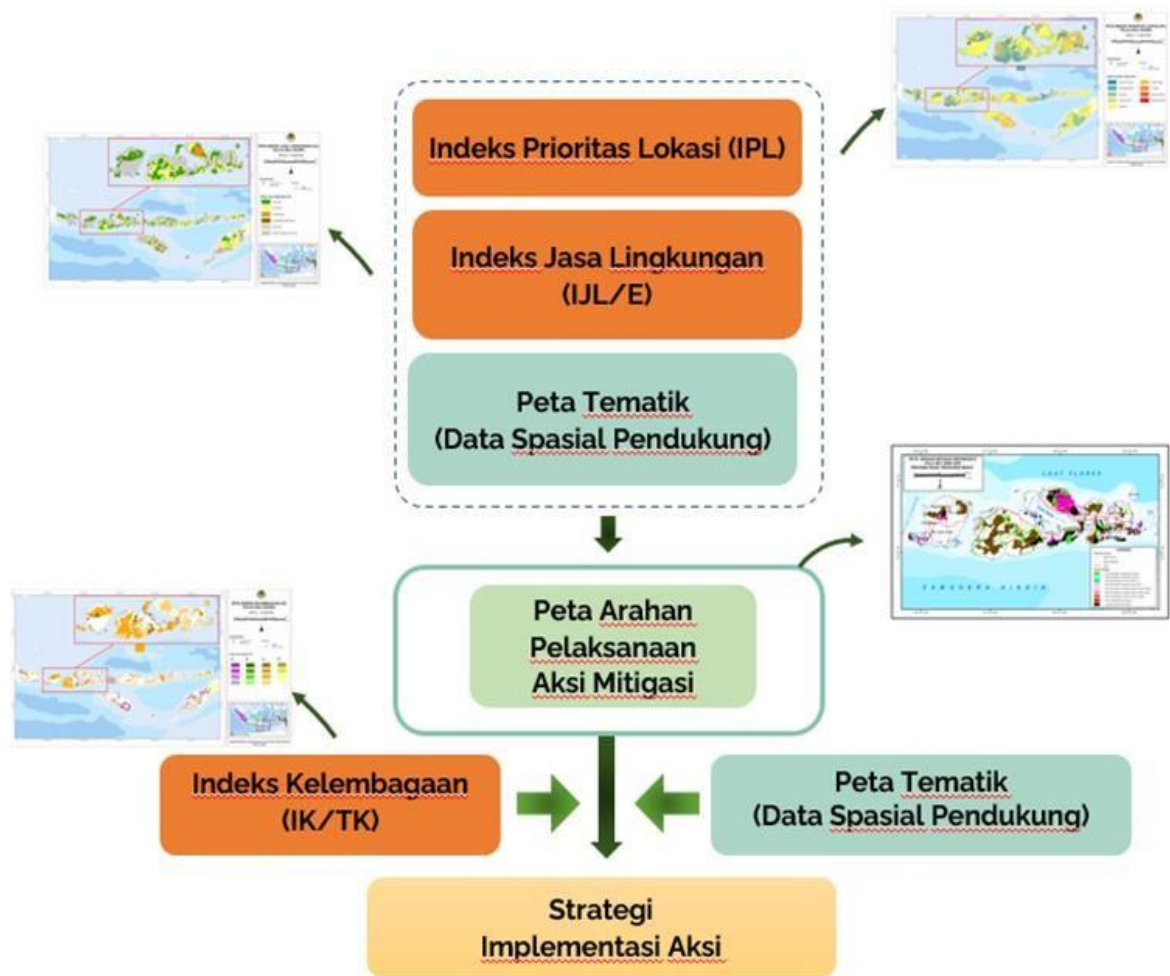
Gambar 7. Data Lokasi dan Sebaran FOLU Provinsi NTB

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6598/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi NTB sampai dengan tahun 2020 terdiri dari:

1. Hutan Konservasi seluas 183.816,77 ha
2. Hutan Lindung seluas 438.394,91 ha
3. Hutan Produksi seluas 150.070,80 ha
4. Hutan Produksi Terbatas seluas 292.884,47 ha

3.2. Analisis Spasial Penyusunan Peta Arahan Aksi Mitigasi *Indonesia's Folu Net Sink* 2030 Provinsi NTB

Aksi mitigasi perubahan iklim Provinsi NTB merupakan aksi atau kegiatan yang dilakukan pada tingkat tapak untuk mendukung upaya pengurangan emisi GRK nasional. Pelaksanaan aksi mitigasi tersebut diarahkan pada lokasi-lokasi tertentu yang paling tepat agar upaya penurunan GRK dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Skema penapisan dalam pemilihan lokasi-lokasi aksi mitigasi perubahan iklim dan sumber serta standar data yang dipergunakan disajikan pada Tabel 8.



Gambar 8. Skema Penapisan dalam Pemilihan Lokasi-Lokasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim

Tabel 8. Sumber dan Standar Data yang Dipergunakan untuk Penapisan Pemilihan Lokasi-lokasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim

No	Data	Sumber	Tahun	Skala
1	Indeks Prioritas Lokasi	Hasil analisis	2021	1:250.000
2	Indeks Jasa Lingkungan (IJL)	Hasil analisis	2021	1:250.000
3	Indeks Kelembagaan (IK)	Hasil analisis	2021	1:250.000
4	Penutupan Lahan	KLHK	1990 & 2020	1:250.000

No	Data	Sumber	Tahun	Skala
5	Fungsi Kawasan Hutan	KLHK	2021	1:250.000
6	KPHP	KLHK	2021	1:250.000
7	KPHL	KLHK	2021	1:250.000
8	PBPH (HA, HT, RE)	KLHK	2021	1:250.000
9	PIAPS	KLHK	2021	1:250.000
10	HGU		2021	1:250.000
11	Mangrove	KLHK		1:250.000

Rencana penurunan emisi GRK sektor kehutanan dan lahan pada penyusunan Rencana Operasional (RENOP) menuju *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* menggunakan hasil analisis spasial dalam Laporan Integrasi Perencanaan Program Berbasis Spasial pada Tingkat Tapak untuk Mencapai Target Pembangunan KLHK (Biro Perencanaan KLHK, 2021) yang disusun dengan menggunakan tiga informasi utama sebagai wujud pengintegrasian berbasis spasial, meliputi:

1. Peta Arahan Optimasi Kawasan Hutan Berdasarkan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi (IJLT)
2. Peta Indeks Biogeofisik (IBGF)
3. Peta Tipologi Kelembagaan

Informasi spasial tentang arahan optimasi pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan Indeks Jasa Lingkungan Hidup (IJLH) diperlukan untuk membantu perencanaan yang sudah menerapkan prinsip-prinsip daya dukung dan daya tampung.

Informasi spasial Indeks Biogeofisik memberikan gambaran tentang kondisi kawasan pada tingkat unit pengelola dalam hubungannya dengan emisi dan serapan GRK yang dapat digunakan sebagai landasan dalam penetapan lokasi prioritas pelaksanaan program sehingga berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK dari deforestasi dan degradasi serta karhutla, dan peningkatan serapan GRK sejalan dengan komitmen NDC.

Informasi spasial tipologi kelembagaan memberikan gambaran tentang kemampuan lembaga dan modal sosial (kondisi masyarakat) pada tingkat tapak yang sangat diperlukan dalam penyusunan strategi pelaksanaan program yang terintegrasi dan bersinergi dengan pelibatan peran serta masyarakat dan pihak lain di dalam kawasan agar hutan beserta ekosistemnya tetap terjamin keberadaannya dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan SDGs untuk membangun koordinasi dan sinergi yang baik, perlu diperhatikan keberadaan kelembagaan di tingkat tapak yang kuat.

Informasi Indeks Prioritas Lokasi (IPL) digunakan sebagai dasar untuk prioritas wilayah pelaksanaan aksi mitigasi. IPL disusun berdasarkan penjumlahan antara Indeks Emisi (*IBGFe*), Indeks Serapan (*IBGFs*), dan Indeks Kebakaran (*IBGFk*). IPL dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

$$IPL = IBGFe + IBGFs + IBGFk$$

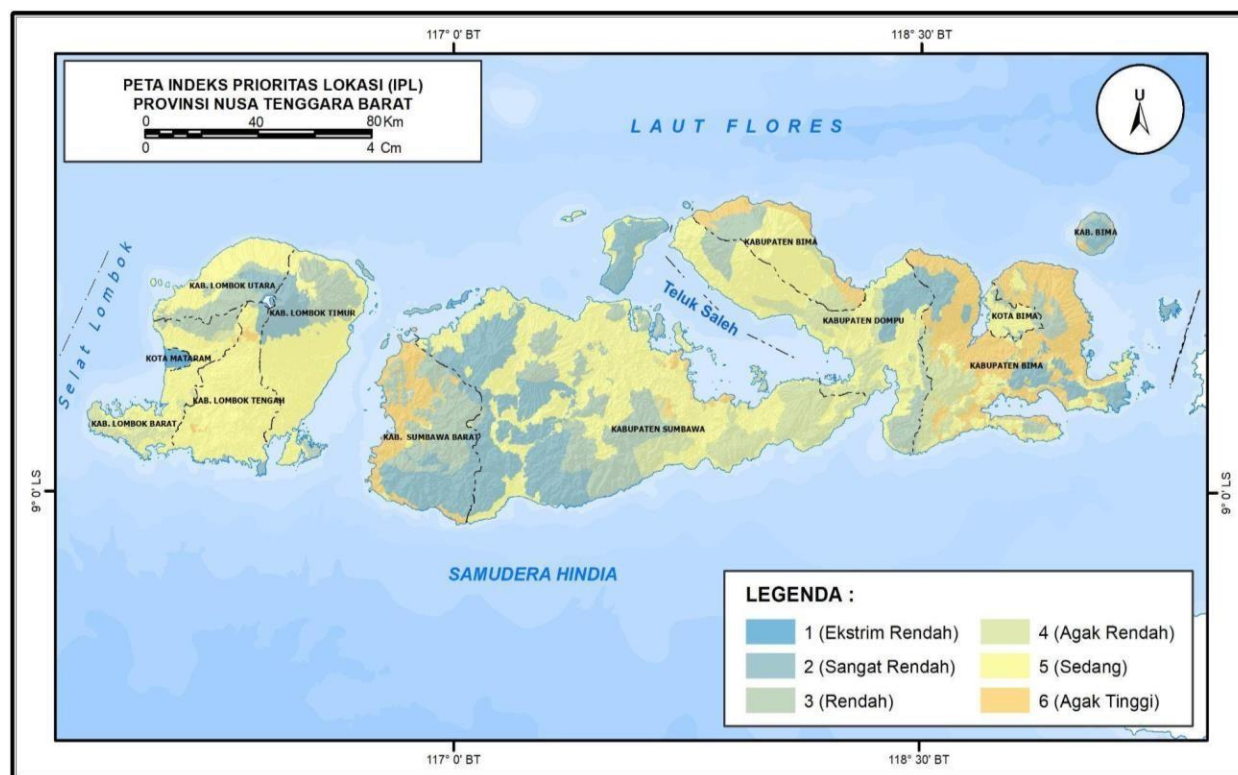
Nilai IPL berkisar dari 1 sampai 9. semakin tinggi nilai IPL maka wilayah tersebut memiliki prioritas yang sangat tinggi sebagai lokasi untuk pelaksanaan program, karena keberadaan faktor pendorong terjadinya deforestasi, lahan tidak produktif dan kebakaran lahan dan hutan yang relatif tinggi. Tabel 9 menyajikan pengelompokan prioritas lokasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan nilai IPL.

Tabel 9. Pengelompokan Prioritas Lokasi untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengelolaan Hutan Berdasarkan Nilai IPL

Prioritas	Indeks Emisi	Indeks Serapan	Indeks Kebakaran	IPL*	Deskripsi
Ekstrim Tinggi	3	3	3	9	Wilayah kelompok ini memiliki tutupan hutan alam sangat rendah namun ancaman deforestasi sangat tinggi, lahan tidak produktif luas dan cenderung meningkat dan masalah kebakaran sangat tinggi
Sangat Tinggi	3	3	2	8	Wilayah kelompok ini umumnya memiliki tutupan hutan alam yang sangat rendah dengan ancaman deforestasi sangat tinggi, lahan tidak produktif cukup luas dan masalah kebakaran cukup tinggi
	3	2	3	8	
	2	3	3	8	
Tinggi	3	3	1	7	Wilayah kelompok ini umumnya memiliki tutupan hutan alam yang cukup tinggi dengan ancaman deforestasi sedang, lahan tidak produktif sangat luas dan masalah kebakaran sangat tinggi
	3	2	2	7	
	3	1	3	7	
	2	3	2	7	Wilayah kelompok ini umumnya memiliki tutupan hutan alam rendah dengan ancaman deforestasi tinggi, lahan tidak produktif secara umum cukup luas, masalah kebakaran yang relatif rendah
	2	2	3	7	
	1	3	3	7	
Agak Tinggi	3	3	0	6	Wilayah kelompok ini umumnya memiliki tutupan hutan alam cukup tinggi dengan ancaman deforestasi sedang sampai tinggi, lahan tidak produktif cukup luas dan umumnya masih memiliki masalah kebakaran yang cukup tinggi
	3	2	1	6	
	3	1	2	6	
	2	3	1	6	Tidak memiliki hutan alam, lahan tidak produktif luas dan cenderung meningkat dan masalah kebakaran sangat tinggi
	2	2	2	6	
	2	1	3	6	
	1	3	2	6	
	1	2	3	6	
	0	3	3	6	

Sedang	3	2	0	5	Wilayah kelompok ini umumnya masih memiliki persentase tutupan hutan alam rendah sampai sedang dengan ancaman deforestasi umumnya cukup tinggi, lahan tidak produktif sedang dan masalah kebakaran relatif rendah
	3	1	1	5	
	2	3	0	5	
	2	2	1	5	
	2	1	2	5	
	1	3	1	5	Wilayah kelompok ini umumnya masih memiliki persentase tutupan hutan alam tinggi dengan ancaman deforestasi rendah, lahan tidak produktif sedang dan masalah kebakaran sedang sampai tinggi
	1	2	2	5	
	1	1	3	5	
	0	3	2	5	Tidak memiliki hutan alam, lahan tidak produktif dan masalah kebakaran cukup tinggi.
	0	2	3	5	
Agak Rendah	3	1	0	4	Wilayah kelompok ini umumnya masih memiliki tutupan hutan alam yang tinggi dengan ancaman deforestasi umumnya rendah sampai sedang, lahan tidak produktif relatif sedang dan masalah kebakaran umumnya sangat rendah
	2	2	0	4	
	2	1	1	4	
	1	3	0	4	
	1	2	1	4	
	1	1	2	4	
	0	3	1	4	Tidak memiliki hutan alam, lahan tidak produktif relatif sedang dan masalah kebakaran umumnya juga sudah sedang
	0	2	2	4	
	0	1	3	4	
Rendah	2	1	0	3	Wilayah ini memiliki tutupan hutan alam sangat tinggi, ancaman deforestasi umumnya sangat rendah, lahan tidak produktif sedikit & kebakaran sangat rendah
	1	2	0	3	
	1	1	1	3	
	0	3	0	3	Tidak memiliki hutan alam, lahan tidak produktif relatif sedang dan masalah kebakaran sudah rendah
	0	2	1	3	
	0	1	2	3	
Sangat Rendah	1	1	0	2	Wilayah ini memiliki tutupan hutan alam sangat tinggi, ancaman deforestasi sangat rendah dan tidak ada masalah kebakaran
Ekstrim Rendah	0	2	0	2	Tidak memiliki tutupan hutan alam, lahan tidak produktif rendah dan cenderung menurun. Masalah kebakaran hampir tidak ada
	0	1	1	2	
	0	1	0	1	

Hasil Analisis IPL Provinsi NTB disajikan dalam bentuk Peta Indeks Prioritas Lokasi (IPL) Provinsi NTB pada Gambar 9. Peta IPL Provinsi NTB. Hasil analisis IPL Provinsi NTB disajikan dalam bentuk luas dan arahan indeks prioritas lokasi di Kawasan Hutan Provinsi NTB pada Tabel 10.



Gambar 9. Peta Indeks Prioritas Lokasi (IPL) Provinsi NTB

Tabel 10. Indeks Prioritas Lokasi (IPL) Provinsi NTB

No	Kawasan Hutan	Arahan Indeks Prioritas Lokasi (Ha)							LUAS TOTAL (Ha)
		0	1	2	3	4	5	6	
		No Data	Ekstrem Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Agak Rendah	Sedang	Agak Tinggi	
1	CA	0,00	-	7.980,30	-	-	3.359,11	0,01	11.339,42
2	HL	1,53	-	136.715,94	19.047,48	9.196,32	16.578,19	2.619,08	28.399.708,74
3	HP	0,04	-	28.471,34	55.802,90	40.802,99	18.887,64	1.223,92	145.188,83
4	HPK		-	34,83	-	-	18,15	-	52,98
5	HPT	0,71	-	107.717,05	78.750,08	69.928,95	33.777,73	7.506,12	263.902,91
6	HSA (KSA)	0,00	-	5.776,47	1.668,96	-	-	-	7.445,43
7	TAHURA	0,00	-	-	0,05	2.728,35	3,81	-	2.732,21
8	TB	0,00	-	25.568,31	-	-	0,00	-	25.568,31
9	TN	1.080,77	-	37.572,77	256,61	0,00	78.713,97	-	117.624,12
10	TWA	366,16	-	2.599,43	1.600,06	2.270,68	1.208,59	8,32	8.053,24
11	TWAL	2,73	-	0,15	0,00	-	3,56	-	6,44
12	APL	2.948,98	5.737,26	723,66	3.263,69	698,08	669.684,93	229.635,12	912.691,72

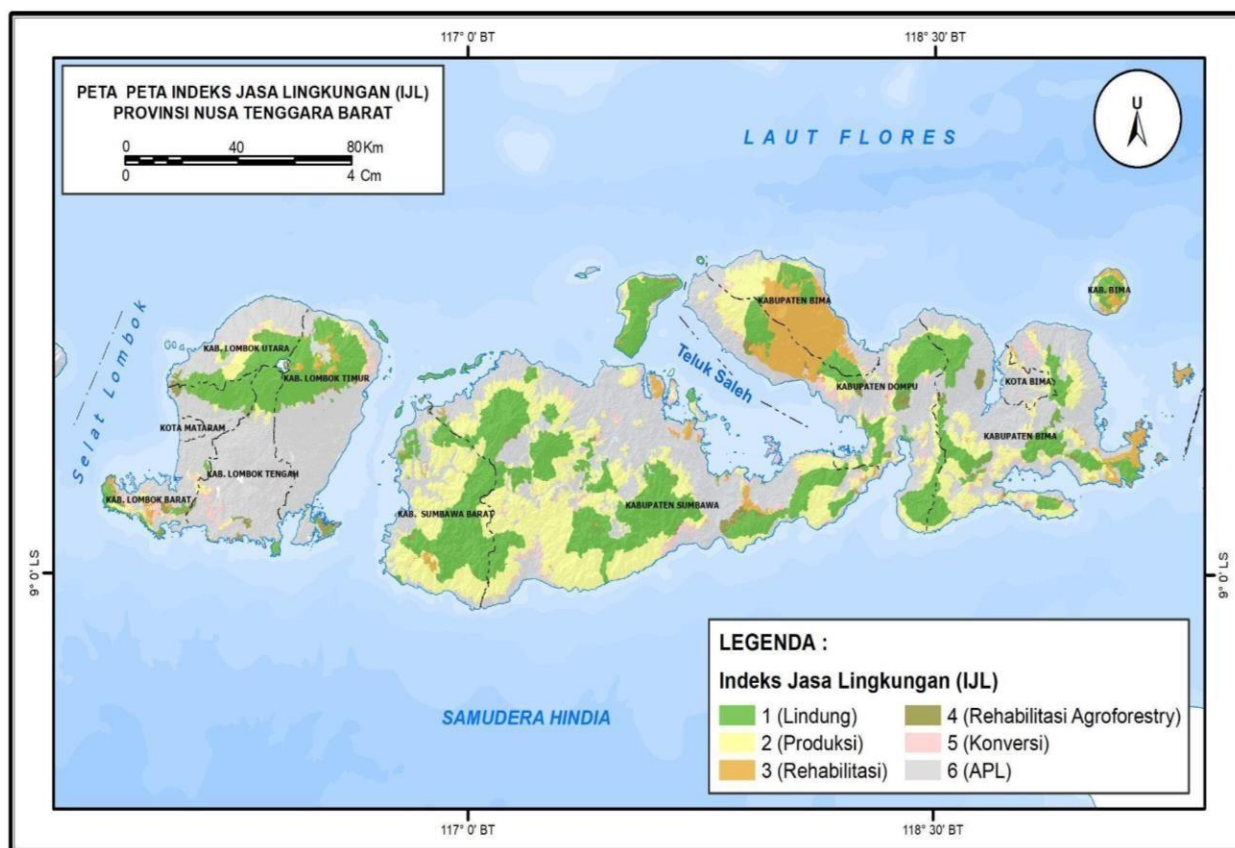
Informasi spasial tentang arahan optimasi pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan IJLH diperlukan untuk membantu perencanaan yang sudah menerapkan prinsip-prinsip daya dukung dan daya tampung. Peta arahan optimasi pemanfaatan kawasan hutan disusun dengan memperhatikan kualitas hutan yang didasarkan pada cadangan karbon tinggi dan tingkat tinggi tutupan tajuk hutan, kemudian Nilai Konservasi Tinggi atau *High Conservation Value* (HCV) yang ditetapkan berdasarkan keberadaan:

1. **Mega Fauna** (Satwa Dilindungi :*Hystrix brachyuran* (landak), *Casuarius casuarius* (glambir glanda), *Anthacoceros convexus* (Rangkong), *Rusa timorensis* (Rusa), *Cacatua sulphurea* (Kaka Tua Jambul Kuning), *Megapodiidae* (Burung Gosong).
2. **Kawasan Ekosistem Esensial** (KEE) (KEE Koridor Penyu, KEE Koridor Mangrove dan KEE Koridor Monyet Ekor Panjang).
3. Jasa Lingkungan Ekosistem Tinggi Terkait Air.

Arahan optimalisasi pemanfaatan kawasan adalah sebagai berikut:

- a. **Arahan Lindung** : Memiliki HCV atau tidak memiliki HCV tinggi tetapi kualitas hutan dan jasa lingkungan ekosistem tinggi dengan rating tinggi.
- b. **Arahan Produksi**: Tidak memiliki HCV, tetapi kualitas hutan baik dan jasa lingkungan ekosistem tinggi, rating tidak tinggi.
- c. **Arahan Rehabilitasi**: Memiliki HCV, kualitas hutan rendah dan jasa lingkungan ekosistem tinggi rating rendah ataupun rating tinggi, areal dalam kawasan yang walaupun kondisi hutan sudah rusak, tidak produktif dan/atau sudah diokupasi oleh masyarakat tetap harus dipertahankan sebagai kawasan hutan, arahan rehabilitasi yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan budidaya pertanian ataupun perkebunan dapat direhabilitasi dalam bentuk kegiatan rehabilitasi agroforestri.
- d. **Arahan Konversi**: Tidak memiliki HCV, kualitas hutan rendah dan jasa lingkungan ekosistem tinggi rating rendah maupun rating tinggi. arahan konversi umumnya sudah dalam bentuk area terbangun dan diokupasi oleh masyarakat.

Hasil Analisis IJL Provinsi NTB disajikan dalam bentuk Peta IJL Provinsi NTB (Gambar 10). Untuk bentuk luas dan arahan Indeks JasaLingkungan di Kawasan Hutan Provinsi NTB pada Tabel 11.



Gambar 10. Peta Indeks Jasa Lingkungan (IJL) Provinsi NTB

Tabel 11. Indeks Jasa Lingkungan (IJL) Provinsi NTB

No	Fungsi Kawasan	Arahan Indeks Jasa Lingkungan (Ha)							Luas Total (Ha)
		0	1	2	3	4	5	6	
		No Data	Ekstrim Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Agak Rendah	Sedang	Agak Tinggi	
1	CA	379.38	5,796.50	0.11	4,976.62	132.64	0.9	0.18	11,286.33
2	HL	2,025.16	3,948,56.01	6,540.68	8,090.70	24,938.15	746.98	1,011.06	43,352.73
3	HP	3,004.26	253.95	91,491.71	16,827.73	42.74	32,113.19	1,022.29	144,755.87
4	HPK	-	-	-	-	-	34.83	18.15	52.98
5	HPT	4,784.78	3,890.68	236,136.02	21,217.62	146.33	30,023.79	1,222.32	297,421.54
6	HSA (KSA)	130.79	5,388.51	0.08	191.69	1,732.58	-	-	7,443.65
7	TAHURA	-	2,606.85	1.85	-	119.76	-	3.75	2,732.21
8	TB	318.55	23,076.51	0.08	424.35	1,715.43	-	0	25,534.92
9	TN	1,097.51	55,548.26	38.11	58,566.38	2,353.07	8.76	12.04	117,624.13
10	TWA	1,276.19	3,258.82	4.28	1,708.15	1,364.21	3	349.72	7,964.37
11	TWAL	3.04	0.7	0	0.02	-	-	0.23	3.99
12	APL	25,957.47	5,184.57	91,735.95	211.77	772.22	1,145.18	784,724.81	909,731.97

Salah satu strategi pemilihan kelembagaan pengelolaan sumber daya hutan yang optimal dapat dilakukan berdasarkan pada dua kondisi objektif, yaitu : Kapasitas Pemerintah dan Kekuatan Modal Sosial. Mengacu pada hal tersebut, maka dalam kelembagaan pengelola Kesatuan Pengelola

Hutan (KPH) dilakukan berdasarkan pendekatan tipologi dengan menggunakan tiga indikator, yaitu :

1. Modal Sosial

Dalam unit pengelolaan dinyatakan dalam bentuk Indeks Modal Sosial yang ditetapkan dari dua indikator yaitu:

- Indikator berdasarkan aktivitas pertanian dan keberadaan penduduk di dalam kawasan yang diukur berdasarkan Persentase Luas Lahan Pertanian dan Pemukiman Terhadap Luas Total KPH.
- Indikator keberadaan masalah sosial yang diukur dari keberadaan 3 jenis program tahunan KPH, yaitu: Penyelesaian Konflik lahan, Program Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanganan Masalah kebakaran.

2. Kapasitas Kelembagaan

Dinyatakan dalam Indeks Kapasitas Lembaga (IKL) yang ditetapkan dari 2 (dua) indikator, yaitu:

- Kapasitas Pemerintah Daerah yang mengacu kepada Kepmen LHK No.SK.651/2016
- Kemampuan kelembagaan KPH yang diukur dari 4 (empat) faktor, yaitu:
 - a. Kondisi sumber daya manusia
 - b. Sarana/prasarana KPH
 - c. Keberadaan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)
 - d. Umur KPH yang ditentukan berdasarkan waktu pengesahan SK RPHJP

3. Potensi Kawasan KPH

Ditetapkan berdasarkan luasan KPH dan persentase area KPH yang sudah dibebani oleh izin. Berdasarkan faktor ini, kondisi sumber daya KPH dibagi menjadi 4 kelompok yaitu:

a. Kelompok A

KPH yang luas wilayah pengelolaan lebih besar 100.000 hektar dan area pengelolaan yang sudahdibebani izin kurang dari 50% luas area.

b. Kelompok B

KPH yang luas wilayah pengelolaan lebih besar 100.000 hektar dan area pengelolaan yang sudahdibebani izin lebih dari 50% luas area.

c. Kelompok C

KPH yang luas wilayah pengelolaan kurang dari 100.000 hektar dan area pengelolaan yang

sudahdibebani izin kurang dari 50% luas area.

d. Kelompok D

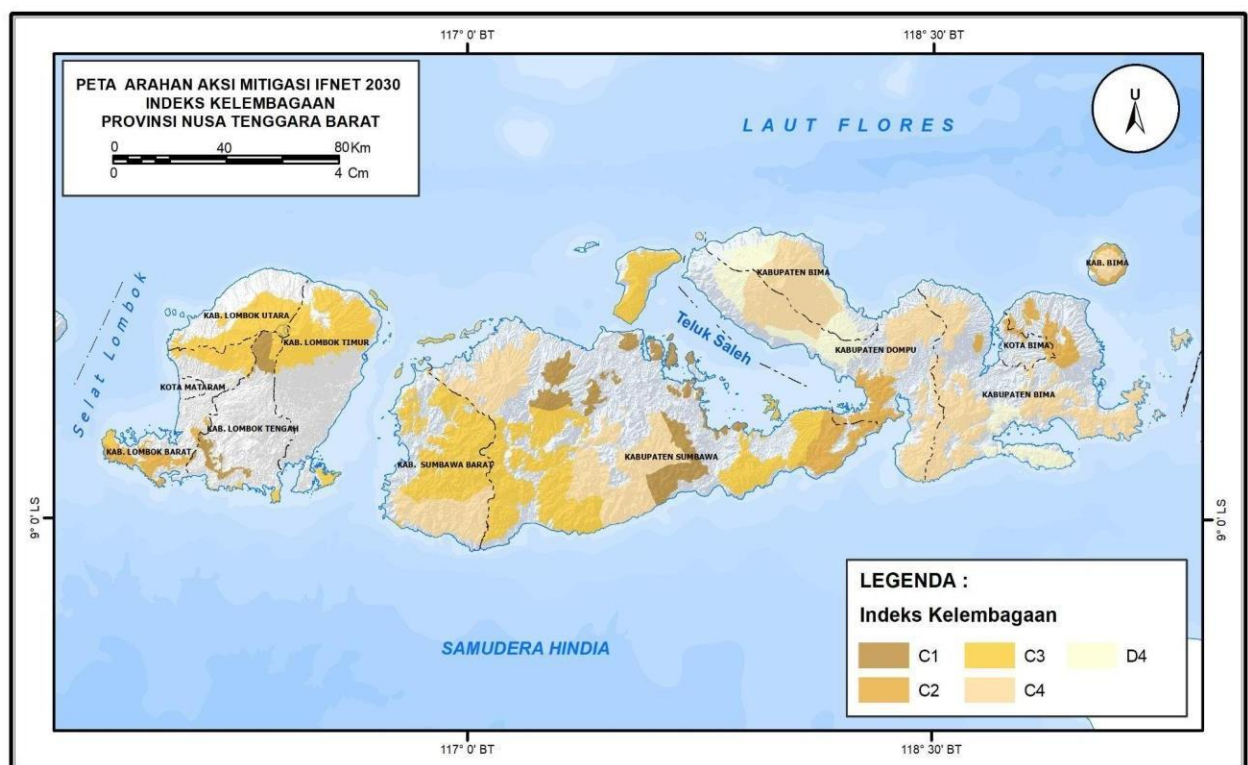
KPH yang luas wilayah pengelolaan kurang dari 100.000 hektar dan area pengelolaan yang sudahdibebani izin lebih dari 50% luas area.

Dari tahapan analisis modal sosial, kapasitas kelembagaan dan potensi kawasan KPH tersebut maka akan diperoleh 16 tipologi Kelembagaan (Tabel 12). Peta arahan Indeks Kelembagaan (IK) Berdasarkan Unit Pengelolaan KPH di Kawasan Hutan Provinsi NTB disajikan pada Gambar 11 dan Indeks Kelembagaan (IK) Berdasarkan Unit Pengelolaan KPH Provinsi NTB disajikan pada Tabel 13.

Tabel 12. Daftar Tipologi Kelembagaan

Tipologi	Deskripsi
A1	KPH yang luas wilayah pengelolaan lebih besar 100.000 hektar dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin kurang dari 50% luas areal, Modal Sosial Kuat, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Kuat
A2	KPH yang luas wilayah pengelolaan lebih besar 100.000 hektar dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin kurang dari 50% luas areal, Modal Sosial Kuat, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Lemah
A3	KPH yang luas wilayah pengelolaan lebih besar 100.000 hektar dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin kurang dari 50% luas areal, Modal Sosial Lemah, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Kuat
A4	KPH yang luas wilayah pengelolaan lebih besar 100.000 hektar dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin kurang dari 50% luas areal, Modal Sosial Lemah, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Lemah
B1	KPH yang luas wilayah pengelolaan lebih besar 100.000 hektar dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin lebih dari 50% luas areal, Modal Sosial Kuat, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Kuat
B2	KPH yang luas wilayah pengelolaan lebih besar 100.000 hektar dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin lebih dari 50% luas areal, Modal Sosial Kuat, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Lemah
B3	KPH yang luas wilayah pengelolaan lebih besar 100.000 hektar dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin lebih dari 50% luas areal, Modal Sosial Lemah, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Kuat
B4	KPH yang luas wilayah pengelolaan lebih besar 100.000 hektar dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin lebih dari 50% luas areal, Modal Sosial Lemah, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Lemah
C1	KPH yang luas wilayah pengelolaan kurang dari 100.000 hektar dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin kurang dari 50% luas areal, Modal Sosial Kuat, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Kuat

Tipologi	Deskripsi
C2	KPH yang luas wilayah pengelolaan kurang dari 100.000 hektar dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin kurang dari 50% luas areal, Modal Sosial Kuat, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Lemah
C3	KPH yang luas wilayah pengelolaan kurang dari 100.000 hektar dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin kurang dari 50% luas areal, Modal Sosial Lemah, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Kuat
C4	KPH yang luas wilayah pengelolaan kurang dari 100.000 hektar dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin kurang dari 50% luas areal, Modal Sosial Lemah, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Lemah
D1	KPH yang luas wilayah pengelolaan kurang dari 100.000 hektar dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin lebih dari 50% luas areal, Modal Sosial Kuat, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Kuat
D2	KPH yang luas wilayah pengelolaan kurang dari 100.000 hektar dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin lebih dari 50% luas areal, Modal Sosial Kuat, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Lemah
D3	KPH yang luas wilayah pengelolaan kurang dari 100.000 hektar dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin lebih dari 50% luas areal, Modal Sosial Lemah, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Kuat
D4	KPH yang luas wilayah pengelolaan kurang dari 100.000 hektar dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin lebih dari 50% luas areal, Modal Sosial Lemah, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Lemah



Gambar 11. Peta Indeks Kelembagaan (IK) Provinsi NTB

Tabel 13. Indeks Kelembagaan (IK) Berdasarkan Unit Pengelolaan KPH Provinsi NTB

No	Pengelola	Wilayah	Indeks Kelembagaan
1	BKPH Ampang Plampang	KPH Ampang	C3
		KPH Plampang	C1
2	BKPH Ampang Riwo	KPH Ampang Riwo	C2
3	BKPH Batulante	KPH Batulante	C1
4	BKPH Brang Beh	KPH Brang Beh	C3
5	BKPH Brang Rea Puncak Ngengas	KPH Brang Rea	C3
		KPH Pucak Ngengas	C4
6	BKPH Madapangga Rompu Waworada	KPH Madapangga Rompu	C4
		KPH Waworada	D4
7	BKPH Maria Donggomasa	KPH Maria	C2
		KPH Donggomasa	C4
8	BKPH Sejong Matalayang	KPH Sejong	C4
		KPH Matayang	C3
9	BKPH Orong Telu	KPH Orong Telu	C3
10	BKPH Pelangan Tastura	KPH Pelangan	C2
		KPH Tastura	C1
11	BKPH Rinjani Barat	KPH Rinjani Barat	C3
12	BKPH Rinjani Timur	KPH Rinjani Timur	C3
13	BKPH Ropang	KPH Ropang	C4
14	BKPH Tambora	KPH Tambora Selatan	D4
		KPH Tambora Utara	D4
15	BKPH Toffo Pajo Soromandi	KPH Toffo Pajo	C4
		KPH Soromandi	C4

Arahan aksi mitigasi dirumuskan berdasarkan data spasial utama yakni IPL, IJL, dan Indeks Kelembagaan (IK), kemudian disempurnakan menjadi strategi aksi mitigasi setelah dilakukan analisis yang menambahkan data tematik yang lebih mutakhir atau lebih detail dari unit kerja terkait. Semakin tinggi nilai IPL semakin tinggi tingkat urgensi atau prioritas lokasi tersebut untuk dijadikan sebagai lokasi sasaran pelaksanaan program. IPL dapat digunakan sebagai arahan untuk menentukan lokasi prioritas pelaksanaan program pengelolaan kawasan hutan. Provinsi NTB memiliki nilai IPL 0-6 yang masuk ke dalam kategori indeks prioritas lokasi agak tinggi. Meski demikian, penyusunan dokumen ini perlu dilakukan mengingat Provinsi NTB merupakan wilayah kepulauan yang rentan terhadap bencana, dimana bencana alam terus terjadi setiap tahunnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa Provinsi NTB merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana alam, dan cuaca ekstrem merupakan bencana yang paling sering terjadi di Provinsi NTB (Lombok Research Center, 2019).

3.3. Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi NTB Berdasarkan Fungsi Kawasan

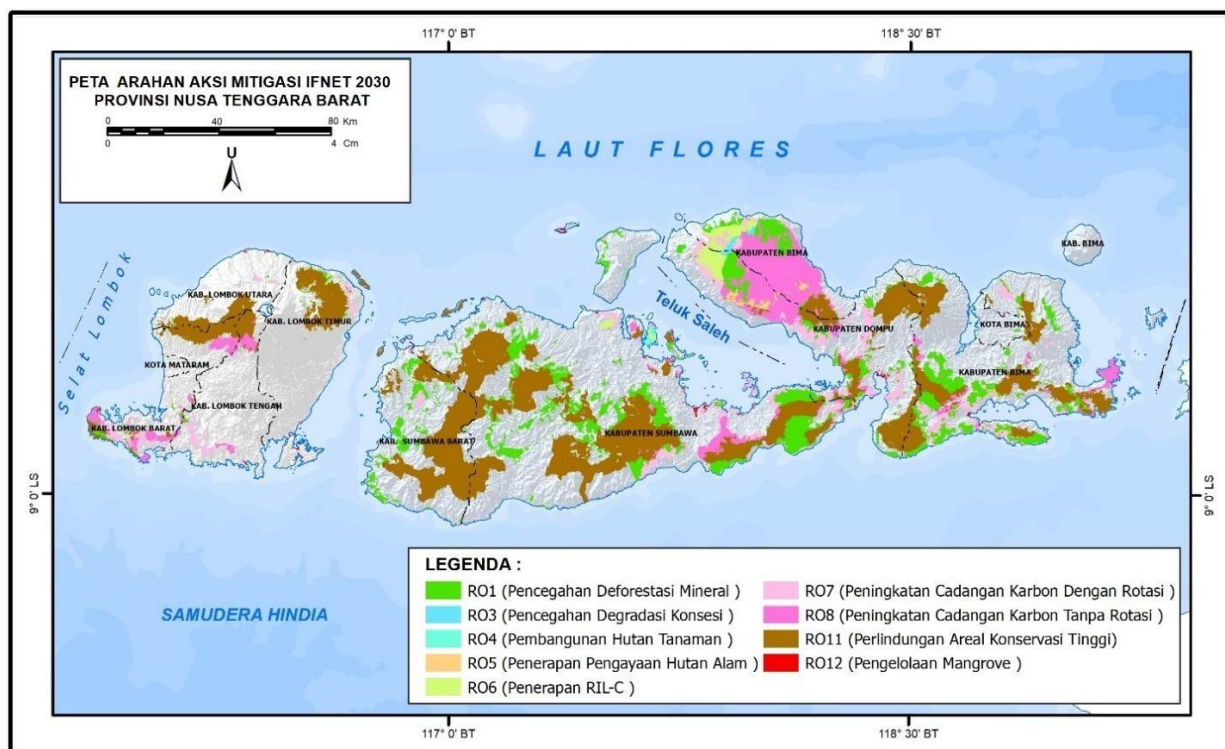
Berdasarkan analisis indeks prioritas lokasi, indeks jasa lingkungan dan indeks kelembagaan terhadap kondisi FOLU Provinsi NTB, dihasilkan peta arahan pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi NTB. Arahan luas serta jenis-jenis kegiatan aksi mitigasi dan peta arahan pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi NTB disajikan pada Tabel 14 dan Gambar 12.

Tabel 14. Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi NTB Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan

Rencana Operasional	Fungsi Kawasan Hutan								Grand Total
	HL	HP	HPT	TAHURA	CA	TN	TWA	APL	
RO1	5.444,24	19.485,39	54.102,72	2,30		17.374,95	705,61	68.029,00	165.144,20
RO3		67,29	2.329,20						2.396,50
RO4		1.606,14							1.606,14
RO5	10,10	633,25	1.185,31			4.714,78	6,57		6.550,01
RO6		10.662,48	6.760,14						17.422,62
RO7		34.669,35	37.981,24					7.693,58	80.344,17
RO8	27.306,85	10.455,41	9.838,59	2.721,05	2.905,39	56.602,88	1.882,44	28,36	111.740,69
RO11	368.982,97	3.128,65	7.941,65					1.694,94	381.748,21
RO12	7,42	89,14	645,84		21,55		69,48	2.254,69	3.088,12
Grand Total	401.751,58	80.796,83	120.784,71	2.723,35	2.926,94	78.692,60	2.664,10	79.700,55	770.040,67

Sumber : BPKHTL, 2023

Ket: RO 01-Pencegahan Deforestasi Lahan Mineral; RO 03-Pencegahan Deforestasi Konsesi; RO 04-Pembangunan Hutan Tanaman; RO 05-Pengayaan Hutan Alam (*Enrichment Natural Regeneration*, ENR); RO 06-Penerapan RIL-C; RO 07-Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi Rehabilitasi Dengan Rotasi; RO 08-Peningkatan Cadangan Karbon Non Rotasi Rehabilitasi Non Rotasi; RO 11-Perlindungan Area Konservasi Tinggi seluas; RO 12-Pengelolaan Mangrove.



Gambar 12. Peta arahan pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim

Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Provinsi NTB

3.4. Rencana Operasional Aksi Mitigasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Provinsi NTB*

Pelaksanaan program dan kegiatan aksi mitigasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di Provinsi NTB harus dapat memberikan kontribusi yang nyata dan secara signifikan terhadap karhutla, penurunan laju deforestasi, degradasi hutan dan peningkatan laju RHL serta penerapan sistem pengelolaan sumber daya hutan lestari yang sejalan dengan target ENDC melalui pendekatan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*. Pada penentuan jenis program dan kegiatan perlu memperhatikan arahan optimasi, kondisi tutupan lahan dan tingkat kepentingan yang mendesak dalam pelaksanaannya sesuai dengan besarnya ancaman dari adanya deforestasi, kebakaran dan degradasi lahan yang digambarkan pada IPL Provinsi NTB. Arahan pelaksanaan aksi mitigasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di Provinsi NTB berdasarkan rencana operasional aksi mitigasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi NTB disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Rencana Operasional (RO) Provinsi NTB

Rencana Operasional	Luas
RO1: Pencegahan deforestasi mineral	165.144,20
RO3: Pencegahan degradasi konsesi	2.396,50
RO4: Pembangunan Hutan Tanaman	1.606,14
RO5: Penerapan pengayaan hutan alam	6.550,01

Rencana Operasional	Luas
RO6: Penerapan RIL-C	17.422,62
RO7: Peningkatan cadangan karbon dengan rotasi	80.344,17
RO8: Peningkatan cadangan karbon tanpa rotasi	111.740,69
RO11: Perlindungan areal konservasi tinggi	381.748,21
RO12: Pengelolaan mangrove	3.088,12
Grand Total	770.040,67

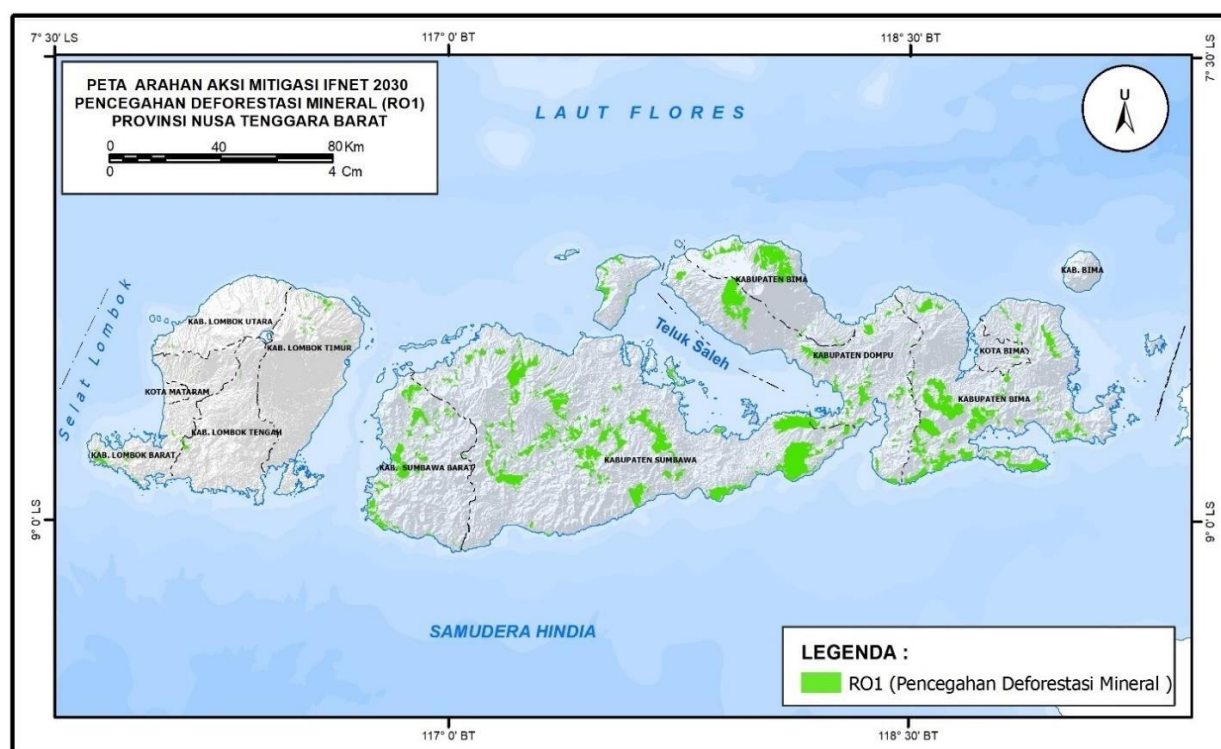
1. Penentuan Rencana Lokasi Pelaksanaan Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi Mineral(RO 1)

Program pencegahan deforestasi mineral adalah salah satu prioritas yang penting untuk semua pemangku kawasan di Provinsi NTB. Pelaksanaan kegiatan dan program yang dilakukan dalam rangka mengurangi risiko deforestasi tinggi. Penentuan rencana lokasi aksi mitigasi RO 1, dilakukan dengan memperhatikan tingkat emisi atau indeks biogeofisik RO 1 pada semua fungsi kawasan sampai pada tingkat tapak di Provinsi NTB seperti pada Tabel 16.

Tabel 16. Biofisik Pencegahan Deforestasi Mineral (RO 1)

Informasi Biofisik	
Kabupaten	Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Bima, Dompu, Kota Bima
Fungsi Kawasan	HL, HP, HPT, TAHURA, TN, TWA, APL
BKPH	Ampang Riwo, Batulanteh, Brang Beh, Orong Telu, Rinjani Barat, Rinjani Timur, Ropang, Tambora, Sejong Matayang, Toffo Pajo Soromandi, Pelangan Tastura, Madapangga Rompu Waworada, Ampang Plampang, Brang Rea Puncak Ngengas, Maria Donggomasa
Tutupan Lahan	Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Hutan Mangrove Primer, Hutan Mangrove Sekunder

Secara detail sebaran luas area pelaksanaan program kegiatan pencegahan deforestasi mineral pada seluruh pemangku kawasan di Provinsi NTB disajikan pada Gambar 13.



Gambar 13. Lokasi Prioritas Program Kegiatan Pencegahan Deforestasi Mineral (RO 1) di Provinsi NTB

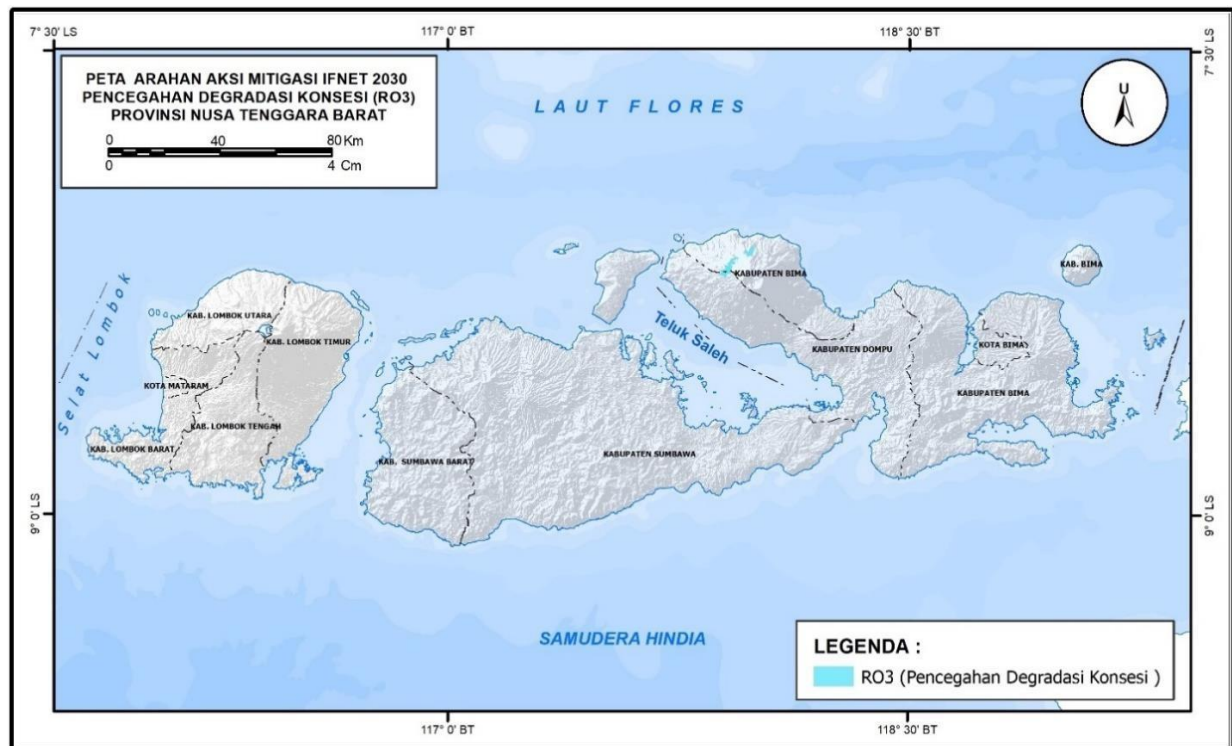
2. Penentuan Rencana Lokasi Pelaksanaan Aksi Mitigasi Pencegahan Degradasi Hutan Konsesi (RO 3)

Faktor terjadinya degradasi hutan yaitu akibat dari adanya kegiatan penebangan pohon dan konversilahan hutan menjadi lahan perkebunan atau lahan lainnya. Degradasi hutan memberi kontribusi terhadap peningkatan emisi GRK, sehingga perlu dilakukan pencegahan degradasi hutan. Pelaksanaan aksi penurunan emisi GRK menuju *net sink* perlu dilakukan dengan sinergi antar berbagai pihak termasuk dengan perusahaan hutan alam atau konsesi. Pelaksanaan kegiatan dan program yang dilakukan dalam rangka Pencegahan Degradasi Hutan Konsesi. Penentuan rencana lokasi aksi mitigasi RO 3, dilakukan dengan memperhatikan tingkat emisi atau indeks biogeofisik RO 3 pada semua fungsi kawasan sampai pada tingkat tapak (Tabel 17).

Tabel 17. Pencegahan Degradasi Hutan Konsesi (RO 3)

Informasi Biofisik	
Kabupaten	Bima
Fungsi Kawasan	HP, HPT
BKPH	Madapangga Rompu Waworada, Maria Donggomasa
Tutupan Lahan	Hutan Lahan Kering Primer

Secara detail sebaran luas area pelaksanaan program kegiatan Pencegahan Degradasi Hutan Konsesi (RO 3) pada seluruh pemangku kawasan di Provinsi NTB disajikan pada Gambar 14.



Gambar 14. Lokasi Prioritas Program Kegiatan Mitigasi Pencegahan Degradasi Hutan Konsesi(RO3) di Provinsi NTB

3. Penentuan Rencana Lokasi Pelaksanaan Aksi Mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman(RO 4)

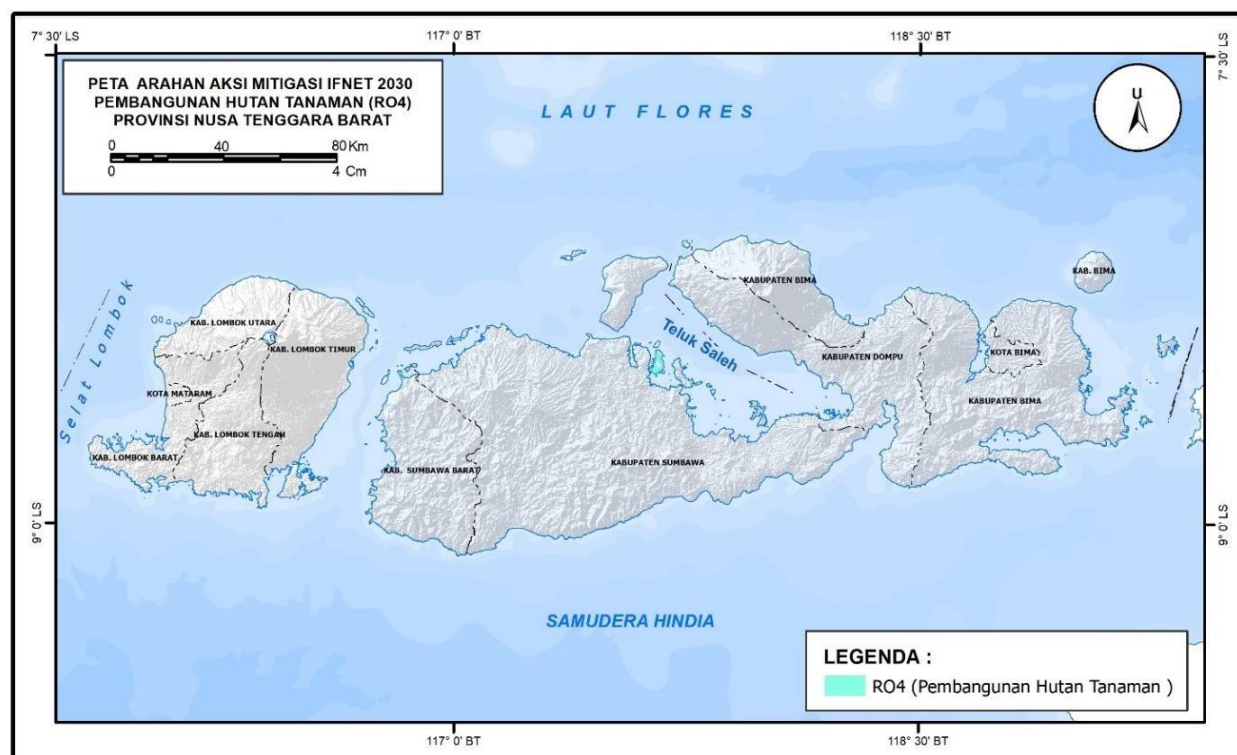
Pembangunan hutan tanaman (HT) selain dapat dilakukan pada areal Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)-HT juga dapat dilakukan pada areal Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) -HTR (Hutan Tanaman Rakyat) dan areal kegiatan *sosial forestry* di Provinsi NTB. Berdasarkan data terakhir Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*, pada kawasan PIAPS di Indonesia terdapat potensi kegiatan pembangunan tanaman seluas 7.327,10 ha. KLHK juga mendukung pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui Hutan Tanaman Energi. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 62 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa tanaman energi merupakan tanaman yang diarahkan pemanfaatannya untuk pemenuhan kebutuhan energi terbarukan yang berasal dari sumber nabati seperti biofuel, biomassa dan tanaman penghasil Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Pelaksanaan kegiatan dan program yang dilakukan dalam rangka Pembangunan Hutan Tanaman. Penentuan rencana lokasi aksi mitigasi RO 4, dilakukan dengan memperhatikan tingkat emisi atau indeks biogeofisik RO 4 pada semua fungsi kawasan sampai pada tingkat tapak (Tabel 18).

Tabel 18. Biofisik Pembangunan Hutan Tanaman (RO 4)

Informasi Biofisik	
Kabupaten	Sumbawa
Fungsi Kawasan	HP
BKPH	Batulanteh, Ropang, Ampang Plampang,
Tutupan Lahan	Semak Belukar, Lahan Terbuka, Savana/Padang Rumput

Secara detail sebaran luas area pelaksanaan program kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman (RO 4) pada seluruh pemangku kawasan di Provinsi NTB disajikan pada Gambar 22.



Gambar 15. Lokasi Prioritas Program Kegiatan Mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman (RO 4) di Provinsi NTB

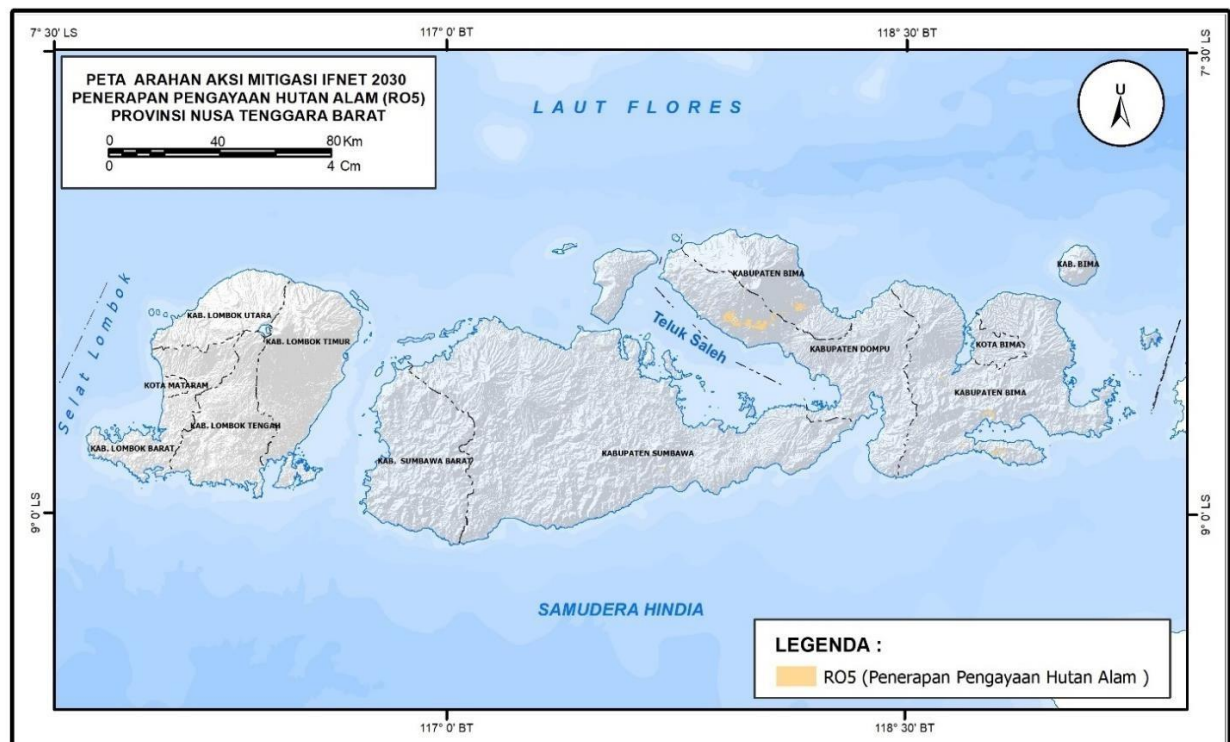
4. Penentuan Rencana Lokasi Pelaksanaan Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (RO 5)

Kawasan yang menjadi pelaksanaan aksi mitigasi penerapan pengayaan hutan alam (RO 5) adalah hutan alam, baik yang terdapat di dalam areal PBPH maupun di luar kawasan hutan. Hutan Alam merupakan areal hutan yang vegetasinya tumbuh tanpa atau sedikit campur tangan manusia. Luas Lokasi Pelaksanaan Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (RO 5) adalah seluas 6.550,01 Ha. Pelaksanaan kegiatan dan program yang dilakukan dalam rangka mengurangi risiko degradasi hutan konsesi. Penentuan rencana lokasi aksi mitigasi RO 5, dilakukan dengan memperhatikan tingkat emisi atau indeks biogeofisik RO 5 pada semua fungsi kawasan sampai pada tingkat tapak (Tabel 19).

Tabel 19. Biofisik Penerapan Pengayaan Hutan Alam (RO 5)

Informasi Biofisik	
Kabupaten	Bima,
Fungsi Kawasan	HL, HP, HPT, TN, TWA, APL
BKPH	Madapangga Rompu Waworada, Maria Donggomasa
Tutupan Lahan	Hutan Lahan dan Kering Primer

Secara detail sebaran luas area pelaksanaan program Penerapan Pengayaan Hutan Alam pada seluruh pemangku kawasan di Provinsi NTB disajikan pada Gambar 23.



Gambar 16. Lokasi Prioritas Program Kegiatan Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (RO 5) di Provinsi NTB

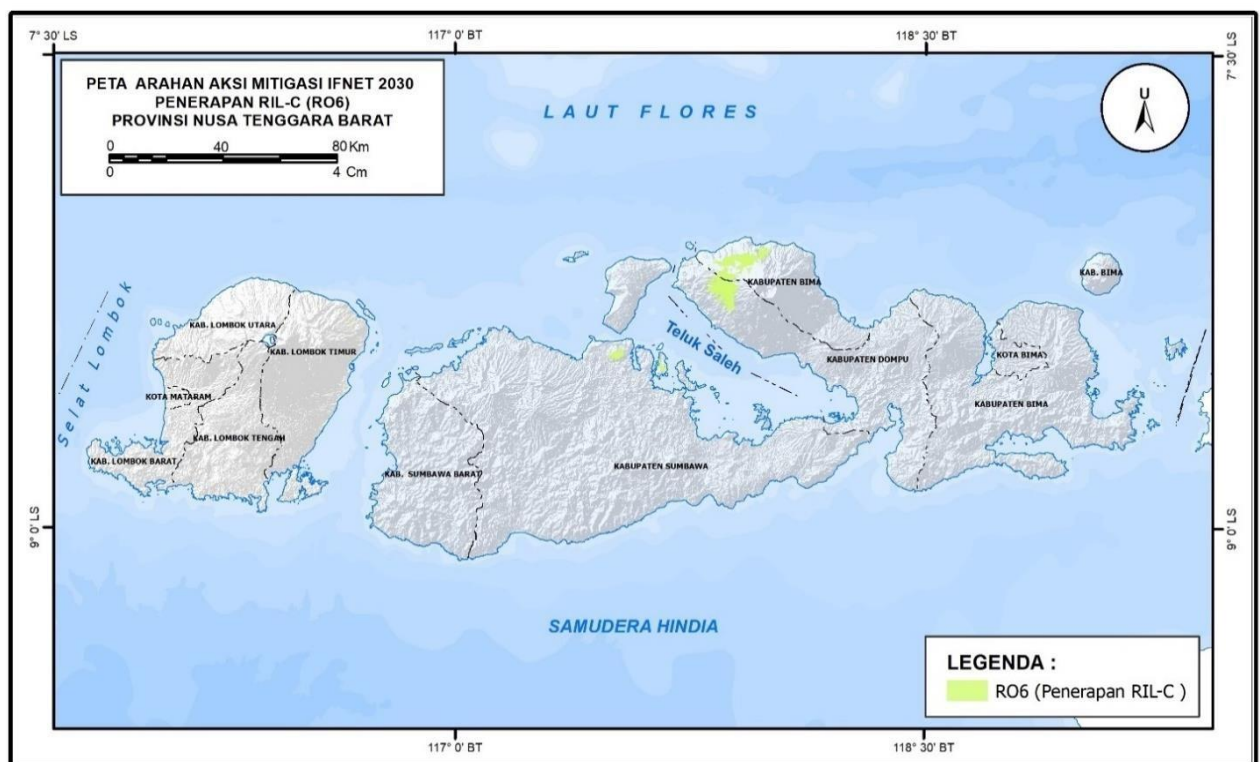
5. Penentuan Rencana Lokasi Pelaksanaan Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C (RO 6)

Areal pelaksanaan aksi mitigasi Penerapan *Reduced Impact Logging-Carbon* (RIL-C) adalah areal hutan alam (HA) dan areal hutan tanaman yang terdapat dalam areal PHPB -HA maupun PBPH-HT. Pelaksanaan kegiatan dan program yang dilakukan dalam rangka peningkatan Penerapan RIL-C (RO 6). Penentuan rencana lokasi aksi mitigasi RO 6, dilakukan dengan memperhatikan tingkat emisi atau indeks biogeofisik RO 6 pada semua fungsi kawasan sampai pada tingkat tapak (Tabel 20).

Tabel 20. Biofisik Penerapan RIL-C (RO 6)

Informasi Biofisik	
Kabupaten	Sumbawa, Bima
Fungsi Kawasan	HP, HPT
BKPH	Ampang Riwo, Tambora, Toffo Pajo Soromandi, Madapangga Rompu Waworada, Ampang Plampang, Batulanteh, Maria Donggomasa, Ropang
Tutupan Lahan	Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Hutan Mangrove Sekunder

Secara detail sebaran luas area pelaksanaan program Penerapan RIL-C pada seluruh pemangku kawasan di Provinsi NTB disajikan pada Gambar 17.



Gambar 17. Lokasi Prioritas Program Kegiatan Mitigasi Penerapan RIL - C (RO 6) di Provinsi NTB

6. Penentuan Rencana Lokasi Pelaksanaan Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi (RO 7)

RHL merupakan salah satu upaya yang digunakan dalam menurunkan tingkat deforestasi dan degradasi lahan serta memulihkan lahan yang kritis sehingga dapat berfungsi sebagai media produksi dan media tata air. Pada ENDC, kegiatan RHL untuk pemulihan produksi disebut sebagai kegiatan rehabilitasi lahan dengan rotasi, sedangkan pada fungsi tata air dan jasa lingkungan lainnya disebut sebagai rehabilitasi lahan non rotasi. Berdasarkan peraturan Menteri KLHK, pada prioritas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi diarahkan pada lahan kritis dan berada pada DAS yang perlu dipulihkan dan diperbaiki. Kegiatan rehabilitasi dengan rotasi diarahkan pada lahan tidak produktif

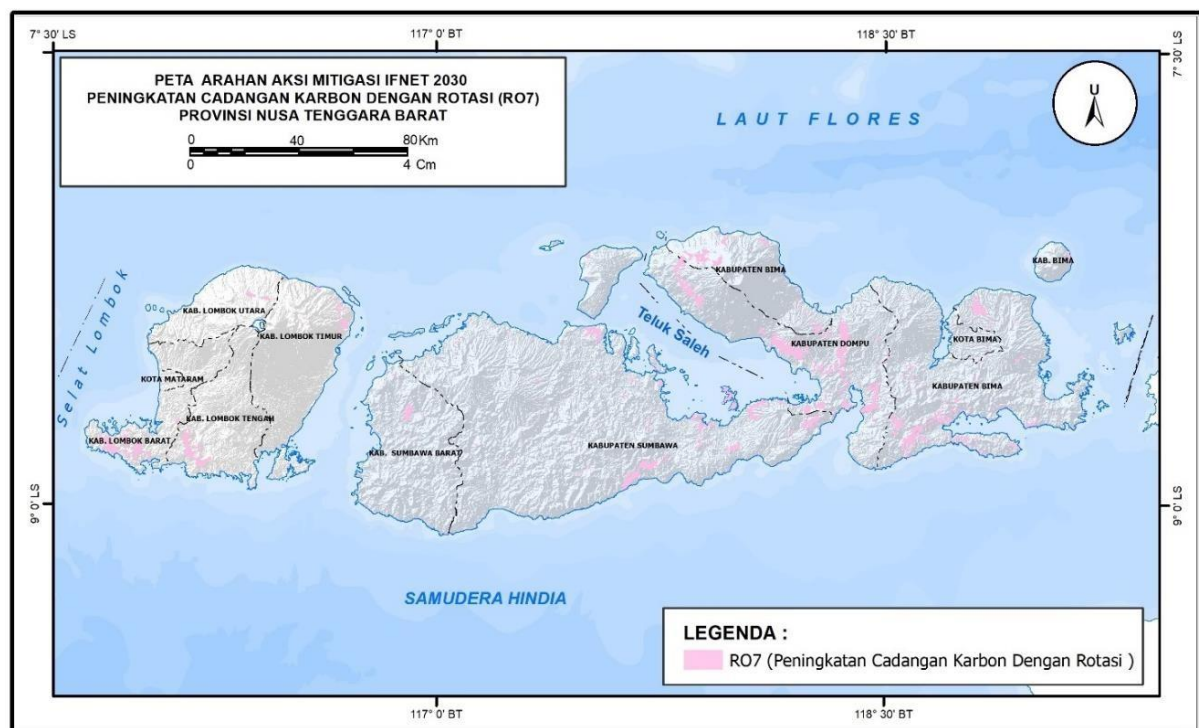
yang berada pada arahan produksi dan konversi di area APL. Pada kawasan hutan, rehabilitasi dengan rotasi diarahkan pada lahan tidak produktif, budidaya dan perkebunan dalam kawasan yang melibatkan masyarakat dan atau yang bersinergi dengan kegiatan perhutanan sosial dan memerlukan kelembagaan KPH yang kuat yang berperan besar dalam melakukan fasilitasi.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan cadangan karbon dengan rotasi. Penentuan rencana lokasi aksi mitigasi RO 7, dilakukan dengan memperhatikan tingkat emisi atau indeks biogeofisik RO 7 pada semua fungsi kawasan sampai pada tingkat tapak (Tabel 21).

Tabel 21. Biofisik Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi (RO 7)

Informasi Biofisik	
Kabupaten	Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Bima, Dompu, Kota Bima
Fungsi Kawasan	HP, HPT, APL
BKPH	Ampang Riwo, Batulanteh, Brang Beh, Orong Telu, Rinjani Barat, Rinjani Timur, Ropang, Tambora, Sejong Matayang, Toffo Pajo Soromandi, Pelangan Tastura, Madapangga Rompu Waworada, Ampang Plampang, Brang Rea Puncak Ngengas, Maria Donggomasa
Tutupan Lahan	Semak Belukar, Lahan Terbuka, Savana/Padang Rumput, Semak Belukar Rawa, Pertanian Lahan Kering, Pertanian Lahan Kering Campur, Sawah

Secara detail sebaran luas area pelaksanaan program Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi pada seluruh pemangku kawasan di Provinsi NTB disajikan pada Gambar 18.



Gambar 18. Lokasi Prioritas Program Kegiatan Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi (RO 7) di Provinsi NTB

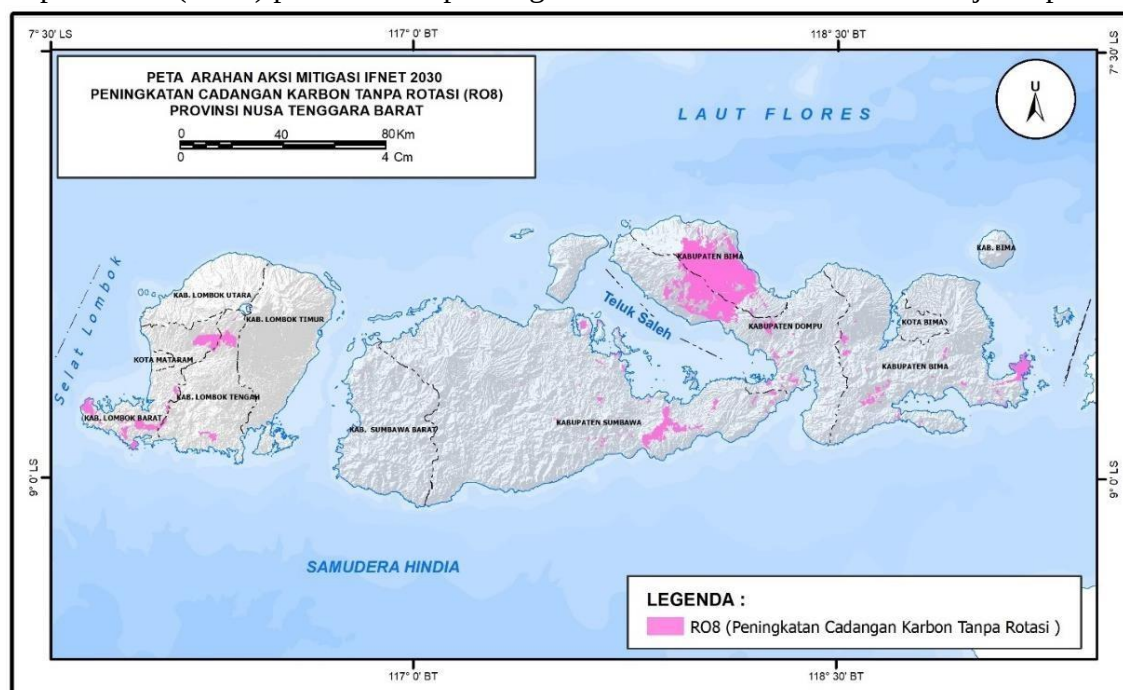
7. Penentuan Rencana Lokasi Pelaksanaan Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi (RO 8)

Kegiatan RHL merupakan salah satu upaya untuk memulihkan fungsi tata air dan layanan jasa lingkungan lainnya sebagai kegiatan rehabilitasi lahan non rotasi. Kegiatan rehabilitasi non rotasi adalah aksi mitigasi untuk peningkatan karbon yang diarahkan pada optimasi kawasan lindung dan rehabilitasi. Pada kawasan hutan rehabilitasi non rotasi diarahkan pada lahan tidak produktif maupun budidaya yang masuk ke dalam arahan lindung dan rehabilitasi. Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan cadangan karbon non rotasi. Penentuan rencana lokasi aksi mitigasi RO 8, dilakukan dengan memperhatikan tingkat emisi atau indeks biogeofisik RO 8 pada semua fungsi kawasan sampai pada tingkat tapak (Tabel 22).

Tabel 22. Biofisik Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi (RO 8)

Informasi Biofisik	
Kabupaten	Lombok Barat, Lombok Tengah, Kota Mataram, Sumbawa, Bima, Dompu
Fungsi Kawasan	HL, HP, HPT, TAHURA, CA, TN, TWA, APL
BKPH	Ampang Riwo, Rinjani Barat, Rinjani Timur, Ropang, Tambora, Toffo Pajo Soromandi, Pelangan Tastura, Madapangga Rompu Waworada, Ampang Plampang, Maria Donggomasa
Tutupan Lahan	Hutan Tanaman, Semak Belukar, Lahan terbuka, Savana/Padang Rumput, Pertanian Lahan Kering, Pertanian Lahan Kering Campur, Sawah

Secara detail sebaran luas area pelaksanaan program kegiatan Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi (RO 8) pada seluruh pemangku kawasan di Provinsi NTB disajikan pada Gambar 19.



Gambar 19. Lokasi Prioritas Program Kegiatan Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi (RO 8) di Provinsi NTB

8. Penentuan Rencana Lokasi Pelaksanaan Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi (RO 11)

Konservasi keanekaragaman hayati adalah salah satu program pembangunan nasional yang merupakan bagian dari program pengelolaan hutan berkelanjutan yang mencakup beberapa kegiatan yaitu :

1. Pemolaan dan Informasi Konservasi alam
2. Pengelolaan Kawasan Konservasi
3. Konservasi Spesies dan Genetik
4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
5. Peningkatan Kualitas Hidup melalui Upaya Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial (KEE)

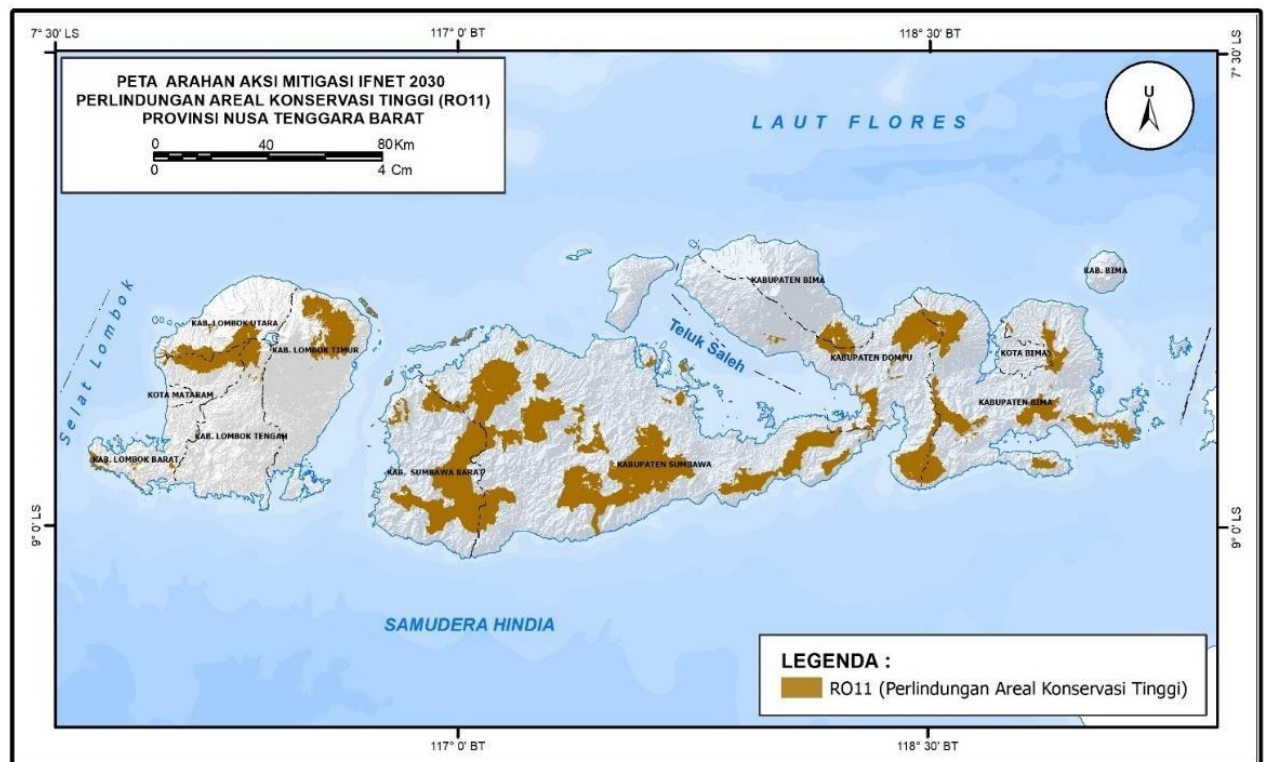
Pada kerangka aksi penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan dan lahan serta konservasi keanekaragaman hayati dapat dilihat dari beberapa aspek seperti konservasi tumbuhan dan satwa liar, pelestarian dan perlindungan habitat sampai pada pelibatan masyarakat lokal dan kearifan lokal. Pada analisis jasa lingkungan ekosistem, beberapa area yang berada di luar kawasan hutan konservasi memiliki nilai konservasi tinggi (HCV) dan menjadi kantong habitat satwa liar maupun kawasan ekosistem esensial sehingga perlu menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati. Pada area APL, dapat diarahkan untuk menjadi Tahura. Luas areal hutan alam yang memiliki nilai konservasi tinggi di luar kawasan hutan konservasi sebagian besar berada di kawasan hutan produksi non-konsesi.

Pelaksanaan kegiatan dan program yang dilakukan dalam rangka Areal Konservasi Tinggi. Penentuan rencana lokasi aksi mitigasi RO 11, dilakukan dengan memperhatikan tingkat emisi atau indeks biogeofisik RO 11 pada semua fungsi kawasan sampai pada tingkat tapak (Tabel 23).

Tabel 23. Biofisik Perlindungan Areal Konservasi Tinggi (RO 11)

Informasi Biofisik	
Kabupaten	Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Bima, Dompu, Kota Bima
Fungsi Kawasan	HL, HP, HPT, TN, APL
BKPH	Ampang Riwo, Batulante, Brang Beh, Orong Telu, Rinjani Barat, Rinjani Timur, Ropang, Tambora, Sejong Matayang, Toffo Pajo Soromandi, Pelangan Tastura, Madapangga Rompu Waworada, Ampang Plampang, Brang Rea Puncak Ngengas, Maria Donggomasa
Tutupan Lahan	Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Hutan Mangrove Primer, Hutan Mangrove Sekunder

Secara detail sebaran luas area pelaksanaan program kegiatan Perlindungan Areal Konservasi Tinggi (RO 11) pada seluruh pemangku kawasan di Provinsi NTB disajikan pada Gambar 20.



Gambar 20. Lokasi Prioritas Program Kegiatan Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi(RO 11) di Provinsi NTB

9. Penentuan Rencana Lokasi Pelaksanaan Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove (RO 12)

Mangrove memiliki potensi yang sangat besar untuk menunjukkan ambisi Indonesia di dalam aksi mitigasi perubahan iklim. Optimalisasi peran mangrove akan berdampak dan menjadi satu tambahan yang nyata pada peran Indonesia dalam aksi-aksi perubahan iklim. Selain dampak positif, dampak negatif yang ditimbulkan dari kerusakan ekosistem mangrove sangat luas, maka ekosistem mangrove harus dikelola dan digunakan secara bijak dan berkelanjutan. Beberapa kebijakan dalam mengelola mangrove yaitu melakukan program rehabilitasi hutan mangrove yang bertujuan untuk memulihkan hutan mangrove yang mengalami kerusakan. Disamping itu, kebijakan dan kerangka regulasi mangrove dengan pertimbangan kondisi dan kearifan lokal promosi manfaat mangrove yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, keterlibatan dalam pengelolaan, meningkatkan produktivitas, memperkuat kerjasama terutama dalam kegiatan rehabilitasi mangrove dan langkah *law enforcement*. Kegiatan rehabilitasi mangrove tidak hanya sekedar menanam, tetapi juga dengan memperhatikan dan melihat bentang alam atau lanskap mangrove. Bentang alam merupakan suatu sistem ekologi-sosial yang terdiri dari mosaik ekosistem alami dan buatan manusia dengan karakteristik konfigurasi topografi, vegetasi, penggunaan lahan dan pemukiman sebagai hasil proses ekologi, sejarah, serta proses ekonomi sosial dan aktivitas manusia di area tersebut.

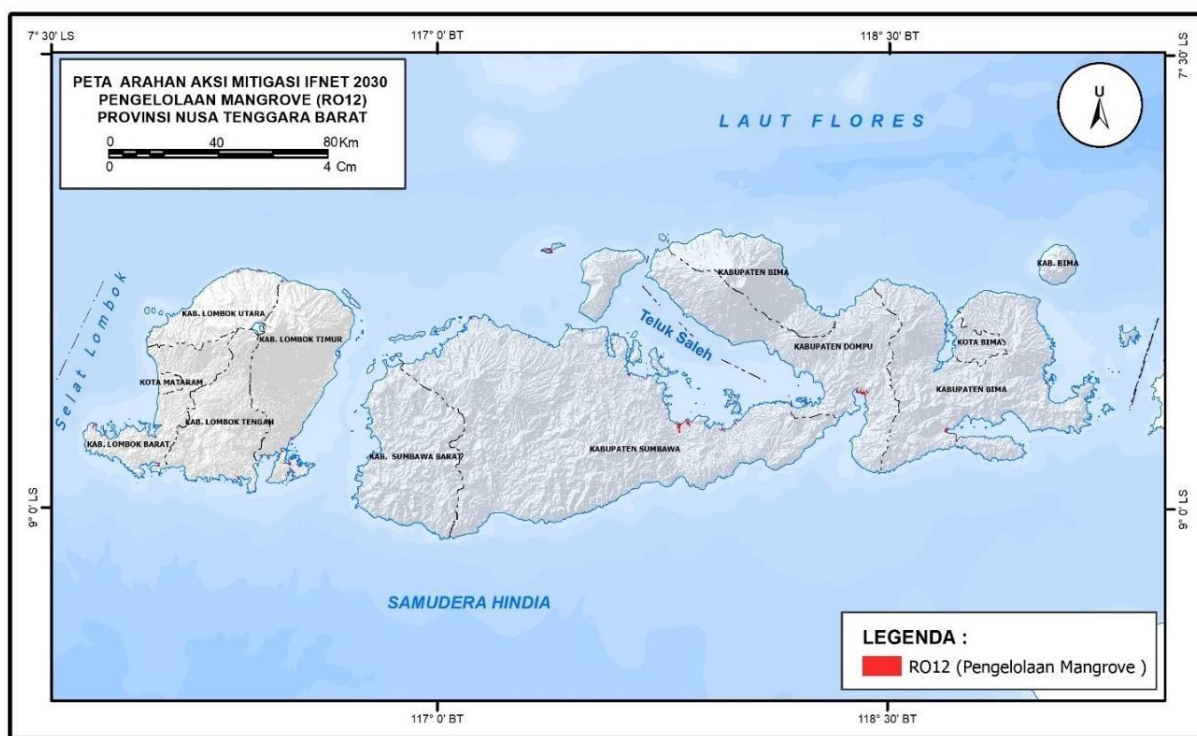
Upaya RHL mangrove dapat terlihat dari pemanfaatan penting yang lain yaitu penurunan emisi GRK secara nasional dengan menyiapkan tanaman mangrove seluas-luasnya dalam menyerap dan menyimpan karbon dalam mangrove. Berdasarkan beberapa penelitian, hutan mangrove mampu menyerap emisi karbon sebesar 4 -5 kali lebih besar daripada hutan dataran mineral. Potensi penyerapan emisi karbon mangrove dapat memberikan kontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Dalam rangka penyelamatan ekosistem mangrove di Indonesia dan dunia memerlukan langkah-langkah yang nyata dan implementatif serta jelas seperti: (a) penetapan kebijakan dan kerangka regulasi dalam pengelolaan ekosistem mangrove disesuaikan dengan kondisi dan kearifan lokal masing-masing negara; (b) mendorong promosi manfaat mangrove yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat baik HHBK maupun jasa lingkungannya; (c) meningkatkan kesadaran keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya sehingga masyarakat merasa memiliki dan dapat mengambil manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial; (d) memberikan batasan yang jelas terkait dengan penebangan kayu mangrove; (e) meningkatkan produktivitas mangrove melalui pengembangan teknologi; (f) menjalin, meningkatkan, memperkuat kerjasama baik di dalam maupun di luar negeri yang diarahkan untuk kegiatan rehabilitasi mangrove; dan (g) meningkatkan upaya penegakan hukum yang adil dan transparan.

Pelaksanaan kegiatan dan program yang dilakukan dalam rangka pengelolaan mangrove Penentuan rencana lokasi aksi mitigasi RO 12, dilakukan dengan memperhatikan tingkat emisi atau indeks biogeofisik RO 12 pada semua fungsi kawasan sampai pada tingkat tapak (Tabel 24).

Tabel 24. Biofisik Pengelolaan Mangrove (RO 12)

Informasi Biofisik	
Kabupaten	Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa, Bima, Dompu
Fungsi Kawasan	HL, HP, HPT, CA, TWA, APL
BKPH	Ampang Riwo, Rinjani Barat, Rinjani Timur, Ropang, Tambora, Toffo Pajo Soromandi, Pelangan Tastura, Madapangga Rompu Waworada, Ampang Plampang, Maria Donggomasa
Tutupan Lahan	Hutan Mangrove Primer, Hutan Mangrove Sekunder, Semak Belukar

Secara detail sebaran luas area pelaksanaan program Pengelolaan Mangrove pada seluruh pemangku kawasan di Provinsi NTB disajikan pada Gambar 21.



Gambar 21. Lokasi Prioritas Program Kegiatan Mitigasi Pengelolaan Mangrove (RO 12) di Provinsi NTB

3.5. Rencana Aksi Mitigasi di Lingkup BKPH dan Kawasan Konservasi Provinsi NTB

Secara umum arahan rencana aksi mitigasi di Provinsi NTB dapat dikategorikan dalam Lingkup Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH), Lingkup Kawasan Konservasi, dan APL. Lingkup BKPH terdiri dari 15 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), untuk lingkup kawasan konservasi dibedakan menjadi kawasan Taman Nasional dan kawasan konservasi di luar Taman Nasional serta APL. Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di Provinsi NTB dapat dijelaskan pada Tabel 25.

Tabel 25. Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di Provinsi NTB Lingkup BKPH, Kawasan Konservasi dan APL.

PENGELOLA	RENCANA OPERASIONAL									Grand Total
	RO 1	RO 3	RO 4	RO 5	RO 6	RO 7	RO 8	RO 11	RO 12	
BKPH Ampang Plampang	15.630,37			90,00		11.017,86	11.044,60	30.260,57	692,89	68.736,30
BKPH Ampang Riwo	17.362,28			94,54		7.535,35	3.157,22	14.518,38		42.667,77
BKPH Batulante	267,44		1.507,51	103,35	1.915,95	1.904,12	1.095,82	12.431,98	4,73	19.230,89
BKPH Brang Beh								9.900,10		9.900,10
BKPH Brang Rea Puncak Ngengas	742,71					77,72	270,40	51.506,19	7,42	52.604,44

PENGELOLA	RENCANA OPERASIONAL									Grand Total
	RO 1	RO 3	RO 4	RO 5	RO 6	RO 7	RO 8	RO 11	RO 12	
BKPH Madapangga Rompu Waworada	28.264,54			1.195,55		12.007,74	4.211,93	18.309,57		63.989,32
BKPH Maria Donggomasa	4.139,05			92,81		3.729,05	3.011,49	27.273,77	1,55	38.247,71
BKPH Orong Telu	314,28					6,10		16.576,56		16.896,94
BKPH Pelangan Tastura	1.871,53		26,65	77,83		10.364,10	10.526,12	8.357,85	35,82	31.259,90
BKPH Rinjani Barat	25,19			4,62	28,95	930,68	1.264,14	23.188,54		25.442,11
BKPH Rinjani Timur	170,04		71,97	51,29	212,82	1.964,70	139,10	24.029,41		26.639,34
BKPH Ropang	2.660,37						234,83	56.144,85		59.040,05
BKPH Sejong Mataiyang	2.107,97					102,05		37.875,57		40.085,59
BKPH Tambora	2.442,24	2.396,50		105,50	15.264,91	15.173,70	12.322,66	10.903,86		58.609,37
BKPH Toffo Pajo Soromandi	3.034,33			13,18		7.837,43	322,27	38.776,08		49.983,28
BKSDA	705,61			6,57			4.787,83		91,04	5.591,04
Tahura Nuraksa	2,30						2.721,05			2.723,35
TN Gunung Rinjani	15,57									15,57
TN Tambora	17.359,38			4.714,78			56.602,88			78.677,03
APL	68.029,00					7.693,58	28,36	1.694,94	2.254,69	79.700,55
Grand Total	165.144,20	2.396,50	1.606,14	6.550,01	17.422,62	80.344,17	111.740,69	381.748,21	3.088,12	770.040,67

Keterangan:

RO 1 : Pencegahan Deforestasi Mineral

RO 7 : Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi

RO 3 : Pencegahan Degradasi Konsesi

RO 8 : Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi

RO 4 : Pembangunan Hutan Tanaman

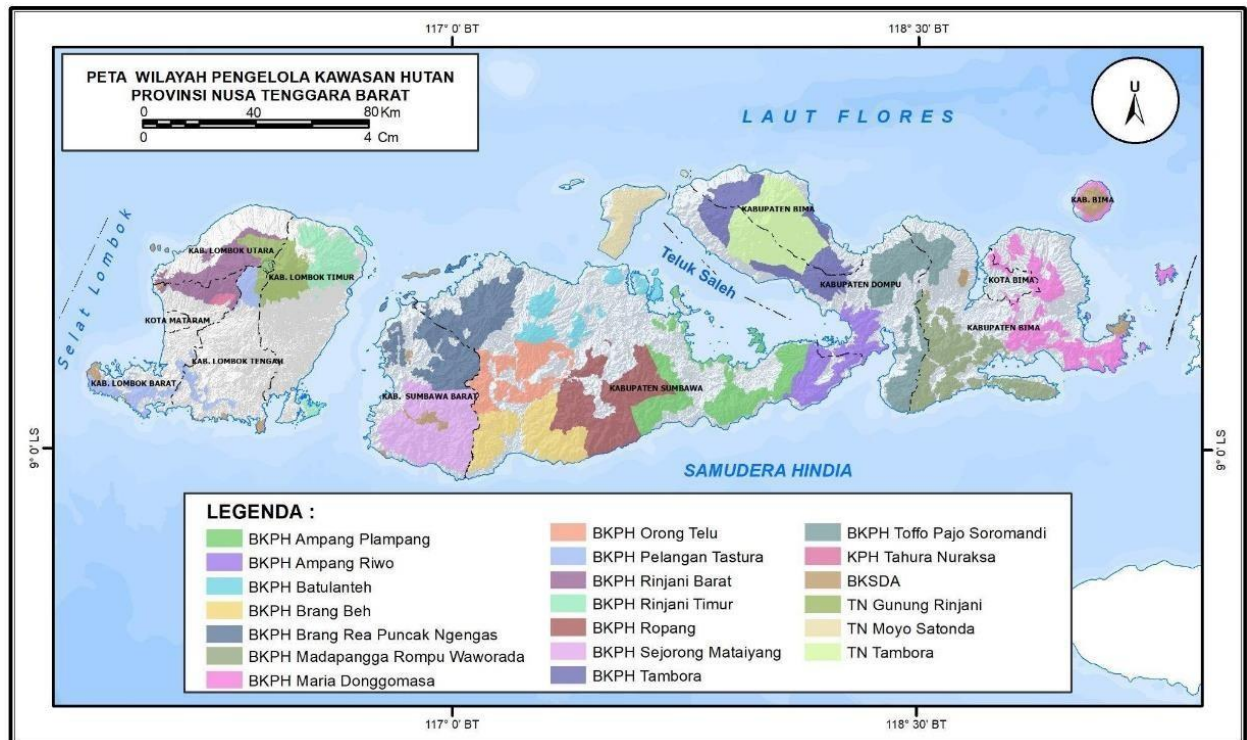
RO 11 : Perlindungan Areal Konservasi Tinggi

RO 5 : Penerapan Pengayaan Hutan Alam

RO 12 : Pengelolaan Mangrove

RO 6 : Penerapan RIL-C

Gambar 22 adalah peta wilayah pengelolaan kawasan hutan untuk rencana operasionalpelaksanaan aksi mitigasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* yang ada di Provinsi NTB.



Gambar 22. Peta Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan untuk Rencana Operasional Pelaksanaan Aksi Mitigasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi NTB

3.5.1. Lingkup BKPH

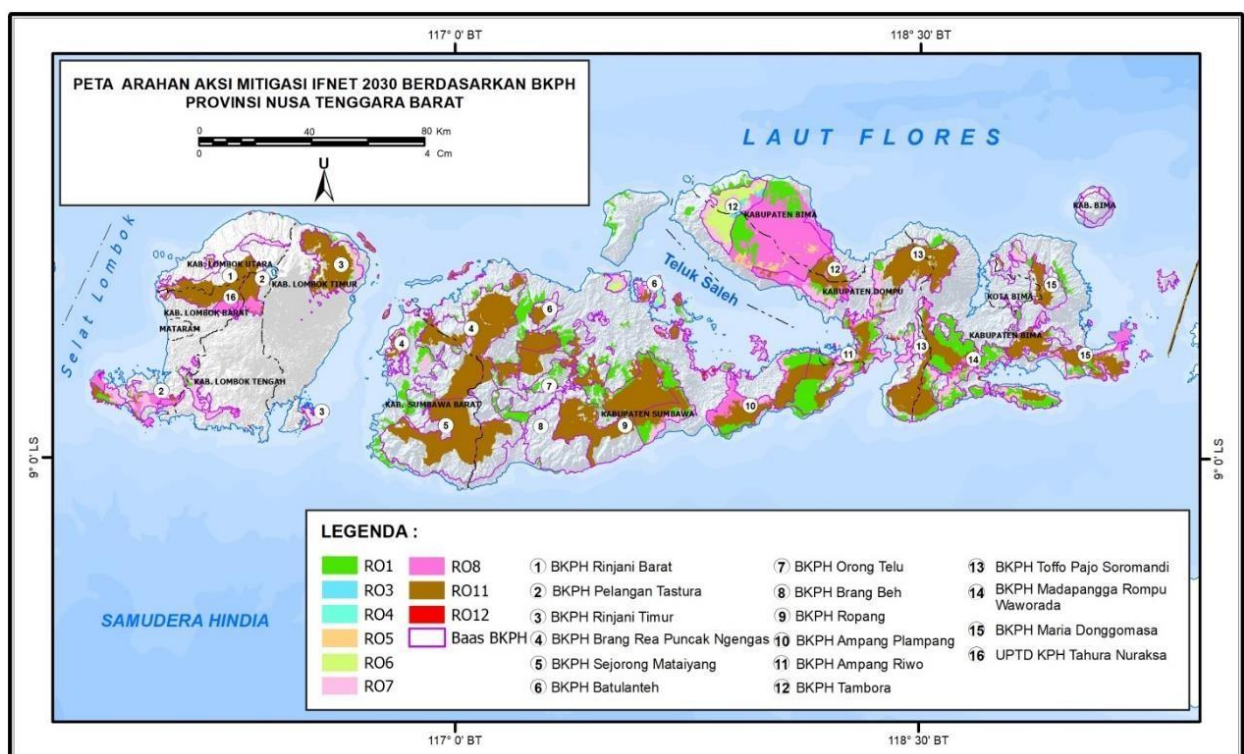
Total areal arahan rencana operasional (RO) pelaksanaan aksi mitigasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di 15 BKPH yang terdapat di Provinsi NTB adalah seluas 603,333.11 Ha. Arahan rencana operasional pelaksanaan aksi mitigasi FOLU NET SINK 2030 di Provinsi NTB terdiri dari:

1. BKPH Ampang Plampang dengan arahan aksi mitigasi pada RO 1, RO 5, RO 7, RO 8, RO 11 dan RO 12 seluas 68,736.30 Ha.
2. BKPH Ampang Riwo dengan arahan aksi mitigasi pada RO 1, RO 5, RO 7, dan RO 8 dan RO 11 seluas 42,667.77 Ha.
3. BKPH Batulante dengan arahan aksi mitigasi pada RO 1, RO 4, RO 5, RO 6, RO 7, RO 8, RO 11 dan RO 12 seluas 19,230.89 Ha.
4. BKPH Brang Beh dengan arahan aksi mitigasi pada RO 11 seluas 9,900.10 Ha.
5. BKPH Brang Rea Puncak Ngengas dengan arahan aksi mitigasi pada RO 1, RO 7, RO 8, dan RO 11 dan RO 12 seluas 52.604,44 Ha. RO 11 sebagai yang terluas dengan luas 51,506.19 Ha.
6. BKPH Maria Donggomasa RO 1, RO 5, RO 7, RO 8 dan RO 11 dan RO 12 seluas 38,247.71 Ha.
7. BKPH Madapangga Rompu Waworada dengan arahan aksi mitigasi pada RO 1, RO 5,

RO 7, RO8, dan RO 11 seluas 63,989.32 Ha.

8. BKPH Sejong Mataiyang dengan arahan aksi mitigasi pada RO1, RO 7, dan RO 11 seluas 40.085,59 Ha.
9. BKPH Orong Telu dengan arahan aksi mitigasi pada RO 1, RO 7 dan RO 11 seluas 16,896.94 Ha.
10. BKPH Pelangan Tastura dengan arahan aksi mitigasi pada RO 1, RO4, RO 5, RO 7, RO 8, RO11 dan RO 12 seluas 31,259.90 Ha.
11. BKPH Rinjani Barat dengan arahan aksi mitigasi pada RO 1, RO 5, RO 6, RO 7, RO 8, dan RO11 seluas 25,442.11 Ha.
12. BKPH Rinjani Timur dengan arahan aksi mitigasi pada RO 1, RO 4, RO 5, RO 7, RO 8, dan RO11 seluas 26.639,34 Ha. RO 11 sebagai yang terluas dengan luas 24,029.41 Ha.
13. BKPH Ropang dengan arahan aksi mitigasi pada RO 1, RO 8, dan RO 11 seluas 59,040.05 Ha.
14. BKPH Toffo Pajo Soromandi dengan arahan aksi mitigasi pada RO 1, RO 5, RO 7, RO 8 dan RO11 seluas 49,983.28 Ha.
15. BKPH Tambora RO 1, RO 3, RO 5, RO 6, RO 7, RO 8, dan RO 11 seluas 58,609,37 Ha.

Berdasarkan jabaran diatas, data arahan RO pelaksanaan aksi mitigasi, lokasi dan luasnya di masing-masing BKPH di Provinsi NTB, maka peta arahan pelaksanaan Aksi Mitigasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi NTB berdasarkan BKPH disajikan pada Gambar 23.



Gambar 23. Peta Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di Provinsi NTB berdasarkan BKPH

3.5.2. Lingkup Kawasan Konservasi

3.5.2.1. Kawasan Konservasi Taman Nasional dan Taman Hutan Raya

Total areal arahan rencana operasional pelaksanaan aksi mitigasi *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di dua TN dan Tahura yang terdapat di Provinsi NTB adalah seluas 81.415,95 Ha. Arahan Rencana Operasional (RO) pelaksanaan aksi mitigasi *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di Provinsi NTB terdiri dari:

1. TN Gunung Rinjani RO 1 seluas 15,57 Ha
2. TN Tambora seluas RO 1, RO 5, RO 8 seluas 78.677,03 Ha
3. Tahura Nuraksa RO 1, RO 8 seluas 2.723,35 Ha

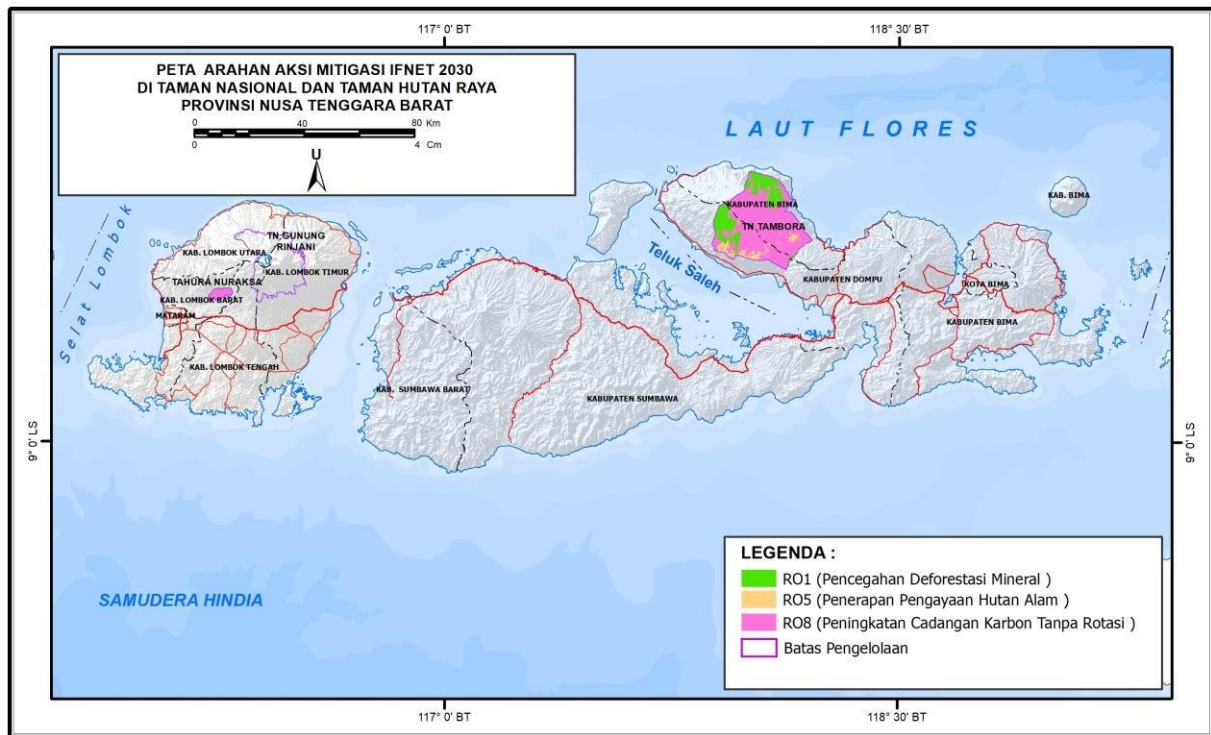
Berdasarkan jabaran diatas, data arahan Rencana Operasional (RO) pelaksanaan aksi mitigasi, lokasi dan luasnya di masing-masing TN di Provinsi NTB disajikan pada Tabel 26 dan Gambar 24. Berikut peta arahan pelaksanaan Aksi Mitigasi *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 Provinsi NTB berdasarkan TN dan Tahura.

Tabel 26. Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di Provinsi NTB Berdasarkan Kawasan Konservasi dalam TN dan Tahura

Pengelola	Rencana Operasional			Grand Total
	RO 1	RO 5	RO 8	
TN Gunung Rinjani	15,57			15,57
TN Tambora	17.359,38	4.714,78	56.602,88	78.677,03
Tahura Nuraksa	2,30		2.721,05	2.723,35

Keterangan:

- RO 1 : Pencegahan Deforestasi Mineral
RO 5 : Penerapan Pengayaan Hutan Alam
RO 8 : Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi



Gambar 24. Peta Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di Provinsi NTB berdasarkan Kawasan Konservasi dalam TN dan Tahura

a. TN Gunung Rinjani (TNGR)

TN Gunung Rinjani (TNGR) merupakan salah satu TN yang ada di Provinsi NTB yang menjadi lokus kegiatan mitigasi penurunan emisi GRK dalam lingkup *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030. Target luasan mitigasi di TNGR tidak terlalu luas sekitar 15,57 Ha. Berdasarkan kondisi lingkungan berupa fungsi kawasan dan tipe tutupan lahan, maka hanya terdapat kegiatan operasional yang akan dilakukan pada TNGR yaitu Pencegahan Deforestasi Mineral (RO 1) seluas 15,57 Ha.

b. TN Tambora

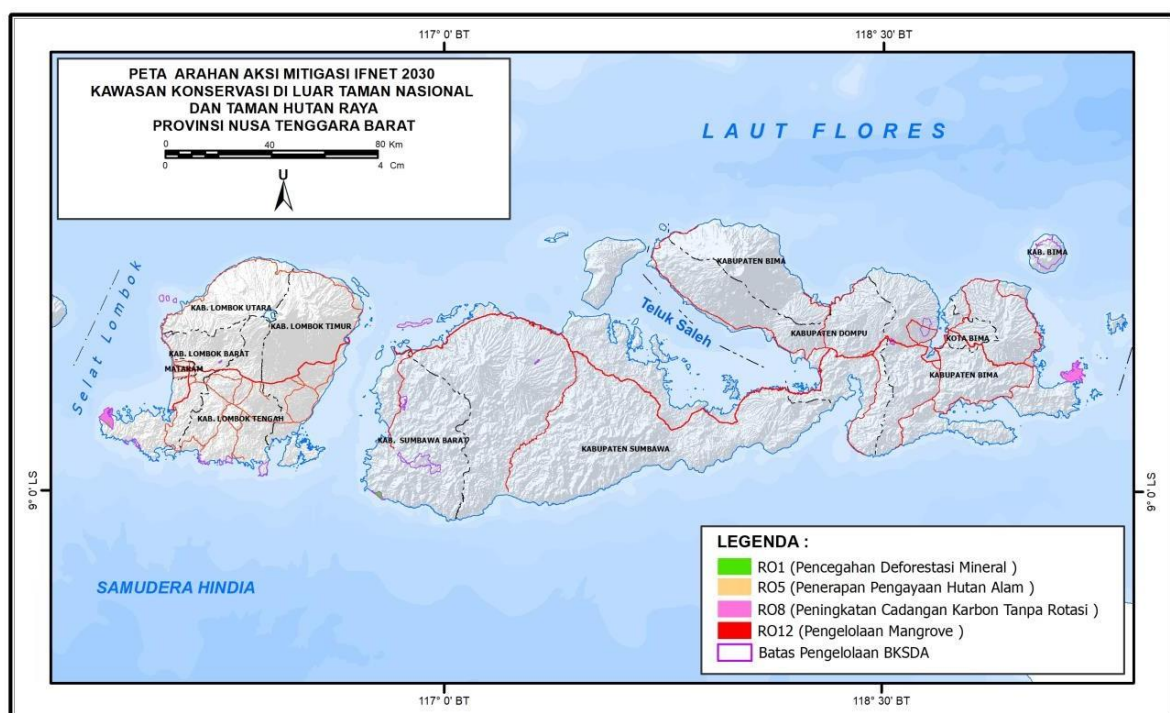
TN Tambora merupakan salah satu TN yang menjadi lokus kegiatan aksimitigasi penurunan emisi GRK dalam *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030. Target luasan mitigasi pada kawasan ini sebesar 78.677,03 Ha lebih luas jika dibandingkan dengan TNGR. Arahan pelaksanaan aksi mitigasi berdasarkan karakteristik lingkungan dan kawasan TN Tambora meliputi RO1 Pencegahan Deforestasi Mineral dengan luasan sebesar 17.359,38 Ha; RO 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam dengan luasan sebesar 4.714,78 Ha; dan RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi dengan luasan sebesar 56.602,88 Ha.

c. Tahura Nuraksa

Tahura Nuraksa merupakan salah satu kawasan konservasi yang menjadi lokus kegiatan aksi mitigasi penurunan emisi GRK dalam *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*. Target luasan mitigasi pada Tahura Nuraksa sebesar 2.723,35 Ha. Arahkan pelaksanaan aksi mitigasi berdasarkan karakteristik lingkungan dan kawasan Tahura Nuraksa meliputi RO 1 Pencegahan Deforestasi Mineral dengan luasan sebesar 2,30 Ha dan RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi dengan luasan sebesar 2.721,05 Ha.

3.5.2.2. Kawasan Konservasi di Luar Taman Nasional dan Taman Hutan Raya

Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Provinsi NTB diberi mandat untuk melaksanakan kegiatan dalam upaya menurunkan emisi karbon dalam kerangka *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* untuk Kawasan konservasi di luar TN dan Tahura Provinsi NTB. Total areal arahan rencana operasional pelaksanaan aksi mitigasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKSDA NTB adalah seluas 5.591,04 Ha. Terdapat 4 (empat) mandat RO yang direncanakan yaitu Pencegahan Deforestasi Mineral (RO 1) seluas 705,61 Ha, Penerapan Pengayaan Hutan Alam (RO5) seluas 6,57 Ha, Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi (RO 8) dengan luasan sebesar 4.787,83 dan Pengelolaan Mangrove (RO 12) seluas 91,04 Ha. Arahkan Rencana Operasional (RO) pelaksanaan aksi mitigasi BKSDA Provinsi NTB disajikan pada Gambar 25 dan Tabel 27. Berikut peta arahan pelaksanaan Aksi Mitigasi *Indonesia's FOLU NET SINK 2030* Provinsi NTB berdasarkan BKSDA.



Gambar 25. Peta Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di Provinsi NTB berdasarkan Kawasan Konservasi di luar TN

Tabel 27. Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di Provinsi NTB Berdasarkan Kawasan Konservasi di luar TN dan Tahura

Pengelola	Rencana Operasional				Grand Total
	RO 1	RO 5	RO 8	RO 12	
BKSDA	705,61	6,57	4.787,83	91,04	5.591,04

Keterangan :

- RO 1 : Pencegahan Deforestasi Mineral
- RO 5 : Penerapan Pengayaan Hutan Alam
- RO 8 : Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi
- RO 12 : Pengelolaan Mangrove

3.5.3. Lahan Mineral pada Areal Penggunaan Lain

Aksi mitigasi pada APL di wilayah Provinsi NTB diarahkan pada 5 (lima) RO yang meliputi: Pencegahan Deforestasi Mineral seluas 68.029,00 Ha, Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi seluas 7.693,58 Ha, Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi seluas 28,36 Ha, Perlindungan Areal Konservasi Tinggi seluas 1.694,94 Ha dan Pengelolaan Mangrove seluas 2.254,69

Arahan tersebut terdistribusi dalam luasan yang berbeda-beda mulai dari 11,41 Ha sampai dengan 68.064,88 Ha yang tersebar pada berbagai wilayah baik yang masih memiliki tutupan hutan hingga kawasan mangrove dan Kawasan Ekosistem Esensial. Secara spesifik mengenai arahan dari masing-masing RO dapat dilihat pada Tabel 28.

Tabel 28. Arahan RO pada APL di Provinsi NTB

Rencana Operasional		Luas (Ha)
RO 1	Pencegahan Deforestasi Mineral	68,029.00
RO 7	Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi	7,693.58
RO 8	Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi	28.36
RO 11	Perlindungan Areal Konservasi Tinggi	1,694.94
RO 12	Pengelolaan Mangrove	2,254.69

Sebagai bentuk penjabaran dari RO tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah merancang beberapa program dan kegiatan rinci berdasarkan masing-masing arahan RO yang diharapkan dapat mengoptimalkan pencapaian dari target yang sudah dituangkan tersebut ke dalam matriks Renja dan anggaran seperti yang tertuang dalam tabel pada lampiran.

3.5.4. Perhutanan Sosial

RO mitigasi penurunan emisi karbon juga dilakukan pada berbagai kawasan hutan yang telah mendapat izin pengelolaan perhutanan sosial (PS). Rencana operasional yang dilakukan pada

kawasan dengan perizinan PS adalah di RO 5 (Penerapan Pengayaan HutanAlam), RO 7 (Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi), RO 8 (Peningkatan Cadangan KarbonTanpa Rotasi), dan RO 11 (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi). Berdasarkan matriks pada pengelola di atas dalam hal ini KPH dan Kawasan Konsevasi memperoleh capaian jumlah KPS (Kelompok Perhutanan Sosial) yang paling banyak yaitu pada KPH Toffo Pajo Soromandi dengan jumlah KPS sebanyak 51 kelompok dan jumlah yang paling sedikit yaitu di KPH Ropang dengan jumlah 2 kelompok. Dengan luas kerjasama yang dimiliki setiap KPH berbeda-beda. Secara detail penjabaran dari capaian PS di Provinsi NTB disajikan pada Tabel 29.

Tabel 29. Persentase Capaian PS di Provinsi NTB

No	Balai KPH/Jenis Kerjasama	Jumlah KPS	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Rinjani Barat	16	6.399,82	12,43
2	Pelangan Tastura	33	7.388,77	14,35
3	Rinjani Timur	17	2.306,63	4,48
4	Sejorong Mataiyang	10	2.674,74	5,19
5	Brang Rea Puncak Ngengas	26	5.045,35	9,80
6	Ropang	2	144,00	0,28
7	Batulanteh	10	2.416,34	4,69
8	Orong Telu	4	162,15	0,31
9	Brang Beh	8	273,83	0,53
10	Ampang Plampang	15	1.493,19	2,90
11	Ampang Riwo	36	5.078,09	9,86
12	Toffo Pajo Soromandi	51	4.586,07	8,91
13	Tambora	6	2.556,70	4,97
14	Madapangga Rontu Waworada	18	1.787,16	3,47
15	Maria Donggomasa	39	8.133,18	15,80
16	Kemitraan Konservasi	5	1.042,19	2,02
Total		296	51.488,21	100,00

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan luas capaian PS yang paling tinggi terdapat pada KPH Maria Donggomassa dengan luas sebesar 8.133,18 Ha dan luasan yang paling kecil terdapat pada KPH Ropang dengan luas sebesar 144 Ha. Dengan total luasan capaian KPS sebesar 51.488,21 Ha dan dengan jumlah KPS sebanyak 296 unit.

3.5.5. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan. Pada Provinsi NTB terdapat beberapa jenis penerima izin PBPH (dulunya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)-HA dan IUPHHK-HTI) dan Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan

dan Wisata Alam (IUPJLWA). Untuk data PBPH dapat dilihat pada Tabel 30.

Tabel 30. Daftar PBPH yang memiliki IUPHHK di Provinsi NTB

No	Status PBPH	Nama	Luas (Ha)
1.	Definitif PBPH	PT Agro Wahana Bumi	27,356.41
2.	Definitif PBPH	PT Esa Sampoerna Agro	7,978.55
3.	Definitif PBPH	PT Sadhana Arif Nusa	4,054.87
Total			39,389.83

Berdasarkan data di atas, kawasan PBPH berada di Kabupaten Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. Sehingga diketahui seluruh kawasan PBPH yang ada di Provinsi NTB adalah seluas 39.839,83 Ha. Sedangkan data penerima izin IUPJLWA yang ada di Provinsi NTB dengan total luasan sebesar 1.624,05 Ha disajikan pada Tabel 31.

Tabel 31. Daftar PBPH yang Memiliki IUPJLWA di Provinsi NTB

No	Status PBPH	Nama	Luas (Ha)
1.	IUPJLWA	PT Indonesia Lombok Resort	448.33
2.	IUPJLWA	PT Sarana Bukit Alami	391.41
3.	IUPJLWA	PT Lombok Saka	52.69
4.	IUPJLWA	PT Ocean Blue Resort	117.72
5.	IUPJLWA	PT Nusantara Oriental Permai	45.80
6.	IUPJLWA	PT Eco Solutions Lombok	338.66
7.	IUPJLWA	PT Jayaputra Adhitama	229.44
Total			1,624.05

Selain PBPH yang sudah jelas diberikan izin, terdapat juga beberapa lokasi yang berpotensi untuk menerima perizinan berusaha, sehingga kawasan ini masuk ke dalam status PBPH rekomendasi dan calon rekomendasi. Terdapat 10 perusahaan yang akan menjadi rekomendasi BPPH dengan total kawasan 35.839,01 Ha. Selain itu terdapat juga 3 perusahaan dan 1 kawasan dengan menggunakan nama pribadi sebagai calon rekomendasi PBPH dengan total kawasan 19.236,94 Ha. Adapun data-data tersebut dapat dilihat pada Tabel 32.

Tabel 32. Daftar Rekomendasi PBPH di Provinsi NTB

No	Status PBPH	Nama	Luas (Ha)
1.	Rekomendasi PBPH	PT Cafe Moly International	474.85
2.	Rekomendasi PBPH	PT Capricorn Villa Resor	20.37
3.	Rekomendasi PBPH	PT Belang Avontur Resor	22.15
4.	Rekomendasi PBPH	PT Gili Kenawa Resor	8.95
5.	Rekomendasi PBPH	PT Pesona Alam Gili Petagan	40.20

No	Status PBPH	Nama	Luas (Ha)
6.	Rekomendasi PBPH	PT Sentra Pertanian Sumbawa	8,096.89
7.	Rekomendasi PBPH	PT Bukit Kayangan Tano	70.06
8.	Rekomendasi PBPH	PT Sinar Pertanian Sumbawa	19,614.51
9.	Rekomendasi PBPH	PT Ekosistem Alam Lestari	4,377.95
10.	Rekomendasi PBPH	PT Pesona Komodo Banta	3,113.08
11.	Calon Rekomendasi	M. Firdaus	19.79
12.	Calon Rekomendasi	PT Yamamoto Asri	3,554.98
13.	Calon Rekomendasi	PT Wana Hijau Energi	4,688.49
14.	Calon Rekomendasi	PT Sumbawa Hijau Lestari	10,973.68
Total			55,075.95

3.5.6. RTRW Provinsi NTB

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada RTRW Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional. Struktur ruang yang diatur dalam RTRW adalah mencakup dua hal. Struktur ruang tersebut meliputi sistem perkotaan untuk wilayah provinsi atau kabupaten dan sistem pusat pelayanan untuk wilayah kota. Selain itu, terdapat pengaturan sistem jaringan prasarana wilayah daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota. RTRW Provinsi NTB memiliki peran yang sangat penting dalam optimalisasi kegiatan perencanaan dan penataan ruang untuk pengentasan kemiskinan dan diharapkan menjadi sebuah kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah, sehingga menjadi arahan dan dasar hukum yang jelas bagi RTRW kabupaten/kota dan pelaku pembangunan. Selain itu, RTRW juga menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan-rencana-program pembangunan di Provinsi NTB baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai daya dukung dan daya tampung ruang serta dapat mendorong percepatan perkembangan pembangunan secara tertib, teratur dan terencana.

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi NTB dalam Revisi Perda RTRW Provinsi NTB adalah “Mewujudkan ruang wilayah darat dan laut provinsi yang maju dan lestari melalui pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana guna pengembangan kawasan unggulan agribisnis, pariwisata dan industri yang berdaya saing”. Revisi RTRW Provinsi NTB sudah mengintegrasikan perencanaan ruang darat dan laut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sektor unggulan ekonomi wilayah Provinsi NTB berdasarkan hasil analisis perekonomian dalam Revisi RTRW Provinsi NTB antara lain sektor pertanian, kehutanan, perikanan dengan pertumbuhan rata-rata 4%

setiap tahun. Tipologi Klassen menunjukkan sektor ini adalah sektor maju dan dapat tumbuh dengan pesat. Sektor prospektif dan dapat menjadi sektor basis. Di sektor pertambangan dan penggalan pertumbuhan rata-rata 32% setiap tahun. Sesuai tipologi Klassen, sektor ini termasuk sektor maju namun tertekan/jenuh. Sektor prospektif dan dapat menjadi *prime mover* (penggerak utama). Untuk sektor industri pengolahan pertumbuhan rata-rata 4% setiap tahun. Sektor potensial atau dapat berkembang dengan pesat. Sektorprospektif dan dapat menjadi sektor basis.

Untuk RTRW diwilayah NTB lokasi perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan yang akan diusulkan kembali dalam rangka revisi RTRW Provinsi NTB, untuk pelepasan Kawasan Pelestarian Alam Perairan pada Taman Wisata Alam Gili Ayer, Gili Meno dan Gili Trawangan menjadi bukan Kawasan Hutan atau APL di Kabupaten Lombok Utara dengan luas $\pm 2.954,00$ Hektar. Pelepasan sebagian kawasan hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan Lindung pada Kelompok Hutan Marejabonga dan Gunung Pepe (Register Tanah Kehutanan-RTK 13) untuk *enclave* di Kabupaten Lombok Tengah memiliki luas 118 Hektar.

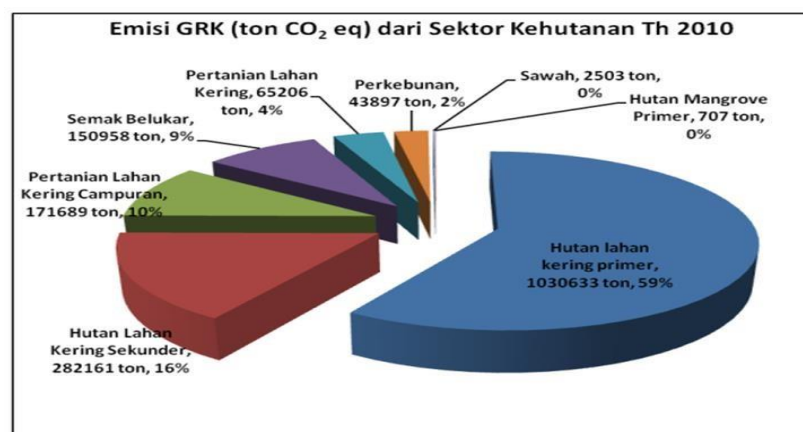
Kabupaten Bima untuk pelepasan seluruh Kawasan Hutan Konservasi pada Kelompok Hutan Kawasan Suaka Alam Danuera (RTK 87) menjadi bukan Kawasan Hutan atau APL dengan luasan $\pm 1.784,38$ Hektar. Pelepasan sebagian Kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Marejabonga dan Gunung Pepe (RTK 13) untuk Pembangunan NTB Halal Industri Park di Kabupaten Lombok Tengah dengan luas $\pm 51,15$ Hektar. Pelepasan sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap pada kelompok Hutan Marejabonga dan Gunung Pepe (RTK13) untuk Pembangunan Pangkalan Kaveleri Kodam IX/Udayana di Lombok NTB, di Kabupaten Lombok Tengah dengan luasan ± 38 Hektar. Perubahan fungsi antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari Hutan Lindung menjadi Hutan Konservasi Tahura Nuraksa pada Kelompok Hutan Gunung Rinjani (RTK 1) di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah memiliki luas $\pm 2.656,80$ Hektar. Untuk perubahan fungsi antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari Hutan Konservasi Tahura Nuraksa menjadi Hutan Lindung pada Kelompok Hutan Gunung Rinjani (RTK 1) di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah dengan luasan $\pm 2.656,80$ Hektar. Sedangkan perubahan dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan Konservasi dari Cagar Alam Toffo Kota Lambu menjadi Taman Wisata Alam (TWA) Toffo Kota Lambu pada Kelompok Hutan Kota Donggomasa (RTK 67) di Kabupaten Bima dengan luasan $\pm 3.333,80$ Hektar.

3.6. Proyeksi Penyerapan Emisi CO₂ Provinsi NTB Tahun 2030

Kehutanan merupakan salah satu sektor yang diharapkan memberikan kontribusi terbesar atas pencapaian target penurunan emisi GRK di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam dokumen ENDC. Untuk mencapai komitmen *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) Indonesia harus secara signifikan mengurangi emisi dari sektor energi yang disertai

dengan usaha mengubah sektor kehutanan dan penggunaan lahan dari sektor pengemisi (*net emitter*) menjadi penyerap (*net sink*). Perhitungan emisi atau penyimpanan (*removals, sequestration*) GRK di sektor kehutanan dapat dihitung dari perubahan biomasa, material organik yang mati dan perubahan karbon tanah pada lahan hutan dan lahan yang dikonversi ke hutan (IPCC Guideline, 2006).

Untuk memproyeksikan penyerapan emisi CO₂ di Provinsi NTB dapat dilakukan dengan menganalisis emisi GRK sektor kehutanan. Perolehan Baseline Emisi GRK untuk sektor Kehutanan di Provinsi NTB dilakukan dengan menghitung perubahan penggunaan lahan (*land use*) dari yang sebelumnya memiliki potensi menyerap CO₂ yang tinggi menjadi lahan yang daya serap CO₂-nya lebih rendah, atau sebaliknya. Hasil laporan RAD-GRK Provinsi NTB (2021) menunjukkan Emisi GRK (ton CO₂ eq) dari Sektor Kehutanan tahun 2010 yaitu sebesar 1.747.754 ton/tahun. Sementara total emisi bersih (net emisi) CO₂ eq adalah sebesar 1.489.255 ton/tahun. Total penyerapan emisi sektor kehutanan di NTB relatif kecil dibandingkan dengan net emisi, yaitu sebesar 258.499 ton/tahun. Angka ini diperoleh berdasarkan perubahan penggunaan lahan dalam zona kawasan hutan (REDD Abacus SP, 2012), yaitu hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan suaka dan wisata, dan hutan penggunaan lain. Jumlah dan sumbangan emisi dari berbagai perubahan penggunaan lahan dapat dijelaskan pada Gambar 26.



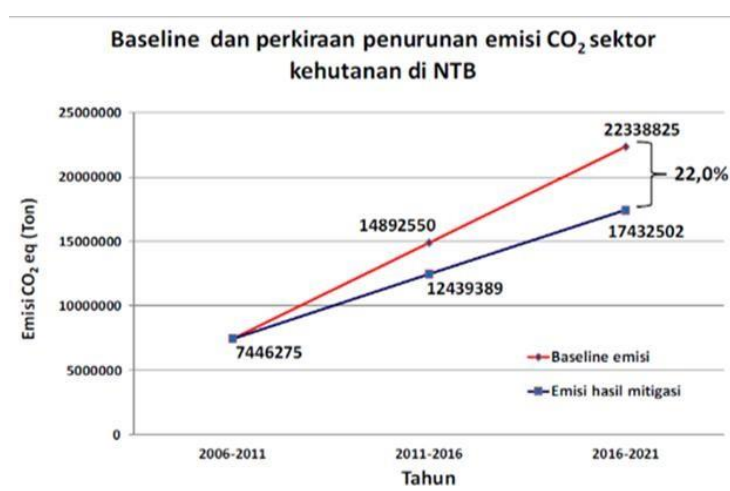
Gambar 26. Emisi GRK dari Sektor Kehutanan Provinsi NTB (2010)

(Sumber : RAD-GRK Provinsi NTB, 2021)

Beberapa faktor penyebab terjadinya emisi pada sektor kehutanan di NTB adalah perubahan penggunaan lahan dari hutan lahan kering primer ke hutan lahan kering sekunder, ke tanah terbuka, ke pertambangan, ke semak belukar dan ke pertanian lahan kering campuran. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat seperti perambahan/budidaya liar untuk tanaman semusim (contoh: padi, jagung, pisang, dll), penebangan hutan secara liar (*illegal logging*), perambahan kawasan hutan, kebakaran hutan dan penggembalaan liar, pembukaan lahan dengan cara

membakar dan perubahan pola tanam tradisional dari agroforestri/tumpangsari menjadi monokultur jagung.

Provinsi NTB memperkirakan penurunan Emisi CO₂ akibat perubahan penggunaan lahan tersebut pada kisaran tahun 2006-2011 sebesar 7.446.275 ton. Kemudian hasil proyeksi tahun 2011-2016 menunjukkan penurunan emisi Co₂ yaitu sebesar 14.892.550 ton. *Baseline net emission* kumulatif sektor kehutanan di NTB dapat dijelaskan pada Gambar 9. Berikut ini.



Sumber : RAD-GRK Provinsi NTB , 2021

Gambar 27. Baseline Perkiraan Penurunan Emisi CO₂ Sektor Kehutanan di NTB

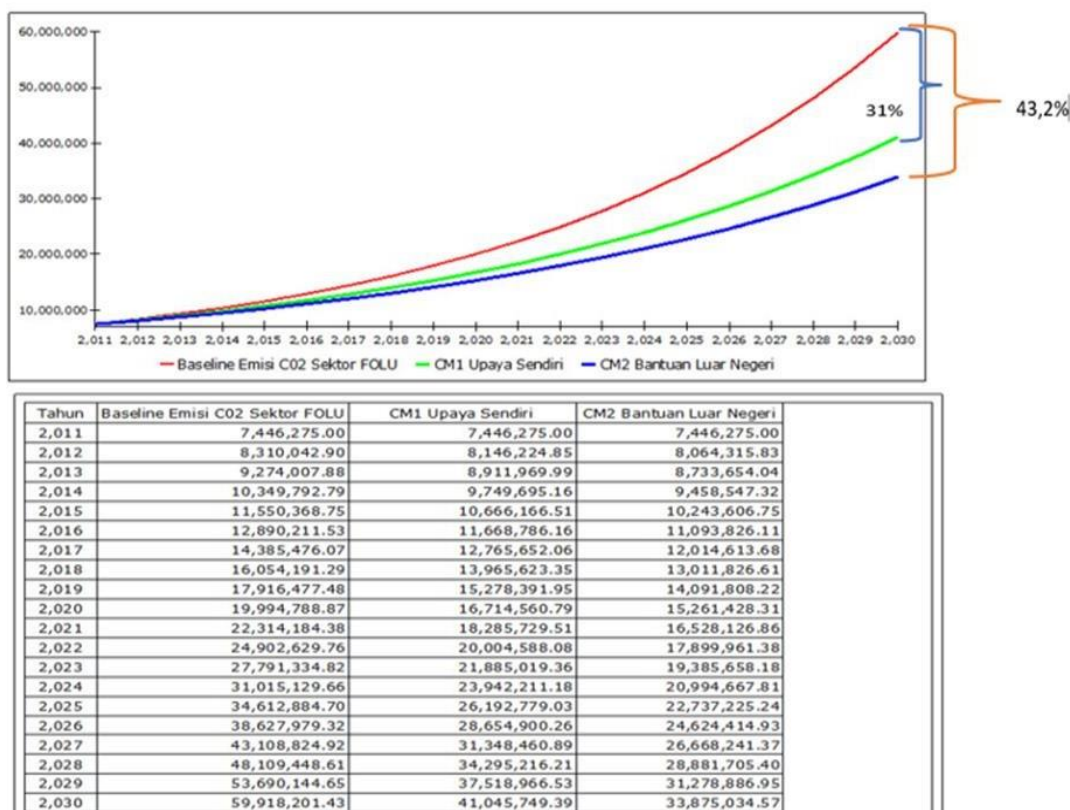
Laporan RAD-GRK Provinsi NTB (2021) menjelaskan, jika penurunan emisi masing-masing ditargetkan 30% pada perubahan penggunaan lahan ke original *land use* ke hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, lahan kering campuran, semak belukar, pertanian lahan kering dan perkebunan, maka diperkirakan akan terjadi pengurangan emisi sebesar 490.632,3 ton CO₂/thn. Jika angka ini diproyeksi selama 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua, maka akan terjadi penurunan emisi sebesar 22% (4.906.323 ton) dari prediksi total emisi tahun 2021, yaitu dari 22.338.825 ton (prediksi emisi tanpa upaya mitigasi) menjadi 17.432.502 ton CO₂ eq (jika dilakukan upaya mitigasi).

Berdasarkan *baseline* tersebut dapat disimpulkan, terjadi laju pertumbuhan emisi CO₂ sebesar 11,6% pada tahun 2016-2021, dengan total 22.314.184 ton. Dengan menggunakan *baseline* 11,6% dapat diproyeksikan jika tidak ada aksi mitigasi, maka penyerapan emisi CO₂ sektor kehutanan di NTB pada tahun 2030 meningkat menjadi 59.918,01 ton.

Dalam rangka pencapaian target penurunan emisi CO₂ di tahun 2030, Provinsi NTB harus merencanakan aksi yang dilakukan baik dengan upaya sendiri (31%) ataupun dengan bantuan dari luar negeri (43%) untuk mencapai *net sink* di tahun 2030. Laju emisi yang harus diturunkan oleh pemerintah NTB pada sektor kehutanan yaitu dari 11,6% menjadi 9,4% dengan upaya sendiri, sedangkan jika ada bantuan dari luar negeri, maka target penurunan emisi dari 11,6% menjadi 8,3%

untuk mencapai *net sink* 43,2%. Proyeksi penurunan Emisi CO₂ Sektor Kehutanan di NTB dapat dijelaskan pada gambar berikut.

Proyeksi penyerapan Emisi Co2 sampai dengan tahun 2030



Gambar 28. Proyeksi Penyerapan Emisi CO₂ Sektor Kehutanan sampai dengan Tahun 2030

Untuk mengurangi emisi GRK di sektor kehutanan diperlukan upaya untuk mengurangi net emisi dan memperbesar sequestrasi. Aksi mitigasi diharapkan dapat mengembalikan fungsi lahan ke fungsi aslinya (terutama mengembalikan fungsi lahan ke hutan lahan kering primer) akan berpotensi men-squaster karbon dalam tubuh tanaman/tanah dalam jumlah yang sangat signifikan.

Dalam Peta Arahan Rencana Operasional Folu Provinsi NTB, dapat dilihat RO terluas terletak pada RO 1, RO 8 dan RO11, di mana aksi pada RO tersebut berfokus pada kegiatan pencegahan karhutla, reforestrasi dan rehabilitasi lahan. RHL dengan prioritas pada kawasan hutan yang menjadi sumber bencana bagi perlindungan daerah di bawahnya. Rehabilitasi dilakukan untuk meningkatkan kemampuan lahan dalam perlindungan tata air dan pencegahan bencana banjir, longsor dan kekeringan. Berdasarkan klasifikasi kemiringan untuk Pulau Lombok berkisar antara 2-15% sehingga dapat dikatakan untuk Pulau Lombok memiliki kemiringan tanah yang rendah. Sedangkan Pulau Sumbawa memiliki klasifikasi kemiringan sebesar 15-40% hal ini menandakan di Pulau Sumbawa cenderung lebih rentan terhadap erosi tanah. Sehingga air hujan dapat dengan mudah mengalir secara cepat di lereng yang curam, membawa tanah dan hara tanah (*nutrient*) yang diperlukan oleh tanaman. Kemiringan lahan dapat memengaruhi jenis tanaman yang dapat tumbuh dengan baik. Lahan dengan

kemiringan rendah lebih cocok untuk pertanian sementara lahan dengan kemiringan tinggi lebih baik untuk konservasi hutan atau penggunaan lain yang meminimalkan terjadinya erosi. Hal ini berdampak penting pada perencanaan dan pelaksanaan RHL. Selain itu wilayah dengan kemiringan tinggi lebih rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor. Oleh karena itu, rehabilitasi lahan harus memperhitungkan strategi pengelolaan risiko bencana alam. Pola rehabilitasi yang dikembangkan akan memperhitungkan kondisi kawasan. Pada kawasan dengan kelerengan tinggi (>40%) tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya, sedangkan pada kawasan dengan kelerengan rendah (<40%) dapat dilakukan dengan kombinasi budidaya tanaman produktif.

Berdasarkan Rencana Umum (RU)-RHL BPDASHL Dodokan Moyosari (2022), sasaran rencana RHL di NTB dilaksanakan pada 3 ekosistem yaitu darat, mangrove dan sempadan pantai yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan. Adapun kegiatan yang akan dilakukan meliputi RHL, Penghijauan, KBR (Kebun Bibit Rakyat), BiPro (Bibit Produktif), sehingga untuk lima tahun yang akan datang total luasan yang menjadi target RHL pada 3 (tiga) ekosistem yaitu 17.523 Ha. Pada tahun 2024 akan diinisiasi dengan fokus pada pengembalian ekosistem untuk seluas 3.325 Ha yang terdampak. Langkah-langkah awal akan mencakup identifikasi penyebab kerusakan, penanaman jenis tanaman endemik, dan penerapan praktik konservasi tanah. Pada tahun 2025, proyek rehabilitasi akan diperluas dengan target luasan 3.550 Ha, mencakup area yang lebih luas untuk meningkatkan dampak positif terhadap keberlanjutan ekosistem. Penekanan khusus akan diberikan pada pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat lokal dalam penanaman kembali dan pemeliharaan area yang direhabilitasi. Tahun 2026 akan menjadi periode lanjutan dari upaya rehabilitasi, dengan fokus pada luasan 3.720 Ha. Proyek ini akan memanfaatkan pengalaman dan pembelajaran dari tahun sebelumnya untuk meningkatkan efisiensi penanaman dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Untuk tahun 2027, rencana RHL akan mencapai puncaknya dengan target luasan 4.090 Ha. Fase ini akan menitikberatkan pada pemantauan yang lebih ketat, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pengembangan model pengelolaan berkelanjutan untuk mendukung ekosistem yang pulih dan kokoh. Dalam penetapan lokasi RHL difokuskan pada kabupaten yang memiliki tingkat kekritisan lahan tertinggi yang ada di Pulau Lombok yaitu Kabupaten Lombok Barat berkisar 34,954 Ha dan Kabupaten Lombok Timur berkisar 23,056 Ha. Sedangkan untuk Pulau Sumbawa nilai kekritisan lahan tertinggi pada Kabupaten Sumbawa dengan nilai 158,522 Ha dan Kabupaten Bima dengan luas 128,546 Ha (BPDASHL Dodokan Moyosari, 2023).

Luasan RHL yang tertuang dalam dokumen RU-RHL lebih kecil dari yang ditargetkan dalam dokumen Renja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi NTB. Penyusunan rencana aksi pada dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan provinsi NTB dalam mengatasi tingkat kekritisan lahan yang mencapai luasan 490,314 ha (Ditjen PDASRH, 2022). Dengan progresifnya peningkatan luasan RHL dari tahun ke tahun, diharapkan rencana ini dapat memberikan kontribusi

nyata terhadap pelestarian lingkungan di NTB dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan.

Aksi yang direncanakan dalam dokumen Renja Sub Nasional *Indonesia's FOLU NetSink 2030* Provinsi NTB dapat dikelompokkan menjadi menjadi 4 yaitu aksi pengurangan emisi, aksi mempertahankan serapan, aksi meningkatkan serapan dan penguatan kelembagaan dengan ruang lingkup sebagai berikut :

1. Aksi pengurangan emisi merupakan upaya untuk mengurangi jumlah emisi GRK yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Beberapa bentuk aksi pengurangan emisi yang dapat dilakukan antara lain:
 - a. Menggunakan energi terbarukan dalam sistem tata guna lahan: Menggantikan sumber energi fosil dengan energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air.
 - b. Efisiensi energi melalui penggunaan teknologi yang lebih efisien dalam penggunaan energi peralatan produksi, dan kendaraan yang lebih efisien bahan bakar dapat mengurangi emisi GRK.
 - c. Meningkatkan aktifitas rehabilitasi dan restorasi kawasan dengan pola agrokompleks untuk meningkatkan produktifitas lahan dan optimalisasi serapan karbon lahan
2. Aksi mempertahankan serapan adalah upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekosistem dalam menyerap karbon dioksida. Beberapa bentuk aksi mempertahankan serapan antara lain:
 - a. Penghutan kembali: Melakukan penghutan kembali daerah yang tegakannya telah ditebang atau terdegradasi dapat meningkatkan serapan karbon dioksida oleh pohon-pohon yang tumbuh.
 - b. Konservasi hutan: Melindungi hutan-hutan yang masih ada dan mencegah deforestasi dapat mempertahankan serapan karbon dioksida oleh pohon-pohon yang ada di dalamnya.
 - c. Praktik pertanian berkelanjutan: Menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan seperti penggunaan pupuk organik dan pengelolaan air yang efisien dapat mempertahankan serapan karbon dioksida oleh tanah pertanian.
3. Aksi meningkatkan serapan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan ekosistem dalam menyerap karbon dioksida. Beberapa contoh aksi meningkatkan serapan antara lain:
 - a. Restorasi lahan basah: Memulihkan lahan basah yang telah terdegradasi atau dikeringkan dapat meningkatkan serapan karbon dioksida oleh tanah dan tumbuhan yang hidup di dalamnya.
 - b. Penanaman pohon: Melakukan penanaman pohon secara masal dapat meningkatkan serapan karbon dioksida oleh pohon-pohon yang baru ditanam.
 - c. Pengelolaan lahan yang berkelanjutan: Mengelola lahan dengan baik seperti menghindari penggunaan bahan kimia yang berbahaya dan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan

dapat meningkatkan serapan karbon dioksida oleh tanah.

4. Penguatan kelembagaan adalah upaya untuk memperkuat lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan dan mitigasi perubahan iklim. Beberapa contoh penguatan kelembagaan antara lain:
 - a. Pembentukan kelembagaan khusus: Membentuk lembaga atau badan yang khusus mengurus isu perubahan iklim dapat meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam mengambil keputusan terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
 - b. Pelibatan masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan perubahan iklim dapat meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap isu ini.
 - c. Pelatihan dan peningkatan kapasitas: Meningkatkan kapasitas lembaga dan individu yang terlibat dalam pengelolaan perubahan iklim melalui pelatihan dan pendidikan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

3.7. Strategi dalam Mendukung Implementasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*

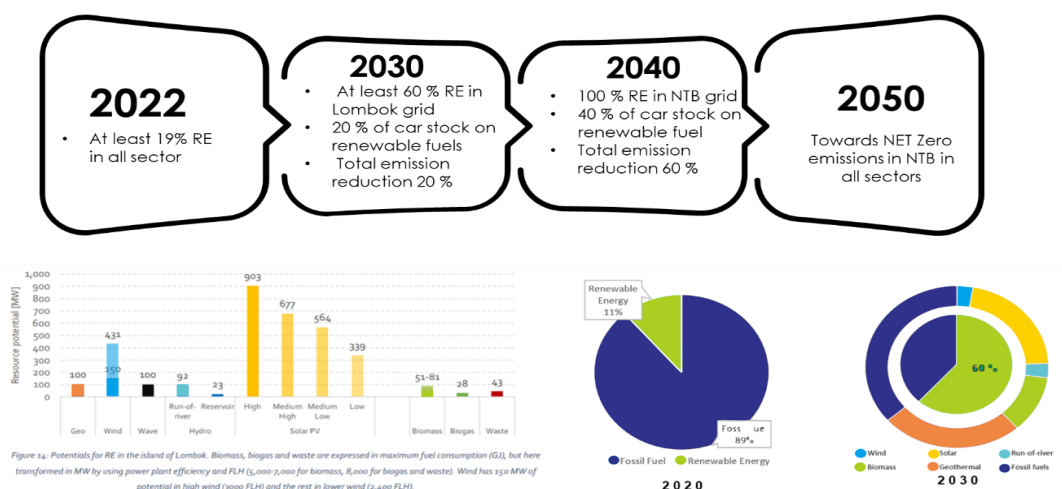
3.7.1. Provinsi NTB Menuju *Net Zero Emission*

Pemerintah telah menargetkan *net zero emission* (NZE) atau emisi nol bersih pada tahun 2060 mendatang dan memberikan target kepada Pemerintah Provinsi NTB untuk menahan laju deforestasi agar bisa menekan laju emisi sebanyak 2 juta ton ekuivalen dan dari degradasi hutan sebesar 1 juta ton ekuivalen. Meskipun target yang diberikan cukup besar, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan NZE tercapai sepuluh tahun lebih cepat yaitu pada tahun 2050. Tiga sektor terbesar yang menyebabkan emisi karbon di Provinsi NTB adalah: 1) sektor energi yaitu masih banyaknya industri yang menggunakan batubara dan minyak bumi sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Itulah yang menyebabkan karbondioksida, 2) sektor kehutanan akibat pembalakan dan perambahan hutan sehingga melepaskan karbondioksida ke udara, dan 3) sektor pengelolaan sampah karena melepaskan gas metan. Untuk itu, beberapa program yang dilakukan untuk mengejar penurunan emisi karbon adalah :

3.7.1.1. Energi Terbarukan (*Renewable Energy*)

Pemanfaatan potensi energi terbarukan untuk menggantikan energi fosil dengan target capaian pada tahun 2030 adalah sebesar 60% penggunaan energi terbarukan. Untuk mencapai target ini telah dilakukan beberapa kerjasama, diantaranya adalah dengan: a) PLN melalui pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), pengembangan EBT dengan menggunakan biomassa untuk pengganti batubara (*Co-Firing*) di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), b) Perusahaan Swasta dan BUMD untuk mengolah sampah pertanian berupa tongkol jagung menjadi bahan baku

pembuatan *Compressed Biogas* (CBG), c) Pembangunan pembangkit listrik tenaga sinar matahari (PLTS) pada area ruang publik dan Perusahaan, dan d) Pembangunan pembangkit listrik minihidro.



Gambar 29. Program *Renewable Energy* Provinsi NTB

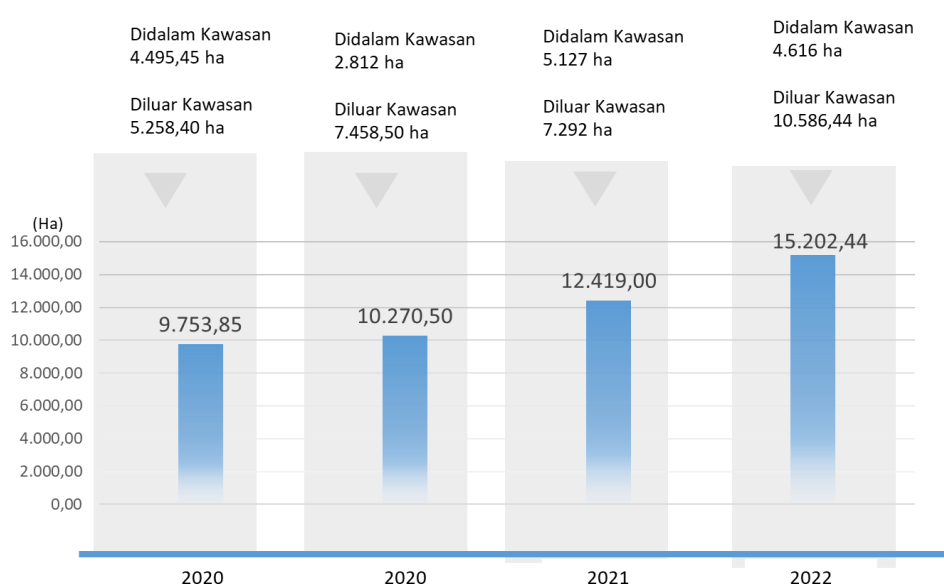
3.7.1.2. NTB Hijau

Program NTB Hijau bertujuan untuk : a). mengembangkan partisipasi masyarakat dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan melalui peningkatan kesadaran, peningkatan fungsi kawasan hutan dan lingkungan terutama dalam perlindungan sumber air dan kawasan rawan bencana, mengembangkan kawasan budidaya kehutanan sebagai support terhadap pembangunan sektor lain yang menjadi unggulan daerah, b). meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan melalui pengelolaan hutan dengan mempertimbangkan status, fungsi dan kondisi wilayah, serta mengembangkan usaha masyarakat berbasis kehutanan, dan c). mengembangkan kebijakan yang lebih berorientasi pada perlindungan ekosistem wilayah dan kebutuhan masyarakat terhadap hasil hutan yang terencana dan terarah yang berorientasi jangka panjang.

Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah : a) Menurunkan luas lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan melalui rehabilitasi dan pencegahan perluasan lahan kritis baru, b) Meningkatkan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan perundangan melalui pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Tanaman Industri (HTI), c) Meningkatkan penyediaan kayu bakar untuk memenuhi kebutuhan energi alternatif untuk mendukung usaha omprongan tembakau, kebutuhan industri kecil dan kebutuhan masyarakat, d) Meningkatkan produksi hasil hutan kayu dan HHBK secara lestari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri yang berasal dari pembangunan HTI, e) Menurunkan kerawanan bencana kawasan sekitar hutan karena pengelolaan hutan yang tepat, f) Menurunkan gangguan keamanan hutan terutama *illegal logging* dan perambahan hutan melalui kerjasama dengan aparat penegak hukum dan pemerintah kabupaten/kota, dan g) Menyiapkan pembangunan kehutanan

sebagai dukungan bagi program pembangunan sektor lain sebagai unggulan daerah.

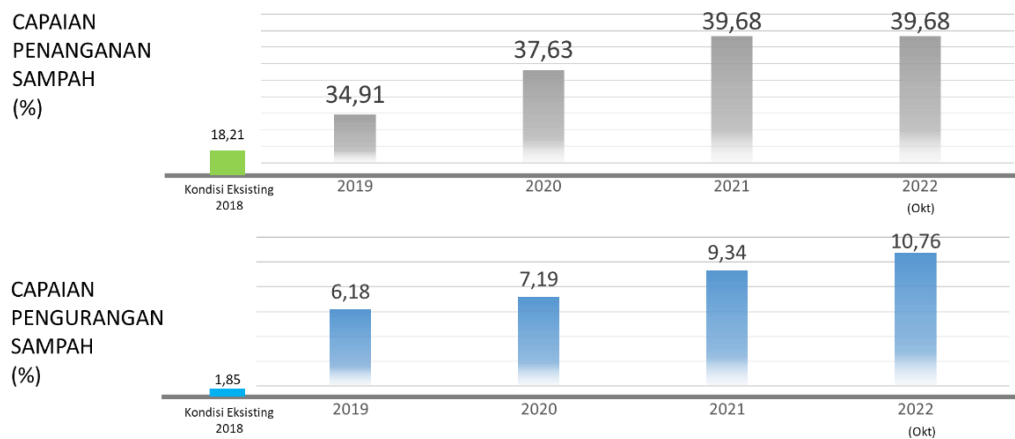
Program NTB Hijau dilaksanakan melalui kegiatan reboisasi dan konservasi. Program NTB Hijau sampai dengan tahun 2022 dilakukan melalui: a) Kerjasama 486 desa yang setara dengan 97.200 Ha. Pembangunan agroforestri didukung 486 anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), b) Konservasi dilakukan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) $\pm$ 15.000 Ha, c) Konservasi dilakukan melalui anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN)/KLHK $\pm$ 20.000 Ha, d) Konservasi yang dilakukan oleh pemegang Persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPPKH) $\pm$ 10.000 Ha, dan e) Konservasi yang dilakukan ormas $\pm$ 10.658 Ha, dengan tingkat capaian adalah sebagai berikut:



Gambar 30. Capaian Program NTB Hijau sampai Tahun 2022

3.7.1.3. NTB Zero Waste;

Sasaran yang ingin dicapai adalah pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sebesar 70% melalui: a) pengelolaan sampah berbasis masyarakat, b.) pengembangan kerjasama pengelolaan sampah, c) penerapan *Extended Producer Responsibility* (EPR), dan d) industrialisasi pengolahan dan daur ulang sampah NTB.



Gambar 31. Capaian Program NTB Zero Waste sampai Tahun 2022

3.7.2. Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 Provinsi NTB

Dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi aksi mitigasi emisi GRK dalam kegiatan dikelompokkan menjadi 4 (empat) bidang. Rencana operasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* serta strategi-strategi pencapaian target penurunan emisi GRK *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* telah dijabarkan pada masing-masing bidang tersebut. Penjabaran strategi penurunan emisi GRK telah disertai dengan penjabaran target, program, rencana operasi dan kegiatan-kegiatan turunannya.

Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari mempunyai 3 (tiga) strategi, yaitu:

1. Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Pengendalian Pengelolaan Kawasan Hutan
2. Strategi Pengelolaan PS
3. Strategi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi

Bidang II Peningkatan Cadangan Karbon memiliki 3 (tiga) strategi yaitu:

1. Strategi RHL
2. Strategi Mangrove
3. Strategi Restorasi dan Replika Ekosistem (RRE), Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ekoriparian

Bidang III Konservasi Keanekaragaman Hayati memiliki 4 (empat) strategi yaitu:

1. Strategi Kawasan dan Peningkatan Populasi Spesies
2. Strategi Intensifikasi Jasa Lingkungan, Taman Hutan Raya dan KHDTK
3. Strategi *High Conservation Value Forest* (HCVF) dan Kelola Fragmentasi Habitat
4. Strategi kemitraan konservasi

Bidang IV Instrumen dan Informasi memiliki 3 (tiga) strategi yaitu:

1. Strategi Sosialisasi dan Komunikasi Publik
2. Strategi *Law Enforcement*
3. Strategi Evaluasi Kebijakan RRE dan Standarisasi

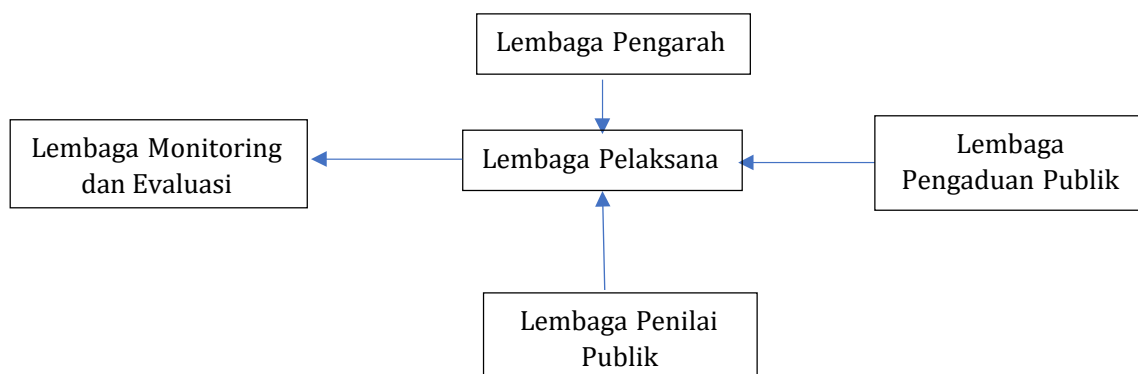
Strategi-strategi pencapaian target penurunan emisi GRK *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* tersebut di atas kemudian dijabarkan menjadi 9 (sembilan) Rencana Operasional (RO) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* yang meliputi:

1. RO 01 Pencegahan Deforestasi Lahan Mineral seluas 165.144,20 Ha
2. RO 03 Pencegahan Deforestasi Konsesi seluas 2.396,50 Ha
3. RO 04 Pembangunan Hutan Tanaman seluas 1.606,14 Ha
4. RO 05 Pengayaan Hutan Alam seluas 6.550,01 Ha
5. RO 06 Penerapan RIL-C seluas 17.422,62 Ha
6. RO 07 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi Rehabilitasi Dengan Rotasi seluas 80.344,17 Ha
7. RO 08 Peningkatan Cadangan Karbon Non Rotasi Rehabilitasi Non Rotasi seluas 111.740,69 Ha
8. RO 11 Perlindungan Area Konservasi Tinggi seluas 381.748,21 Ha
9. RO 12 Pengelolaan Mangrove seluas 3.088,12 Ha

Renja *FOLU Net Sink 2023 – 2030* Provinsi NTB merupakan Renja Sub Nasional yang mendukung tercapainya target penurunan emisi GRK *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*, sehingga penyusunan Renja aksi mitigasi emisi GRK harus sesuai dengan Renja *FOLU Net Sink 2023 – 2030* Nasional dan sesuai dengan potensi, kapasitas dan RPJMD Provinsi NTB.

BAB IV. KELEMBAGAAN PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Kelembagaan pelaksanaan program dan kegiatan ini harus diuraikan secara jelas karena sebagai upaya agar skenario Rencana Aksi Mitigasi dapat dilaksanakan dan sekaligus menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Mitigasi (Bab III) di tingkat tapak. Kelembagaan yang dihadirkan di sini adalah kelembagaan yang ideal dan lengkap (Gambar 32) yang terdiri dari (i) lembaga pengarah, (ii) lembaga pelaksana, (iii) lembaga monitoring dan evaluasi, (iv) lembaga penilai publik, dan (iv) lembaga pengaduan publik. Sistem kelembagaan ini telah sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yang dikemukakan oleh UNDP dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum.



Gambar 32. Lembaga pelaksana pelaksanaan Rencana Aksi Mitigasi Provinsi NTB

Gambar 32 menunjukkan bahwa ada 3 (tiga) lembaga yang termasuk lembaga internal sebagai pelaksana rencana aksi mitigasi, yaitu lembaga pengarah, lembaga pelaksana, dan lembaga monitoring dan evaluasi. Dua (2) lembaga lain adalah lembaga eksternal dan bersifat independen, yaitu lembaga penilai publik, dan lembaga pengaduan publik. Kedua lembaga publik tersebut dipisahkan dan tidak dijadikan satu dengan tujuan untuk mengantisipasi jika laporan publik yang masuk dan diserahkan kepada lembaga penilai publik, tapi lembaga penilai tersebut tidak ditindaklanjuti, sehingga lembaga pengaduan dapat melakukan verifikasi baik kepada lembaga penilai maupun kepada publik melalui sosial media yang ada.

4.1. Analisis Stakeholder

Analisis stakeholder merupakan proses mengidentifikasi semua pihak stakeholder yang memiliki peran langsung atau tidak langsung terhadap tindakan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan suatu program. Tujuannya agar ada kerja sama baik antara tim pelaksana maupun stakeholder untuk menjamin keberhasilan program tersebut. Penyusunan program Renja aksi dan

mitigasi di wilayah Provinsi NTB disusun secara aktif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan khususnya lini pemerintahan dari lintas sektoral maupun UPT KLHK termasuk juga pemerintah Provinsi, Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)- Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Setelah dilakukan identifikasi semua stakeholder yang terkait dengan Renja, maka perlu dilakukan stratifikasi atas stakeholder tersebut ke dalam bidang-bidang *INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030*, yaitu (1) penurunan deforestasi dan degradasi hutan, (2) pengelolaan hutan lestari, (3) peningkatan cadangan karbon, (4) pengelolaan konservasi, dan (5) pengelolaan instrumen dan informasi sebagaimana tercantum pada Tabel 33.

Tabel 33. Peran Para Pihak dalam Implementasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di Provinsi NTB

No	Pemangku Kepentingan	Peran
1.	PEMPROV NTB	1. Berkontribusi pada penyiapan kebijakan di tingkat daerah 2. Melakukan asistensi dan pendampingan terkait dengan penguatan tata kelola hutan di daerah 3. Melakukan koordinasi pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup di tingkat pusat dan kabupaten
2.	UPT KLHK	1. Mengembangkan instrumen dan sistem perencanaan dalam mendukung pembangunan di tingkat daerah 2. Memberikan dukungan program dan kegiatan yang <i>inline</i> dengan kebutuhan daerah 3. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program
3.	Pemerintah Kabupaten dan desa	1. Bersama-sama Pemerintah Provinsi dan UPT memastikan proses tata kelola sumberdaya hutan dan lingkungan di wilayahnya 2. Mengalokasikan program dan kegiatan yang mendukung kegiatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan lingkungan
4.	PBPH	1. Sebagai Pelaksana Program dan Kegiatan dari Pemerintah 2. Memberikan dukungan pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya hutan yg lestari di sekitar wilayah kelolanya
5.	UNIVERSITAS	1. Melakukan kajian terkait inovasi teknologi dan tata kelola dalam pengelolaan sumber daya hutan 2. Bersama sama pemerintah melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas para pihak dalam pengelolaan sumber daya hutan 3. Melakukan diseminasi dan informasi hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan
6.	NGO	1. Memafsilitasi dan berkoordinasi dalam pembangunan kehutanan di tingkat daerah 2. Memberikan asistensi dan pendampingan terkait upaya peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam 3. Memberikan informasi terkait dengan proses dan hasil pendampingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan

No	Pemangku Kepentingan	Peran
7.	BPDLH	1. Memberikan dukungan dan asistensi terkait proses pendanaan dalam pengelolaan sumberdaya hutan 2. Mendorong upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui skema insentif berbasis kinerja dalam mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan lestari
8.	Mitra Strategis (Filantropi)	1. Bersama-sama pemerintah dan masyarakat dalam melakukan upaya tata kelola kehutanan di tingkat provinsi, kabupaten dan desa 2. Mendorong upaya inovasi dalam penguatan tata kelola kehutanan yang berkelanjutan

4.2. Berbagi Peran, Sinergisitas dan Penguatan Hubungan Antar Pemangku Kepentingan

Peran masing-masing pihak dalam penggunaan sumberdaya hutan menimbulkan interdependensi antara satu sama lain (Puspitojati *et al*, 2012; Wulandari & Sumarti, 2011; Winara & Mukhtar, 2011; Sudirman, 2016). Hal tersebut memberikan penegasan akan pentingnya upaya pengelolaan kolaboratif dalam pengelolaan sumberdaya hutan, sebagaimana ditegaskan oleh *International Union for Conservation of Nature-IUCN* (2003) pentingnya perubahan paradigma pengelolaan hutan yang melibatkan multi pihak yang berkepentingan dan mengakomodasi kepentingan masyarakat setempat. Pengaturan kelembagaan sebagai mekanisme interaksi antar aktor (Schmid AA, 2004; Kasper W, 1998; Ostrom E, 2005), dapat menjadi salah satu instrumen untuk memberikan keadilan manfaat serta mewujudkan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya hutan.

Analisis peran pemangku kepentingan yang digunakan dalam dokumen ini mengadopsi model analisis yang dikembangkan (Reed *et al.*, 2009). Analisis pemangku kepentingan diterapkan untuk mengungkapkan kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan, memahami sinergi dan konflik antar pemangku kepentingan, dan memahami permintaan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan. Reed *et al* (2009) menyatakan bahwa analisis pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan cara: (1) mengidentifikasi pemangku kepentingan dan kepentingannya, (2) mengelompokkan dan mengkategorikan pemangku kepentingan, (3) menganalisis hubungan antar pemangku kepentingan tersebut.

Dalam upaya mendorong sinergisme dan optimalisasi pencapaian *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030, pemerintah Provinsi NTB telah melakukan pemetaan para pihak yang mencakup peran dan tanggung jawab masing masing dalam mendukung berbagai agenda kerja FOLU, pemetaan tersebut telah didistribusikan dalam 5 (lima) bidang pengembangan *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 34.

Tabel 34. Pemetaan Peran Parapihak dalam Mendukung Implementasi *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di Provinsi NTB

BIDANG		RO		LOKASI	FUNGSI	PARA PIHAK	Pemerintah Daerah	Pemerintah Pusat	Pendukung
I	Pengelolaan Hutan lestari	01	Pencegahan Deforestasi Lahan Mineral	TN Tambora, KPH Toffo Pajo Soromandi, Tahura Nuraksa, KPH Tambora, KPH Brang Beh, APL, KPH Batu Lanteh, KPH Ampang Riwo, KPH Ampang Plampang, BKSDA, KPH Brang Rea Puncak Ngengas, KPH Madapangga Rompu Waworada, KPH Maria Donggomasa, KPH Orong Telu,KPH Pelangan Tastura, KPH Rinjani Barat, KPH Rinjani Timur, KPH Ropang, KPH Sejongong Mataiyang, TN Gunung Rinjani.	HL, HP, HPT, TAHURA, TN, TWA, APL	DLHK, Pemerintah Setempat, DISTANBUN, LITBANG, NGO Terkait, PU, BPDAS, BKSDA, KLHK, TN, BPD LH, PBPH, TN. Universitas	DLHK, KPH, DISTANBUN, LITBANG, DISPERINDAG, DISNAKERJA, PU,DKP	BPDAS, BKSDA, KLHK, BPD LH, PBPH, TN. Universitas,	NGO, Mitra
		03	Pencegahan Deforestasi Konsesi	KPH Tambora	HP, HPT,	Pemerintah Setempat,KLHK, DLHK, NGO Terkait, Mitra KLHK/DLHK, PBPH,TN, BPD LH, PBPH, TN, Universitas	DLHK, KPH, DISTANBUN, LITBANG, DISPERINDAG, DISNAKERJA, PU	BPDAS, BKSDA, KLHK, BPD LH, PBPH, TN. Universitas,	NGO, Mitra
		05	Pengayaan Hutan Alam	TN Tambora, KPH Batu Lanteh, KPH Ampang Riwo, KPH Ampang Plampang, BKSDA, KPH Madapangga Rompu Waworada, KPH MariaDonggomasa, KPH Pelangan Tastura, KPH Rinjani Barat, KPH Rinjani Timur, KPH Tambora, KPH Brang Beh, KPH Toffo Pajo Soromandi.	HL, HP, HPT, TN, TWA	Pemerintah Setempat,BPDAS, KLHK, PBPH, DLHK, NGO Terkait, Mitra KLHK/DLH K, BPDAS, Disnakerja, LITBANG, TN, BPD LH, PBPH, TN. Universitas	DLHK, KPH, DISTANBUN, LITBANG, DISPERINDAG, DISNAKERJA, PU	BPDAS, BKSDA, KLHK, BPD LH, PBPH, TN. Universitas,	NGO, Mitra

BIDANG		RO		LOKASI	FUNGSI	PARA PIHAK	Pemerintah Daerah	Pemerintah Pusat	Pendukung
		06	Penerapan RIL-C	KPH Batu Lanteh, KPH Rinjani Barat, KPH Rinjani Timur, KPH Tambora	HP,HPT	Pemerintah Setempat,KLHK, DLHK, PBPH, Disnakerja, LITBANG, PBPH, DISTANBUN, NGO Terkait, PU, BPDAS,TN, BPD LH, PBPH, TN. Universitas	DLHK, KPH, DISTANBUN, LITBANG, DISPERINDAG, DISNAKERJA, PU	BPDAS, BKSDA, KLHK, BPD LH, PBPH, TN. Universitas,	NGO, Mitra
II	Peningkatan Cadangan Karbon	07	Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi Rehabilitasi dengan Rotasi	KPH Batu Lanteh, APL, KPH Ampang Riwo, KPH Ampang Plampang, KPH Brang Rea Puncak Ngengas, KPH Madapangga Rompu Waworada, KPH Maria Donggomasa, KPH Orong Telu,KPH Pelangan Tastura, KPH Rinjani Barat, KPH Rinjani Timur, KPH Sejong Mataiyang, KPH Tambora, KPH Toffo Pajo Soromandi	HP, HPT, APL	DLHK, Pemerintah Setempat, BPDAS, PBPH, KLHK, NGO Terkait, DISTANBUN, LITBANG, PU, Mitra KLHK/DLHK, TN, BPD LH, PBPH, TN. Universitas	DLHK, KPH, DISTANBUN, LITBANG, DISPERINDAG, DISNAKERJA, PU	BPDAS, BKSDA, KLHK, BPD LH, PBPH, TN. Universitas,	NGO, Mitra
		08	Peningkatan Cadangan Karbon Non Rotasi Rehabilitasi Non Rotasi	KPH Brang Beh, KPH Toffo Pajo Soromandi, APL, KPH Batu Lanteh, Tahura Nuraksa, TN Tambora, KPH Ampang Riwo, KPH Ampang Plampang,BKSDA, KPH Brang Rea Puncak Ngengas, KPH Madapangga Rompu Waworada, KPH Maria Donggomasa, KPH Pelangan Tastura, KPH Rinjani Barat, KPH Rinjani Timur, KPH Ropang, KPH Tambora.	HL, HP, HPT, TAHUR A, CA, TN, TWA, APL	DLHK, Pemerintah Setempat, BPDAS, PBPH, KLHK, NGO Terkait, Mitra KLHK/DLHK, TN, BPD LH, PBPH, TN. Universitas	DLHK, KPH, DISTANBUN, LITBANG, DISPERINDAG, DISNAKERJA, PU	BPDAS, BKSDA, KLHK, BPD LH, PBPH, TN. Universitas,	NGO, Mitra
		12	Pengelolaan Mangrove	KPH Batu Lanteh, APL, KPH Ampang Plampang, BKSDA, KPH Brangrea Puncak Ngengas, KPH Maria Donggomasa, KPH	HL, HP, HPT, CA,TWA ,APL	DLHK, Dinas Kelautan & Perikanan, Pemerintah Setempat, NGO Terkait, BKSDA ,	DLHK, KPH, DISTANBUN, LITBANG, DISPERINDAG, DISNAKERJA, PU	BPDAS, BKSDA, KLHK, BPD LH, PBPH, TN. Universitas,	NGO, Mitra

BIDANG		RO		LOKASI	FUNGSI	PARA PIHAK	Pemerintah Daerah	Pemerintah Pusat	Pendukung
				Pelangan Tastura.		TN,BPDLH, PBPH, TN. Universitas			
III	Konservasi Keanekaragaman Hayati	01	Pencegahan Deforestasi Lahan Mineral	TN Tambora, KPH Toffo Pajo Soromandi, Tahura Nuraksa, KPH Tambora, KPH Brang Beh, APL, KPH Batu Lanteh, KPH Ampang Riwo, KPH Ampang Plampang, BKSDA, KPH Brang Rea Puncak Ngengas, KPH Madapangga Rompu Waworada, KPH Maria Donggomasa, KPH Orong Telu, KPH Pelangan Tastura, KPH Rinjani Barat, KPH Rinjani Timur, KPH Ropang, KPH Sejongong Mataiyang, TN Gunung Rinjani.	HL, HP, HPT, TAHUR A, TN, TWA, APL	DLHK, Pemerintah Setempat, DISTANBUN, LITBANG, NGO Terkait, PU, BPDAS, BKSDA, KLHK, TN, BPDLH, PBPH, TN. Universitas	DLHK, KPH, DISTANBUN, LITBANG, DISPERINDAG, DISNAKERJA, PU	BPDAS, BKSDA, KLHK, BPDLH, PBPH, TN. Universitas,	NGO, Mitra
		05	Pengayaan Hutan Alam	TN Tambora, KPH Batu Lanteh, KPH Ampang Riwo, KPH Ampang Plampang, BKSDA, KPH Madapangga Rompu Waworada, KPH Maria Donggomasa, KPH Pelangan Tastura, KPH Rinjani Barat, KPH Rinjani Timur, KPH Tambora, KPH Brang Beh, KPH Toffo Pajo Soromandi.	HL, HP, HPT, TN, TWA	Pemerintah Setempat, BPDAS, KLHK, PBPH, DLHK, NGO Terkait, Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, Disnakerja, LITBANG, TN, BPDLH, PBPH, TN. Universitas	DLHK, KPH, DISTANBUN, LITBANG, DISPERINDAG, DISNAKERJA, PU	BPDAS, BKSDA, KLHK, BPDLH, PBPH, TN. Universitas,	NGO, Mitra
		11	Perlindungan Area Konservasi Tinggi	KPH Batu Lanteh, APL, KPH Ampang Riwo, KPH Ampang Plampang, KPH Brang Rea Puncak Ngengas, KPH Madapangga Rompu Waworada, KPH Maria Donggomasa, KPH Orong Telu, KPH Pelangan Tastura, KPH Rinjani Barat, KPH Rinjani Timur, KPH Sejongong Mataiyang, KPH Tambora,	HL, HP, HPT, APL	Pemerintah Setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO Terkait, Mitra KLHK/DLHK, DISPERINDAG, LITBANG, BPDASPU, DISTANBUN, TN, Universitas	DLHK, KPH, DISTANBUN, LITBANG, DISPERINDAG, DISNAKERJA, PU	BPDAS, BKSDA, KLHK, BPDLH, PBPH, TN. Universitas,	NGO, Mitra

BIDANG	RO	LOKASI	FUNGSI	PARA PIHAK	Pemerintah Daerah	Pemerintah Pusat	Pendukung
IV	Instrumen dan Informasi	04 Pembangu nan Hutan Tanaman	KPH Batu Lanteh, KPH Pelangan Tastura, KPH Rinjani Timur.	HP	Pemerintah Setempat, KLHK, DLHK, NGO Terkait, Mitra KLHK/DLHK, PBPH, DISPERINDAG, DISNAKERJA, LITBANG, BPD LH, PBPH, TN. BPDAS, TN, Universitas	DLHK, KPH, DISTANBUN, LITBANG, DISPERINDAG, DISNAKERJA, PU BPDAS, BKSDA, KLHK, BPD LH, PBPH, TN. Universitas,	NGO, Mitra

Tabel 34 memberikan informasi bahwa distribusi peran para pihak secara umum dapat dipetakan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang selama ini dijalankan di tingkat daerah, sehingga di harapkan dapat berkontribusi dan memberikan peran yang optimal dalam mendorong implementasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* beberapa uraian terkait dengan implementasi peran tersebut sudah dijelaskan pada Tabel 33 di atas.

4.3. Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia

Meskipun komitmen dan peran masing masing aktor telah dipetakan, masih terdapat beberapa kendala dalam optimalisasi implementasinya di lapangan, beberapa kendala tersebut diantaranya terkait dengan keberlanjutan proses kolaborasi, kepastian anggaran dalam mengawal pelaksanaan kegiatan, serta cenderung bias sektor akibat adanya intervensi lain. Dengan demikian dibutuhkan formulasi kebijakan dalam rangka penguatan sistem kelembagaan yang kuat yang mampu mendorong stabilitas pelaksanaan kegiatan melalui peningkatan *co-ownership*, *co-responsibility*, *co-operation* dari masing masing pihak (Gambar 33).

Mayers (2005) mengungkapkan dengan karakteristik yang demikian, pilihan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan peran pemangku kepentingan tersebut yaitu dengan mendorong keterlibatan, membangun kapasitas dan mengamankan kepentingan.



Gambar 33. Ilustrasi Strategi Penguatan Peran Para Pihak dalam Implementasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*

Strategi ini sejalan langkah-langkah yang dikembangkan oleh Suporahardjo (2005) dalam membangun strategi pencapaian kolaborasi yang efektif, dengan uraian sebagai berikut :

1. Kolaborasi dapat berjalan dengan sukses bila berhasil membangun "*Common Ground*" (pandangan yang sama); kemitraan akan sukses jika memberikan penekanan pada kepentingan bersama atau menemukan cara menjembatani kecocokan kepentingan yang masih berbeda.
2. Pentingnya menciptakan kesempatan baru untuk berinteraksi.
3. Pentingnya melibatkan stakeholder kedalam proses interaksi yang intensif, bukan hanya pada tataran produk akhir, agar keputusan yang dibuat dapat menjadi efektif dan mewakili seluruh kepentingan stakeholder.
4. Pentingnya mengatasi permasalahan dengan menggunakan cara-cara baru dan kreatif yang didasarkan pada positifisme dalam mempertimbangkan jalan keluar dari suatu problem.
5. Pentingnya meningkatkan kepekaan terhadap tanggung jawab dan komitmen dari para stakeholder.
6. Inti dari kemitraan yang kolaboratif adalah hubungan antara individu, bukan antara organisasi, sehingga disimpulkan bahwa kemitraan orang-orang yang bergabung berdasarkan hubungan.
7. Pendekatan kolaboratif lebih ditekankan pada upaya-upaya pengabdian, energik secara individual dengan pendekatan pro aktif dan berani memulai suatu hal yang baru.
8. Saling berintrospeksi diri untuk menyadari segala kekurangan yang dimiliki, sehingga terciptarasa saling menghargai dan membutuhkan di antara para aktor.

Dalam perspektif teoritis, formulasi strategi tersebut dapat dipandang sebagai proses yang menghasilkan dan menguji konseptualisasi-konseptualisasi alternatif atas suatu kondisi masalah. perumusan masalah meliputi empat tahapan yang saling berhubungan, yaitu: mengenali masalah, meneliti masalah, mendefinisikan masalah, dan menspesifikasikan masalah.

Oleh karena itu, dalam kerangka mendorong percepatan implementasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* perlu dilakukan pendekatan yang secara komprehensif mampu menggerakkan sumberdaya secara simultan dan terintegrasi dengan komponen pembangunan lainnya. Dalam hal ini salah satu pendekatan yang dapat digunakan yaitu pendekatan kelembagaan.

Peters (2000) menjelaskan ada empat pendekatan yang biasa digunakan dalam memahami kelembagaan. Keempat pendekatan tersebut ialah: pendekatan normatif, pilihan rasional (*rational choice*), sejarah, dan empiris. Pendekatan normatif melihat institusi dari tiga aspek yaitu nilai yang dianut, budaya yang dikembangkan dan proses bagaimana budaya tersebut dibuat dan dipertahankan. Sedangkan pendekatan pilihan rasional mendefinisikan institusi sebagai sekumpulan aturan dan insentif. Anggota dari suatu institusi berlaku sebagai respon terhadap aturan dan insentif ini. Namun demikian, pada dasarnya individu-individu ini sudah memiliki seperangkat preferensi yang tidak dapat diubah oleh keterlibatannya dalam sebuah institusi.

Pendekatan sejarah (*historical institutions*) berpendapat bahwa "*the policy and structural choices made at the inception of the institution will have a persistent influence over its behavior for the remainder of its existence*" atau pilihan kebijakan dan struktur yang dibuat pada awal dari suatu institusi akan memiliki pengaruh yang terus menerus terhadap perilaku selama institusi tersebut ada (Steinmo, Thelen and Longstreth, 1992 dalam Peters, 2000)ⁱ. Ide dari model ketergantungan (*path dependency*) merupakan sentral dari teori pendekatan sejarah ini.

Pendekatan empiris (*empirical institutionalism*) mendefinisikan institusi sebagai sebuah formal struktur dari pemerintahan. Pendekatan ini mengkaji apakah institusi membuat perubahan dalam melakukan pilihan kebijakan atau stabilitas politik. Pendekatan ini memfokuskan pada perbedaan antara struktur presidential atau parlemen.

Peranan kelembagaan sangat penting dalam mengatur interdependensi antar manusia terhadap sesuatu, kondisi atau situasi, melalui inovasi hak pemilikan (*property right*), batas yurisdiksi (*jurisdiction boundary*), dan aturan representasi (*rules of representation*). Institusi selalu disertai sanksi-sanksi (formal-informal) yang disepakati dan penegakannya.

BAB V. PENDANAAN KEGIATAN

Target Renja, program serta kegiatan yang telah disusun berdasarkan kajian Renja RKPD dan instansi Provinsi NTB dengan indikator yang terdiri dari strategi, kawasan, luasan, tujuan program, program, kegiatan rencana operasional serta perkiraan anggaran untuk periode tahun 2024-2030. Pertimbangan penyusunan anggaran untuk setiap aksi ditentukan berdasarkan pendekatan luasan dan aktivitas mitigasi. Anggaran tersebut disesuaikan dengan petunjuk dan arahan pelaksanaan kegiatan dan program yang dilaksanakan di tingkat tapak sehingga dilakukan perubahan sesuai peta arahan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi NTB. Sumber pendanaan kegiatan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di Provinsi NTB akan dibahas berkaitan dengan (1) Rencana dan Kebutuhan Anggaran, (2) Sumber dan Sistem Pendanaan, dan (3) Skema Pendanaan Proyek yang Sedang Dikembangkan sebagai Bentuk Kerjasama Pemerintah.

5.1. Rencana Kebutuhan Anggaran

Rincian Umum *Person in Charge* (PIC) dan Total Anggaran Rencana Operasi pada setiap Unit Pengelolaan di Provinsi NTB dapat dijelaskan pada Tabel 35.

Tabel 35. Rincian Umum *Person in Charge* (PIC) dan Total Anggaran Rencana Operasional pada Setiap Unit Pengelolaan di Provinsi NTB

No	Pengelola	Rencana Operasional (RO)	PIC	Total	Grand Total (Rp. x 1.000.000,-)
1	KPH Ampang Plampang	RO 1	DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, DISTANBUN , LITBANG, NGO terkait, PU, BPDAS, Universitas, PBPH	352.645	1.050.037
		RO 5	DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, NGO terkait, BPDAS, Universitas, PBPH	4.697	
		RO 7	DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, BPDAS, Universitas, PBPH	245.000	
		RO 8	DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, BPDAS, Universitas, PBPH	338.240	
		RO 11	KLHK, DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, BPDAS, NGO terkait , Universitas, PBPH	6.940	
		RO 12	DLHK, KPH Ampang Plampang Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerinth setempat, NGO terkait, Universitas, PBPH	102.515	

No	Pengelola	Rencana Operasional (RO)	PIC	Total	Grand Total (Rp. x 1.000.000,-)
2	KPH Ampang Riwo	RO 1	DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG, NGO terkait, PU, BPDAS, Universitas, PBPH	388.689	664.226
		RO 5	DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat, NGO terkait, BPDAS, Universitas, PBPH	4.207	
		RO 7	DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat, BPDAS, Universitas, PBPH	166.250	
		RO 8	KLHK, DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat, BPDAS, NGO terkait, PBPH, Universitas	98.000	
		RO 11	KLHK, DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat, BPDAS, NGO terkait, Universitas, PBPH	7.080	
3	KPH Batulante	RO 1	DLHK, KPH Batulante, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG, NGO terkait, PU, BPDAS, Universitas, PBPH	16.992	316.319
		RO 4	KPH Batulante, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH, Disperindag, Disnakerja, LITBANG, Universitas, PBPH	5.355	
		RO 5	KPH Batulante, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, Universitas, PBPH	3.276	
		RO 6	KPH Batulante, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH, Disnakerja, LITBANG, PBPH, Universitas	5.775	
		RO 7	KPH Batulante, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH, Universitas	42.000	
		RO 8	KLHK, DLHK, KPH Batulante, Pemerintah setempat, BPDAS, NGO terkait, PBPH	23.3576	
		RO11	KLHK, DLHK, KPH Batulante, Pemerintah setempat, BPDAS, NGO terkait, Universitas, PBPH	5.145	
		RO 12	DLHK, KPH Batulante, Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerintah setempat, NGO terkait	4.200	
4	KPH Brang Beh	RO 11	KLHK, DLHK, KPH Batulante, Pemerintah setempat, BPDAS, NGO terkait, Universitas, PBPH	3.673	3.673
5	KPH Brang Rea Puncak Ngengas	RO 1	DLHK, KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG, NGO terkait, PU, BPDAS, Universitas, PBPH	27.611	

No	Pengelola	Rencana Operasional (RO)	PIC	Total	Grand Total (Rp. x 1.000.000,-)
	KPH Brang Rea Puncak Ngengas	RO 7	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH, Universitas	11.914	86.355
		RO 8	KLHK, DLHK, KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, BPDAS, NGO terkait, PBPH, Universitas	8.260	
		RO 11	KLHK, DLHK, KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, BPDAS, NGO terkait, Universitas, PBPH	31.325	
		RO 12	DLHK, KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerintah setempat, NGO terkait, Universitas, PBPH	7.245	
6	KPH Madapangga Rompu Waworada	RO 1	DLHK, KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, DISTANBUN , LITBANG, NGO terkait, PU, BPDAS, Universitas, PBPH	641.720	1.152.331
		RO 5	DLHK, KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, NGO terkait, BPDAS, Universitas, PBPH	46.672	
		RO 7	DLHK, KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, BPDAS, PBPH	262.500	
		RO 8	DLHK, KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, BPDAS, PBPH, Universitas	130.200	
		RO 11	KLHK, DLHK, KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, BPDAS, NGO terkait , Universitas, PBPH	71.239	
7	KPH Maria Donggomasa	RO 1	DLHK, KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, DISTANBUN , LITBANG, NGO Terkait, PU, BPDAS, Universitas, PBPH	102.175	699.499
		RO 5	DLHK, KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, NGO terkait, BPDAS	2.247	
		RO 7	DLHK, KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, DISTANBUN , LITBANG, NGO terkait, PU, BPDAS, Universitas, PBPH	245.000	
		RO 8	DLHK, KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, BPDAS, PBPH, Universitas	338.240	
		RO 11	KLHK, DLHK, KPH Maria Donggomasa Pemerintah setempat, BPDAS, NGO terkait , Universitas, PBPH	7.560	

No	Pengelola	Rencana Operasional (RO)	PIC	Total	Grand Total (Rp. x 1.000.000,-)
		RO 12	DLHK, KPH Maria Donggomasa, Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerintah setempat, NGO terkait	4.277	
8	KPH Sejong Mataiyang	RO 1	DLHK, KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG, NGO terkait, PU, BPDAS, Universitas, PBPH	51.275	62.685
		RO 7	DLHK, KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG, NGO terkait, PU, BPDAS, Universitas, PBPH	3.570	
		RO 11	KLHK, DLHK, KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat, BPDAS, NGO terkait, Universitas, PBPH	7.840	
9	KPH Orong Telu	RO 1	DLHK, KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG, NGO terkait, PU, BPDAS, Universitas, PBPH, Universitas	63.630	298.690
		RO 7	DLHK, KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG, NGO Terkait, PU, BPDAS, Universitas, PBPH	226.450	
		RO 11	KLHK, DLHK, KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, BPDAS, NGO terkait, Universitas, PBPH	8.610	
10	KPH Pelangan Tastura	RO 1	DLHK, KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG, NGO Terkait, PU, BPDAS, Universitas, PBPH, Universitas	51.355	621.043
		RO 4	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH, Disperindag, Disnakerja, LITBANG, Universitas, PBPH	3.710	
		RO 5	DLHK, KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, NGO terkait, BPDAS, Universitas, PBPH	4.228	
		RO 7	DLHK, KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG, NGO terkait, PU, BPDAS	226.450	
		RO 8	DLHK, KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, BPDAS, PBPH	322.000	
		RO 11	KLHK, DLHK, KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, BPDAS, NGO terkait	4.865	
		RO 12	DLHK, KPH Pelangan Tastura, Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerintah setempat, NGO terkait	8.435	

No	Pengelola	Rencana Operasional (RO)	PIC	Total	Grand Total (Rp. x 1.000.000,-)
11	KPH Rinjani Barat	RO 1	DLHK, KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, DISTANBUN , LITBANG, NGO terkait, PU, BPDAS	5.390	77.015
		RO 5	DLHK, KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, NGO terkait, BPDAS	870	
		RO 6	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH, Disnakerja, LITBANG, PBPH	3.210	
		RO 7	DLHK, KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, DISTANBUN , LITBANG, NGO terkait, PU, BPDAS	23.375	
		RO 8	DLHK, KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, BPDAS, PBPH, Universitas	37.800	
		RO 11	KLHK, DLHK, KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, BPDAS, NGO terkait, Universitas, PBPH	6.370	
12	KPH Rinjani Timur	RO 1	DLHK, KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, DISTANBUN , LITBANG, NGO Terkait, PU, BPDAS, Universitas, PBPH	14.400	85.495
		RO 4	DLHK, KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, NGO terkait, BPDAS, Universitas, PBPH	1.365	
		RO 5	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH, Disnakerja, LITBANG, PBPH, Universitas	2.660	
		RO 6	DLHK, KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, DISTANBUN , LITBANG, NGO terkait, PU, BPDAS, Universitas, PBPH	5.600	
		RO 7	DLHK, KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, BPDAS, PBPH, Universitas	49.500	
		RO 8	KLHK, DLHK, KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, BPDAS, NGO terkait, Universitas, PBPH	5.600	
		RO 11	DLHK, KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, DISTANBUN , LITBANG, NGO terkait, PU, BPDAS, Universitas, PBPH	6.370	
13	KPH Ropang	RO 1	DLHK, KPH Ropang, Pemerintah setempat, DISTANBUN , LITBANG, NGO terkait, PU, BPDAS, Universitas, PBPH	62.780	79.720
		RO 8	KLHK, DLHK, KPH Ropang, Pemerintah setempat, BPDAS, NGO terkait	7.000	

No	Pengelola	Rencana Operasional (RO)	PIC	Total	Grand Total (Rp. x 1.000.000,-)
		RO 11	DLHK, KPH Ropang , Pemerintah setempat, DISTANBUN , LITBANG, NGO terkait, PU, BPDAS, Universitas, PBPH	9.940	
14	KPH Tambora	RO 1	DLHK, KPH Tambora, Pemerintah setempat, DISTANBUN , LITBANG, NGO terkait, PU, BPDAS, Universitas, PBPH	71.235	859.615
		RO 3	KPH Tambora, pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH, Universitas	57.575	
		RO 5	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH, Disnakerja, LITBANG, PBPH, Universitas	5.005	
		RO 6	DLHK, KPH Tambora, Pemerintah setempat, DISTANBUN , LITBANG, NGO terkait, PU, BPDAS, Universitas, PBPH	7.630	
		RO 7	DLHK, KPH Tambora, Pemerintah setempat, BPDAS, PBPH, Universitas	332.500	
		RO 8	KLHK, DLHK, KPH Tambora Pemerintah setempat, BPDAS, NGO terkait, Universitas, PBPH	383.600	
		RO 11	DLHK, KPH Tambora, Pemerintah setempat, DISTANBUN , LITBANG, NGO terkait, PU, BPDAS, Universitas, PBPH	2.070	
15	KPH Toffo Pajo Soromandi	RO 1	DLHK, KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, DISTANBUN , LITBANG, NGO terkait, PU, BPDAS, Universitas, PBPH	77.979	271.585
		RO 5	DLHK, KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, NGO terkait, BPDAS, Universitas, PBPH	1.190	
		RO 7	DLHK, KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, BPDAS, PBPH	175.000	
		RO 8	DLHK, KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, BPDAS, PBPH, Universitas	9.856	
		RO 11	KLHK, DLHK, KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, BPDAS, NGO terkait	7.560	
16	BKSDA	RO 1	BKSDA, Pemerintah setempat, BPDAS, KLHK, DLHK, DISTANBUN, LITBANG, Universitas, PBPH	21.630	163.350
		RO 5	BKSDA, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS,	1.960	

No	Pengelola	Rencana Operasional (RO)	PIC	Total	Grand Total (Rp. x 1.000.000,-)
			Universitas, PBPH		
		RO 8	BKSDA, Pemerintah Setempat, NGO terkait, BPDAS, KLHK, PBPH terkait	132.000	
		RO 12	DLHK, BKSDA Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerinth setempat, NGO terkait, Universitas, PBPH	7.760	
17	Tahura Nuraksa	RO 1	TAHURA NURAKSA, Pemerintah setempat, NGO terkait/Mitra KLHK	2.216	85.376
		RO 8	TAHURA NURAKSA, Pemerintah Setempat, NGO terkait/Mitra KLHK, BPDAS, KLHK, PBPH terkait, PBPH, Universitas	83.160	
18	TN Gunung Rinjani	RO 1	TN Gunung Rinjani, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG, BPDAS, DLHK, Universitas, PBPH	16.495	16.495
19	TN Tambora	RO 1	TN Tambora, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG, BPDAS, DLHK, Universitas, PBPH	413.595	1.028.560
		RO 5	TN Tambora, Pemerintah setempat, BPDAS, KLHK, PBPH terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGo terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	113.155	
		RO 8	TN Tambora Pemerintah setempat, NGO terkait, BPDAS, KLHK, PBPH terkait, Universitas	501.810	
20	APL	RO 1	KLHK, Dinas Terkait, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK/Mitra KLHK , Universitas, PBPH	176.690	441.858
		RO 7	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH, Universitas	175.000	
		RO 8	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH, Universitas	3.088	
		RO 11	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Disperindag, LITBANG, Universitas, PBPH	10.080	
		RO 12	DLHK, Dinas Terkait Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerintah setempat, NGO terkait, Universitas, PBPH	77.000	
Grand Total					8.063.927

Secara umum anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pencapaian FOLU *Net Sink* di Provinsi NTB mencapai Rp. **8.063.927.000.000,- (Delapan Triliun Enam Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah)**. Alokasi tersebut terdistribusi dalam berbagai program dan kegiatan yang diarahkan pada upaya peningkatan pencapaian target ENDC Indonesia dari sektor hutan dan lahan. Namun pendanaan tersebut belum mencakup kegiatan Pengelolaan Intrumen dan Sistem Informasi pada Bidang V yang diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp. **500 Miliar Rupiah**. Dengan demikian kebutuhan total dana rencana aksi mitigasi Provinsi NTB sebesar Rp. **8.563.927.000.000,- (Delapan Triliun Lima Puluh Enam Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah)**. Berikut secara detail dijabarkan rencana anggaran Provinsi NTB.

Tabel 36. Rincian Anggaran Setiap RO Provinsi NTB

No	Rencana Operasional	Luas (ha)	Rencana Anggaran (Rp x 1.000.000)	Sumber Pembiayaan
1	RO 01. Pencegahan Deforestasi Lahan Mineral	165.144,20	2.558.502	APBN/APBD/Donor
2	RO 03. Pencegahan Deforestasi Konsesi	2.396,50	57.575	APBN/APBD/Donor
3	RO 04. Pembangunan Hutan Tanaman	1.606,14	10.430	APBN/APBD/Donor
4	RO 05. Pengayaan Hutan Alam	6.550,01	190.167	APBN/APBD/Donor
5	RO 06. Penerapan RIL	17.422,62	22.215	APBN/APBD/Donor
6	RO 07. Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi	80.344,17	2.184.509	APBN/APBD/Donor
7	RO 08. Peningkatan Cadangan Karbon Non Rotasi	111.740,69	2.632.430	APBN/APBD/Donor
8	RO 11. Perlindungan Area Konservasi Tinggi	381.748,21	196.667	APBN/APBD/Donor
9	RO 12. Pengelolaan Mangrove	3,088,12	211.432	APBN/APBD/Donor
Grand Total		770,040.67	8.063.927	

Pada Tabel 37 menunjukkan bahwa perlu dilakukannya pemisahan anggaran dalam pelaksanaan Renja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* pada setiap provinsi, mengingat sumber pendanaan kegiatan aksi penurunan emisi GRK FOLU *Net Sink 2030* Provinsi NTB dapat dibiayai oleh APBN, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH), kemitraan pemerintah pusat dan daerah, swasta, hibah Luar Negeri/Dalam Negeri, serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundangan pendanaan yang berlaku.

Tabel 37. Rencana Pembiayaan Aksi Mitigasi Provinsi NTB

No	Aarahan Aksi Mitigasi Berdasarkan Bidang	Total Biaya (Rp x 1.000.000)	Rencana Alokasi Biaya Indonesia FOLU Net Sink 2030		
			APBN (%)	APBD (%)	BPD LH (%)
1	Bidang I. Pengelolaan Hutan Lestari	2.838.889	30	40	30
2	Bidang II. Peningkatan Cadangan Karbon	4.816.939	50	30	20
3	Bidang III. Konservasi Keanekaragaman Hayati	408.099	25	25	50
4	Bidang V. Pengelolaan Instrumen dan Sistem Informasi	500.000	50	25	25
Grand Total		8.563.927			

5.2. Pembiayaan yang Teridentifikasi Untuk Pencapaian Rencana Operasional

Pendanaan dapat diupayakan secara lokal atau luar negeri dan dapat dilakukan melalui sejumlah mekanisme seperti pembayaran berbasis hasil, insentif dan manfaat non-karbon. Perjanjian Paris menetapkan bahwa negara-negara peserta harus mengakui pentingnya sumberdaya keuangan yang memadai dan dapat diprediksi untuk melaksanakan semua program yang diprioritaskan. Bentuk-bentuk pendanaan dapat dilihat berikut:

5.1.1. Upfront payment

Jenis pendanaan ini ditujukan untuk kegiatan persiapan seperti persiapan instrumen kebijakan, peningkatan kapasitas dan lainnya. Kegiatan yang menggunakan jenis pembiayaan ini telah ada dan terus berlanjut. Subsidi juga berasal dari sumber bilateral dan multilateral.

5.2.1. Result-based payment

Jenis pendanaan ini ditujukan untuk kegiatan yang telah terbukti dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Pembiayaan jenis ini belum diterapkan di Indonesia karena belum diterapkan peraturan turunan dari undang-undang tentang nilai ekonomi karbon dan dilaksanakan pada tahap implementasi. Sedangkan sumber dana yang dimanfaatkan dalam aksi mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Provinsi NTB meliputi:

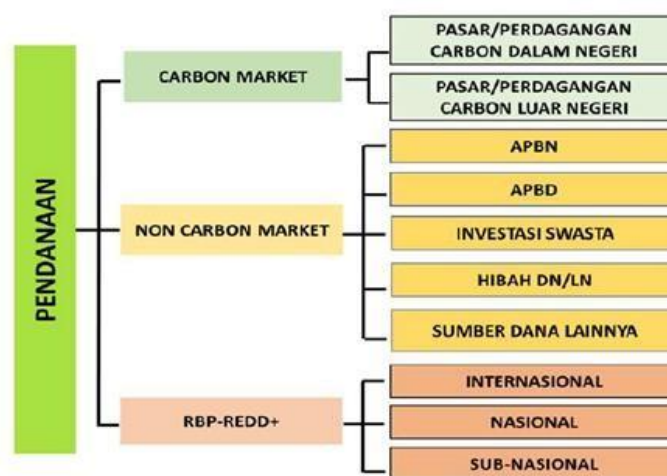
- 1) Pendanaan dalam negeri yang terdiri dari APBD dan APBN. Pada level sub-nasional dapat berasal dari BPD LH yang spesifik mengelola dana lingkungan hidup.
- 2) Dana Publik yang merujuk pada dana yang ada di pemerintah.
- 3) *Green Climate Fund* (GCF) merupakan sumber dana iklim bersumber dari *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). GCF memiliki ketersediaan dana sekitar USD 10,3 milyar sehingga menjadikan kelembagaan sumber dana perubahan iklim terkuat di dunia.

- 4) *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPC) yang merupakan sumber dana lintas donor yang dikelola oleh *World Bank*. Tujuan dari pendanaan ini untuk membantu peningkatan kapasitas Indonesia dalam menyusun strategi nasional berbasis REDD+.
- 5) *Bio Carbon Fund* (BCF) merulan sumber dana untuk Inisiatif Bentang Hutan Berkelanjutan (*Initiative Sustainable Forest Landscapes*, ISFL) yang bersifat multilateral dalam upaya promosi dan penghargaan bagi negara yang mampu menurunkan emisi GRK dalam upaya penggunaan sumberdaya alam secara cerdas.
- 6) Dana publik atau swasta yang dikelola *World Bank* untuk biaya dana percontohan konversi karbon di hutan dan agro ekosistem.
- 7) *Bilateral cooperation* merupakan bagian pendanaan melalui kerjasama dua negara.
- 8) Pendanaan pihak swasta melalaui dana CSR maupun *voluntary*.

5.3. Rencana Sumber Pendanaan yang Dapat Diakses

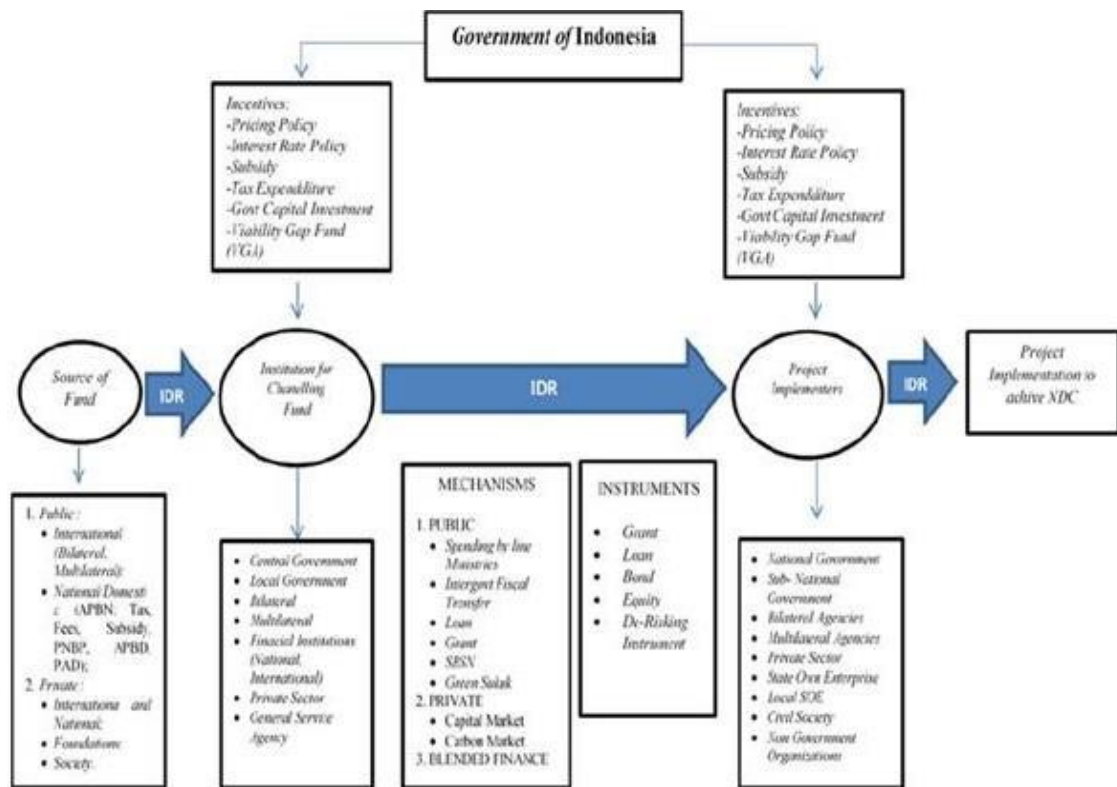
Pendanaan dari APBN/APBD menggambarkan komitmen pemerintah pusat/daerah terhadap aksi mitigasi perubahan iklim, sedangkan pendanaan internasional dapat berupa bilateral maupun multilateral. Pembiayaan bilateral pada umumnya berupa hibah yang disalurkan melalui lembaga pembangunan bilateral atau multilateral, sedangkan pembiayaan multilateral yang dapat berupa hibah, pembayaran berbasis hasil (*Result Based Payment*-RBP REDD+), maupun bentuk pendanaan lainnya.

Sumber dan sistem pendanaan untuk mendukung kegiatan aksi mitigasi emisi GRK FOLU *Net Sink* Provinsi NTB tahun 2024-2030 mengikuti Skema Sumber Pendanaan Menuju Pencapaian FOLU *Net Sink* 2030 disajikan pada Gambar 34, dan sistem serta mekanisme pendanaan untuk mendukung pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang telah dikembangkan Pemerintah Indonesia seperti yang disajikan pada Gambar 35 berikut ini.



Gambar 34. Skema Pendanaan Menuju Pencapaian FOLU *Net Sink* 2030

(Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022)



Gambar 35. Sistem Pendanaan untuk Mendukung Implementasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim

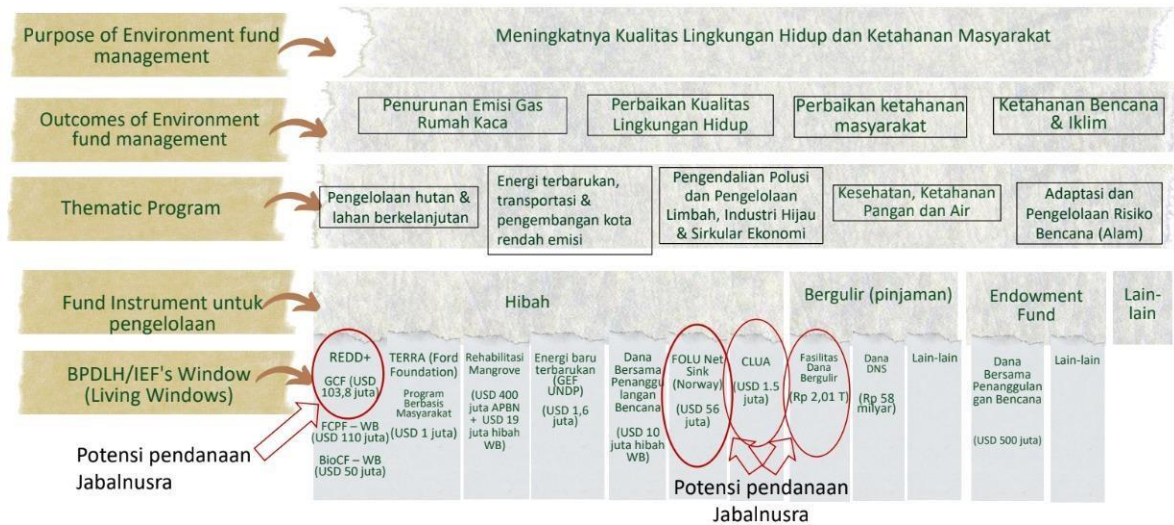
Kegiatan aksi mitigasi emisi GRK FOLU *Net Sink* Provinsi NTB tahun 2024-2030 bersifat berkelanjutan sehingga sistem penganggaran kegiatan harus dipastikan berlanjut. Hal ini penting untuk diperhatikan karena capaian kegiatan pada tahun 2030 dilalui melalui capaian berjenjang tiap tahun yang sudah terukur.

Salah satu sumber pendanaan FOLU *Net Sink* 2030 di Provinsi NTB yang juga dapat diakses melalui Dana Hibah yang dikelola oleh BPDH. Berdasarkan paparan direktur utama BPDH tahun 2023, dana hibah yang dialokasikan untuk implementasi aksi mitigasi FOLU sebesar USD 56 juta yang bersumber dari Norwegia. Selain itu hibah tersebut juga dialokasikan untuk REDD+ sekitar USD 103,8 juta yang bersumber dari *Green Climate Fund* (GCF). Secara detail rencana pendanaan yang dapat diakses untuk Provinsi NTB dapat dilihat pada Gambar 36.



FRAMING PENGELOLAAN DANA LH

Aligned with the target of SDGs, NDCs and other commitments

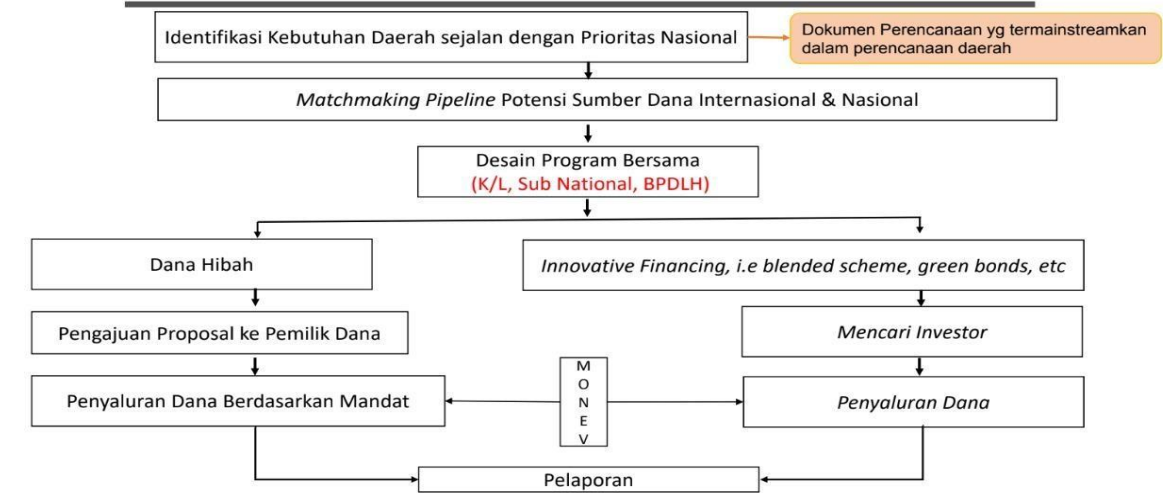


Gambar 36. Potensi Pendanaan yang Dapat Diakses

Pada Gambar di atas menunjukkan bahwa dana hibah yang diberikan, diperuntukan untuk beberapa bidang yang ada di FOLU Net Sink 2030. Bidang yang dimaksud adalah Bidang I. Pengelolaan Hutan Lestari, Bidang II. Peningkatan Cadangan Karbon, Bidang III. Konservasi Keanekaragaman Hayati, dan Bidang V. Pengelolaan Instrumen dan Sistem Informasi. Hasil yang diharapkan dalam pemberian dana ini adalah mengurangi emisi karbon dan konservasi karbon, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan kualitas hidup dan ketahanan bencana.

5.4. Skema Pendanaan Proyek yang Sedang Dikembangkan Sebagai Bentuk Kerjasama Pemerintah

Potensi anggaran yang dimiliki tidak terlepas dari adanya kolaborasi antar stakeholder. Kolaborasi ini dilakukan untuk mendesain program dan alokasi pendanaan yang diperlukan dalam FOLU Net Sink 2030 di Provinsi NTB. Berikut secara detail skema kolaborasi antar stakeholder dalam peningkatan pendanaan lingkungan hidup dapat dijelaskan pada Gambar 37.



Gambar 37. Skema Pendanaan

Dalam mendukung penurunan target ENDC di NTB, pemerintah telah membentuk Kelompok Kerja Percepatan erhutanan Sosial (Pokja PPS) melalui SK Gubernur Nomor 552-576 Tahun 2022 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan antara lain meningkatnya angka kemiskinan dan degradasi ekosistem hutan. Skema perhutanan sosial dirancang dan dikembangkan dalam menerapkan dasar konseptual pembangunan berkelanjutan, yang layak secara ekonomi, dapat diterima secara sosial, serta berkelanjutan secara ekologis. Program PS difokuskan pada kawasan yang rawan deforestasi dan masyarakat yang bergantung pada hutan sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Kawasan Perhutanan Sosial (PIAPS). Nilai ekonomi yang tercatat dari adanya PS sekitar Rp. 12.406.182.000 Miliar. Sumber pendanaan dari skema PS ini melalui The World Bank bersama dengan KLHK yang berkolaborasi dengan beberapa stakeholder seperti Universitas, Pemda, SSF Project, Lokal Non-Government Organization (NGO), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, dan Yayasan Relief Islami Indonesia (*Islamic Relief*).

Upaya menindaklanjuti penandatanganan nota kesepakatan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) antara Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan Provinsi NTB pada tanggal 15 Agustus 2023 di Jakarta, dilaksanakan rapat penyusunan Renja implementasi PRKBI yang dihadiri langsung oleh Bappenas RI bersama tim, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Perangkat Daerah tingkat Provinsi, Mitra Pembangunan yang terdiri dari YRII, Konsepsi, Transform, dan sektor swasta.

Pemerintah Provinsi NTB akan berkolaborasi baik dengan mitra pembangunan maupun dengan sektor swasta. Berbagai mitra pembangunan, termasuk YRII, Konsepsi, Transform

menyampaikan komitmen kolaborasi baik dalam proses penyusunan dokumen PRKBI yang sudah berjalan, maupun melalui berbagai program masing-masing mitra yang mendukung berbagai capaian PRKBI di semua sektornya. Selain itu terdapat juga komitmen kuat dari PT Eco Solution Lombok (ESL) yang juga merupakan bagian dari Konsorsium Iklim dan Lingkungan Hidup (Climate and Environment Consortium-CEC) NTB. Bersama akademisi dari Universitas Mataram dan Universitas Hamzanwadi berkomitmen untuk turut berkolaborasi di dalam program PRKBI ini.

BAB VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Proses monitoring dan evaluasi upaya mitigasi FOLU *Net Sink* sub nasional NTB 2030 merupakan serangkaian proses penting dalam kegiatan untuk mengukur keberhasilan kegiatan/proyek/program yang dilaksanakan secara berkala. Melalui proses ini, efektivitas inisiatif dan efektivitas biaya pelaksanaan kegiatan/proyek/program diukur secara kuantitatif dan distribusi manfaat dilakukan secara adil. Oleh karena itu, sistem monitoring dan evaluasi harus dilaksanakan oleh lembaga yang tidak terafiliasi dengan lembaga pelaksana instrumen pendanaan. Penerapan sistem monitoring dan evaluasi merupakan alat untuk mendukung implementasi FOLU *Net Sink Mitigation Measures* 2030 tingkat daerah untuk Provinsi NTB melalui mekanisme pengukuran dan pelaporan kinerja oleh pelaksana kegiatan/program, dan mekanisme verifikasi independen. Diputuskan untuk mengembangkan metodologi dan format sejalan dengan pedoman UNFCCC dan ENDC. Dengan sistem ini, setiap kegiatan/proyek/program dapat diukur secara tepat.

Kegiatan monitoring dan evaluasi aksi mitigasi FOLU *Net Sink* 2030 Sub Nasional Provinsi NTB dilakukan melalui mekanisme, (1) Monitoring dan evaluasi rutin tahunan, yaitu penilaian dilakukan setiap akhir tahun kegiatan/anggaran, yang dilakukan terhadap capaian kuantitas dan kualitas setiap kegiatan yang direncanakan; (2) Monitoring dan evaluasi tertentu, yaitu penilaian dilakukan apabila terjadi perubahan rencana dan pelaksanaan kegiatan yang bersifat mendadak akibat adanya perubahan arah kebijakan maupun faktor lainnya (misalnya terjadi bencana alam).

Monitoring dan evaluasi juga dilakukan berdasarkan target dan volume capaian yang telah ditetapkan dan jangka waktu untuk mencapai target dan volume capaian pada masing-masing kegiatan. Agar sistem monitoring dan evaluasi dapat menjadi entitas yang *highly trustable* dan memiliki *high integrity*, institusi monitoring dan evaluasi dibangun dengan prinsip-prinsip berikut: (1) taat asas (*consistent*), menjamin tersedianya metodologi yang konsisten dari waktu ke waktu dan berlaku di seluruh lokasi kegiatan aksi mitigasi FOLU *Net Sink* 2030 Sub Nasional Provinsi NTB; (2) lengkap (*complete*), kelengkapan informasi mencakup cadangan karbon di semua komponen ekosistem, baik yang di atas tanah (batang, ranting, daun) dan di bawah tanah (akar), serta biomassa yang telah terurai sebagian atau seluruhnya (nekromassa, serasah, gambut); (3) teliti (*accurate*), ketelitian data merupakan unsur penting yang terkait dengan efektivitas penurunan emisi di lokasi prioritas; (4). terbuka (*transparent*), hasil dan metodologi pengukuran yang dilaporkan dijamin keterbukaannya sebagai informasi publik oleh lembaga yang melakukan monitoring dan evaluasi; (5) dapat diperbandingkan (*comparable*), hasil pengukuran dapat dibandingkan antar waktu untuk tapak kegiatan/proyek/program yang sama, atau antar tapak kegiatan/proyek/program yang sama tipologinya.

5.1. Prinsip Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memperoleh informasi secara terus-menerus sehingga hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian akhir di kegiatan ini untuk melihat pencapaian dari program yang dijalankan. Jika terdapat kesenjangan (gap) antara rencana dengan realisasi, misalnya pelaksanaan yang tidak tepat pada lokasi program kegiatan yang diarahkan, maka diantaranya dapat dilakukan penyesuaian terhadap perencanaan pada masing-masing lembaga dan melakukan realokasi anggaran kegiatan. Sehingga target pelaksanaan FOLU *Net Sink* 2030 Sub Nasional Provinsi NTB dapat tercapai. Berikut beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melakukan monitoring dan evaluasi :

1. Terencana

Bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang dan terjadwal.

2. Objektif

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sesuai kondisi yang ada di lapangan, dan didasarkan pada standar/kriteria/pedoman/juknis/juklak yang ada.

3. Akuntabel

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai dengan prosedur dan metode yang tepat, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

4. Terstruktur

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara bertahap sesuai dengan alur yang telah ditetapkan dan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.

5. Transparan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara terbuka dan hasilnya dapat diakses oleh berbagai pihak.

6. Efektif dan Efisien

Dalam penggunaan dana, waktu dan tenaga.

5.2. Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi

Kelembagaan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi program kegiatan aksi mitigasi FOLU *Net Sink* 2030 Sub Nasional Provinsi NTB akan dibentuk sesuai dengan keputusan Gubernur. Lembaga ad-hoc yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi NTB ini diberikan mandat untuk mengkoordinasikan para pihak atau lembaga yang melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan isu perubahan iklim. Pembentukan kelembagaan monitoring dan evaluasi akan

disesuaikan dengan sub-sistem yang akan ditentukan. Dimana sub sistem monitoring dan evaluasi FOLU *Net Sink* 2030 Sub Nasional Provinsi NTB akan dibagi menjadi lima sub sistem berdasarkan cakupan, tujuan khusus, kegiatan teknis, data, informasi dan analisa yang terlibat serta lembaga-lembaga khusus yang terkait. Dalam implementasinya sub-sub sistem ini saling berhubungan satu dengan lainnya dan terintegrasi yang dapat dilihat pada matriks di bawah ini:

Tabel 38. Deskripsi Sub-sistem Kelembagaan Implementasi *Indonesia's FOLU Net Sink* Provinsi NTB

Subsistem	Deskripsi
Subsistem monitoring dan deforestasi	Subsistem monitoring dan deforestasi merupakan bagian yang berkoordinasi dengan subsistem monitoring deforestasi di tingkat nasional. Hasil pemantauan di tingkat sub nasional harus disampaikan ke tingkat nasional sebagai bahan masukan perbaikan sistematis ke depan. Hasil pemantauan nasional juga disampaikan ke tingkat sub nasional sehingga terjadi pertukaran data terkini (<i>real time updating</i>) selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara langsung di lokasi (<i>ground truthing</i>) oleh pengelola wilayah kerja
Subsistem monitoring perubahan tutupan lahan	Subsistem monitoring perubahan tutupan lahan merupakan bagian yang berkoordinasi dengan tingkat nasional. Subsistem ini membutuhkan kemampuan menginterpretasikan citra satelit, klasifikasi tutupan lahan, pengetahuan dan pemahaman lokal. Semua hasil yang telah dikompilasikan harus dimonitor melalui pengecekan secara langsung di lokasi (<i>ground truthing</i>)
Subsistem faktor emisi	Subsistem faktor emisi bertujuan untuk mengkompilasi dan menghitung nilai karbon, berupa cadangan karbon dan serapan CO ₂ pada berbagai tutupan lahan dengan tingkat keakuratan nilai-nilai intrinsik yang selama ini digunakan sebagai faktor emisi karbon. Nilai tersebut diperoleh bersumber dari basis data instansi terkait, yaitu Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, UPT Pusat, serta Dinas Pertambangan yang memiliki amanat pengelolaan kawasan
Subsistem	Deskripsi
Subsistem basis data terestrial dan spasial	Subsistem basis data terestrial dan spasial mendukung tiga subsistem di atas, yaitu deforestasi, perubahan tutupan lahan dan basis data terestrial-spasial melalui basis data karbon hutan dan potensi kehutanan, basis data persamaan alometrik dan basis data spasial semua tipe tutupan hutan
Subsistem informasi jaringan pengamanan sosial (<i>safeguards</i>)	Subsistem informasi jaringan pengamanan sosial (<i>safeguards</i>) dibutuhkan agar program pengurangan emisi GRK dapat berlangsung dan tujuan FOLU <i>Net Sink</i> 2030 tidak merugikan masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan. Sistem ini memberi masukan informasi terkini (<i>real time</i>) kepada unit pengendali pembangunan untuk dapat dilakukan pendampingan dan konsultasi dengan unit manajemen (penanggung jawab kawasan) terkait tindakan memperbaiki tata kelola kawasan agar program yang dijalankan linier.

5.3. Tanggung Jawab dan Penilaian Capaian Kinerja

Memperhatikan arahan pencapaian target FOLU *Net Sink* 2030 Sub Nasional Provinsi NTB maka diperlukan kerjasama yang kuat dengan memperhatikan distribusi tanggungjawab para pihak sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/KL (Kementerian Lembaga)/institusi sebagai bagian mekanisme rentang kendali untuk proses monitoring dan evaluasi terhadap capaian dan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan.

Jika capaian target kinerja di bawah persentase yang diharapkan, maka kita ingin memastikan apakah sumberdaya yang sudah dialokasikan dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut sudah berjalan dengan optimal atau belum. Apabila belum optimal, maka pendekatan kolaborasi dari para pihak dapat diarahkan untuk mencapai target tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab capaian kinerja FOLU *Net Sink* 2030 Sub Nasional Provinsi NTB menjadi tanggung jawab semua pihak. Sehingga satuan penurunan emisi ton CO₂e akan dibagi per kapita masyarakat di Provinsi NTB. Mengacu pada Dokumen Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tanggal 24 Februari 2022, disebutkan bahwa pengurangan emisi GRK dengan puncak emisi bersih GRK nasional (seluruh sektor) akan tercapai pada tahun 2030 sebesar 4,23 ton CO₂e per kapita. Dengan memperhatikan standar perhitungan emisi yang dihasilkan pada luasan tertentu, maka seluruh kawasan hutan di Provinsi NTB harus dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memberi kontribusi penurunan emisi sesuai potensi yang dimiliki. Selain itu dapat menjamin kelestarian pulau-pulau kecil dengan karakteristik dengan daya tampung dan daya dukung yang kecil.

5.4. Pelaporan

Pengukuran dan pelaporan kinerja monitoring dan evaluasi FOLU *Net Sink* 2030 Sub Nasional Provinsi NTB yang akan diterapkan ke semua aktivitas Rencana operasional dengan pola bertahap, sesuai dengan yang diarahkan oleh panduan kebijakan FOLU *Net Sink* 2030 nasional. Aktivitas-aktivitas yang diukur secara umum meliputi 8 (delapan) kegiatan aksi mitigasi sektor kehutanan, yaitu; 1) pencegahan deforestasi lahan mineral, 2) pencegahan deforestasi konsesi, 3) pembangunan hutan tanaman, 4) pengayaan hutan alam (enhanced natural regeneration (ENR), 5) penerapan RIL-C, 6) peningkatan cadangan karbon non rotasi, 7) perlindungan area konservasi tinggi, dan 8) pengelolaan mangrove. Pengukuran dan pelaporan yang dilaksanakan diharapkan mampu mendukung pelaksanaan dari FOLU *Net Sink* 2030 nasional menuju pencapaian kondisi *net sink* dengan nilai serapan sebesar 140 juta ton CO₂e sesuai standar internasional secara bertahap.

Penerapan FOLU *Net Sink* 2030 Sub Nasional Provinsi NTB akan meliputi kawasan yang luas, berbagai tipe tutupan lahan serta proses-proses kompleks pertukaran informasi dari banyak pihak. Dengan demikian dibutuhkan suatu sistem yang komprehensif untuk mengetahui besarnya pencapaian tersebut sebagai bagian dari instrumen pelaporan yg akan dijalankan.

Laporan dari sistem ini akan mencakup informasi tentang jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh sektor hutan dan lahan, serta jumlah karbon yang diserap oleh tanaman dan ekosistem terkait. Laporan ini juga akan membandingkan pencapaian aktual dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2030.

BAB VII. PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia telah mengambil langkah dengan menetapkan strategi *net sink* untuk sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030, yang dikenal sebagai *Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030*, hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai target Kesepakatan Nasional tentang Perubahan Iklim (ENDC). Dokumen Renja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi NTB merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Operasional FOLU *Net Sink 2030* Indonesia yang memberikan pedoman pelaksanaan program kerja bagi seluruh UPT, OPD dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari.

Arahan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* didasarkan pada perencanaan spasial, dalam bentuk penentuan lokasi rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK sektor kehutanan dan lahan. Untuk pencapaian target FOLU *Net Sink 2030* Sub Nasional Provinsi, Pemerintah Provinsi NTB menetapkan luasan sebesar 770.040,67 Ha dengan Rencana Aksi Mitigasi Sub Nasional Provinsi NTB meliputi rencana aksi mitigasi sebagai berikut; (1) Pencegahan Deforestasi Lahan Mineral (RO1); (2) Pencegahan Degradasi Konsensi (RO3); (3) Pengayaan Hutan Alam (*Enhanced Natural Regeneration*, ENR) (RO5); (4) Penerapan RIL-C (*Reduced Impact Logging – Carbon*) (RO6); (5) Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi (RO7); (6) Peningkatan Cadangan Karbon Non Rotasi (RO8); (7) Perlindungan Area Konservasi Tinggi (RO11), (8) Pengelolaan mangrove (RO12) yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang terstruktur dan terukur.

Untuk melaksanakan RO 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, dan 12 guna mencapai target Renja FOLU *Net Sink 2030* Sub Nasional Provinsi NTB sesuai arahan nasional sebesar 770.040,67 Ha, maka diperlukan pendanaan sebesar Rp. 8.563.927.000.000,- (Delapan Triliun Lima Puluh Enam Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah). Dengan kontribusi dari berbagai sumber dana APBN, APBD, BPD LH dan Lembaga Donor. Sistem monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh DLHK Provinsi NTB melalui Kelompok Kerja REDD+ yang sudah terbentuk untuk memastikan implementasi berjalan dan terdaftar dalam sistem registasi nasional. Disamping itu, untuk pelaksanaan RO 1-12 harus disusun *Social and Environmental Safeguard* (SES) yang terintegrasi dengan *Safeguard Information System* REDD+ (SIS REDD+) yang telah dirancang nasional, serta memastikan setiap program dan kegiatan yang dirancang teregistrasi dalam *National Registry System* (NRS).

Setiap elemen dalam RO perlu terus diperkuat, dikembangkan, diselaraskan, dan dijaga konsistensinya guna menjamin pencapaian tujuan Renja *Net Sink* FOLU 2030 di tingkat sub-nasional Provinsi NTB. Agar implementasi RO 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, dan 12 dapat mencapai sasaran Renja *Net Sink* FOLU 2030 Sub Nasional Provinsi NTB, pihak-pihak terkait harus bekerja sama dengan berbagi tanggung jawab berdasarkan wilayah pengelolaan dan otoritas wilayah. Sebagai langkah untuk memastikan sinergi antara pihak-pihak yang melaksanakan RO 1-12 di tingkat provinsi, kabupaten, desa, dan proyek di tingkat lokasi, Mekanisme Pembagian Manfaat (*Benefit Sharing Mechanism*-BSM) perlu dirancang secara terstruktur dan menyeluruh.

7.2. Rekomendasi

Penyusunan kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mendukung pelaksanaan RO 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, dan 12 yang tercantum dalam Renja Sub Nasional *Indonesia's* FOLU *NetSink* 2030 Provinsi NTB memerlukan kolaborasi dan integrasi efektif dari setiap bagian serta langkah-langkah untuk memperkuat struktur kelembagaan di tingkat provinsi, kabupaten, desa, dan unit manajemen di level tapak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi RO 1-12 dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam usaha untuk menyelaraskan kesenjangan antara perencanaan dan pencapaian pelaksanaan program kegiatan dalam Renja Sub Nasional *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030 Provinsi NTB, perlu dilakukan langkah-langkah, termasuk memastikan kolaborasi berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini melibatkan perhitungan kebutuhan pembiayaan untuk implementasi FOLU *Net Sink* 2030 Sub Nasional Provinsi NTB, dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan ketersediaan sumber pembiayaan pada instansi/ SKPD/KL yang telah direncanakan.

Meningkatkan sinergi dan memaksimalkan kontribusi pembiayaan dari proyek-proyek yang sedang berjalan merupakan langkah yang akan diambil (dalam tahap perencanaan) di wilayah yurisdiksi sub nasional, dengan tujuan mencapai target FOLU *Net Sink* 2030 yang telah ditetapkan. Jika diperlukan, akan dicari alternatif pembiayaan potensial untuk mempercepat implementasi rencana aksi FOLU *Net Sink* 2030 Sub Nasional Provinsi NTB. Sistem pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RO 1-12 perlu dikembangkan dan dilaksanakan secara konsisten dan komprehensif untuk memastikan tercapainya tujuan dalam Renja FOLU *Net Sink* 2030 Sub Nasional Provinsi NTB. Ini mencakup pelaksanaan SES, pendaftaran program dan kegiatan dalam NRS, dan BSM.

7.3. Disclaimer

Rencana Operasional ini merupakan upaya dan langkah Pemerintah Provinsi NTB untuk mencapai *carbon neutral* identik dengan NZE Program *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030, melalui

skenario LCCP dan pada LTS-LCCR 2050 menetapkan target *net sink* pada sektor FOLU (*beyond net zero emission*). Dalam pelaksanaannya dilakukan melalui skenario LCCP seperti semangat yang ditegaskan dalam langkah ambisius untuk mencapai net zero emission sektor FOLU pada 2030. Dalam kaitan ini tetap mempertimbangkan dinamika yang berkembang dalam perjalanan pelaksanaan tugas kerja, perkembangan kebijakan dan referensi global, nasional maupun lokal, yang memerlukan safeguard dalam bentuk pelaksanaan pada target minimal sesuai skenario CPOS (*current policy scenario*).

Dinamika kerja terkait dengan data/informasi geospasial, yaitu IGT KLHK periode pemutakhiran 2018 2019 yang bersumber dari basis data geospasial KLHK. Telaahan spasial ini merupakan bagian dari hasil telaah kegiatan integrasi program berbasis spasial di tingkat tapak di KLHK tahun 2020. Menjadi penting untuk menegaskan tentang Disclaimer ini atas gambaran kondisi dan situasi:

Pertama: memberikan pengaman dan apabila skenario LCCP tidak bisa kita capai (karena *conditional* dan *unconditional*), Pemerintah Provinsi NTB tetap konsisten dan sesuai dengan komitmen yang secara hukum mengikat (yaitu ENDC) namun tetap menunjukkan ambisinya untuk menggunakan skenario LCCP.

Kedua: ditujukan untuk memberikan gambaran bahwa bilamana masih terdapat ketidaksesuaian di lapangan terkait angka-angka, perlu dilihat dan dipertimbangkan sebagai kewajaran dengan kondisi perbedaan periode data yang dipakai.

Ketiga: terdapat isu lintas sektor yang akan mempengaruhi pencapaian target Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi NTB termasuk antara lain target pengurangan emisi di sektor FOLU dengan kebutuhan lahan antara pengembangan energi biomassa, ketahanan pangan dan target pengurangan emisi di sektor FOLU.

Keempat: dapat terjadi perbedaan hasil analisis dan kerja lapangan (meskipun diantaranya tidak prinsip/tidak signifikan) karena akibat penggunaan skala peta yang berbeda (*level of intensity of the map*) terutama dikaitkan dengan kegiatan RHL. Terhadap hal ini akan terus dilakukan langkah koherensi.

Kelima: di sisi lain dalam kegiatan awal untuk menyatukan atau integrasi usaha dari puluhan unit satuan kerja (dan tidak menutup kemungkinan antar kabupaten/kota), juga dapat terjadi bias persepsi atas suatu metodologi, seperti misalnya dalam asumsi *survival rate* ENDC dan LTS 23% luasan aktual 23%, dibandingkan dengan syarat keberhasilan (ditegaskan tentang persentasi tanaman tumbuh) yaitu 75% seperti ditetapkan dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Terhadap hal-hal seperti ini, sambil kegiatan terus

berjalan akan dilakukan koherensi pandangan, metodologi dan hasilnya.

Keenam: meski kecil kemungkinan terjadi, dengan perubahan kebijakan dan tata kerja untuk semakin efektif menghasilkan aktualisasi prinsip *Sustainable Forest Management*, *Forest Governance* serta *Carbon Governance*, masih terdapat kemungkinan masalah kelembagaan, dalam arti kegiatan dan unsur pelaksana kerja, terutama di tingkat kabupaten/kota yang sangat besar kemungkinan akan mencakup beberapa bentuk kelembagaan dengan *rule base* yang sambil berjalan akan terus diselaraskan (*learning by doing*).

Ketujuh: pada tingkat sub nasional hal terkait dengan pendekatan capaian ENDC dan pendekatan low carbon development (yang di antaranya mencakup sektor FOLU) disesuaikan dengan pendekatan ENDC sebagaimana mandat UU No. 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi *Paris Agreement*.

DAFTAR PUSTAKA

AKSARA: Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rendah Karbon Indonesia. 2023. Akses :

[ICCTF– Indonesia Climate Change Trust Fund](#)

Boateng, C., & Boateng, S. . (2015). *Tertiary Institutions in Ghana Curriculum Coverage on Climate Change: Implications for Climate Change Awareness*. Journal of Education and Practice, 6(12), 99–106. Retrieved from <http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/21886>

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB. 2023. Jumlah Kejadian Bencana Berdasarkan Jenis Bencana Tahun 2022.

Kasper W, Streit ME. 1998. *Institutional Economics, Social Order and Policy*. Edward Elgar. Cheltenham, UK. and Northampton, MA. USA.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* untuk Pengendalian Perubahan Iklim. Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322). Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319). Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320). Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756). Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 1387). Jakarta.
- Lombok Research Center. 2019. Identifikasi dan Strategi Mitigasi Bencana Kekeringan Potensial. Retrieved from Lombok Research Center.
- Meyers J. 2005. Analisis kekuatan stakeholders. Dalam: Supahardjo, editor. 2005. Manajemen Kolaborasi: Memahami Pluralisme Membangun Konsensus. Bogor (ID): Pustaka Latin.
- Ostrom E. 2005. *Understanding Institutional Diversity*. United Kingdom (US): Princeton University Press.
- Peters, B.G. 2000. *Institutional Theory: Problems and Prospects*. Viena: Institute for Advance Studies.
- Peraturan Presiden. Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK
- Peraturan Gubernur NTB. Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan GRK (RAD GRK) Provinsi NTB.
- Peraturan Gubernur NTB. Nomor 54 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API).
- Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai. 2023. Wilayah Kerja BPDAS Dodokan Moyo Sari, Provinsi NTB.
- Republik Indonesia. 1990. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687). Kementerian Kehutanan. Jakarta
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Kementerian Kehutanan. Jakarta
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Kementerian Agraria dan Tata

Ruang. Jakarta

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Kementerian Kehutanan. Jakarta

Republik Indonesia. 2013. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Kementerian Kehutanan. Jakarta

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Kementerian Dalam Negeri. Jakarta

Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Kementerian Luar Negeri. Jakarta

Republik Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Republik Indonesia. Jakarta

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta

- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6518) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta
- Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta
- Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta
- Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta
- Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Kementerian Keuangan. Jakarta
- Republik Indonesia. 2021. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Kementerian Dalam Negeri. Jakarta
- Schmid AA. 2004. *Conflict and Cooperation; Institutional and Behavioral Economics*. United Kingdom (US): Blackwell Publishing.

- Sudirman DM. 2016. Keberlanjutan Institusi Kesepakatan Konservasi Masyarakat di Taman Nasional Lore Lindu Provinsi Sulawesi Tengah. [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Suriadi. A., M. Nazam, Kisman dan A. Ripaldi. 2014. Trend Produktivitas Padi Akibat Perubahan Iklim di NTB. Seminar Nasional Fakultas Pertanian UGM. Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Untuk Kedaulatan Pangan. UGM Press. PP10-15.
- Winara, A. & Mukhtar, A.S., 2011. Potensi Kolaborasi dalam Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Papua. *Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 8(3), pp.217–226.
- Wulandari, W. & Sumarti, T., 2011. Implementasi Manajemen Kolaboratif Dalam Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*, 5(1), pp.32–50.

LAMPIRAN



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 522 - 632 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA KERJA
SUB NASIONAL *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE NET SINK* 2030
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UNTUK PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim), bahwa dalam rangka implementasi *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim, perlu disusun Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan rencana kerja dimaksud, perlu dibentuk Kelompok Kerja agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's Forestry And Other Land Use Net Sink* 2030 Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Pengendalian Perubahan Iklim;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 149);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 158);
13. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

14. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 Nomor 54);
15. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2023 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* untuk Pengendalian Perubahan Iklim;
 2. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.30/MENLHK/SETJEN/KLN.0/1/2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja *Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030* Sub Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 3. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9/SETJEN/ROUM/KLN.0/1/2023 tentang Penetapan, Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.67/SETJEN/ROUM/KLN.0/4/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9/SETJEN/ROUM/KLN.0/1/2023 tentang Penetapan, Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's Forestry And Other Land Use Net Sink 2030* Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Pengendalian Perubahan Iklim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Kelompok Kerja Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Hutan;
 - b. Kelompok Kerja Perhutanan Sosial;
 - c. Kelompok Kerja Multiusaha dan Teknik Pengelolaan Produksi pada Bidang Pengelolaan Hutan Lestari;
 - d. Kelompok Kerja Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL);
 - e. Kelompok Kerja Mangrove;
 - f. Kelompok Kerja Restorasi, Replikasi Ekosistem, Ruang Terbuka Hijau dan Ekoriparian pada Bidang Peningkatan Cadangan Karbon;
 - g. Kelompok Kerja Kawasan dan Peningkatan Populasi Spesies;
 - h. Kelompok Kerja Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value Forest*);
 - i. Kelompok Kerja Intensifikasi Jasa Lingkungan, Tahura dan Kebun Raya;
 - j. Kelompok Kerja Kemitraan Konservasi pada Bidang Konservasi;
 - k. Kelompok Kerja Sosialisasi dan Komunikasi Publik;
 - l. Kelompok Kerja Penegakan Hukum (*Law Enforcement*);
 - m. Kelompok Kerja Evaluasi Kebijakan *Review, Renew, and Establish* (RRE) dan Standarisasi pada Bidang Instrumen dan Informasi.
- KETIGA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 17 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. LALU GITA ARIAD

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR : 522 - 632 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA KERJA SUB
 NASIONAL *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE NET SINK 2030*
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UNTUK PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

SUSUNAN KEANGGOTAAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	KET.
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTB	Penanggung Jawab	
2.	Asisten II Bidang Perencanaan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTB	Pengarah	
3.	Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara	Pengarah	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB	Pengarah	
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	Ketua	
6.	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB	Ketua I	
7.	Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dodokan Moyosari	Ketua II	
8.	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar	Sekretaris	
9.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	Sekretaris I	
10.	Dr. Ir. Nandi Koesmaryandi, M.Sc. (Institut Pertanian Bogor)	Tenaga Ahli	
11.	Dr. Andi Chairil Ichsan, S.Hut. (Universitas Mataram)	Tenaga Ahli	
12.	Kornelia Webliana B, S.Hut., M.Sc. (Universitas Mataram)	Tenaga Ahli	
	Bidang Pengelolaan Hutan Lestari		
13.	Kepala Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	Ketua	
14.	Didik Prihandono, S.Si. (Surveyor Pemetaan Ahli Muda pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar)	Anggota	
	• Kelompok Kerja Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Hutan		
15.	Kepala Seksi Wilayah III Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara	Koordinator	

1	2	3	4
16.	Astan Wirya, S.H., M.H. (Polisi Kehutanan Muda pada Bidang PHKA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB)	Anggota	
	• Kelompok Kerja Perhutanan Sosial		
17.	Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara	Koordinator	
18.	Hendro Sulaksono, S.P. (Fungsional Penyuluh Kehutanan pada bidang PDASRPM Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB)	Anggota	
	• Kelompok Kerja Multiusaha dan Teknik Pengelolaan Produksi		
19.	Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII Surabaya	Koordinator	
20.	Andini Suciningtyas Putri, S.T. (Surveyor Pemetaan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB)	Anggota	
	Bidang Peningkatan Cadangan Karbon		
21.	Kepala Bidang PDASRPM pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	Ketua	
22.	Denas Pangesti, A.Md. (Surveyor Pemetaan Terampil pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar)	Anggota	
	• Kelompok Kerja Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)		
23.	Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi pada BPDAS Dodokan Moyosari	Koordinator	
24.	Rian Priyuhadi, S.Si (Pengolah Data Seksi RHL pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dodokan Moyosari)	Anggota	
	• Kelompok Kerja Mangrove		
25.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	Koordinator	
26.	Ega Denaswidhi, S.Si. (Staf pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dodokan Moyosari)	Anggota	
	• Kelompok Kerja Restorasi, Replikasi Ekosistem, Ruang Terbuka Hijau dan Ekoriparian		
27.	Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	Koordinator	
28.	Amran Hakim Dewangga, S.T. (Surveyor Pemetaan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB)	Anggota	
	Bidang Konservasi		
29.	Kepala Bidang PHKA pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	Ketua	
30.	Romilla Sari, S.Hut. (Staf pada Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan)	Anggota	

1	2	3	4
	• Kelompok Kerja Kawasan dan Peningkatan Populasi Spesies		
31.	Kepala Seksi Konservasi Wilayah III pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB	Koordinator	
32.	Staf pada Seksi Konservasi Wilayah III Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB	Anggota	1 (satu) orang
	• Kelompok Kerja Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (<i>High Conservation Value Forest</i>)		
33.	Kepala Balai Taman Nasional Tambora	Koordinator	
34.	Sabaruddin, S.H. (Polisi Kehutanan Muda pada Bidang PHKA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB)	Anggota	
	• Kelompok Kerja Intensifikasi Jasa Lingkungan, Tahura dan Kebun Raya		
35.	Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani	Koordinator	
36.	Juwita Widya Qur'ani, S.T. (Surveyor Pemetaan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB)	Anggota	
	• Kelompok Kerja Kemitraan Konservasi		
37.	Kepala Seksi Konservasi Wilayah I pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB	Koordinator	
38.	Staf pada Seksi Konservasi Wilayah I Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB	Anggota	1 (satu) orang
	Bidang Instrumen dan Informasi		
39.	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen LHK Mataram	Ketua	
40.	Adnan Sukma W, A.Md.Ak. (Staf pada Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan)	Anggota	
	• Kelompok Kerja Sosialisasi dan Komunikasi Publik		
41.	Koordinator PPID pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	Koordinator	
42.	Dian Sianti Handayani, S.T. (Staf pada Bidang PSPPL Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB)	Anggota	
	• Kelompok Kerja Penegakan Hukum (<i>Law Enforcement</i>)		
43.	Danpos Gakkum Mataram Seksi Wilayah III Balai Gakkum Jawa Bali Nusra	Koordinator	
44.	Haryadi Hairi, S.H. (Polisi Kehutanan Muda pada Bidang PHKA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB)	Anggota	

1	2	3	4
	Kelompok Kerja Evaluasi Kebijakan <i>Review, Renew, and Establish</i> (RRE) dan Standarisasi		
45.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Penerapan Standar Instrumen LHK Mataram	Koordinator	
46.	Kabag. Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi NTB	Anggota	

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. LALU GITA ARIADI

BKPH AMPANG PLAMPANG

Lampiran 2. Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di BKPH Ampang Plampang

Tabel Rencana Operasional (RO 1 Pencegahan Deforestasi Mineral) *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di BKPH Ampang Plampang

Luasan (ha/RO)	Tujuan Program	Program		Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
							Anggaran/Tahun														
							2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp				
15,630.37	Aksi Pengurangan emisi	A Pencegahan Kebakaran	A.1	Identifikasi Kawasan Rawan Kebakaran	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
			A.2	Sosialisasi kawasan rawan kebakaran	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
			A.3	Pengamanan Kawasan Rawan Kebakaran	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat , Pemadam kebakaran	APBN/APBD/ Donor	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	3500
			A.4	Pelaksanaan Pembinaan MPA (masyarakat Peduli Api)	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
			A.5	Penyediaan sarana Prasarana Pemadaman Kebakaran	KPH Ampang Plampang, Pemrintah setempat	APBN/APBD/ Donor					Paket	2000						Paket	2000	4000	
	B Penanggulang an Kebakaran	B	B.1	Koordinasi & Komunikasi antar stakeholders terkait Pemadaman	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	35
			B.2	Pembangunan Kanal Bloking	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, PU, DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	200	Paket	200	Paket	200	Paket	200	Paket	200	Paket	200	Paket	200	1400
			B.3	Pemadaman Kebakaran	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, Pemadam kebakaran	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
	C Penanganan Pasca Kebakaran	C	C.1	Monitoring dan Evaluasi Areal Pasca Kebakaran	DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	350
	Aksi Mepertahankan Serapan	D Pengamanan Kawasan Hutan	D.1	Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280

Luasan (ha/RO)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
						Anggaran/Tahun														
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	
			D.2	Sosialisasi batas Kawasan KPH	DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280	
			D.3	Identifikasi dan Inventarisasi SDH	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Ha	200	Ha	200	Ha	200	Ha	200	Ha	200	Ha	200	1400	
			D.4	Patroli terpadu	TNI Polri , KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280	
		E.	Pengembangan RIL-C & Penegelolaan SILIN	E.1	Koordinasi dengan pemilik izin untuk pelaksanaan RIL-C dan SILIN	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, TNI Polri	APBN/APBD/Donor	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	35
				E.2	Sosialisasi pemanenan hutan dengan RIL-C dan Pengelolaan PBPH-HA dengan SILIN	KPH Ampang Plampang, TNI Polri, PT pemilik izin	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
	Aksi meningkatkan Serapan	F.	Rehabilitasi	F.1	Rehabilitasi pada Areal Bekas Terbakar	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, BPDAS	Ha	16000	Ha	16000	Ha	16000	Ha	16000	Ha	16000	Ha	16000	112000	
				F.2	Rehabilitasi pada Kawasan lahan kritis dan terdegradasi	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, BPDAS	Ha	16000	Ha	16000	Ha	16000	Ha	16000	Ha	16000	Ha	16000	112000	
				F.3	Rehabilitasi di lahan masyarakat (KBR, KBD, HR dll)	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, BPDAS	Ha	16000	Ha	16000	Ha	16000	Ha	16000	Ha	16000	Ha	16000	112000	
	Kelembagaan	G.	Penguatan Kelembagaan & Sosialisasi	G.1	Pelaksanaan Koordinasi antar Pemangku Kepentingan	DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	35
				G.2	Sosialisasi Perhutanan Sosial	DLHK, KPH Ampang Plampang, Perhutanan sosial	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
				G.3	Pembentukan dan Pembinaan Perhutanan Sosial	DLHK, KPH Ampang Plampang, Perhutanan sosial	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
				G.4	Kerjasama Kemitraan antara PBPH-HA/ HT/ RE dengan	DLHK, KPH Ampang Plampang, PT Pemilik izin	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280

Luasan (ha/RO)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
						Anggaran/Tahun														
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp					
			masyarakat sekitar (KULIN KK)																	
			G.5 Penyusunan, pembaharuan dan Pengesahan RPHJP	DLHK, KPH Ampang Plampang,	APBN/APBD/ Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	50	200		
			G.6 Pengadaan tenaga POLHUT dan Tenaga Penyuluh Kehutanan	DLHK, KPH Ampang Plampang	APBN/APBD/ Donor	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	75	525		
			G.7 Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelaksana	DLHK, KPH Ampang Plampang	APBN/APBD/ Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210		
			G.8 Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas masyarakat pengelola PS dan masyarakat sekitar kawasan kelola (Fasilitasi, Pendampingan dan Pembinaan)	DLHK, KPH Ampang Plampang, Perhutanan sosial	APBN/APBD/ Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210		
			G.9 Fasilitasi dan pelaksanaan pendampingan kelompok tani hutan (KTH) & bimbingan teknis dalam pengelolaan PS	DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210		
			G.10 Pembangunan demplot Agroforestry	DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket		Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	300		
			G.11 Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan (Ekowisata, Jasa tata air, dan penyimpanan/ penyerapan karbon)	DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700		
			G.12 Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemanfaatan HHBK dan multi usaha kehutanan pada areal berizin	DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, DISTANBUN , LITBANG, NGO Terkait	APBN/APBD/ Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175		
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																		352645		

Tabel Rencana Operasional (RO 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Ampang Plampang

Luasan (ha/RO)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)		
						Anggaran/Tahun																
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
90.00	Aksi Pengurangan Emisi	A.	Pemulihan Ekosistem	A.1	Penentuan dan Penataan Areal Target Pemulihan Ekosistem	DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Ha	100	Ha	100	Ha	100	Ha	100	Ha	100	Ha	100	700		
	A.2			Sosialisasi Kepada Masyarakat terkait kegiatan Reforestasi dan Rehabilitasi Lahan	DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280			
	A.3			Fasilitasi, Pendampingan dan Pembinaan Masyarakat	DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175			
	Aksi Meningkatkan Serapan	B.	Reforestasi dan Rehabilitasi Lahan	B.1	Penanaman/Pengkayaan pada areal bekas tebangan	DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, BPDAS	APBN/APBD/Donor	Ha	76	Ha	76	Ha	76	Ha	76		76		76	Ha	76	532
				B.2	Penanaman pada APL serta Kawasan Hutan yang meliputi HL, HPT, HP, dan KK	DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, BPDAS	APBN/APBD/Donor	Ha	76	Ha	76	Ha	76	Ha	76		76		76	Ha	76	532
				B.3	Penanaman pada Areal PIAPS & PS	DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, BPDAS	APBN/APBD/Donor	Ha	76	Ha	76	Ha	76	Ha	76		76		76	Ha	76	532
				B.4	Penanaman pada areal lahan terbuka & Tanaman Peneduh pada Turus dan Median Jalan	DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, BPDAS	APBN/APBD/Donor	Ha	76	Ha	76	Ha	76	Ha	76		76		76	Ha	76	532
				B.5	Penanaman areal dengan pola kemitraan	DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, BPDAS	APBN/APBD/Donor	Ha	76	Ha	76	Ha	76	Ha	76		76		Ha	Ha	76	532
				B.6	Rehab DAS	DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, BPDAS	APBN/APBD/Donor	Ha	76	Ha	76	Ha	76	Ha	76		76	Ha	Ha	Ha	76	532
	Kelembagaan	C.	Pengembangan Multi Usaha	C.1	Pengembangan multi usaha melalui pola agroforestry	DLHK, KPH Ampang Plampang	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Ha	Ha	Paket	50	350
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																					4697	

Tabel Rencana Operasional (RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Ampang Plampang

Luasan (ha/RO)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)		
						Anggaran/Tahun																
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
11,017.86	Aksi Peningkatan Serapan	A	Penanaman	A.1	Penanaman pada Areal KPH	DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	Ha	7000	Ha	7000	Ha	7000	Ha	7000	Ha	7000	Ha	7000	Ha	7000	49000
				A.2	Penanaman pada Areal PBPH	DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, BPDAS PBPH	APBN/APBD/Donor	Ha	7000	Ha	7000	Ha	7000	Ha	7000	Ha	7000	Ha	7000	Ha	7000	49000
				A.3	Penanaman pada Areal PS	DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	Ha	7000	Ha	7000	Ha	7000	Ha	7000	Ha	7000	Ha	7000	Ha	7000	49000
				A.4	Penanaman pada Areal PIAPS	DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	Ha	7000	Ha	7000	Ha	7000	Ha	7000	Ha	7000	Ha	7000	Ha	7000	49000
				A.5	Penanaman pada Areal HGU dan Non HGU	DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	Ha	7000	Ha	7000	Ha	7000	Ha	7000	Ha	7000	Ha	7000	Ha	7000	49000
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																						245000

Tabel Rencana Operasional (RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Ampang Plampang

Luasan (ha/RO)	Tujuan Program	Program		Kegiatan		PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
								Anggaran/Tahun														
								2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	
11,044.60	Aksi Peningkatan Serapan	A	Penanaman	A.1	Penanaman pada Areal Konservasi	DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	Ha	8630	Ha	8630	Ha	8630	Ha	8630	Ha	8630	Ha	8630	Ha	8630	60410
				A.2	Penanaman pada Areal KPH dan PIAPS	DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	Ha	8630	Ha	8630	Ha	8630	Ha	8630	Ha	8630	Ha	8630	Ha	8630	60410
				A.3	Penanaman pada Areal PBPH	DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	Ha	8630	Ha	8630	Ha	8630	Ha	8630	Ha	8630	Ha	8630	Ha	8630	60410
				A.4	Penanaman pada Areal APL HGU dan Non HGU	DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	Ha	8630	Ha	8630	Ha	8630	Ha	8630	Ha	8630	Ha	8630	Ha	8630	60410
		B	Pemeliharaan Tanaman	B.1	Pemeliharaan Tanaman pada Areal Konservasi	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Ha	3450	Ha	3450	Ha	3450	Ha	3450	Ha	3450	Ha	3450	Ha	3450	24150
				B.2	Pemeliharaan Tanaman pada Areal KPH dan PIAPS	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Ha	3450	Ha	3450	Ha	3450	Ha	3450	Ha	3450	Ha	3450	Ha	3450	24150
				B.3	Pemeliharaan Tanaman pada Areal PBPH	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Ha	3450	Ha	3450	Ha	3450	Ha	3450	Ha	3450	Ha	3450	Ha	3450	24150
				B.4	Pemeliharaan Tanaman pada Areal APL HGU dan Non HGU	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Ha	3450	Ha	3450	Ha	3450	Ha	3450	Ha	3450	Ha	3450	Ha	3450	24150
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																					338240	

Tabel Rencana Operasional (RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Ampang Plampang

Luasan (ha/RO)	Tujuan Program	Program		Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)	
							Anggaran/Tahun															
							2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp		
30,260.57	Aksi pengurangan emisi	A	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	A.1	Sosialisasi kebakaran hutan dan lahan	KPH Ampang Plampang, TNI Polri, Pemerintah setempat, NGO terkait		Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
				A.2	Patroli kebakaran hutan dan lahan	KPH Ampang Plampang, TNI Polri, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket
				A.3	Kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin dan luar kawasan hutan	KPH Ampang Plampang, TNI Polri, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
	Aksi Mempertahankan Serapan	B	Pengamanan Hutan dan Lahan	B.1	Sosialisasi pengamanan hutan dan lahan	KLHK, DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
				B.2	Patroli pengamanan hutan dan lahan	KLHK, DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
				B.3	Kegiatan pencegahan perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum di bebani izin dan luar kawasan hutan	KLHK, DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
				B.4	Penataan Batas Areal	KLHK, DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket		Paket		Paket	40	Paket		Paket		Paket	40	Paket		80
				C	Konservasi Kehati	C.1	Sosialisasi Konservasi Kehati	KLHK, DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket

				C.2	Identifikasi dan inventarisasi keanekaragaman hayati (Flora dan Fauna)	KLHK, DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
				C.3	Survei Populasi Satwa, penyusunan dan pemantauan action plan konservasi Satwa	KLHK, DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
				C.4	Identifikasi potensi Jasling dan Wisata Alam	KLHK, DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
				C.5	Upaya konservasi melalui HCVF	KLHK, DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	 Ha	20	 Ha	20	 Ha	20	 Ha	20	 Ha	20	 Ha	20	140
				C.6	Rescue Satwa yang dilindungi	KLHK, DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
				C.7	Pemantauan peredaran Flora dan fauna yang dilindungi	KLHK, DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
				C.8	Menjaga koridor satwa	KLHK, DLHK, KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	350
	Aksi meningkatkan serapan	D	Penanaman dan Pengayaan tanaman	D.1	Kegiatan penanaman dan pengayaan tanaman pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin serta areal penggunaan lainnya pada areal hutan dan luar kawasan hutan.	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, BPDAS	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
	Kelembagaan	E	Pemberdayaan Masyarakat	E.1	Pendampingan dan Monev kegiatan perlindungan Keanekaragaman Hayati	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
				E.2	Pembinaan MPA dan peningkatan SDM	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat , NGO terkait	APBN/APBD/ Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
				E.3	Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD/ Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420

				E.4	Pendampingan dan pembinaan kelembagaan KTH (Kelompok Tani Hutan	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD/ Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																					6940	

Tabel Rencana Operasional (RO 12 Pengelolaan Mangrove) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Ampang Plampang

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
						Anggaran/Tahun														
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	
692.89	Aksi Mengurangi emisi	A. Pengamanan dan pencegahan kawasan dari kegiatan Konversi lahan	A.1 Sosialisasi Pelestarian kawasan Mangrove	DLHK, KPH Ampang Plampang Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerinth setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
			A.2 Patroli Pengamanan Hutan Mangrove	KPH Ampang Plampang, TNI Polri	APBN/APBD/ Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
			A.3 Pencegahan dan penanggulangan kegiatan konversi lahan mangrove	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
	Aksi peningkatan Seraya Emisi	B. Penanaman	B.1 Penataan Batas Areal	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	..Ha	4655	..Ha	4655	..Ha	4655	..Ha	4655	..Ha	4655	..Ha	4655	..Ha	4655	32585
			B.2 Penanaman Mangrove	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	..Ha	4655	..Ha	4655	..Ha	4655	..Ha	4655	..Ha	4655	..Ha	4655	..Ha	4655	32585
			B.3 Rehabilitasi dalam rangka pemulihan ekosistem mngrove	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Ha	4655	Ha	4655	Ha	4655	Ha	4655	Ha	4655	Ha	4655	Ha	4655	32585
		C. Inventarisasi Mangrove	C.1 Inventarisasi dan identifikasi potensi mangrove	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	..Ha	100	..Ha	100	Ha	100	...Ha	100	Ha	100	Ha	100	...Ha	100	700
			C.2 Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
		Kelembagaan	D. Pemberdayaan Masyarakat	D.1 Pemberdayaan masyarakat setempat/ sekitar hutan	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50

				D.2	Skema multiusaha kehutanan	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
				D.3	Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
				D.4	Pembentukan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata)	KPH Ampang Plampang, pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
		E.	Penyusunan Rencana	E.1	Penyusunan RPHJP dan RPHJPD	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
				E.2	Penyusunan data potensi Mangrove	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
		F.	Peningkatan Kapasitas SDM	F.1	Peningkatan kapasitas POKDARWIS dan KKMD	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
				F.2	Pembentukan dan Pendampingan MPA	KPH Ampang Plampang, Pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
		Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				

BKPH AMPANG RIWO

Lampiran 3. Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di BKPH Ampang Riwo

Tabel Rencana Operasional (RO 1 Pencegahan Deforestasi Mineral) *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di BKPH Ampang Riwo

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)	
						Anggaran/Tahun															
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp		
17,362.28	Aksi Pengurangan emisi	A. Pencegahan Kebakaran	A.1	Identifikasi Kawasan Rawan Kebakaran	KPH Ampang Riwo Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
			A.2	Sosialisasi kawasan rawan kebakaran	KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD/ Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
			A.3	Pengamanan Kawasan Rawan Kebakaran	KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat , Pemadam kebakaran	APBN/APBD/ Donor	Paket	400	Paket	400	Paket	400	Paket	400	Paket	400	Paket	400	Paket	400	2800
			A.4	Pelaksanaan Pembinaan MPA (masyarakat Peduli Api)	KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
			A.5	Penyediaan sarana Prasarana Pemadaman Kebakaran	KPH Ampang Riwo, Pemrintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	560
		B. Penanggulangan Kebakaran	B.1	Koordinasi & Komunikasi antar stakeholders terkait Pemadaman	KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	4	Paket	4	Paket	4	Paket	4	Paket	4	Paket	4	Paket	4	28
			B.2	Pembangunan Kanal Blokong	KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat, PU, DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	160	Paket	160	Paket	160	Paket	160	Paket	160	Paket	160	Paket	160	1120
			B.3	Pemadaman Kebakaran	KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat, Pemadam kebakaran	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
		C. Penanganan Pasca Kebakaran	C.1	Monitoring dan Evaluasi Areal Pasca Kebakaran	DLHK, KPH Ampang Riwo	APBN/APBD/ Donor	paket	40	paket	40	paket	40	paket	40	paket	40	paket	40	paket	40	280
	Aksi Mepertahankan	D. Pengamanan Kawasan Hutan	D.1	Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	DLHK, KPH Ampang Riwo	APBN/APBD/ Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210

	Serapan			D.2	Sosialisasi batas Kawasan KPH	DLHK, KPH Ampang Riwo	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
				D.3	Identifikasi dan Inventarisasi SDH	KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Ha	160	Ha	160	Ha	160	Ha	160	Ha	160	Ha	160	1120
				D.4	Patroli terpadu	TNI Polri , KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
	E.	Pengembangan RIL-C & Penegelolaan SILIN	E.1	Koordinasi dengan pemilik izin untuk pelaksanaan RIL-C dan SILIN	KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat, TNI Polri	APBN/APBD/Donor	Paket	4	Paket	4	Paket	4	Paket	4	Paket	4	Paket	4	28	
			E.2	Sosialisasi pemanenan hutan dengan RIL-C dan Pengelolaan PBPH-HA dengan SILIN	KPH Ampang Riwo, TNI Polri, PT pemilik izin	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210	
	Aksi meningkatkan Serapan	F.	Rehabilitasi	F.1	Rehabilitasi pada Areal Bekas Terbakar	KPH Ampang Rwo, Pemerintah setempat, BPDAS	APBN/APBD/Donor	Ha	18000	Ha	18000	Ha	18000	Ha	18000	Ha	18000	Ha	18000	126000
				F.2	Rehabilitasi pada Kawasan lahan kritis dan terdegradasi	KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat, BPDAS	APBN/APBD/Donor	Ha	18000	Ha	18000	Ha	18000	Ha	18000	Ha	18000	Ha	18000	126000
				F.3	Rehabilitasi di lahan masyarakat (KBR, KBD, HR dll)	KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat, BPDAS	APBN/APBD/Donor	Ha	18000	Ha	18000	Ha	18000	Ha	18000	Ha	18000	Ha	18000	126000
	Kelembagaan	G.	Penguatan Kelembagaan & Sosialisasi	G.1	Pelaksanaan Koordinasi antar Pemangku Kepentingan	DLHK, KPH Ampang Riwo	APBN/APBD/Donor	Paket	4	Paket	Ha	Paket	4	Paket	4	Paket	4	Paket	4	28
				G.2	Sosialisasi Perhutanan Sosial	DLHK, KPH Ampang Riwo, Perhutanan sosial	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	Ha	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
				G.3	Pembentukan dan Pembinaan Perhutanan Sosial	DLHK, KPH Ampang Riwo, Perhutanan sosial	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	Ha	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
				G.4	Kerjasama Kemitraan antara PBPH-HA/ HT/ RE dengan masyarakat sekitar (KULIN KK)	DLHK, KPH Ampang Riwo, PT Pemilik izin	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
				G.5	Penyusunan, pembaharuan dan Pengesahan RPHJP	DLHK, KPH Ampang Riwo	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
				G.6	Pengadaan tenaga POLHUT dan Tenaga Penyuluh Kehutanan	DLHK, KPH Ampang Riwo	APBN/APBD/Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420

				G.7	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelaksana	DLHK, KPH Ampang Riwo	APBN/APBD/Donor	Paket	22	Paket	22	Paket	22	Paket	22	Paket	22	Paket	22	154
				G.8	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas masyarakat pengelola PS dan masyarakat sekitar kawasan kelola (Fasilitasi, Pendampingan dan Pembinaan)	DLHK, KPH Ampang Riwo, Perhutanan sosial	APBN/APBD/Donor	Paket	22	Paket	22	Paket	22	Paket	22	Paket	22	Paket	22	154
				G.9	Fasilitasi dan pelaksanaan pendampingan kelompok tani hutan & bimbingan teknis dalam pengelolaan PS	DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	22	Paket	22	Paket	22	Paket	22	Paket	22	Paket	22	154
				G.10	Pembangunan demplot Agroforestry	DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
				G.11	Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan (Ekowisata, Jasa tata air, dan penyimpanan/ penyerapan karbon)	DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	560
				G.12	Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemanfaatan HHBK dan multi usaha kehutanan pada areal berizin	DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat		Paket	19	Paket	19	Paket	19	Paket	19	Paket	19	Paket	19	133
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				388689

Tabel Rencana Operasional (RO 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Ampang Riwo

Luasan (ha/RO)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)	
						Anggaran/Tahun															
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp		
94.54	Aksi Pengurangan Emisi	A. Pemulihan Ekosistem	A.1	Penentuan dan Penataan Areal Target Pemulihan Ekosistem	DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Ha	150	Ha	150	Ha	150	Ha	150	Ha	150	Ha	150	Ha	150	1050
	A.2		Sosialisasi Kepada Masyarakat terkait kegiatan Reforestasi dan Rehabilitasi Lahan	DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat, NFO terkait	APBN/APBD/Donor	Paket	120	Paket	120	Paket	120	Paket	120	Paket	120	Paket	120	Paket	120	840	
	A.3		Fasilitasi, Pendampingan dan Pembinaan Masyarakat	DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	75	525	
	Aksi meningkatkan serapan	B. Reforestasi dan Rehabilitasi Lahan	B.1	Penanaman/Pengkayaan pada areal bekas tebangan	DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat, BPDAS	APBN/APBD/Donor	Ha	26	Ha	26	Ha	26	Ha	26	Ha	26	Ha	26	Ha	26	182
			B.2	Penanaman pada APL serta Kawasan Hutan yang meliputi HL, HPT, HP, dan KK	DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat, BPDAS	APBN/APBD/Donor	Ha	26	Ha	26	Ha	26	Ha	26	Ha	26	Ha	26	Ha	26	182
			B.3	Penanaman pada Areal PIAPS & PS	DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat, BPDAS	APBN/APBD/Donor	Ha	26	Ha	26	Ha	26	Ha	26	Ha	26	Ha	26	Ha	26	182
			B.4	Penanaman pada areal lahan terbuka & Tanaman Peneduh pada Turus dan Median Jalan	DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat, BPDAS	APBN/APBD/Donor	Ha	26	Ha	26	Ha	26	Ha	26	Ha	26	Ha	26	Ha	26	182
			B.5	Penanaman areal dengan pola kemitraan	DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat, BPDAS	APBN/APBD/Donor	Ha	26	Ha	26	Ha	26	Ha	26	Ha	26	Ha	26	Ha	26	182
			B.6	Rehab DAS	DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat, BPDAS	APBN/APBD/Donor	Ha	26	Ha	26	Ha	26	Ha	26	Ha	26	Ha	26	Ha	26	182
	Kelembagaan	C. Pengembangan Multi Usaha	C.1	Pengembangan multi usaha melalui pola agroforestry	DLHK, KPH Ampang Riwo	APBN/APBD/Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				4207	

Tabel Rencana Operasional (RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Ampang Riwo

Luasan (ha/RO)	Tujuan Program	Program		Kegiatan		PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)												Total Anggaran (Rp x 1.000.000)		
								Anggaran/Tahun														
								2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
								Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp		Satuan	Rp
7,535.35	Aksi Peningkatan Serapan	A	Penanaman	A.1	Penanaman pada Areal KPH	DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Ha	4750	Ha	4750	Ha	4750	Ha	4750	Ha	4750	Ha	4750	Ha	4750	33250
				A.2	Penanaman pada Areal PBPH	DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat, BPDAS, PBPh	APBN/APBD/ Donor	Ha	4750	Ha	4750	Ha	4750	Ha	4750	Ha	4750	Ha	4750	Ha	4750	33250
				A.3	Penanaman pada Areal PS	DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Ha	4750	Ha	4750	Ha	4750	Ha	4750	Ha	4750	Ha	4750	Ha	4750	33250
				A.4	Penanaman pada Areal PIAPS	DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Ha	4750	Ha	4750	Ha	4750	Ha	4750	Ha	4750	Ha	4750	Ha	4750	33250
				A.5	Penanaman pada Areal HGU dan Non HGU	DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat, BPDAS, pBPH	APBN/APBD/ Donor	Ha	4750	Ha	4750	Ha	4750	Ha	4750	Ha	4750	Ha	4750	Ha	4750	33250
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																						166250

Tabel Rencana Operasional (RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Ampang Riwo

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program		Kegiatan		PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
								Anggaran/Tahun																
								2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
								Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
3,157.22	Aksi Peningkatan Serapan	A	Penanaman	A. 1	Penanaman pada Areal Konservasi	DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Ha	2500	Ha	2500	Ha	2500	Ha	2500	Ha	2500	Ha	2500	Ha	2500	17500		
				A. 2	Penanaman pada Areal KPH dan PIAPS	DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Ha	2500	Ha	2500	Ha	2500	Ha	2500	Ha	2500	Ha	2500	Ha	2500	17500		
				A. 3	Penanaman pada Areal PBPH	DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Ha	2500	Ha	2500	Ha	2500	Ha	2500	Ha	2500	Ha	2500	Ha	2500	17500		

				A.4	Penanaman pada Areal APL HGU dan Non HGU	DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	Ha	2500	Ha	2500	Ha	2500	Ha	2500	Ha	2500	Ha	2500	Ha	2500	17500
		B	Pemeliharaan Tanaman	B.1	Pemeliharaan Tanaman pada Areal Konservasi	KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Ha	1000	Ha	1000	Ha	1000	Ha	1000	Ha	1000	Ha	1000	Ha	1000	7000
		B.2		Pemeliharaan Tanaman pada Areal KPH dan PIAPS	KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Ha	1000	Ha	1000	Ha	1000	Ha	1000	Ha	1000	Ha	1000	Ha	1000	7000	
		B.3		Pemeliharaan Tanaman pada Areal PBPH	KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Ha	1000	Ha	1000	Ha	1000	Ha	1000	Ha	1000	Ha	1000	Ha	1000	7000	
		B.4		Pemeliharaan Tanaman pada Areal APL HGU dan Non HGU	KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Ha	1000	Ha	1000	Ha	1000	Ha	1000	Ha	1000	Ha	1000	Ha	1000	7000	
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																					98000	

Tabel Rencana Operasional (RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Ampang Riwo

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program		Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)	
							Anggaran/Tahun															
							2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp		
14,518.38	Aksi pengurangan emisi	A	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	A.1	Sosialisasi kebakaran hutan dan lahan	KPH Ampang Riwo, TNI Polri, Pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
				A.2	Patroli kebakaran hutan dan lahan	KPH Ampang Riwo,, TNI Polri, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
				A.3	Kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin dan luar kawasan hutan	KPH Ampang Riwo,, TNI Polri, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
	Aksi Mempertahankan Serapan	B	Pengamanan Hutan dan Lahan	B.1	Sosialisasi pengamanan hutan dan lahan	KLHK, DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
				B.2	Patroli pengamanan hutan dan lahan	KLHK, DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420

				B.3	Kegiatan pencegahan perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum di bebani izin dan luar kawasan hutan	KLHK, DLHK, KPH Ampang Riwo,, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
				B.4	Penataan Batas Areal	KLHK, DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket		Paket		Paket	40	Paket		Paket		Paket	40	80
		C	Konservasi Kehati	C.1	Sosialisasi Konservasi Kehati	KLHK, DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
				C.2	Identifikasi dan inventarisasi keanekaragaman hayati (Flora dan Fauna)	KLHK, DLHK, KPH KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
				C.3	Survei Populasi Satwa, penyusunan dan pemantauan action plan konservasi Satwa	KLHK, DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
				C.4	Identifikasi potensi Jasling dan Wisata Alam	KLHK, DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
				C.5	Upaya konservasi melalui HCVF	KLHK, DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	 Ha	20	 Ha	20	 Ha	20	 Ha	20	 Ha	20	 Ha	20	140
				C.6	Rescue Satwa yang dilindungi	KLHK, DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
				C.7	Pemantauan peredaran Flora dan fauna yang dilindungi	KLHK, DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
				C.8	Menjaga koridor satwa	KLHK, DLHK, KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	350

	Aksi meningkatkan serapan	D	Penanaman dan Pengayaan tanaman	D.1	Kegiatan penanaman dan pengayaan tanaman pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin serta areal penggunaan lainnya pada areal hutan dan luar kawasan hutan.	KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat, BPDAS	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
	Kelembagaan	E	Pemberdayaan Masyarakat	E.1	Pendampingan dan Monev kegiatan perlindungan Keanekaragaman Hayati	KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
				E.2	Pembinaan MPA dan peningkatan SDM	KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat , NGO terkait	APBN/APBD/Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
				E.3	Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra	KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD/Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
				E.4	Pendampingan dan pembinaan kelembagaan KTH (Kelompok Tani Hutan	KPH Ampang Riwo, Pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD/Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																					7080	

BKPH BATULANTEH

Lampiran 4. Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di BKPH Batulanteh

Tabel Rencana Operasional (RO 1 Pencegahan Deforestasi Mineral) *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di BKPH Batu Lanteh

Luasan (ha/RO)	Tujuan Program	Program		Kegiatan		PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
								Anggaran/Tahun														
								2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	
267.44	Aksi Pengurangan emisi	A.	Pencegahan Kebakaran	A.1	Identifikasi Kawasan Rawan Kebakaran	KPH Batulante h , Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
				A.2	Sosialisasi kawasan rawan kebakaran	KPH Batulante h , Pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
				A.3	Pengamanan Kawasan Rawan Kebakaran	KPH Batulante h , Pemerintah setempat , Pemadam kebakaran	APBN/APBD/ Donor	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	75	525
				A.4	Pelaksanaan Pembinaan MPA (masyarakat Peduli Api)	KPH Batulante h , Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
				A.5	Penyediaan sarana prasarana pemadaman kebakaran	KPH Batulante h , Pemrintah setempat	APBN/APBD/ Donor					Paket	2000							Paket	2000	4000
	B.	Penanggulangan Kebakaran	B.1	Koordinasi & Komunikasi antar stakeholders terkait Pemadaman	KPH Batulante h , Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	3	Paket	3	Paket	3	Paket	3	Paket	3	Paket	3	Paket	3	21	
			B.2	Pembangunan Kanal Bloking	KPH Batulante h , Pemerintah setempat, PU, DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	90	Paket	90	Paket	90	Paket	90	Paket	90	Paket	90	Paket	90	630	
			B.3	Pemadaman Kebakaran	KPH Batulante h , Pemerintah setempat, Pemadam kebakaran	APBN/APBD/ Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210	
	C.	Penanganan Pasca Kebakaran	C.1	Monitoring dan Evaluasi Areal Pasca Kebakaran	DLHK, KPH Batulante h ,	APBN/APBD/ Donor	paket	30	paket	30	paket	30	paket	30	paket	30	paket	30	paket	30	210	
	Aksi Mepertahankan Serapan	D.	Pengamanan Kawasan Hutan	D.1	Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	DLHK, KPH Batulante h ,	APBN/APBD/ Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175
				D.2	Sosialisasi batas Kawasan KPH	DLHK, KPH Batulante h ,	APBN/APBD/ Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175
				D.3	Identifikasi dan Inventarisasi SDH	KPH Batulante h , Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Ha	90	Ha	90	Ha	90	Ha	90	Ha	90	Ha	90	Ha	90	630
				D.4	Patroli terpadu	TNI Polri , KPH Batulante h , Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280

Aksi meningkatkan Serapan	E.	Pengembangan RIL-C & Penegelolaan SILIN	E.1	Koordinasi dengan pemilik izin untuk pelaksanaan RIL-C dan SILIN	KPH Batulante, Pemerintah setempat, TNI Polri	APBN/APBD/Donor	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	35
			E.2	Sosialisasi pemanenan hutan dengan RIL-C dan Pengelolaan PBPH-HA dengan SILIN	KPH Batulante, TNI Polri, PT pemilik izin	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
	F.	Rehabilitasi	F.1	Rehabilitasi pada Areal Bekas Terbakar	KPH Batulante, Pemerintah setempat, BPDAS	APBN/APBD/Donor	Ha	280	Ha	280	Ha	280	Ha	280	Ha	280	Ha	280	Ha	280	1960
			F.2	Rehabilitasi pada Kawasan lahan kritis dan terdegradasi	KPH Batulante, Pemerintah setempat, BPDAS	APBN/APBD/Donor	Ha	280	Ha	280	Ha	280	Ha	280	Ha	280	Ha	280	Ha	280	1960
			F.3	Rehabilitasi di lahan masyarakat (KBR, KBD, HR dll)	KPH Batulante, Pemerintah setempat, BPDAS	APBN/APBD/Donor	Ha	280	Ha	280	Ha	280	Ha	280	Ha	280	Ha	280	Ha	280	1960
	G.	Penguatan Kelembagaan & Sosialisasi	G.1	Pelaksanaan Koordinasi antar Pemangku Kepentingan	DLHK, KPH Batulante,	APBN/APBD/Donor	Paket	3	Paket	3	Paket	3	Paket	3	Paket	3	Paket	3	Paket	3	21
			G.2	Sosialisasi Perhutanan Sosial	KPH Batulante, Perhutanan sosial	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
			G.3	Pembentukan dan Pembinaan Perhutanan Sosial	DLHK, KPH Batulante, Perhutanan sosial	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
			G.4	Kerjasama Kemitraan antara PBPH-HA/ HT/ RE dengan masyarakat sekitar (KULIN KK)	DLHK, KPH Batulante, PT Pemilik izin	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
			G.5	Penyusunan, pembaharuan dan Pengesahan RPHJP	DLHK, KPH Batulante,	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
			G.6	Pengadaan tenaga POLHUT dan Tenaga Penyuluh Kehutanan	DLHK, KPH Batulante,	APBN/APBD/Donor	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	315
			G.7	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelaksana	DLHK, KPH Batulante,	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
			G.8	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas masyarakat pengelola PS dan masyarakat sekitar kawasan kelola (Fasilitasi, Pendampingan dan Pembinaan)	DLHK, KPH Batulante, Perhutanan sosial	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
			G.9	Fasilitasi dan pelaksanaan pendampingan kelompok tani hutan & bimbingan teknis dalam pengelolaan PS	DLHK, KPH Batulante,, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
			G.10	Pembangunan demplot Agroforestry	DLHK, KPH Batulante, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350

				G.11	Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan (Ekowisata, Jasa tata air, dan penyimpanan/ penyerapan karbon)	DLHK,KPH Batulanteh, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	560
				G.12	Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemanfaatan HHBK dan multi usaha kehutanan pada areal berizin	DLHK, KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, DISTANBUN , LITBANG, NGO Terkait	APBN/APBD/ Donor	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	105
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				16992

Tabel Matriks Rencana Operasional (RO 4 Pembangunan Hutan Tanaman) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Batu Lanteh

Luasan (ha/RO)	Tujuan Program	Program		Kegiatan		PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
								Anggaran/Tahun														
								2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	
1,507.51	Aksi Pengurangan Emisi	A .	Pembukaan Lahan	A.1	Sosialisasi Pembukaan Lahan Ramah Lingkungan	KPH Batulanteh,, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGo terkait atau Mitra KLHK/ DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	560
	A.2			Identifikasi lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	560	
	Aksi Mempertahanka n Serapan	B.	Pengamanan Kawasan	B.1	Monitoring dan Evaluasi Areal pda areal Pembangunan Hutan Tanaman	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	75	525
	Aksi meningkatkan Serapan	C.	Penilaian Status Lahan	C.1	Penilaian Kesesuaian Lahan	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
		D .	Penanaman	D.1	Penanaman Hutan Tanaman dengan pola kerja sama kemitraan antara PBPB dengan masyarakat	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGo terkait atau Mitra KLHK/ DLHK, BPDAS	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350

				D.2	Penanaman pada areal Pesetujuan Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat (PPHTR)	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGo terkait atau Mitra KLHK/ DLHK, BPDAS	APBN/APBD/ Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
				D.3	Penerapan sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
	Kelembagaan	E.	Fasilitasi percepatan pengembang an HTE pada PBPH	E.1	Sosialisasi HTE pada PBPH	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGo terkait atau Mitra KLHK/ DLHK, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	560
				E.2	Pembangunan demplot HTE	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGo terkait atau Mitra KLHK/ DLHK, PBPH, PU, Perkim	APBN/APBD/ Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700
				E.3	Integrasi industry HTE	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGo terkait atau Mitra KLHK/ DLHK, PBPH, Disperindag, Disnakerja	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
		F.	Peningkatan Kapasitas SDM	F.1	Fasilitasi dan Pembinaan/Penguatan aparatur KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGo terkait atau Mitra KLHK/ DLHK, PBPH, Disperindag, Disnakerja	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
				F.2	Pengembangan Hutan Tanaman Energi pada KTH (Kelompok Tani Hutan) di KPH	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGo terkait atau Mitra KLHK/ DLHK, PBPH, Disperindag, Disnakerja, LITBANG	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
				F.3	Pengembangan Multiusaha kehutanan	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGo terkait atau Mitra KLHK/ DLHK, PBPH, Disperindag, Disnakerja, LITBANG	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				5355

Tabel Rencana Operasional (RO 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Batu Lanteh

Luasan (ha/ RO)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)	
						Anggaran/Tahun															
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp		
03.35	Aksi Pengurangan Emisi	A. Pemulihan Ekosistem	A.1	Penentuan dan Penataan Areal Target Pemulihan Ekosistem	KPH Batulante h , Pemerintah setempat, KLHK, DLHK,	APBN/APBD/ Donor	Ha	80	Ha	80	Ha	80	Ha	80	Ha	80	Ha	80	Ha	80	560
	A.2		Sosialisasi Kepada Masyarakat terkait kegiatan Reforestasi dan Rehabilitasi Lahan	KPH Batulante h , Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGo terkait atau Mitra KLHK/ DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140	
	A.3		Fasilitasi, Pendampingan dan Pembinaan Masyarakat	KPH Batulante h , Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGo terkait atau Mitra KLHK/ DLHK, Disnakerja	APBN/APBD/ Donor	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	105	
		B. Reforestasi dan	B.1	Penanaman/Pengkayaan pada areal bekas tebangan	KPH Batulante h , Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGo	APBN/APBD/ Donor	Ha	53	Ha	53	Ha	53	Ha	53	Ha	53	Ha	53	Ha	53	371
	Aksi meningkatkan serapan	Rehabilitasi Lahan			terkait atau Mitra KLHK/ DLHK, BPDAS																
			B.2	Penanaman pada APL serta Kawasan Hutan yang meliputi HL, HPT, HP, dan KK	KPH Batulante h , Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/ DLHK, BPDAS	APBN/APBD/ Donor	Ha	53	Ha	53	Ha	53	Ha	53	Ha	53	Ha	53	Ha	53	371
			B.3	Penanaman pada Areal PIAPS & PS	KPH Batulante h , Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/ DLHK, BPDAS	APBN/APBD/ Donor	Ha	53	Ha	53	Ha	53	Ha	53	Ha	53	Ha	53	Ha	53	371
			B.4	Penanaman pada areal lahan terbuka & Tanaman Peneduh pada Turus dan Median Jalan	KPH Batulante h , Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/ DLHK, BPDAS	APBN/APBD/ Donor	Ha	53	Ha	53	Ha	53	Ha	53	Ha	53	Ha	53	Ha	53	371
			B.5	Penanaman areal dengan pola kemitraan	KPH Batulante h , Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/ DLHK, BPDAS	APBN/APBD/ Donor	Ha	53	Ha	53	Ha	53	Ha	53	Ha	53	Ha	53	Ha	53	371
			B.6	Rehab DAS	KPH Batulante h , Pemerintah setempat, KLHK, DLHK,	APBN/APBD/ Donor	Ha	53	Ha	53	Ha	53	Ha	53	Ha	53	Ha	53	Ha	53	371

					NGO terkait atau Mitra KLHK/ DLHK, BPDAS																	
	Kelembagaan	C.	Pengembangan Multi Usaha	C.1	Pengembangan multi usaha melalui pola agroforestry	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, LITBANG, NGO terkait atau Mitra KLHK /DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	245
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																						3276

Tabel Rencana Operasional (RO 6 Penerapan RIL C) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Batu Lanteh

Luasan (ha/RO)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
						Anggaran/Tahun																
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
1,915.95	Aksi Pengurangan Emisi	A																				
	Aksi Mempertahankan serapan	B	Pembukaan Wilayah Hutan	B.1	Pembukaan wilayah Hutan secara terencana pada PBPH- HA/ HT	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420		
				B.2	Penentuan Sistem Silvikultur sesuai karakteristik Tapak (TPTI/TPTJ/SILIN) pada PBPH-HA/ HT	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420		
				B.3	Penerapan RIL dan RIL-C pada PBPH-HA/ HT	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350		
				B.4	Pemanenan dengan menggunakan kearifan lokal setempat pada areal hutan desa	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350		
				B.5	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210		

			B.6	Sosialisasi Sistem Silvikultur dan Praktek RIL C	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210		
Aksi meningkatkan serapan	C					APBN/APBD/Donor															0		
Kelembagaan	D	Pembuatan Peta Areal Kerja dan Penyusunan Rencana	D.1	Pembuatan Peta Areal Kerja menyeluruh pada PBPH-HA/ HT	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	560		
			D.2	Penyusunan Rencana Penebangan pada PBPH-HA/ HT	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420		
		Penyusunan Laporan	D.3	Penyusunan Laporan dan Monev Pengelolaan Hutan Lestari pada PBPH- HA/HT	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420		
			Peningkatan SDM	D.4	Pelatihan internal penerapan RIL dan RIL C pada PBPH- HA/ HT	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	75	525	
		D.5		Peningkatan kapasitas SDM	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH, Disnakerja	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210		
		D.6		Pembinaan masyarakat desa hutan pemanfaatan hasil hutan non-kayu	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH, Disnakerja, LITBANG	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350		
		D.7		Pembinaan dan pendampingan PBPH	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350		
		D.8		Bimbingan teknis perhitungan nilai ekonomi karbon	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350		
				E	Pemberdayaan Masyarakat	E.1	Pengembangan Multi Usaha Kehutanan dan produksi HHBK bersama masyarakat pada PBPH-RE	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH, Disnakerja, Disperindag, LITBANG	APBN/APBD/Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20
			E.2			Pengembangan industry Primer Kehutanan berbasis non kayu	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH, DISTANBUN, LITBANG	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210

		Monev	E.3	Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan (KPH & PBPH)	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																					5775

Tabel Rencana Operasional (RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Batu Lanteh

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program		Kegiatan		PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total
								Anggaran/Tahun														Anggaran
								2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		(Rp x
								Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	1.000.000)
1,904.12	Aksi Peningkatan Serapan	A	Penanaman	A.1	Penanaman pada Areal KPH	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGo terkait atau Mitra KLHK/ DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Ha	1200	Ha	1200	Ha	1200	Ha	1200	Ha	1200	Ha	1200	Ha	1200	8400
				A.2	Penanaman pada Areal PBPH	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGo terkait atau Mitra KLHK/ DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Ha	1200	Ha	1200	Ha	1200	Ha	1200	Ha	1200	Ha	1200	Ha	1200	8400
				A.3	Penanaman pada Areal PS	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/ DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Ha	1200	Ha	1200	Ha	1200	Ha	1200	Ha	1200	Ha	1200	Ha	1200	8400
				A.4	Penanaman pada Areal PIAPS	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/ DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Ha	1200	Ha	1200	Ha	1200	Ha	1200	Ha	1200	Ha	1200	Ha	1200	8400
				A.5	Penanaman pada Areal HGU dan Non HGU	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/ DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Ha	1200	Ha	1200	Ha	1200	Ha	1200	Ha	1200	Ha	1200	Ha	1200	8400
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																						42000

Tabel Rencana Operasional (RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Batu Lanteh

Luasan (ha/ RO)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
						Anggaran/Tahun																
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
1,095.82	Aksi Peningkatan Serapan	A	Penanaman	A.1	Penanaman pada Areal Konservasi	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/ DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Ha	8000	Ha	8000	Ha	8000	Ha	8000	Ha	8000	Ha	8000	Ha	8000	56000
				A.2	Penanaman pada Areal KPH dan PIAPS	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/ DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Ha	8000	Ha	8000	Ha	8000	Ha	8000	Ha	8000	Ha	8000	Ha	8000	56000
				A.3	Penanaman pada Areal PBPH	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/ DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Ha	8000	Ha	8000	Ha	8000	Ha	8000	Ha	8000	Ha	8000	Ha	8000	56000
				A.4	Penanaman pada Areal APL HGU dan Non HGU	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/ DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Ha	8000	Ha	8000	Ha	8000	Ha	8000	Ha	8000	Ha	8000	Ha	8000	56000
		B	Pemeliharaan Tanaman	B.1	Pemeliharaan Tanaman pada Areal Konservasi	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/ DLHK, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Ha	342	Ha	342	Ha	342	Ha	342	Ha	342	Ha	342	Ha	342	2394
				B.2	Pemeliharaan Tanaman pada Areal KPH dan PIAPS	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/ DLHK, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Ha	342	Ha	342	Ha	342	Ha	342	Ha	342	Ha	342	Ha	342	2394
				B.3	Pemeliharaan Tanaman pada Areal PBPH	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/ DLHK, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Ha	342	Ha	342	Ha	342	Ha	342	Ha	342	Ha	342	Ha	342	2394
				B.4	Pemeliharaan Tanaman pada Areal APL HGU dan Non HGU	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/ DLHK, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Ha	342	Ha	342	Ha	342	Ha	342	Ha	342	Ha	342	Ha	342	2394
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																					233576	

Tabel Rencana Operasional (RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Batu Lanteh

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total
						Anggaran/Tahun														Anggaran
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		(Rp x 1.000.000)
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	
12,431.98	Aksi pengurangan emisi	A Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	A.1 Sosialisasi kebakaran hutan dan lahan	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70
			A.2 Patroli kebakaran hutan dan lahan	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175
			A.3 Kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin dan luar kawasan hutan	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	245
	Aksi Mempertahankan Serapan	B Pengamanan Hutan dan Lahan	B.1 Sosialisasi pengamanan hutan dan lahan	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70
			B.2 Patroli pengamanan hutan dan lahan	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175
			B.3 Kegiatan pencegahan perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum di bebani izin dan luar kawasan hutan	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	245
			B.4 Penataan Batas Areal	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
	C Konservasi Kehati	C.1 Sosialisasi Konservasi Kehati	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70	
		C.2 Identifikasi dan inventarisasi keanekaragaman hayati (Flora dan Fauna)	KPH Batulanteh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350	

				C.3	Survei Populasi Satwa, penyusunan dan pemantauan action plan konservasi Satwa	KPH Batulante, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
				C.4	Identifikasi potensi Jasling dan Wisata Alam	KPH Batulante, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Dinas Pariwisata	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
				C.5	Upaya konservasi melalui HCVF	KPH Batulante, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	 Ha	65	 Ha	65	 Ha	65	 Ha	65	 Ha	65	 Ha	65	455
				C.6	Rescue Satwa yang dilindungi	KPH Batulante, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	75	525
				C.7	Pemantauan peredaran Flora dan fauna yang dilindungi	KPH Batulante, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
				C.8	Menjaga koridor satwa	KPH Batulante, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	 Ha	35	 Ha	35	 Ha	35	 Ha	35	 Ha	35	 Ha	35	245
	Aksi meningkatkan serapan	D	Penanaman dan Pengayaan tanaman	D.1	Kegiatan penanaman dan pengayaan tanaman pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin serta areal penggunaan lainnya pada	KPH Batulante, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
					areal hutan dan luar kawasan hutan.															
	Kelembagaan	E	Pemberdayaan Masyarakat	E.1	Pendampingan dan Monev kegiatan perlindungan Keanekaragaman Hayati	KPH Batulante, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	245
				E.2	Pembinaan MPA dan peningkatan SDM	KPH Batulante, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175
				E.3	Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra	KPH Batulante, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Disperindag	APBN/APBD/Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175
				E.4	Pendampingan dan pembinaan kelembagaan KTH (Kelompok Tani Hutan	KPH Batulante, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Disperindag, LITBANG	APBN/APBD/Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				5145

Tabel Rencana Operasional (RO 12 Pengelolaan Mangrove) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Batu Lanteh

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
						Anggaran/Tahun																
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
4.73	Aksi Mengurangi emisi	A. Pengamanan dan pencegahan kawasan dari kegiatan Konversi lahan	A. 1 Sosialisasi Pelestarian kawasan Mangrove	DLHK, KPH Batulanteh Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210		
			A. 2 Patroli Pengamanan Hutan Mangrove	KPH Batulanteh, TNI Polri	APBN/APBD/ Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210		
			A. 3 Pencegahan dan penanggulangan kegiatan konversi lahan mangrove	KPH Batulanteh, pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140		
	Aksi peningkatan Seraya Emisi	B. Penanaman	B.1 Penataan Batas Areal	KPH Batulanteh, pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Ha	115	Ha	115	Ha	115	Ha	115		115	Ha	115	Ha	115	805		
			B.2 Penanaman mangrove	KPH Batulanteh, pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Ha	115	Ha	115	Ha	115	Ha	115		115	Ha	115	Ha	115	805		
			B.3 Rehabilitasi hutan dan lahan mangrove	KPH Batulanteh, pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Ha	115	Ha	115	Ha	115	Ha	115		115	Ha	115	Ha	115	805		
		C. Inventarisasi Mangrove	C.1 Inventarisasi dan identifikasi potensi mangrove	KPH Batulanteh, pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Ha	20	Ha	20	Ha	20	Ha	20		20	Ha	20	Ha	20	140		
			C.2 Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra	KPH Batulanteh, pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Ha	20	Paket	20	140		
		Kelembagaan	D. Pemberdayaan Masyarakat	D.1 Pemberdayaan masyarakat setempat/ sekitar hutan	KPH Batulanteh, pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD/ Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Ha	25	Paket	25	175	
	D.2 Skema multiusaha kehutanan			KPH Batulanteh, pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Ha	20	Paket	20	140		
	D.3 Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah			KPH Batulanteh, pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Ha	30	Paket	30	210		
	D.4 Pembentukan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata)			KPH Batulanteh, pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210		
	E. Penyusunan Rencana		E.1 Penyusunan RPHJP dan RPHJPD	KPH Batulanteh, pemerintah setempat, DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70		

				E.2	Penyusunan data potensi Mangrove	KPH Batulanteh, pemerintah setempat, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70
		F.	Peningkatan Kapasitas SDM	F.1	Peningkatan kapasitas POKDARWIS dan KKMD	KPH Batulanteh, pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD/Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70
				F.2	Pembentukan dan Pendampingan MPA	KPH Batulanteh, pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD/Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																						4200

BKPH BRANG BEH

Lampiran 5. Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di BKPH Brang Beh

Tabel Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di BKPH Brang Beh

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
						Anggaran/Tahun																
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp					
9,900.10	Aksi pengurangan emisi	A Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	A.1 Sosialisasi kebakaran hutan dan lahan	Balai KPH Brang Beh, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Pemerintah setempat	- Kegiatan Sosialisasi kawasan rawan kebakaran dilakukan 5 kali dalam setahun dengan target Desa-Desa sekitar kawasan hutan pada wilayah kerja Balai KPH Brang Beh (5 Desa) dengan melibatkan unsur pemdes dan tokoh masyarakat. - Perkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 5.000.000/Kegiatan (komponen biaya makan minum peserta dan perjalan dinas pelaksana kegiatan) dengan total kebutuhan anggaran dalam 1 tahun sebesar Rp. 25.000.000.	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175				
			A.2 Patroli kebakaran hutan dan lahan	Balai KPH Brang Beh, Pemerintah Setempat, TNI/POLRI	- Pencegahan Kawasan Rawan Kebakaran dalam rangka pencegahan kawasan hutan menggunakan metode patroli rutin pada lokasi rawan kebakaran yang dilakukan sebanyak 10 kali selama 5 bulan (Juli-November) dengan asumsi 2 kegiatan/bulan. Luas kawasan hutan yang diamankan sebesar ± 5.000 Ha (luas areal terbuka dalam kawasan hutan pada wilayah kerja Balai KPH Brang Beh. Kegiatan melibatkan unsur Pemdes dan Unsur Keamanan (TNI & Polri) di tingkat desa. - Perkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 6.000.000/Kegiatan (komponen biaya perjalanan dinas pelaksana kegiatan) dengan total kebutuhan anggaran dalam 1 tahun sebesar Rp. 60.000.000.	Perjalan an Dinas	60	Perjalan an Dinas	60	Perjalan an Dinas	60	Perjalan an Dinas	60	Perjalan an Dinas	60	Perjalan an Dinas	60	420				
			A.3 Kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin dan luar kawasan hutan	Balai KPH Brang Beh, Pemerintah Setempat, TNI/POLRI	- Kegiatan pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dilakukan dilakukan dengan menurunkan tim pada lokasi titik api ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kerja Balai KPH Brang Beh. Asumsi perkiraan terjadi 20 kali aktifitas pemadaman kebakaran kawasan. Kegiatan melibatkan unsur Pemdes dan Unsur Keamanan (TNI & Polri) di tingkat desa. - Perkiraan kebutuhan biaya dalam 1 tahun sebesar Rp. 60.000.000	Perjalan an Dinas	60	Perjalan an Dinas	60	Perjalan an Dinas	60	Perjalan an Dinas	60	Perjalan an Dinas	60	Perjalan an Dinas	60	420				

						(Kompenen biaya perjalanan dinas pelaksana kegiatan)																	
Aksi Mempertahankan Serapan	B	Pengamanan Hutan dan Lahan	B.1	Sosialisasi pengamanan hutan dan lahan	Balai KPH Brang Beh, Pemerintah Setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK, DLHK, KLHK	- Kegiatan sosialisasi perlindungan dan pengamanan hutan dilakukan dengan metode pertemuan pada 5 Desa yang berbatasan dengan kawasan hutan wilayah kerja Balai KPH Brang Beh sebanyak 2 kali dalam setahun dengan total 10 Kegiatan dalam setahun. Kegiatan melibatkan unsur pemdes dan tokoh masyarakat. - Total kebutuhan biaya per kegiatan sebesar Rp. 5.000.000/Kegiatan (komponen biaya makan minum peserta dan perjalanan dinas pelaksana kegiatan) dengan total kebutuhan biaya dalam 1 tahun sebesar Rp. 50.000.000	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350		
			B.2	Patroli pengamanan hutan dan lahan	Balai KPH Brang Beh, Pemerintah setempat, TNI/POLRI	- Kegiatan patroli terpadu dilaksanakan dengan melibatkan unsur pengamanan (TNI/Polri) pada titik-titik yang dianggap rawan terjadinya gangguan keamanan hutan atau berdasarkan laporan lapangan terkait tindakan gangguan kemanan hutan yang sedang terjadi. - Kegiatan dijadwalkan sebanyak 2 kali dalam satu bulan sepanjang tahun dengan total pelaksanaan 24 kegiatan dengan melibatkan Unsur Keamanan (TNI & Polri) di tingkat desa. - Perkiraan kebutuhan biaya sebesar Rp. 5.000.000/Kegiatan (Komponen biaya perjalanan dinas pelaksana kegiatan) dengan total kebutuhan 1 tahun sebesar Rp. 120.000.000	Perjalan an Dinas	120	Perjalan an Dinas	120	Perjalan an Dinas	120	Perjalan an Dinas	120	Perjalan an Dinas	120	Perjalan an Dinas	120	840				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

				E.2	Pembinaan MPA dan peningkatan SDM	Balai KPH Brang Beh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait/Mitra KLHK, Disnakerja	- Kegiatan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) dilakukan dengan melakukan pembentukan MPA dan melakukan pelatihan rutin setiap tahun. Masyarakat Peduli Api ditargetkan dibentuk pada desa yang berbatasan dengan kawasan hutan pada wilayah kerja Balai KPH Brang Beh (5 Desa). - Perkiraan kebutuhan dana pertahun sebesar Rp. 15.000.000 (Komponen biaya makan minum peserta pelatihan dan perjalanan dinas pelaksana kegiatan)	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	105
				E.3	Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra	Balai KPH Brang Beh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait/Mitra KLHK, Disperindag, Disnakerja		Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		0
				E.4	Pendampingan dan pembinaan kelembagaan KTH (Kelompok Tani Hutan)	Balai KPH Brang Beh, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait/Mitra KLHK, Disperindag, Disnakerja	- Kegiatan pendampingan KTH dan bimbingan teknis difokuskan pada aspek kelola kawasan dan kelola usaha dari kelompok, dengan bentuk kegiatan berupa pelatihan yang diperlukan oleh kelompok dengan menghadirkan narasumber jika diperlukan. - Kegiatan bimbingan teknis berbasis pada Desa sekitar kawasan yang memiliki kelompok PS (5 Desa) dan dilakukan sebanyak satu kali dalam satu tahun. - Perkiraan kebutuhan biaya per kegiatan sebesar Rp. 7.000.000 (komponen biaya makan minum peserta, perjalanan dinas pelaksana kegiatan dan honor narasumber)dengan total kebutuhan dalam 1 tahun sebesar Rp. 35.000.000	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	245
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																					3673	

BKPH BRANG REA PUNCAK NGENGAS

Lampiran 6. Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Brang Rea Puncak Ngengas

Tabel Rencana Operasional (RO 1 Pencegahan Deforestasi Mineral) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Brang Rea Puncak Ngengas

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan		PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
							Anggaran/Tahun														
							2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	
742.71	Aksi Pengurangan emisi	A. Pencegahan Kebakaran	A.1	Identifikasi Kawasan Rawan Kebakaran	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140		
			A.2	Sosialisasi kawasan rawan kebakaran	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK/Mitra KLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175		
			A.3	Pengamanan Kawasan Rawan Kebakaran	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350		
			A.4	Pelaksanaan Pembinaan MPA (masyarakat Peduli Api)	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	245		
			A.5	Penyediaan sarana Prasarana Pemadaman Kebakaran	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor					Paket	2000					Paket	2000	4000		
	B. Penanggulangan Kebakaran	B.1	Koordinasi & Komunikasi antar stakeholders terkait Pemadaman	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140	
		B.2	Pembangunan Kanal Bloking	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, PU, Perkim	APBN/APBD/ Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700	
		B.3	Pemadaman Kebakaran	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350	
	C. Penanganan Pasca Kebakaran	C.1	Monitoring dan Evaluasi Areal Pasca Kebakaran	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	350	
	Aksi Mepertahankan	D. Pengamanan Kawasan Hutan	D.1	Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK/Mitra KLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280

Serapan			D.2	Sosialisasi batas Kawasan KPH	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK/Mitra KLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
			D.3	Identifikasi dan Inventarisasi SDH	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK/Mitra KLHK	APBN/APBD/Donor	Ha	50	Ha	50	Ha	50	Ha	50	Ha	50	Ha	50	Ha	50	350
			D.4	Patroli terpadu	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, TNI/POLRI	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
		E. Pengembangan RIL-C & Penegelolaan SILIN	E.1	Koordinasi dengan pemilik izin untuk pelaksanaan RIL-C dan SILIN	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, PBPH terkait, KLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	35
			E.2	Sosialisasi pemanenan hutan dengan RIL-C dan Pengelolaan PBPH-HA dengan SILIN	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, PBPH terkait, KLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
Aksi meningkatkan Serapan	F.	Rehabilitasi	F.1	Rehabilitasi pada Areal Bekas Terbakar	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, BPDAS, DLHK, KLHK	APBN/APBD/Donor	Ha	800	Ha	800	Ha	800	Ha	800	Ha	800	Ha	800	Ha	800	5600
			F.2	Rehabilitasi pada Kawasan lahan kritis dan terdegradasi	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, BPDAS, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	Ha	800	Ha	800	Ha	800	Ha	800	Ha	800	Ha	800	Ha	800	5600
			F.3	Rehabilitasi di lahan masyarakat (KBR, KBD, HR dll)	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Ha	800	Ha	800	Ha	800	Ha	800	Ha	800	Ha	800	Ha	800	5600
	Kelembagaan	G. Penguatan Kelembagaan & Sosialisasi	G.1	Pelaksanaan Koordinasi antar Pemangku Kepentingan	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	3	Paket	3	Paket	3	Paket	3	Paket	3	Paket	3	Paket	3	21
			G.2	Sosialisasi Perhutanan Sosial	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
			G.3	Pembentukan dan Pembinaan Perhutanan Sosial	KLHK, KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
			G.4	Kerjasama Kemitraan antara PBPH-HA/ HT/ RE dengan masyarakat sekitar (KULIN KK)	KLHK, KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
			G.5	Penyusunan, pembaharuan dan Pengesahan RPHJP	KLHK, KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK/Mitra	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210

Tabel Rencana Operasional (RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Brang Rea Puncak Ngengas

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
						Anggaran/Tahun																
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
77.72	Aksi Peningkatan Serapan	A	Penanaman	A.1	Penanaman pada Areal KPH	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH		..Ha	150	..Ha	150	..Ha	150	..Ha	150	..Ha	150	..Ha	150	1050		
				A.2	Penanaman pada Areal PBPH	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN / APBD / Donor	..Ha	388	..Ha	388	..Ha	388	..Ha	388	..Ha	388	..Ha	388	2716		
				A.3	Penanaman pada Areal PS	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN / APBD / Donor	..Ha	388	..Ha	388	..Ha	388	..Ha	388	..Ha	388	..Ha	388	2716		
				A.4	Penanaman pada Areal PIAPS	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN / APBD / Donor	..Ha	388	..Ha	388	..Ha	388	..Ha	388	..Ha	388	..Ha	388	2716		
				A.5	Penanaman pada Areal HGU dan Non HGU	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN / APBD / Donor	..Ha	388	..Ha	388	..Ha	388	..Ha	388	..Ha	388	..Ha	388	2716		
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				11914		

Tabel Rencana Operasional (RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Brang Rea Puncak Ngengas

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
						Anggaran/Tahun														
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	
270.40	Aksi Peningkatan Serapan	A	Penanaman	A.1	Penanaman pada Areal Konservasi	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	... Ha	210	... Ha	210	... Ha	210	... Ha	210	... Ha	210	... Ha	210	1470
			A.2	Penanaman pada Areal KPH dan PIAPS	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	... Ha	210	... Ha	210	... Ha	210	... Ha	210	... Ha	210	... Ha	210	1470	
			A.3	Penanaman pada Areal PBPH	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	... Ha	210	... Ha	210	... Ha	210	... Ha	210	... Ha	210	... Ha	210	1470	
			A.4	Penanaman pada Areal APL HGU dan Non HGU	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau	APBN/APBD/ Donor	... Ha	210	... Ha	210	... Ha	210	... Ha	210	... Ha	210	... Ha	210	1470	

[illegible]

Tabel Rencana Operasional (RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Brang Rea Puncak Ngengas

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)	
						Anggaran/Tahun															
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp		
51,506.19	Aksi pengurangan emisi	A Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	A.1	Sosialisasi kebakaran hutan dan lahan	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK		Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
			A.2	Patroli kebakaran hutan dan lahan	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI		Paket	125	Paket	125	Paket	125	Paket	125	Paket	125	Paket	125	Paket	125	875
			A.3	Kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin dan luar kawasan hutan	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI		Paket	175	Paket	175	Paket	175	Paket	175	Paket	175	Paket	175	Paket	175	1225
	Aksi Mempertahankan Serapan	B Pengamanan Hutan dan Lahan	B.1	Sosialisasi pengamanan hutan dan lahan	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK		Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
			B.2	Patroli pengamanan hutan dan lahan	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI		Paket	125	Paket	125	Paket	125	Paket	125	Paket	125	Paket	125	Paket	125	875
			B.3	Kegiatan pencegahan perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum di bebani izin dan luar kawasan hutan	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI		Paket	175	Paket	175	Paket	175	Paket	175	Paket	175	Paket	175	Paket	175	1225
			B.4	Penataan Batas Areal	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah		Paket	250	Paket	250	Paket	250	Paket	250	Paket	250	Paket	250	Paket	250	1750

				setempat, KLHK, DLHK																
		C	Konservasi Kehati	C.1	Sosialisasi Konservasi Kehati	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NOo terkait atau Mitra KLHK/DLHK		Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
				C.2	Identifikasi dan inventarisasi keanekaragaman hayati (Flora dan Fauna)	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK		Paket	250	Paket	250	Paket	250	Paket	250	Paket	250	Paket	250	1750
				C.3	Survei Populasi Satwa, penyusunan dan pemantauan action plan konservasi Satwa	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK		Paket	250	Paket	250	Paket	250	Paket	250	Paket	250	Paket	250	1750
				C.4	Identifikasi potensi Jasling dan Wisata Alam	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Dinas Pariwisata		Paket	250	Paket	250	Paket	250	Paket	250	Paket	250	Paket	250	1750
				C.5	Upaya konservasi melalui HCVF	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK		 Ha	625	 Ha	625	 Ha	625	 Ha	625	 Ha	625	 Ha	625	4375
				C.6	Rescue Satwa yang dilindungi	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK		Paket	875	Paket	875	Paket	875	Paket	875	Paket	875	Paket	875	6125
				C.7	Pemantauan peredaran Flora dan fauna yang dilindungi	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK		Paket	250	Paket	250	Paket	250	Paket	250	Paket	250	Paket	250	1750
				C.8	Menjaga koridor satwa	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK		 Ha	175	 Ha	175	 Ha	175	 Ha	175	 Ha	175	 Ha	175	1225
	Aksi meningkatkan serapan	D	Penanaman dan Pengayaan tanaman	D.1	Kegiatan penanaman dan pengayaan tanaman pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin serta areal penggunaan lainnya pada areal hutan dan luar kawasan hutan.	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI		Paket	250	Paket	250	Paket	250	Paket	250	Paket	250	Paket	250	1750
	Kelembagaan	E	Pemberdayaan Masyarakat	E.1	Pendampingan dan Monev kegiatan perlindungan Keanekaragaman	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah		Paket	175	Paket	175	Paket	175	Paket	175	Paket	175	Paket	175	1225

			Hayati	setempat, KLHK, DLHK															
			E.2	Pembinaan MPA dan peningkatan SDM	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK		Paket	125	Paket	125	Paket	125	Paket	125	Paket	125	Paket	125	875
			E.3	Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Disperindag		Paket	125	Paket	125	Paket	125	Paket	125	Paket	125	Paket	125	875
			E.4	Pendampingan dan pembinaan kelembagaan KTH (Kelompok Tani Hutan	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Disperindag, LITBANG		Paket	125	Paket	125	Paket	125	Paket	125	Paket	125	Paket	125	875
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																			31325

Tabel Rencana Operasional (RO 12 engelolaan Mangrove) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Brang Rea Puncak Ngengas

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
						Anggaran/Tahun																
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
7.42	Aksi Mengurangi emisi	A. Pengamanan dan pencegahan kawasan dari kegiatan Konversi lahan	A.1	Sosialisasi Pelestarian kawasan Mangrove	DLHK, KPH Brang Rea Puncak Ngengas Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerintah setempat		Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420	
			A.2	Patroli Pengamanan Hutan Mangrove	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, TNI Polri		Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420	
			A.3	Pencegahan dan penanggulangan kegiatan konversi lahan mangrove	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat		Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350	
	Aksi peningkatan	B. Penanaman	B.1	Penataan Batas Areal	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat		..Ha	150	..Ha	150	..Ha	150	..Ha	150	..Ha	150	..Ha	150	..Ha	150	1050	

	Seraya Emisi			B.2	Penanaman mangrove	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat		..Ha	150	..Ha	150	..Ha	150	..Ha	150	..Ha	150	..Ha	150	1050
				B.3	Rehabilitasi hutan dan lahan mangrove	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat		...Ha	150	...Ha	150	...Ha	150	...Ha	150	...Ha	150	...Ha	150	1050
		C.	Inventarisasi Mangrove	C.1	Inventarisasi dan identifikasi potensi mangrove	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat		Ha	50	Ha	50	Ha	50	Ha	50	Ha	50	Ha	50	350
				C.2	Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, NGO terkait		Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
	Kelembagaan	D.	Pemberdayaan Masyarakat	D.1	Pemberdayaan masyarakat setempat/ sekitar hutan	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, NGO terkait		Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	245
				D.2	Skema multiusaha kehutanan	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat		Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	245
				D.3	Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat		Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	245
				D.4	Pembentukan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata)	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat		Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
		E.	Penyusunan Rencana	E.1	Penyusunan RPHJP dan RPHJPD	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, DLHK		Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
				E.2	Penyusunan data potensi Mangrove	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, DLHK		Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
		F.	Peningkatan Kapasitas SDM	F.1	Peningkatan kapasitas POKDARWIS dan KKMD	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, NGO terkait		Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
				F.2	Pembentukan dan Pendampingan MPA	KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Pemerintah setempat, NGO terkait		Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				7245

BKPH MADAPANGGA ROMPU WAWORADA

Lampiran 7. Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Madapangga Rompu Waworada

Tabel Rencana Operasional (RO 1 Pencegahan Deforestasi Mineral) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Madapangga Rompu Waworada

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan		PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total
							Anggaran/Tahun														Anggaran (Rp x 1.000.000)
							2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	
28,264.54	Aksi Pengurangan emisi	A. Pencegahan Kebakaran	A.1	Identifikasi Kawasan Rawan Kebakaran	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
			A.2	Sosialisasi kawasan rawan kebakaran	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
			A.3	Pengamanan Kawasan Rawan Kebakaran	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor														0	
			A.4	Pelaksanaan Pembinaan MPA (masyarakat Peduli Api)	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
			A.5	Penyediaan sarana Prasarana Pemadaman Kebakaran	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor				Paket	2000							Paket	2000	4000	
		B. Penanggulangan Kebakaran	B.1	Koordinasi & Komunikasi antar stakeholders terkait Pemadaman	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	35
			B.2	Pembangunan Kanal Bloking	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, PU, Perkim	APBN/APBD/ Donor	Paket	200	Paket	200	Paket	200	Paket	200	Paket	200	Paket	200	Paket	200	1400
			B.3	Pemadaman Kebakaran	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
		C. Penanganan Pasca Kebakaran	C.1	Monitoring dan Evaluasi Areal Pasca Kebakaran	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	350
		Aksi Mepertahankan Serapan	D. Pengamanan Kawasan Hutan	D.1	Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40
D.2	Sosialisasi batas Kawasan KPH			KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, NGO terkait atau	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280	

[illegible]

				G.7	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelaksana	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
				G.8	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas masyarakat pengelola PS dan masyarakat sekitar kawasan kelola (Fasilitasi, Pendampingan dan Pembinaan)	KLHK, KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
				G.9	Fasilitasi dan pelaksanaan pendampingan kelompok tani hutan & bimbingan teknis dalam pengelolaan PS	KLHK, KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
				G.10	Pembangunan demplot Agroforestry	KLHK, KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket		Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	300
				G.11	Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan (Ekowisata, Jasa tata air, dan penyimpanan/ penyerapan karbon)	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, KLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700
				G.12	Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemanfaatan HHHK dan multi usaha kehutanan pada areal berizin	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG	APBN/APBD/Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				641720

Tabel Rencana Operasional (RO 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Madapangga Rompu Waworada

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)	
						Anggaran/Tahun															
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Satuan n	Rp	Satuan n	Rp	Satuan n	Rp	Satuan n	Rp	Satuan n	Rp	Satuan n	Rp	Satuan n	Rp		
1,195.55	Aksi Pengurangan Emisi	A. Pemulihan Ekosistem	A. 1	Penentuan dan Penataan Areal Target Pemulihan Ekosistem	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK,	APBN/APBD/ Donor	...Ha	650	 Ha	650	 Ha	650	 Ha	650	 Ha	650	 Ha	650	 Ha	650	4550
	A. 2		Sosialisasi Kepada Masyarakat terkait kegiatan Reforestasi dan Rehabilitasi Lahan	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	260	Paket	260	Paket	260	Paket	260	Paket	260	Paket	260	Paket	260	1820	
	A. 3		Fasilitasi, Pendampingan dan Pembinaan Masyarakat	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Disnakerja	APBN/APBD/ Donor	Paket	162	Paket	162	Paket	162	Paket	162	Paket	162	Paket	162	Paket	162	1134	
	Aksi meningkatkan serapan	B. Reforestasi dan Rehabilitasi Lahan	B.1	Penanaman/Pengkayaan pada areal bekas tebangan	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD/ Donor	 Ha	1700	 Ha	1700	 Ha	350	 Ha	350	 Ha	350	 Ha	350	 Ha	350	5150
			B.2	Penanaman pada APL serta Kawasan Hutan yang meliputi HL, HPT, HP, dan KK	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD/ Donor	 Ha	1700	 Ha	1700	 Ha	350	 Ha	650	 Ha	650	 Ha	650	 Ha	650	6350
			B.3	Penanaman pada Areal PIAPS & PS	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD/ Donor	 Ha	1700	 Ha	1700	 Ha	350	 Ha	650	 Ha	650	 Ha	650	 Ha	650	6350
			B.4	Penanaman pada areal lahan terbuka & Tanaman Peneduh pada Turus dan Median Jalan	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD/ Donor	 Ha	1700	 Ha	1700	 Ha	350	 Ha	650	 Ha	650	 Ha	650	 Ha	650	6350
			B.5	Penanaman areal dengan pola kemitraan	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD/ Donor	 Ha	1700	 Ha	1700	 Ha	350	 Ha	650	 Ha	650	 Ha	650	 Ha	650	6350
			B.6	Rehab DAS	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD/ Donor	 Ha	1700	 Ha	1700	 Ha	350	 Ha	650	 Ha	650	 Ha	650	 Ha	650	6350
	Kelembagaan	C. Pengembangan Multi Usaha	C.1	Pengembangan multi usaha melalui pola agroforestry	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, LITBANG, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	324	Paket	324	Paket	324	Paket	324	Paket	324	Paket	324	Paket	324	2268
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				46672	

Tabel Rencana Operasional (RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Madapangga Rompu Waworada

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
						Anggaran/Tahun																
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
12,007.74	Aksi Peningkatan Serapan	A	Penanaman	A.1	Penanaman pada Areal KPH	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	 Ha	7500	 Ha	7500	 Ha	7500	 Ha	7500	 Ha	7500	 Ha	7500	 Ha	7500	52500
				A.2	Penanaman pada Areal PBPH	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	 Ha	7500	 Ha	7500	 Ha	7500	 Ha	7500	 Ha	7500	 Ha	7500	 Ha	7500	52500
				A.3	Penanaman pada Areal PS	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	 Ha	7500	 Ha	7500	 Ha	7500	 Ha	7500	 Ha	7500	 Ha	7500	 Ha	7500	52500
				A.4	Penanaman pada Areal PIAPS	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	 Ha	7500	 Ha	7500	 Ha	7500	 Ha	7500	 Ha	7500	 Ha	7500	 Ha	7500	52500
				A.5	Penanaman pada Areal HGU dan Non HGU	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	 Ha	7500	 Ha	7500	 Ha	7500	 Ha	7500	 Ha	7500	 Ha	7500	 Ha	7500	52500
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																						262500

Tabel Rencana Operasional (RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Madapangga Rompu Waworada

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
						Anggaran/Tahun														
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	
4,211.93	Aksi Peningkatan Serapan	A	Penanaman	A.1 Penanaman pada Areal Konservasi	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	 Ha	3300	 Ha	3300	 Ha	3300	 Ha	3300	 Ha	3300	 Ha	3300	23100	
				A.2 Penanaman pada Areal KPH dan PIAPS	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	 Ha	3300	 Ha	3300	 Ha	3300	 Ha	3300	 Ha	3300	 Ha	3300	23100	
				A.3 Penanaman pada Areal PBPH	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra	APBN/APBD/ Donor	 Ha	3300	 Ha	3300	 Ha	3300	 Ha	3300	 Ha	3300	 Ha	3300	23100	

[illegible][illegible]

[illegible]

	Aksi meningkatkan serapan	D	Penanaman dan Pengayaan tanaman	D.1	Kegiatan penanaman dan pengayaan tanaman pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin serta areal penggunaan lainnya pada areal hutan dan luar kawasan hutan.	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD/Donor	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	3500
	Kelembagaan	E	Pemberdayaan Masyarakat	E.1	Pendampingan dan Monev kegiatan perlindungan Keanekaragaman Hayati	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	3500
				E.2	Pembinaan MPA dan peningkatan SDM	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	3500
				E.3	Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Disperindag	APBN/APBD/Donor	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	3500
				E.4	Pendampingan dan pembinaan kelembagaan KTH (Kelompok Tani Hutan	KPH Madapangga Rompu Waworada, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Disperindag, LITBANG	APBN/APBD/Donor	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	3500
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				71239

BKPH MARIA DONGGOMASA

Lampiran 8. Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di BKPH Maria Donggomasa

Tabel Rencana Operasional (RO 1 Pencegahan Deforestasi Mineral) *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di BKPH Maria Donggomasa

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan		PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total
							Anggaran/Tahun																Anggaran (Rp x 1.000.000)
							2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
4139.05	Aksi Pengurangan emisi	A. Pencegahan Kebakaran	A.1	Identifikasi Kawasan Rawan Kebakaran	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140				
			A.2	Sosialisasi kawasan rawan kebakaran	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280				
			A.3	Pengamanan Kawasan Rawan Kebakaran	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350				
			A.4	Pelaksanaan Pembinaan MPA (masyarakat Peduli Api)	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350				
			A.5	Penyediaan sarana Prasarana Pemadaman Kebakaran	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor				Paket	2000						Paket	2000	4000				
	B. Penanggulangan Kebakaran	B.1	Koordinasi & Komunikasi antar stakeholders terkait Pemadaman	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	35					
		B.2	Pembangunan Kanal Bloking	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, PU, Perkim	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350					
		B.3	Pemadaman Kebakaran	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350					
	C. Penanganan Pasca Kebakaran	C.1	Monitoring dan Evaluasi Areal Pasca Kebakaran	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	350					
	Aksi Mepertahankan Serapan	D. Pengamanan Kawasan Hutan	D.1	Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280				
D.2			Sosialisasi batas Kawasan KPH	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280					

			D.3	Identifikasi dan Inventarisasi SDH	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	350
			D.4	Patroli terpadu	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, TNI/POLRI	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
		E. Pengembangan RIL-C & Penegelolaan SILIN	E.1	Koordinasi dengan pemilik izin untuk pelaksanaan RIL-C dan SILIN	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, , PBPH terkait, KLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	35
			E.2	Sosialisasi pemanenan hutan dengan RIL-C dan Pengelolaan PBPH-HA dengan SILIN	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, , PBPH terkait, KLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
	Aksi meningkatkan Serapan	F. Rehabilitasi	F.1	Rehabilitasi pada Areal Bekas Terbakar	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, BPDAS, DLHK, KLHK	APBN/APBD/Donor	 Ha	4350	 Ha	4350	 Ha	4350	 Ha	4350	 Ha	4350	 Ha	4350	 Ha	4350	30450
			F.2	Rehabilitasi pada Kawasan lahan kritis dan terdegradasi	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, BPDAS, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	 Ha	4350	 Ha	4350	 Ha	4350	 Ha	4350	 Ha	4350	 Ha	4350	 Ha	4350	30450
			F.3	Rehabilitasi di lahan masyarakat (KBR, KBD, HR dll)	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	 Ha	4350	 Ha	4350	 Ha	4350	 Ha	4350	 Ha	4350	 Ha	4350	 Ha	4350	30450
	Kelembagaan	G.	G.1	Pelaksanaan Koordinasi antar Pemangku Kepentingan	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	35
		Penguatan Kelembagaan & Sosialisasi	G.2	Sosialisasi Perhutanan Sosial	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
			G.3	Pembentukan dan Pembinaan Perhutanan Sosial	KLHK, KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
			G.4	Kerjasama Kemitraan antara PBPH-HA/ HT/ RE dengan masyarakat sekitar (KULIN KK)	KLHK, KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
			G.5	Penyusunan, pembaharuan dan Pengesahan RPHJP	KLHK, KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
			G.6	Pengadaan tenaga POLHUT dan Tenaga Penyuluh Kehutanan	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, KLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
			G.7	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelaksana	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
			G.8	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas masyarakat pengelola PS dan masyarakat sekitar kawasan kelola (Fasilitasi, Pendampingan dan Pembinaan)	KLHK, KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210

				G.9	Fasilitasi dan pelaksanaan pendampingan kelompok tani hutan & bimbingan teknis dalam pengelolaan PS	KLHK, KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
				G.10	Pembangunan demplot Agroforestry	KLHK, KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
				G.11	Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan (Ekowisata, Jasa tata air, dan penyimpanan/ penyerapan karbon)	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, KLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	315
				G.12	Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemanfaatan HHBK dan multi usaha kehutanan pada areal berizin	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG	APBN/APBD/ Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				102175

Tabel Rencana Operasional (RO 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Maria Donggomasa

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program		Kegiatan		PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
								Anggaran/Tahun																
								2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
								Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
92.81	Aksi Pengurangan Emisi	A .	Pemulihan Ekosistem	A. 1	Penentuan dan Penataan Areal Target Pemulihan Ekosistem	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK,	APBN/APBD/ Donor	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	350				
	A. 2			Sosialisasi Kepada Masyarakat terkait kegiatan Reforestasi dan Rehabilitasi Lahan	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280					
	A. 3			Fasilitasi, Pendampingan dan Pembinaan Masyarakat	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Disnakerja	APBN/APBD/ Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175					
	Aksi meningkatkan serapan	B.	Reforestasi dan	B.1	Penanaman/Pengkayaan pada areal bekas tebangan	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD/ Donor	..Ha	26	..Ha	26	..Ha	26	..Ha	26	..Ha	26	..Ha	26	182				

			Rehabilitasi Lahan	B.2	Penanaman pada APL serta Kawasan Hutan yang meliputi HL, HPT, HP, dan KK	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD/Donor	 Ha	26	 Ha	26	 Ha	26	 Ha	26	 Ha	26	 Ha	26	182
				B.3	Penanaman pada Areal PIAPS & PS	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD/Donor	 Ha	26	 Ha	26	 Ha	26	 Ha	26	 Ha	26	 Ha	26	182
				B.4	Penanaman pada areal lahan terbuka & Tanaman Peneduh pada Turus dan Median Jalan	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD/Donor	 Ha	26	 Ha	26	 Ha	26	 Ha	26	 Ha	26	 Ha	26	182
				B.5	Penanaman areal dengan pola kemitraan	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD/Donor	 Ha	26	 Ha	26	 Ha	26	 Ha	26	 Ha	26	 Ha	26	182
				B.6	Rehab DAS	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD/Donor	 Ha	26	 Ha	26	 Ha	26	 Ha	26	 Ha	26	 Ha	26	182
				Kelembagaan	C.	Pengembangan Multi Usaha	C.1	Pengembangan multi usaha melalui pola agroforestry	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, LITBANG, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				2247

Tabel Rencana Operasional (RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Maria Donggomasa

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)	
						Anggaran/Tahun															
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp		
3729.05	Aksi Peningkatan Serapan	A	Penanaman	A.1 Penanaman pada Areal KPH	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	..Ha	7000	..Ha	7000	..Ha	7000	..Ha	7000	..Ha	7000	..Ha	7000	..Ha	7000	49000
			A.2 Penanaman pada Areal PBPH	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	..Ha	7000	..Ha	7000	..Ha	7000	..Ha	7000	..Ha	7000	..Ha	7000	..Ha	7000	49000	
			A.3 Penanaman pada Areal PS	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	..Ha	7000	..Ha	7000	..Ha	7000	..Ha	7000	..Ha	7000	..Ha	7000	..Ha	7000	49000	

			A.4	Penanaman pada Areal PIAPS	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	..Ha	7000	..Ha	7000	..Ha	7000	..Ha	7000	..Ha	7000	..Ha	7000	49000
			A.5	Penanaman pada Areal HGU dan Non HGU	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	..Ha	7000	..Ha	7000	..Ha	7000	..Ha	7000	..Ha	7000	..Ha	7000	49000
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																			245000

Tabel Rencana Operasional (RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Maria Donggomasa

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program		Kegiatan		PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
								Anggaran/Tahun																
								2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
								Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
3011.49	Aksi Peningkatan Serapan	A	Penanaman	A.1	Penanaman pada Areal Konservasi	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	... Ha	8630	... Ha	8630	... Ha	8630	... Ha	8630	... Ha	8630	... Ha	8630	60410				
				A.2	Penanaman pada Areal KPH dan PIAPS	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	... Ha	8630	... Ha	8630	... Ha	8630	... Ha	8630	... Ha	8630	... Ha	8630	60410				
				A.3	Penanaman pada Areal PBPH	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	... Ha	8630	... Ha	8630	... Ha	8630	... Ha	8630	... Ha	8630	... Ha	8630	60410				
				A.4	Penanaman pada Areal APL HGU dan Non HGU	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	... Ha	8630	... Ha	8630	... Ha	8630	... Ha	8630	... Ha	8630	... Ha	8630	60410				
		B	Pemeliharaan Tanaman	B.1	Pemeliharaan Tanaman pada Areal Konservasi	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD/ Donor	... Ha	3450	... Ha	3450	... Ha	3450	... Ha	3450	... Ha	3450	... Ha	3450	24150				
				B.2	Pemeliharaan Tanaman pada Areal KPH dan PIAPS	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD/ Donor	... Ha	3450	... Ha	3450	... Ha	3450	... Ha	3450	... Ha	3450	... Ha	3450	24150				
				B.3	Pemeliharaan Tanaman pada Areal PBPH	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD/ Donor	... Ha	3450	... Ha	3450	... Ha	3450	... Ha	3450	... Ha	3450	... Ha	3450	24150				
				B.4	Pemeliharaan Tanaman pada Areal APL HGU dan	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau	APBN/APBD/ Donor	... Ha	3450	... Ha	3450	... Ha	3450	... Ha	3450	... Ha	3450	... Ha	3450	24150				

		C	Konservasi Kehati	C.1	Sosialisasi Konservasi Kehati	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
				C.2	Identifikasi dan inventarisasi keanekaragaman hayati (Flora dan Fauna)	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700
				C.3	Survei Populasi Satwa, penyusunan dan pemantauan action plan konservasi Satwa	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
				C.4	Identifikasi potensi Jasling dan Wisata Alam	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Dinas Pariwisata	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
				C.5	Upaya konservasi melalui HCVF	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	700
				C.6	Rescue Satwa yang dilindungi	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
				C.7	Pemantauan peredaran Flora dan fauna yang dilindungi	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
				C.8	Menjaga koridor satwa	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	350
	Aksi meningkatkan serapan	D	Penanaman dan Pengayaan tanaman	D.1	Kegiatan penanaman dan pengayaan tanaman pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin serta areal penggunaan lainnya pada areal hutan dan luar kawasan hutan.	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
	Kelembagaan	E	Pemberdayaan Masyarakat	E.1	Pendampingan dan Monev kegiatan perlindungan Keanekaragaman Hayati	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
				E.2	Pembinaan MPA dan peningkatan SDM	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350

				E.3	Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Disperindag	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
				E.4	Pendampingan dan pembinaan kelembagaan KTH (Kelompok Tani Hutan	KPH Maria Donggomasa, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Disperindag, LITBANG	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				7560

Tabel Rencana Operasional (RO 12 Pengelolaan Mangrove) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Maria Donggomasa

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
						Anggaran/Tahun																
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
1.55	Aksi Mengurangi emisi	A. Pengamanan dan pencegahan kawasan dari kegiatan Konversi lahan	A. 1 Sosialisasi Pelestarian kawasan Mangrove	DLHK, KPH Maria Donggomasa Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280		
			A. 2 Patroli Pengamanan Hutan Mangrove	KPH Maria Donggomasa, TNI Polri	APBN/APBD/ Donor	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	245		
			A. 3 Pencegahan dan penanggulangan kegiatan konversi lahan mangrove	KPH Maria Donggomasa, pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350		
	Aksi peningkatan Seraya Emisi	B. Penanaman	B.1 Penataan Batas Areal	KPH Maria Donggomasa, pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	..Ha	77	..Ha	77	..Ha	77	..Ha	77	..Ha	77	..Ha	77	..Ha	77	539		
			B.2 Penanaman mangrove	KPH Maria Donggomasa, pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Ha	77	Ha	77	Ha	77	Ha	77	Ha	77	Ha	77	Ha	77	539		
			B.3 Rehabilitasi hutan dan lahan mangrove	KPH Maria Donggomasa, pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Ha	77	Ha	77	Ha	77	Ha	77	Ha	77	Ha	77	Ha	77	539		
		C. Inventarisasi Mangrove	C.1 Inventarisasi dan identifikasi potensi mangrove	KPH Maria Donggomasa, pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Ha	45	Ha	45	Ha	45	Ha	45	Ha	45	Ha	45	Ha	45	315		
			C.2 Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra	KPH Maria Donggomasa, pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140		
		Kelembagaan	D. Masyarakat	D.1 Pemberdayaan masyarakat setempat/ sekitar hutan	KPH Maria Donggomasa, pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140	
	D.2 Skema multiusaha kehutanan			KPH Maria Donggomasa,	APBN/APBD/	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140		

				pemerintah setempat	Donor														
		D.3	Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah	KPH Maria Donggomasa, pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140	
		D.4	Pembentukan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata)	KPH Maria Donggomasa, pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210	
	E.	Penyusunan Rencana	E.1	Penyusunan RPHJP dan RPHJPD	KPH Maria Donggomasa, pemerintah setempat, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	175	
			E.2	Penyusunan data potensi Mangrove	KPH Maria Donggomasa, pemerintah setempat, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	175	
	F.	Peningkatan Kapasitas SDM	F.1	Peningkatan kapasitas POKDARWIS dan KKMD	KPH Maria Donggomasa, pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD/Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	175	
			F.2	Pembentukan dan Pendampingan MPA	KPH Maria Donggomasa, pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD/Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	175	
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																			4277

BKPH ORONG TELU

Lampiran 9. Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Orong Telu

Tabel Rencana Operasional (RO 1 Pencegahan Deforestasi Mineral) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Orong Telu

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan		PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
							Anggaran/Tahun														
							2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	
314.28	Aksi Pengurangan emisi	A. Pencegahan Kebakaran	A.1	Identifikasi Kawasan Rawan Kebakaran	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140
			A.2	Sosialisasi kawasan rawan kebakaran	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	245
			A.3	Pengamanan Kawasan Rawan Kebakaran	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	245
			A.4	Pelaksanaan Pembinaan MPA (masyarakat Peduli Api)	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	245
			A.5	Penyediaan sarana Prasarana Pemadaman Kebakaran	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
	B. Penanggulangan Kebakaran	B.1	Koordinasi & Komunikasi antar stakeholders terkait Pemadaman	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	35	
		B.2	Pembangunan Kanal Bloking	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, PU, Perkim	APBN/APBD/ Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210	
		B.3	Pemadaman Kebakaran	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210	
	C. Penanganan Pasca Kebakaran	C.1	Monitoring dan Evaluasi Areal Pasca Kebakaran	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	paket	30	paket	30	paket	30	paket	30	paket	30	paket	30	paket	30	210	
	Aksi Mepertahankan Serapan	D. Pengamanan Kawasan Hutan	D.1	Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
D.2			Sosialisasi batas Kawasan KPH	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra	APBN/APBD/ Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175	

					KLHK/DLHK																
			D.3	Identifikasi dan Inventarisasi SDH	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	 Ha	25	 Ha	25	 Ha	25	 Ha	25	 Ha	25	 Ha	25	 Ha	25	175
			D.4	Patroli terpadu	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, TNI/POLRI	APBN/APBD/Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175
	E.	Pengembangan RIL-C & Penegelolaan SILIN	E.1	Koordinasi dengan pemilik izin untuk pelaksanaan RIL-C dan SILIN	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, PBPH terkait, KLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	35
			E.2	Sosialisasi pemanenan hutan dengan RIL-C dan Pengelolaan PBPH-HA dengan SILIN	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, PBPH terkait, KLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
Aksi meningkatkan Serapan	F.	Rehabilitasi	F.1	Rehabilitasi pada Areal Bekas Terbakar	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, BPDAS, DLHK, KLHK	APBN/APBD/Donor	... Ha	2770	... Ha	2770	... Ha	2770	... Ha	2770	... Ha	2770	... Ha	2770	... Ha	2770	19390
			F.2	Rehabilitasi pada Kawasan lahan kritis dan terdegradasi	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, BPDAS, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	... Ha	2770	... Ha	2770	... Ha	2770	... Ha	2770	... Ha	2770	... Ha	2770	... Ha	2770	19390
			F.3	Rehabilitasi di lahan masyarakat (KBR, KBD, HR dll)	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	... Ha	2770	... Ha	2770	... Ha	2770	... Ha	2770	... Ha	2770	... Ha	2770	... Ha	2770	19390
Kelembagaan	G.	Penguatan Kelembagaan & Sosialisasi	G.1	Pelaksanaan Koordinasi antar Pemangku Kepentingan	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	35
			G.2	Sosialisasi Perhutanan Sosial	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
			G.3	Pembentukan dan Pembinaan Perhutanan Sosial	KLHK, KPH Orong Telu, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	245
			G.4	Kerjasama Kemitraan antara PBPH-HA/ HT/ RE dengan masyarakat sekitar (KULIN KK)	KLHK, KPH Orong Telu, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
			G.5	Penyusunan, pembaharuan dan Pengesahan RPHJP	KLHK, KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	245
			G.6	Pengadaan tenaga POLHUT dan Tenaga Penyuluh Kehutanan	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
			G.7	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelaksana	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210

				G.8	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas masyarakat pengelola PS dan masyarakat sekitar kawasan kelola (Fasilitasi, Pendampingan dan Pembinaan)	KLHK, KPH Orong Telu, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
				G.9	Fasilitasi dan pelaksanaan pendampingan kelompok tani hutan & bimbingan teknis dalam pengelolaan PS	KLHK, KPH Orong Telu, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
				G.10	Pembangunan demplot Agroforestry	KLHK, KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	245
				G.11	Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan (Ekowisata, Jasa tata air, dan penyimpanan/ penyerapan karbon)	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, KLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175
				G.12	Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemanfaatan HHHBK dan multi usaha kehutanan pada areal berizin	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG	APBN/APBD/Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				63630

Tabel Rencana Operasional (RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Orong Telu

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
						Anggaran/Tahun																
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
6.10	Aksi Peningkatan Serapan	A	A.1	Penanaman pada Areal KPH	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	... Ha	6470	... Ha	6470	... Ha	6470	... Ha	6470	... Ha	6470	... Ha	6470	45290			
			A.2	Penanaman pada Areal PBPH	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	... Ha	6470	... Ha	6470	... Ha	6470	... Ha	6470	... Ha	6470	... Ha	6470	45290			

				A.3	Penanaman pada Areal PS	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	... Ha	6470	... Ha	6470	... Ha	6470	... Ha	6470	... Ha	6470	... Ha	6470	45290
				A.4	Penanaman pada Areal PIAPS	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	... Ha	6470	... Ha	6470	... Ha	6470	... Ha	6470	... Ha	6470	... Ha	6470	45290
				A.5	Penanaman pada Areal HGU dan Non HGU	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	... Ha	6470	... Ha	6470	... Ha	6470	... Ha	6470	... Ha	6470	... Ha	6470	45290
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				226450

Tabel Rencana Operasional (RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Orong Telu

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program		Kegiatan		PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
								Anggaran/Tahun																
								2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
								Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
16576.56	Aksi pengurangan emisi	A	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	A.1	Sosialisasi kebakaran hutan dan lahan	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK		Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280				
				A.2	Patroli kebakaran hutan dan lahan	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI		Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280				
				A.3	Kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin dan luar kawasan hutan	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI		Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350				
	Aksi Mempertahankan Serapan	B	Pengamanan Hutan dan Lahan	B.1	Sosialisasi pengamanan hutan dan lahan	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK		Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280				
				B.2	Patroli pengamanan hutan dan lahan	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI		Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280				

				B.3	Kegiatan pencegahan perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum di bebani izin dan luar kawasan hutan	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI		Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
				B.4	Penataan Batas Areal	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK		Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700
		C	Konservasi Kehati	C.1	Sosialisasi Konservasi Kehati	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK		Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700
				C.2	Identifikasi dan inventarisasi keanekaragaman hayati (Flora dan Fauna)	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK		Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700
				C.3	Survei Populasi Satwa, penyusunan dan pemantauan action plan konservasi Satwa	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK		Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
				C.4	Identifikasi potensi Jasling dan Wisata Alam	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Dinas Pariwisata		Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
				C.5	Upaya konservasi melalui HCVF	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK		 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	350
				C.6	Rescue Satwa yang dilindungi	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK		Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
				C.7	Pemantauan peredaran Flora dan fauna yang dilindungi	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK		Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
				C.8	Menjaga koridor satwa	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK		 Ha	30	 Ha	30	 Ha	30	 Ha	30	 Ha	30	 Ha	30	210
	Aksi meningkatkan serapan	D	Penanaman dan Pengayaan tanaman	D.1	Kegiatan penanaman dan pengayaan tanaman pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin serta areal penggunaan lainnya pada areal hutan dan luar kawasan hutan.	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI		Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
	Kelembagaan	E	Pemberdayaan Masyarakat	E.1	Pendampingan dan Monev kegiatan perlindungan Keanekaragaman Hayati	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK		Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700
				E.2	Pembinaan MPA dan peningkatan SDM	KPH Orong Telu, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK,		Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700

[illegible]

BKPH PELANGAN TASTURA

Lampiran 10. Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di BKPH Pelangan Tastura

Tabel Rencana Operasional (RO 1 Pencegahan Deforestasi Mineral) *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di BKPH Pelangan Tastura

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)	Sumberdana
						Anggaran/Tahun																	
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030					
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp				
1871.53	Aksi Pengurangan emisi	A .	Pencegahan Kebakaran	A.1	Identifikasi Kawasan Rawan Kebakaran	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat	- Kegiatan Identifikasi dilakukan dengan metode patroli rutin dan pendataan titik- titik rawan kebakaran pada wilayah kerja Balai KPH Brang Beh. - Kegiatan pendataan dilakukan 1 bulan sekali selama 6 bulan periode Januari - Juni.		Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140	APBN/APBD/ Donor	
			A.2	Sosialisasi kawasan rawan kebakaran	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	- Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan dengan tujuan penyadartahuan masyarakat terkait bahaya, dampak dan cara pencegahan kebakaran hutan dan lahan. - Kegiatan sosialisasi mengundang masyarakat pinggir kawasan, para ketua kelompok mitra KPH, dan tokoh-tokoh masyarakat di desa sekitar kawasan hutan		Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280	APBN/APBD/ Donor		
			A.3	Pengamanan Kawasan Rawan Kebakaran	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI	- Pencegahan dan Pengamanan Kawasan Rawan Kebakaran dilaksanakan dengan metode patroli rutin pada lokasi rawan kebakaran. - Luas kawasan hutan yang diamankan sebesar ± 5.000 Ha.		Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	315	APBN/APBD/ Donor		
			A.4	Pelaksanaan Pembinaan MPA (masyarakat Peduli Api)	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat		Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	315	APBN/APBD/ Donor	

				A.5	Penyediaan sarana Prasarana Pemadaman Kebakaran	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat	- Kegiatan penyediaan sarana Prasarana Pemadaman Kebakaran dilakukan dengan metode pengadaan peralatan dan sarpras pemadam kebakaran dan kendaraan bermotor untuk mendukung operasional lapangan.					Paket	2000						Paket	2000	4000	APBN/APBD/Donor	
		B. Penanggulangan Kebakaran	B.1	Koordinasi & Komunikasi antar stakeholders terkait Pemadaman	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat	- Kegiatan koordinasi & komunikasi antar stakeholder dilakukan dengan unsur pengamanan (TNI/Polri) dengan asumsi kegiatan dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun.		Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	35	APBN/APBD/Donor
			B.2	Pembangunan Kanal Bloking	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, PU, Perkim			Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	315	APBN/APBD/Donor
			B.3	Pemadaman Kebakaran	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, Pemadam	- Kegiatan pemadaman kebakaran dilakukan dilakukan dengan menurunkan tim pada lokasi titik api		Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	315	APBN/APBD/Donor
					Kebakaran, TNI/POLRI	ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kerja Balai																	
		C. Penanganan Pasca Kebakaran	C.1	Monitoring dan Evaluasi Areal Pasca Kebakaran	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat	- Kegiatan monitoring dan evaluasi areal pasca kebakaran dilakukan dengan metode turun lapangan pada lokasi-lokasi terjadinya kebakaran kawasan hutan. - Kegiatan dilakukan pada Bulan Desember dengan asumsi kebutuhan biaya per tahun sebesar Rp. 11.000.000.		paket	45	paket	45	paket	45	paket	45	paket	45	paket	45	paket	45	315	APBN/APBD/Donor
Aksi Mepertahankan Serapan	D .	Pengamanan Kawasan Hutan	D.1	Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	- Kegiatan sosialisasi perlindungan dan pengamanan hutan dilakukan dengan metode pertemuan pada Desa- Desa yang berbatasan dengan kawasan hutan wilayah kerja Balai KPH		Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280	APBN/APBD/Donor
			D.2	Sosialisasi batas Kawasan Konservasi (KSA & KPA)	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK			Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280	APBN/APBD/Donor

				D.3	Identifikasi dan Inventarisasi SDH	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat atau Mitra KLHK/DLHK	- Kegiatan identifikasi dilakukan dengan menerjunkan tim pendataan di lapangan dengan tujuan mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi tegakan kayu bernilai komersial tinggi (sebagai data awal untuk titik strategis pengamanan kawasan) dan potensi HHBK (sebagai data awal untuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan)	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	315	APBN/APBD/Donor
				D.4	Patroli terpadu	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, TNI/POLRI	- Kegiatan patroli terpadu dilaksanakan dengan melibatkan unsur pengamanan (TNI/Polri) pada titik-titik yang dianggap rawan terjadinya gangguan keamanan hutan.	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280	APBN/APBD/Donor
		E. Pengembangan RIL-C & Penegelolaan SILIN	E.1	Koordinasi dengan pemilik izin untuk pelaksanaan RIL-C dan SILIN	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, , PBPH terkait, KLHK			Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	35	APBN/APBD/Donor
			E.2	Sosialisasi pemanenan hutan dengan RIL-C dan Pengelolaan PBPH-HA dengan SILIN	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, , PBPH terkait, KLHK			Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280	APBN/APBD/Donor
Aksi meningkatkan Serapan	F. Rehabilitasi	F.1	Rehabilitasi pada Areal Bekas Terbakar	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, BPDAS, DLHK, KLHK	- Kegiatan Rehabilitasi pada areal bekas terbakar dilakukan dengan penanaman tanaman produktif	H a	195 0	H a	195 0	H a	195 0	H a	195 0	H a	195 0	H a	195 0	H a	195 0	H a	195 0	13650	APBN/APBD/Donor		
		F.2	Rehabilitasi pada Kawasan lahan kritis dan terdegradasi	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, BPDAS, KLHK, DLHK	- Kegiatan Rehabilitasi pada Kawasan lahan kritis dilakukan dengan pembuatan demplot HHBK pada kawasan hutan yang masuk kedalam kategori kritis. - Demplot HHBK dibangun berbasis wilayah resort dari Balai KPH Brang Beh (One Resort One Demplot/OROD)	H a	195 0	H a	195 0	H a	195 0	H a	195 0	H a	195 0	H a	195 0	H a	195 0	H a	195 0	13650	APBN/APBD/Donor		

				F.3	Rehabilitasi di lahan masyarakat (KBR, KBD, HR dll)	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat	- Rehabilitasi di lahan masyarakat dilakukan dengan pembangunan hutan rakyat, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kayu lokal sehingga dapat mengurangi tekanan kebutuhan kayu terhadap kawasan hutan.	H a	195 0	H a	195 0	H a	195 0	H a	195 0	H a	195 0	H a	195 0	H a	1950	13650	APBN/APBD/ Donor
Kelembagaan	G	Penguatan Kelembagaan & Sosialisasi	G.1	Pelaksanaan Koordinasi antar Pemangku Kepentingan	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat		Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	35	APBN/APBD/ Donor	
			G.2	Sosialisasi Perhutanan Sosial	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat	- Kegiatan sosialisasi perhutanan sosial dilakukan berbasis pada desa-desa yang berbatasan dengan kawasan hutan pada wilayah kerja Balai KPH Pelangan Tastura	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280	APBN/APBD/ Donor	
			G.3	Pembentukan dan Pembinaan Perhutanan Sosial	KLHK, KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat	- Pembentukan kelompok Perhutanan Sosial ditargetkan sebanyak 1 kelompok per tahun.	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350	APBN/APBD/ Donor	
			G.4	Kerjasama Kemitraan antara PBPH-HA/ HT/ RE dengan masyarakat sekitar (KULIN KK)	KLHK, KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat		Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280	APBN/APBD/ Donor	
			G.5	Penyusunan, pembaharuan dan Pengesahan RPHJP	KLHK, KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	- Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) dilakukan setiap tahun dengan perkiraan kebutuhan biaya sebesar Rp. 2.000.000 - Pembaharuan (revisi) Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dijadwalkan dilakukan pada tahun 2024 dengan perkiraan kebutuhan biaya sebesar Rp. 5.000.000 - Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan periode 2030-2040 dijadwalkan dilakukan pada tahun 2030 dengan perkiraan kebutuhan biaya sebesar Rp. 10.000.000	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350	APBN/APBD/ Donor	

			G.6	Pengadaan tenaga POLHUT dan Tenaga Penyuluh Kehutanan	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, KLHK		Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	315	APBN/APBD/Donor
			G.7	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelaksana	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG	- Pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur dilakukan dengan koordinasi dengan Pusat Diklat lingkup Kementerian LHK dengan target setiap tahun mengirimkan dua tenaga teknis.	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210	APBN/APBD/Donor
			G.8	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas masyarakat pengelola PS dan masyarakat sekitar kawasan kelola (Fasilitasi, Pendampingan dan Pembinaan)	KLHK, KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat	- Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat pengelolaan PS difokuskan pada peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok dengan target kegiatan pembinaan dan pendampingan kelompok	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210	APBN/APBD/Donor
			G.9	Fasilitasi dan pelaksanaan pendampingan kelompok tani hutan & bimbingan teknis dalam pengelolaan PS	KLHK, KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat	- Kegiatan pendampingan KTH dan bimbingan teknis difokuskan pada aspek kelola kawasan dan kelola usaha dari kelompok, dengan bentuk kegiatan berupa pelatihan yang diperlukan oleh kelompok dengan menghadirkan narasumber jika diperlukan. - Kegiatan bimbingan teknis berbasis pada Desa sekitar kawasan yang memiliki kelompok PS dan dilakukan sebanyak satu kali dalam satu tahun.	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210	APBN/APBD/Donor
			G.10	Pembangunan demplot Agroforestry	KLHK, KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	- Pembangunan demplot agroforestry dengan bibit produktif okulasi dilakukan pada lahan garapan kelompok Perhutanan Sosial	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175	APBN/APBD/Donor

				G.1 1	Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan (Ekowisata, Jasa tata air, dan penyimpanan/ penyerapan karbon)	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, KLHK		Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	315	APBN/APBD/Donor
				G.1 2	Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemanfaatan HHBK dan multi usaha kehutanan pada areal berizin	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG	- Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan HHBK pada areal berizin dilakukan dengan memberikan pelatihan teknis terkait budidaya dan pengolahan hasil HHBK.	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175	APBN/APBD/Donor
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				51355	

Tabel Rencana Operasional (RO 4 Pembangunan Hutan Tanaman) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Pelangan Tastura

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total
						Anggaran/Tahun																Anggaran
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		(Rp x		
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	1.000.000)		
26.65	Aksi Pengurangan Emisi	A. Pembukaan Lahan	A.1 Sosialisasi Pembukaan Lahan Ramah Lingkungan	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	PAKET	30	PAKET	30	PAKET	30	PAKET	30	PAKET	30	PAKET	30	PAKET	30	210		
	Aksi Mempertahankan Serapan		A.2 Identifikasi lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman	KPH Pelangan Tastura,, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD /Donor	PAKET	45	PAKET	45	PAKET	45	PAKET	45	PAKET	45	PAKET	45	PAKET	45	315		
			A.3 Penataan Areal Kerja	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD /Donor	PAKET	25	PAKET	25	PAKET	25	PAKET	25	PAKET	25	PAKET	25	PAKET	25	175		
	Aksi meningkatkan Serapan	B. Pengamanan Kawasan	B.1 Monitoring dan Evaluasi Areal pda areal Pembangunan Hutan Tanaman	KPH Pelangan Tastura,, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD /Donor	PAKET	30	PAKET	30	PAKET	30	PAKET	30	PAKET	30	PAKET	30	PAKET	30	210		
		C. Penilaian Status Lahan	C.1 Penilaian Kesesuaian Lahan	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD /Donor	PAKET	25	PAKET	25	PAKET	25	PAKET	25	PAKET	25	PAKET	25	PAKET	25	175		

		D.	Penanaman	D.1	Penanaman Hutan Tanaman dengan pola kerja sama kemitraan	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, /Donor	APBN/APBD	PAKET	50	PAKET	50	PAKET	50	PAKET	50	PAKET	50	PAKET	50	350
					antara PBPH dengan masyarakat	DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS														
				D.2	Penanaman pada areal Pesetujuan Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat (PPHTR)	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD /Donor	PAKET	50	PAKET	50	PAKET	50	PAKET	50	PAKET	50	PAKET	50	350
				D.3	Penerapan sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD /Donor	PAKET	30	PAKET	30	PAKET	30	PAKET	30	PAKET	30	PAKET	30	210
	Kelembagaan	E.	Fasilitasi percepatan pengembangan HTE pada PBPH	E.1	Sosialisasi HTE pada PBPH	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD /Donor	PAKET	30	PAKET	30	PAKET	30	PAKET	30	PAKET	30	PAKET	30	210
				E.2	Pembangunan demplot HTE	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH, PU, Perkim	APBN/APBD /Donor	PAKET	50	PAKET	50	PAKET	50	PAKET	50	PAKET	50	PAKET	50	350
				E.3	Integrasi industry HTE	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH, Disperindag, Disnakerja	APBN/APBD /Donor	PAKET	50	PAKET	50	PAKET	50	PAKET	50	PAKET	50	PAKET	50	350
		F.	Peningkatan Kapasitas SDM	F.1	Fasilitasi dan Pembinaan/Penguatan aparatur KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH, Disperindag, Disnakerja	APBN/APBD /Donor	PAKET	45	PAKET	45	PAKET	45	PAKET	45	PAKET	45	PAKET	45	315
				F.2	Pengembangan Hutan Tanaman Energi pada KTH (Kelompok Tani Hutan) di KPH	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH, Disperindag, Disnakerja, LITBANG	APBN/APBD /Donor	PAKET	35	PAKET	35	PAKET	35	PAKET	35	PAKET	35	PAKET	35	245

				F.3	Pengembangan Multiusaha kehutanan	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH, Disperindag, Disnakerja, LITBANG	APBN/APBD /Donor	PAKET	35	PAKET	35	PAKET	35	PAKET	35	PAKET	35	PAKET	35	245
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				3710

Tabel Rencana Operasional (RO 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Pelangan Tastura

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program		Kegiatan		PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
								Anggaran/Tahun														
								2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	
77.83	Aksi Pengurangan Emisi	A.	Pemulihan Ekosistem	A.1	Penentuan dan Penataan Areal Target Pemulihan Ekosistem	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK,	APBN/APBD/ Donor	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	700
	A.2			Sosialisasi Kepada Masyarakat terkait kegiatan Reforestasi dan Rehabilitasi Lahan	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	315	
				A.3	Fasilitasi, Pendampingan dan Pembinaan Masyarakat	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Disnakerja	APBN/APBD/ Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175
	Aksi meningkatkan serapan	B.	Reforestasi dan Rehabilitasi Lahan	B.1	Penanaman/Pengkayaan pada areal bekas tebangan	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD/ Donor	... Ha	64	... Ha	64	... Ha	64	... Ha	64	... Ha	64	... Ha	64	... Ha	64	448
				B.2	Penanaman pada APL serta Kawasan Hutan yang meliputi HL, HPT, HP, dan KK	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD/ Donor	... Ha	64	... Ha	64	... Ha	64	... Ha	64	... Ha	64	... Ha	64	... Ha	64	448
				B.3	Penanaman pada Areal PIAPS & PS	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD/ Donor	... Ha	64	... Ha	64	... Ha	64	... Ha	64	... Ha	64	... Ha	64	... Ha	64	448

				B.4	Penanaman pada areal lahan terbuka & Tanaman Peneduh pada Turus dan Median Jalan	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD/Donor	... Ha	64	... Ha	64	... Ha	64	... Ha	64	... Ha	64	... Ha	64	448
				B.5	Penanaman areal dengan pola kemitraan	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD/Donor	... Ha	64	... Ha	64	... Ha	64	... Ha	64	... Ha	64	... Ha	64	448
				B.6	Rehab DAS	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD/Donor	... Ha	64	... Ha	64	... Ha	64	... Ha	64	... Ha	64	... Ha	64	448
	Kelembagaan	C.	Pengembangan Multi Usaha	C.1	Pengembangan multi usaha melalui pola agroforestry	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, LITBANG, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				4228

Tabel Rencana Operasional (RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Pelangan Tastura

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)	
						Anggaran/Tahun															
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp		
10364.10	Aksi Peningkatan Serapan	A	Penanaman	A.1 Penanaman pada Areal KPH	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD /Donor	..Ha	6470	..Ha	6470	..Ha	6470	..Ha	6470	..Ha	6470	..Ha	6470	..Ha	6470	45290
			A.2 Penanaman pada Areal PBPH	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD /Donor	..Ha	6470	..Ha	6470	..Ha	6470	..Ha	6470	..Ha	6470	..Ha	6470	..Ha	6470	45290	
			A.3 Penanaman pada Areal PS	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD /Donor	..Ha	6470	..Ha	6470	..Ha	6470	..Ha	6470	..Ha	6470	..Ha	6470	..Ha	6470	45290	

				A.4	Penanaman pada Areal PIAPS	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD /Donor	..Ha	6470	..Ha	6470	..Ha	6470	..Ha	6470	..Ha	6470	..Ha	6470	45290
				A.5	Penanaman pada Areal HGU dan Non HGU	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD /Donor	..Ha	6470	..Ha	6470	..Ha	6470	..Ha	6470	..Ha	6470	..Ha	6470	45290
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				226450

Tabel Rencana Operasional (RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Pelangan Tastura

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
						Anggaran/Tahun														
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	
10526.12	Aksi Peningkatan Serapan	A	Penanaman	A.1	Penanaman pada Areal Konservasi	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD /Donor	... Ha	8220	... Ha	8220	... Ha	8220	... Ha	8220	... Ha	8220	... Ha	8220	57540
				A.2	Penanaman pada Areal KPH dan PIAPS	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD /Donor	... Ha	8220	... Ha	8220	... Ha	8220	... Ha	8220	... Ha	8220	... Ha	8220	57540
				A.3	Penanaman pada Areal PBPH	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD /Donor	... Ha	8220	... Ha	8220	... Ha	8220	... Ha	8220	... Ha	8220	... Ha	8220	57540
				A.4	Penanaman pada Areal APL HGU dan Non HGU	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD /Donor	... Ha	8220	... Ha	8220	... Ha	8220	... Ha	8220	... Ha	8220	... Ha	8220	57540
		B	Pemeliharaan Tanaman	B.1	Pemeliharaan Tanaman pada Areal Konservasi	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD /Donor	... Ha	3280	... Ha	3280	... Ha	3280	... Ha	3280	... Ha	3280	... Ha	3280	22960
				B.2	Pemeliharaan	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah	APBN/APBD	... Ha	3280	... Ha	3280	... Ha	3280	... Ha	3280	... Ha	3280	... Ha	3280	22960

				Tanaman pada Areal KPH dan PIAPS	setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	/Donor														
			B.3	Pemeliharaan Tanaman pada Areal PBPH	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD /Donor	... Ha	3280	... Ha	3280	... Ha	3280	... Ha	3280	... Ha	3280	... Ha	3280	22960	
			B.4	Pemeliharaan Tanaman pada Areal APL HGU dan Non HGU	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD /Donor	... Ha	3280	... Ha	3280	... Ha	3280	... Ha	3280	... Ha	3280	... Ha	3280	22960	
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																			322000	

Tabel Rencana Operasional (RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Pelangan Tastura

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan		PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
							Anggaran/Tahun														
							2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	
8357.85	Aksi pengurangan emisi	A Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	A.1	Sosialisasi kebakaran hutan dan lahan	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
			A.2	Patroli kebakaran hutan dan lahan	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD /Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
			A.3	Kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin dan luar kawasan hutan	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD /Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
	Aksi	B Pengamanan	B.1	Sosialisasi pengamanan	KPH Pelangan Tastura,	APBN/APBD	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210

	Mempertahankan Serapan	Hutan dan Lahan		hutan dan lahan	Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	/Donor														
			B.2	Patroli pengamanan hutan dan lahan	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD /Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140	
			B.3	Kegiatan pencegahan perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum di bebani izin dan luar kawasan hutan	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD /Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210	
			B.4	Penataan Batas Areal	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210	
		C Konservasi Kehati	C.1	Sosialisasi Konservasi Kehati	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210	
			C.2	Identifikasi dan inventarisasi keanekaragaman hayati (Flora dan Fauna)	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210	
			C.3	Survei Populasi Satwa, penyusunan dan pemantauan action plan konservasi Satwa	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350	
			C.4	Identifikasi potensi Jasling dan Wisata Alam	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Dinas Pariwisata	APBN/APBD /Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210	

			C.5	Upaya konservasi melalui HCVF	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	35
			C.6	Rescue Satwa yang dilindungi	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140
			C.7	Pemantauan peredaran Flora dan fauna yang dilindungi	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	315
			C.8	Menjaga koridor satwa	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD /Donor	Ha	45	Ha	45	Ha	45	Ha	45	Ha	45	Ha	45	315
	Aksi meningkatkan serapan	D	Penanaman dan Pengayaan tanaman	D.1 Kegiatan penanaman dan pengayaan tanaman pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin serta areal penggunaan lainnya pada areal hutan dan luar kawasan hutan.	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD /Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
	Kelembagaan	E	Pemberdayaan Masyarakat	E.1 Pendampingan dan Monev kegiatan perlindungan Keanekaragaman Hayati	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
			E.2	Pembinaan MPA dan peningkatan SDM	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
			E.3	Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Disperindag	APBN/APBD /Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
			E.4	Pendampingan dan pembinaan	KPH Pelangan Tastura, Pemerintah setempat, KLHK,	APBN/APBD /Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280

				kelembagaan KTH (Kelompok Tani Hutan	DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Disperindag, LITBANG															
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				4865

Tabel Rencana Operasional (RO 12 Pengelolaan Mangrove) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Pelangan Tastura

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
						Anggaran/Tahun																
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
35.82	Aksi Mengurangi emisi	A. Pengamanan dan pencegahan kawasan dari kegiatan	A.1 Sosialisasi Pelestarian kawasan Mangrove	DLHK, KPH Pelangan Tastura, Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280		
			A.2 Patroli Pengamanan Hutan Mangrove	KPH Pelangan Tastura, TNI Polri	APBN/APBD /Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280		
		Konversi lahan	A.3 Pencegahan dan penanggulangan kegiatan konversi lahan mangrove	KPH Pelangan Tastura, pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	315		
	Aksi peningkatan Seraya Emisi	B. Penanaman	B.1 Penataan Batas Areal	KPH Pelangan Tastura, pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	..Ha	325	..Ha	325	..Ha	325	..Ha	325	..Ha	325	..Ha	325	..Ha	325	2275		
			B.2 Penanaman mangrove	KPH Pelangan Tastura, pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	..Ha	325	..Ha	325	..Ha	325	..Ha	325	..Ha	325	..Ha	325	..Ha	325	2275		
			B.3 Rehabilitasi hutan dan lahan mangrove	KPH Pelangan Tastura, pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Ha	30	Ha	30	Ha	30	Ha	30	Ha	30	Ha	30	Ha	30	210		
		C. Inventarisasi Mangrove	C.1 Inventarisasi dan identifikasi potensi mangrove	KPH Pelangan Tastura, pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Ha	50	Ha	50	Ha	50	Ha	50	Ha	50	Ha	50	Ha	50	350		
			C.2 Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra	KPH Pelangan Tastura, pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD /Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350		
	Kelembagaan	D. Pemberdayaan Masyarakat	D.1 Pemberdayaan masyarakat setempat/	KPH Pelangan Tastura, pemerintah setempat, NGO	APBN/APBD /Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280		

				sekitar hutan	terkait														
			D.2	Skema multiusaha kehutanan	KPH Pelangan Tastura, pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
			D.3	Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah	KPH Pelangan Tastura, pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
			D.4	Pembentukan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata)	KPH Pelangan Tastura, pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
		E.	Penyusunan Rencana	E.1	Penyusunan RPHJP dan RPHJPD	KPH Pelangan Tastura, pemerintah setempat, DLHK /Donor	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	245
				E.2	Penyusunan data potensi Mangrove	KPH Pelangan Tastura, pemerintah setempat, DLHK /Donor	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	245
		F.	Peningkatan Kapasitas SDM	F.1	Peningkatan kapasitas POKDARWIS dan KKMD	KPH Pelangan Tastura, pemerintah setempat, NGO terkait	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	245
				F.2	Pembentukan dan Pendampingan MPA	KPH Pelangan Tastura, pemerintah setempat, NGO terkait	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	245
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																			8435

BKPH RINJANI BARAT

Lampiran 11. Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Rinjani Barat

Tabel Rencana Operasional (RO) 1 *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Rinjani Barat

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
						Anggaran/Tahun																
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp							
25.19	Aksi Pengurangan emisi	A. Pencegahan Kebakaran	A.1 Identifikasi Kawasan Rawan Kebakaran	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70		
			A.2 Sosialisasi kawasan rawan kebakaran	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140		
			A.3 Pengamanan Kawasan Rawan Kebakaran	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175		
			A.4 Pelaksanaan Pembinaan MPA (masyarakat Peduli Api)	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210		
			A.5 Penyediaan sarana Prasarana Pemadaman Kebakaran	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350		
		B. Penanggulangan Kebakaran	B.1 Koordinasi & Komunikasi antar stakeholders terkait Pemadaman	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70		
			B.2 Pembangunan Kanal Bloking	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, PU, Perkim	APBN/APBD/ Donor	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	315		
			B.3 Pemadaman Kebakaran	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175		
		C. Penanganan Pasca Kebakaran	C.1 Monitoring dan Evaluasi Areal Pasca Kebakaran	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	paket	25	paket	25	paket	25	paket	25	paket	25	paket	25	paket	25	175		
	Aksi Mepertahankan Serapan	D. Pengamanan Kawasan Hutan	D.1 Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140		
			D.2 Sosialisasi batas Kawasan Hutan	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140		
			D.3 Identifikasi dan Inventarisasi SDH	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	315		
			D.4 Patroli terpadu	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140		
		E. Pengembangan RIL-C & Penegelolaan SILIN	E.1 Koordinasi dengan pemilik izin untuk pelaksanaan RIL-C dan SILIN	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, , PBPH terkait, KLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70		
			E.2 Sosialisasi pemanenan hutan dengan RIL-C dan Pengelolaan PBPH-HA dengan SILIN	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, , PBPH terkait, KLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140		
	Aksi meningkatkan Serapan	F. Rehabilitasi	F.1 Rehabilitasi pada Areal Bekas Terbakar	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, BPDAS, DLHK, KLHK	APBN/APBD/ Donor	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	350		
			F.2 Rehabilitasi pada Kawasan lahan kritis dan terdegradasi	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, BPDAS, KLHK, DLHK	APBN/APBD/ Donor	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	350		
			F.3 Rehabilitasi di lahan masyarakat (KBR, KBD, HR dll)	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	350		
	Kelembagaan	G. Penguatan Kelembagaan & Sosialisasi	G.1 Pelaksanaan Koordinasi antar Pemangku Kepentingan	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140		
			G.2 Sosialisasi Perhutanan Sosial	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140		

				G.3	Pembentukan dan Pembinaan Perhutanan Sosial	KLHK, KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	105
				G.4	Kerjasama Kemitraan antara PBPH-HA/ HT/ RE dengan masyarakat sekitar (KULIN KK)	KLHK, KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140
				G.5	Penyusunan, pembaharuan dan Pengesahan RPHJP	KLHK, KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	105
				G.6	Pengadaan tenaga POLHUT dan Tenaga Penyuluh Kehutanan	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, KLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175
				G.7	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelaksana	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG	APBN/APBD/ Donor	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	105
				G.8	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas masyarakat pengelola PS dan masyarakat sekitar kawasan kelola (Fasilitasi, Pendampingan dan Pembinaan)	KLHK, KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	105
				G.9	Fasilitasi dan pelaksanaan pendampingan kelompok tani hutan & bimbingan teknis dalam pengelolaan PS	KLHK, KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	105
				G.10	Pembangunan demplot Agroforestry	KLHK, KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175
				G.11	Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan (Ekowisata, Jasa tata air, dan penyimpanan/ penyerapan karbon)	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, KLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	315
				G.12	Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemanfaatan HHHBK dan multi usaha kehutanan pada areal berizin	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG	APBN/APBD/ Donor	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	105
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				5390

Tabel Rencana Operasional (RO 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Rinjani Barat

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total
						Anggaran/Tahun																Anggaran (Rp x 1.000.000)
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
4.62	Aksi Pengurangan Emisi	A. Pemulihan Ekosistem	A. 1	Penentuan dan Penataan Areal Target Pemulihan Ekosistem	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK,	APBN/APBD /Donor	 Ha	40	 Ha	40	 Ha	40	 Ha	40	 Ha	40	 Ha	40	240			
	Aksi mempertahankan serapan		A. 2	Sosialisasi Kepada Masyarakat terkait kegiatan Reforestasi dan Rehabilitasi Lahan	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	120			
	A. 3		Fasilitasi, Pendampingan dan Pembinaan Masyarakat	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Disnakerja	APBN/APBD /Donor	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	90				
	Aksi meningkatkan serapan	B. Reforestasi dan Rehabilitasi Lahan	B.1	Penanaman/Pengkayaan pada areal bekas tebangan	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD /Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	150			
			B.2	Penanaman pada APL serta Kawasan Hutan yang meliputi HL, HPT, HP, dan KK	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD /Donor	 Ha	4	 Ha	4	 Ha	4	 Ha	4	 Ha	4	 Ha	4	24			
			B.3	Penanaman pada Areal PIAPS & PS	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD /Donor	 Ha	4	 Ha	4	 Ha	4	 Ha	4	 Ha	4	 Ha	4	24			
			B.4	Penanaman pada areal lahan terbuka & Tanaman Peneduh pada Turus dan Median Jalan	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD /Donor	 Ha	4	 Ha	4	 Ha	4	 Ha	4	 Ha	4	 Ha	4	24			
			B.5	Penanaman areal dengan pola kemitraan	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD /Donor	 Ha	4	 Ha	4	 Ha	4	 Ha	4	 Ha	4	 Ha	4	24			
			B.6	Rehab DAS	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD /Donor	 Ha	4	 Ha	4	 Ha	4	 Ha	4	 Ha	4	 Ha	4	24			
	Kelembagaan	C. Pengembangan Multi Usaha	C.1	Pengembangan multi usaha melalui pola agroforestry	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, LITBANG, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	150			
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																			870			

Tabel Rencana Operasional (RO 6 Penerapan RIL C) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Rinjani Barat

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan		PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total
							Anggaran/Tahun																Anggaran (Rp x 1.000.000)
							2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
28.95	Aksi Pengurangan Emisi	A					Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	180		
	Aksi Mempertahankan serapan	B	Pembukaan Wilayah Hutan	B.1	Pembukaan wilayah Hutan secara terencana pada PBPH-HA/ HT	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD /Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	180	
				B.2	Penentuan Sistem Silvikultur sesuai karakteristik Tapak (TPTI/TPTJ/SILIN) pada PBPH-HA/ HT	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD /Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	180	
				B.3	Penerapan RIL dan RIL-C pada PBPH-HA/ HT	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD /Donor	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	270	
				B.4	Pemanenan dengan menggunakan kearifan lokal setempat pada areal hutan desa	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD /Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	180	
				B.5	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH, TNI/POLRI	APBN/APBD /Donor	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	270	
				B.6	Sosialisasi Sistem Silvikultur dan Praktek RIL C	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD /Donor	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	270	
	Aksi meningkatkan serapan	C					APBN/APBD /Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	150	
	Kelembagaan	D	Pembuatan Peta Areal Kerja dan Penyusunan Rencana	D.1	Pembuatan Peta Areal Kerja menyeluruh pada PBPH-HA/ HT	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD /Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	150	
				D.2	Penyusunan Rencana Penebangan pada PBPH-HA/ HT	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD /Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	180	
			Penyusunan Laporan	D.3	Penyusunan Laporan dan Monev Pengelolaan Hutan Lestari pada PBPH- HA/HT	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD /Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	180	
			Peningkatan SDM	D.4	Pelatihan internal penerapan RIL dan RIL C pada PBPH-HA/ HT	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD /Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	150	
				D.5	Peningkatan kapasitas SDM	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH, Disnakerja	APBN/APBD /Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	150	

			D.6	Pembinaan masyarakat desa hutan pemanfaatan hasil hutan non-kayu	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH, Disnakerja, LITBANG	APBN/APBD /Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	150	
			D.7	Pembinaan dan pendampingan PBPH	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD /Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	150	
			D.8	Bimbingan teknis perhitungan nilai ekonomi karbon	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD /Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	150	
		E	Pemberdayaan Masyarakat	E.1	Pengembangan Multi Usaha Kehutanan dan produksi HHBK bersama masyarakat pada PBPH-RE	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH, Disnakerja, Disperindag, LITBANG	APBN/APBD /Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	150
				E.2	Pengembangan industry Primer Kehutanan berbasis non kayu	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH, DISTANBUN, LITBANG	APBN/APBD /Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	150
			Monev	E.3	Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan (KPH & PBPH)	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD /Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	150
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				3210

Tabel Rencana Operasional (RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Rinjani Barat

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total
						Anggaran/Tahun																Anggaran (Rp x 1.000.000)
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
930.68	Aksi Peningkatan Serapan	A	Penanaman	A.1	Penanaman pada Areal KPH	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD /Donor	..Ha	1550	..Ha	1550	..Ha	315	..Ha	315	..Ha	315	..Ha	315	..Ha	315	4675
				A.2	Penanaman pada Areal PBPH	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD /Donor	..Ha	1550	..Ha	1550	..Ha	315	..Ha	315	..Ha	315	..Ha	315	..Ha	315	4675
				A.3	Penanaman pada Areal PS	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD /Donor	..Ha	1550	..Ha	1550	..Ha	315	..Ha	315	..Ha	315	..Ha	315	..Ha	315	4675
				A.4	Penanaman pada Areal PIAPS	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD /Donor	..Ha	1550	..Ha	1550	..Ha	315	..Ha	315	..Ha	315	..Ha	315	..Ha	315	4675
				A.5	Penanaman pada Areal HGU dan Non HGU	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD /Donor	..Ha	1550	..Ha	1550	..Ha	315	..Ha	315	..Ha	315	..Ha	315	..Ha	315	4675
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																					23375	

Tabel Rencana Operasional (RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Rinjani Barat

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
						Anggaran/Tahun																
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
1264.14	Aksi Peningkatan Serapan	A	Penanaman	A.1	Penanaman pada Areal Konservasi	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD /Donor	... Ha	2650	... Ha	2650	... Ha	550	... Ha	550	... Ha	550	... Ha	550	... Ha	550	8050
				A.2	Penanaman pada Areal KPH dan PIAPS	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD /Donor	... Ha	2650	... Ha	2650	... Ha	550	... Ha	550	... Ha	550	... Ha	550	... Ha	550	8050
				A.3	Penanaman pada Areal PBPH	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD /Donor	... Ha	2650	... Ha	2650	... Ha	550	... Ha	550	... Ha	550	... Ha	550	... Ha	550	8050
				A.4	Penanaman pada Areal APL HGU dan Non HGU	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD /Donor	... Ha	2650	... Ha	2650	... Ha	550	... Ha	550	... Ha	550	... Ha	550	... Ha	550	8050
		B	Pemeliharaan Tanaman	B.1	Pemeliharaan Tanaman pada Areal Konservasi	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD /Donor	... Ha	200	... Ha	200	... Ha	200	... Ha	200	... Ha	200	... Ha	200	... Ha	200	1400
				B.2	Pemeliharaan Tanaman pada Areal KPH dan PIAPS	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD /Donor	... Ha	200	... Ha	200	... Ha	200	... Ha	200	... Ha	200	... Ha	200	... Ha	200	1400
				B.3	Pemeliharaan Tanaman pada Areal PBPH	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD /Donor	... Ha	200	... Ha	200	... Ha	200	... Ha	200	... Ha	200	... Ha	200	... Ha	200	1400
				B.4	Pemeliharaan Tanaman pada Areal APL HGU dan Non HGU	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD /Donor	... Ha	200	... Ha	200	... Ha	200	... Ha	200	... Ha	200	... Ha	200	... Ha	200	1400
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																						37800

Tabel Rencana Operasional (RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Rinjani Barat

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan		PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
							Anggaran/Tahun														
							2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	
23188.54	Aksi pengurangan emisi	A Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	A.1	Sosialisasi kebakaran hutan dan lahan	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	245		
			A.2	Patroli kebakaran hutan dan lahan	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	385		
			A.3	Kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin dan luar kawasan hutan	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	385		
	Aksi Mempertahan kan Serapan	B Pengamanan Hutan dan Lahan	B.1	Sosialisasi pengamanan hutan dan lahan	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	245		
			B.2	Patroli pengamanan hutan dan lahan	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	385		
			B.3	Kegiatan pencegahan perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum di bebani izin dan luar kawasan hutan	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	385		
			B.4	Penataan Batas Areal	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	245		
		C Konservasi Kehati	C.1	Sosialisasi Konservasi Kehati	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	245		
			C.2	Identifikasi dan inventarisasi keanekaragaman hayati (Flora dan Fauna)	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	385		
			C.3	Survei Populasi Satwa, penyusunan dan pemantauan action plan konservasi Satwa	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	245		

				C.4	Identifikasi potensi Jasling dan Wisata Alam	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Dinas Pariwisata	APBN/APBD/Donor	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	385
				C.5	Upaya konservasi melalui HCVF	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	 Ha	15	 Ha	15	 Ha	15	 Ha	15	 Ha	15	 Ha	15	105
				C.6	Rescue Satwa yang dilindungi	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175
				C.7	Pemantauan peredaran Flora dan fauna yang dilindungi	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	385
				C.8	Menjaga koridor satwa	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	315
	Aksi meningkatkan serapan	D	Penanaman dan Pengayaan tanaman	D.1	Kegiatan penanaman dan pengayaan tanaman pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin serta areal penggunaan lainnya pada areal hutan dan luar kawasan hutan.	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD/Donor	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	315
	Kelembagaan	E	Pemberdayaan Masyarakat	E.1	Pendampingan dan Monev kegiatan perlindungan Keanekaragaman Hayati	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	385
				E.2	Pembinaan MPA dan peningkatan SDM	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	385
				E.3	Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Disperindag	APBN/APBD/Donor	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	385
				E.4	Pendampingan dan pembinaan kelembagaan KTH (Kelompok Tani Hutan	KPH Rinjani Barat, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Disperindag, LITBANG	APBN/APBD/Donor	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	385
	Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																			

BKPH RINJANI TIMUR

Lampiran 12. Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di BKPH Rinjani Timur

Tabel Rencana Operasional (RO 1 Pencegahan Deforestasi Mineral) *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di BKPH Rinjani Timur

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total	
						Anggaran/Tahun																Anggaran	
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		(Rp x			
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	1.000.000)			
170.04	Aksi Pengurangan emisi	A. Pencegahan Kebakaran	A.1	Identifikasi Kawasan Rawan Kebakaran	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70		
			A.2	Sosialisasi kawasan rawan kebakaran	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, (NGo terkait atau Mitra KLHK/DLHK/Mitra KLHK)	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140		
			A.3	Pengamanan Kawasan Rawan Kebakaran	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175		
			A.4	Pelaksanaan Pembinaan MPA (masyarakat Peduli Api)	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210		
			A.5	Penyediaan sarana Prasarana Pemadaman Kebakaran	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor					Paket	3000							Paket	3000	6000		
	B. Penanggulangan Kebakaran	B.1	Koordinasi & Komunikasi antar stakeholders terkait Pemadaman	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70	
		B.2	Pembangunan Kanal Bloking	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, PU, Perkim	APBN/APBD/ Donor	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	3500	
		B.3	Pemadaman Kebakaran	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175	
	C. Penanganan Pasca Kebakaran	C.1	Monitoring dan Evaluasi Areal Pasca Kebakaran	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	paket	25	paket	25	paket	25	paket	25	paket	25	paket	25	paket	25	paket	25	175	
	Aksi Mepertahankan Serapan	D. Pengamanan Kawasan Hutan	D.1	Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140
			D.2	Sosialisasi batas Kawasan Hutan	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140
			D.3	Identifikasi dan Inventarisasi SDH	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	 Ha	60	 Ha	60	 Ha	60	 Ha	60	 Ha	60	 Ha	60	 Ha	60	 Ha	60	420
			D.4	Patroli terpadu	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140

Aksi meningkatkan Serapan	E.	Pengembangan RIL-C & Penegelolaan SILIN	E.1	Koordinasi dengan pemilik izin untuk pelaksanaan RIL-C dan SILIN	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, , PBPH terkait, KLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70
			E.2	Sosialisasi pemanenan hutan dengan RIL-C dan Pengelolaan PBPH-HA dengan SILIN	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, , PBPH terkait, KLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140
	F.	Rehabilitasi	F.1	Rehabilitasi pada Areal Bekas Terbakar	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, BPDAS, DLHK, KLHK	APBN/APBD/ Donor	 Ha	60	 Ha	60	 Ha	60	 Ha	60	 Ha	60	 Ha	60	 Ha	60	420
			F.2	Rehabilitasi pada Kawasan lahan kritis dan terdegradasi	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, BPDAS, KLHK, DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
			F.3	Rehabilitasi di lahan masyarakat (KBR, KBD, HR dll)	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
	G.	Penguatan Kelembagaan & Sosialisasi	G.1	Pelaksanaan Koordinasi antar Pemangku Kepentingan	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140
			G.2	Sosialisasi Perhutanan Sosial	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140
			G.3	Pembentukan dan Pembinaan Perhutanan Sosial	KLHK, KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	105
			G.4	Kerjasama Kemitraan antara PBPH-HA/ HT/ RE dengan masyarakat sekitar (KULIN KK)	KLHK, KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140
			G.5	Penyusunan, pembaharuan dan Pengesahan RPHJP	KLHK, KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	105
			G.6	Pengadaan tenaga POLHUT dan Tenaga Penyuluh Kehutanan	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, KLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175
			G.7	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelaksana	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG	APBN/APBD/ Donor	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	105
			G.8	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas masyarakat pengelola PS dan masyarakat sekitar kawasan kelola (Fasilitasi, Pendampingan dan Pembinaan)	KLHK, KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	105
			G.9	Fasilitasi dan pelaksanaan pendampingan kelompok	KLHK, KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	105

[illegible][illegible]

				D.2	Penanaman pada areal Pesetujuan Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat (PPHTR)	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD/Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140	
				D.3	Penerapan sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70	
	Kelembagaan	E.	Fasilitasi percepatan pengembangan HTE pada PBPH	E.1	Sosialisasi HTE pada PBPH	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70	
				E.2	Pembangunan demplot HTE	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH, PU, Perkim	APBN/APBD/Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70	
				E.3	Integrasi industry HTE	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH, Disperindag, Disnakerja	APBN/APBD/Donor	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	105	
		F.	Peningkatan Kapasitas SDM	F.1	Fasilitasi dan Pembinaan/Penguatan aparatur KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH, Disperindag, Disnakerja	APBN/APBD/Donor	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	105	
				F.2	Pengembangan Hutan Tanaman Energi pada KTH (Kelompok Tani Hutan) di KPH	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH, Disperindag, Disnakerja, LITBANG	APBN/APBD/Donor	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	105	
				F.3	Pengembangan Multiusaha kehutanan	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH, Disperindag, Disnakerja, LITBANG	APBN/APBD/Donor	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	105	
	Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				1365

Tabel Rencana Operasional (RO 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Rinjani Timur

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
						Anggaran/Tahun														
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	
51.29	Aksi Pengurangan Emisi	A. Pemulihan Ekosistem	A.1	Penentuan dan Penataan Areal Target Pemulihan Ekosistem	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK,	APBN/APBD/Donor	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	350	
	A.2		Sosialisasi Kepada Masyarakat terkait kegiatan Reforestasi dan Rehabilitasi Lahan	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140		
	A.3		Fasilitasi, Pendampingan dan Pembinaan Masyarakat	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Disnakerja	APBN/APBD/Donor	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	105		
	Aksi meningkatkan serapan	B. Reforestasi dan Rehabilitasi Lahan	B.1	Penanaman/Pengkayaan pada areal bekas tebangan	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD/Donor	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	315	
			B.2	Penanaman pada APL serta Kawasan Hutan yang meliputi HL, HPT, HP, dan KK	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD/Donor	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	315	
			B.3	Penanaman pada Areal PIAPS & PS	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD/Donor	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	315	
			B.4	Penanaman pada areal lahan terbuka & Tanaman Peneduh pada Turus dan Median Jalan	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD/Donor	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	315	
			B.5	Penanaman areal dengan pola kemitraan	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD/Donor	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	315	
			B.6	Rehab DAS	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra	APBN/APBD/Donor	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	315	

					KLHK/DLHK, BPDAS																
	Kelembagaan	C.	Pengembangan Multi Usaha	C.1	Pengembangan multi usaha melalui pola agroforestry	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, LITBANG, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	175
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																					2660

Tabel Rencana Operasional (RO 6 Penerapan RIL C) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Rinjani Timur

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan		PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
							Anggaran/Tahun																
							2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
212.82	Aksi Pengurangan Emisi	A																					
	Aksi Mempertahankan serapan	B	Pembukaan Wilayah Hutan	B.1	Pembukaan wilayah Hutan secara terencana pada PBPH-HA/ HT	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210			
B.2				Penentuan Sistem Silvikultur sesuai karakteristik Tapak (TPTI/TPTJ/SILIN) pada PBPH-HA/ HT	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210				
B.3				Penerapan RIL dan RIL-C pada PBPH-HA/ HT	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350				
B.4				Pemanenan dengan menggunakan kearifan lokal setempat pada areal hutan desa	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210				
B.5				Patroli perlindungan dan pengamanan hutan	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH, TNI/POLRI	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350				
B.6				Sosialisasi Sistem Silvikultur dan Praktek RIL C	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350				
	Aksi meningkatkan serapan	C				APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350				
	Kelembagaan	D	Pembuatan Peta Areal	D.1	Pembuatan Peta Areal Kerja menyeluruh pada PBPH-HA/ HT	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350			

			Kerja dan Penyusunan Rencana	D.2	Penyusunan Rencana Penebangan pada PBPH-HA/ HT	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
			Penyusunan Laporan	D.3	Penyusunan Laporan dan Monev Pengelolaan Hutan Lestari pada PBPH-HA/HT	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
			Peningkatan SDM	D.4	Pelatihan internal penerapan RIL dan RIL C pada PBPH-HA/ HT	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
				D.5	Peningkatan kapasitas SDM	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH, Disnakerja	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
				D.6	Pembinaan masyarakat desa hutan pemanfaatan hasil hutan non-kayu	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH, Disnakerja, LITBANG	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
				D.7	Pembinaan dan pendampingan PBPH	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
				D.8	Bimbingan teknis perhitungan nilai ekonomi karbon	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
		Pemberdayaan Masyarakat	E.1	Pengembangan Multi Usaha Kehutanan dan produksi HHBK bersama masyarakat pada PBPH-RE	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH, Disnakerja, Disperindag, LITBANG	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350	
			E.2	Pengembangan industry Primer Kehutanan berbasis non kayu	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH, DISTANBUN, LITBANG	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350	
		Monev	E.3	Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan (KPH & PBPH)	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350	
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				5600

Tabel Rencana Operasional (RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Rinjani Timur

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
						Anggaran/Tahun																
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
1964.70	Aksi Peningkatan Serapan	A	Penanaman	A.1	Penanaman pada Areal KPH KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	..Ha	3300	..Ha	3300	..Ha	660	..Ha	660	..Ha	660	..Ha	660	..Ha	660	9900	

			A.2	Penanaman pada Areal PBPH	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	..Ha	3300	..Ha	3300	..Ha	660	..Ha	660	..Ha	660	..Ha	660	9900
			A.3	Penanaman pada Areal PS	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	..Ha	3300	..Ha	3300	..Ha	660	..Ha	660	..Ha	660	..Ha	660	9900
			A.4	Penanaman pada Areal PIAPS	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	..Ha	3300	..Ha	3300	..Ha	660	..Ha	660	..Ha	660	..Ha	660	9900
			A.5	Penanaman pada Areal HGU dan Non HGU	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	..Ha	3300	..Ha	3300	..Ha	660	..Ha	660	..Ha	660	..Ha	660	9900
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																			49500

Tabel Rencana Operasional (RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Rinjani Timur

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total
						Anggaran/Tahun																Anggaran (Rp x 1.000.000)
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
139.10	Aksi Peningkatan Serapan	A Penanaman	A.1	Penanaman pada Areal Konservasi	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	... Ha	175	... Ha	175	... Ha	175	... Ha	175	... Ha	175	... Ha	175	... Ha	175	1225	
			A.2	Penanaman pada Areal KPH dan PIAPS	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	... Ha	175	... Ha	175	... Ha	175	... Ha	175	... Ha	175	... Ha	175	... Ha	175	1225	
			A.3	Penanaman pada Areal PBPH	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	... Ha	175	... Ha	175	... Ha	175	... Ha	175	... Ha	175	... Ha	175	... Ha	175	1225	
			A.4	Penanaman pada Areal APL HGU dan Non HGU	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	... Ha	175	... Ha	175	... Ha	175	... Ha	175	... Ha	175	... Ha	175	... Ha	175	1225	
		B Pemeliharaan Tanaman	B.1	Pemeliharaan Tanaman pada Areal Konservasi	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	... Ha	25	... Ha	25	... Ha	25	... Ha	25	... Ha	25	... Ha	25	... Ha	25	175	
			B.2	Pemeliharaan Tanaman pada Areal KPH dan PIAPS	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	... Ha	25	... Ha	25	... Ha	25	... Ha	25	... Ha	25	... Ha	25	... Ha	25	175	

				B.3	Pemeliharaan Tanaman pada Areal PBPH	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	... Ha	25	... Ha	25	... Ha	25	... Ha	25	... Ha	25	... Ha	25	175
				B.4	Pemeliharaan Tanaman pada Areal APL HGU dan Non HGU	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	... Ha	25	... Ha	25	... Ha	25	... Ha	25	... Ha	25	... Ha	25	175
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				5600

Tabel Rencana Operasional (RO Perlindungan Areal Konservasi Tinggi) 11 *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Rinjani Timur

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)	
						Anggaran/Tahun															
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp		
24029.41	Aksi pengurangan emisi	A Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	A.1	Sosialisasi kebakaran hutan dan lahan	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	245
			A.2	Patroli kebakaran hutan dan lahan	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD/Donor	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	385
			A.3	Kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin dan luar kawasan hutan	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD/Donor	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	385
	Aksi Mempertahankan Serapan	B Pengamanan Hutan dan Lahan	B.1	Sosialisasi pengamanan hutan dan lahan	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	245

			B.2	Patroli pengamanan hutan dan lahan	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD/Donor	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	385
			B.3	Kegiatan pencegahan perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum di bebani izin dan luar kawasan hutan	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD/Donor	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	385
			B.4	Penataan Batas Areal	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	245
		C	Konservasi Kehati	C.1	Sosialisasi Konservasi Kehati	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	245
			C.2	Identifikasi dan inventarisasi keanekaragaman hayati (Flora dan Fauna)	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	385
			C.3	Survei Populasi Satwa, penyusunan dan pemantauan action plan konservasi Satwa	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	Paket	35	245
			C.4	Identifikasi potensi Jasling dan Wisata Alam	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Dinas Pariwisata	APBN/APBD/Donor	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	385
			C.5	Upaya konservasi melalui HCVF	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	 Ha	15	 Ha	15	 Ha	15	 Ha	15	 Ha	15	 Ha	15	 Ha	15	105
			C.6	Rescue Satwa yang dilindungi	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175
			C.7	Pemantauan peredaran Flora dan fauna yang dilindungi	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	385

				C.8	Menjaga koridor satwa	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	 Ha	45	315
Aksi meningkatkan serapan	D	Penanaman dan Pengayaan tanaman	D.1	Kegiatan penanaman dan pengayaan tanaman pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin serta areal penggunaan lainnya pada areal hutan dan luar kawasan hutan.	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD/Donor	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	315	
Kelembagaan	E	Pemberdayaan Masyarakat	E.1	Pendampingan dan Monev kegiatan perlindungan Keanekaragaman Hayati	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	385	
			E.2	Pembinaan MPA dan peningkatan SDM	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	385	
			E.3	Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Disperindag	APBN/APBD/Donor	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	385	
			E.4	Pendampingan dan pembinaan kelembagaan KTH (Kelompok Tani Hutan	KPH Rinjani Timur, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Disperindag, LITBANG	APBN/APBD/Donor	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	Paket	55	385	
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																					6370	

BKPH ROPANG

Lampiran 13. Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di BKPH Ropang

Tabel Rencana Operasional (RO 1 Pencegahan Deforestasi Mineral) *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di BKPH Ropang

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)	
						Anggaran/Tahun																	
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030					
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp				
2660.37	Aksi Pengurangan emisi	A. Pencegahan Kebakaran	A.1	Identifikasi Kawasan Rawan Kebakaran	KPH Ropang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70		
			A.2	Sosialisasi kawasan rawan kebakaran	KPH Ropang, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140		
			A.3	Pengamanan Kawasan Rawan Kebakaran	KPH Ropang, Pemerintah setempat, Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350		
			A.4	Pelaksanaan Pembinaan MPA (masyarakat Peduli Api)	KPH Ropang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350		
			A.5	Penyediaan sarana Prasarana Pemadaman Kebakaran	KPH Ropang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor					Paket	2000							Paket	2000	4000		
	B. Penanggulangan Kebakaran	B.1	Koordinasi & Komunikasi antar stakeholders terkait Pemadaman	KPH Ropang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70	
		B.2	Pembangunan Kanal Bloking	KPH Ropang, Pemerintah setempat, PU, Perkim	APBN/APBD/Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140	
		B.3	Pemadaman Kebakaran	KPH Ropang, Pemerintah setempat, Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350	
	C. Penanganan Pasca Kebakaran	C.1	Monitoring dan Evaluasi Areal Pasca Kebakaran	KPH Ropang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	350	
	Aksi Mepertahankan Serapan	D. Pengamanan Kawasan Hutan	D.1	Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	KPH Ropang, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140
			D.2	Sosialisasi batas Kawasan Hutan	KPH Ropang, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140
			D.3	Identifikasi dan Inventarisasi SDH	KPH Ropang, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	 Ha	20	 Ha	20	 Ha	20	 Ha	20	 Ha	20	 Ha	20	 Ha	20	 Ha	20	140
			D.4	Patroli terpadu	KPH Ropang, Pemerintah setempat, TNI/POLRI	APBN/APBD/Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140

		E.	Pengembangan RIL-C & Penegelolaan SILIN	E.1	Koordinasi dengan pemilik izin untuk pelaksanaan RIL-C dan SILIN	KPH Ropang, Pemerintah setempat, PBPH terkait, KLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70
				E.2	Sosialisasi pemanenan hutan dengan RIL-C dan Pengelolaan PBPH-HA dengan SILIN	KPH Ropang, Pemerintah setempat, PBPH terkait, KLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140
Aksi meningkatkan Serapan		F.	Rehabilitasi	F.1	Rehabilitasi pada Areal Bekas Terbakar	KPH Ropang, Pemerintah setempat, BPDAS, DLHK, KLHK	APBN/APBD/Donor	 Ha	2770	 Ha	2770	 Ha	2770	 Ha	2770	 Ha	2770	 Ha	2770	19390
				F.2	Rehabilitasi pada Kawasan lahan kritis dan terdegradasi	KPH Ropang, Pemerintah setempat, BPDAS, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	 Ha	2770	 Ha	2770	 Ha	2770	 Ha	2770	 Ha	2770	 Ha	2770	19390
				F.3	Rehabilitasi di lahan masyarakat (KBR, KBD, HR dll)	KPH Ropang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	 Ha	2770	 Ha	2770	 Ha	2770	 Ha	2770	 Ha	2770	 Ha	2770	19390
Kelembagaan		G.	Penguatan Kelembagaan & Sosialisasi	G.1	Pelaksanaan Koordinasi antar Pemangku Kepentingan	KPH Ropang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70
				G.2	Sosialisasi Perhutanan Sosial	KPH Ropang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140
				G.3	Pembentukan dan Pembinaan Perhutanan Sosial	KLHK, KPH Ropang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
				G.4	Kerjasama Kemitraan antara PBPH-HA/ HT/ RE dengan masyarakat sekitar (KULIN KK)	KLHK, KPH Ropang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140
				G.5	Penyusunan, pembaharuan dan Pengesahan RPHJP	KLHK, KPH Ropang, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
				G.6	Pengadaan tenaga POLHUT dan Tenaga Penyuluh Kehutanan	KPH Ropang, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, KLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
				G.7	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelaksana	KPH Ropang, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
				G.8	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas masyarakat pengelola PS dan masyarakat sekitar kawasan kelola (Fasilitasi, Pendampingan dan Pembinaan)	KLHK, KPH Ropang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
				G.9	Fasilitasi dan pelaksanaan pendampingan kelompok tani hutan & bimbingan teknis dalam pengelolaan PS	KLHK, KPH Ropang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210

				G.10	Pembangunan demplot Agroforestry	KLHK, KPH Ropang, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
				G.11	Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan (Ekowisata, Jasa tata air, dan penyimpanan/ penyerapan karbon)	KPH Ropang, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, KLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175
				G.12	Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemanfaatan HHBK dan multi usaha kehutanan pada areal berizin	KPH Ropang, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG	APBN/APBD/Donor	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	105
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				67280

Tabel Rencana Operasional (RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Ropang

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program		Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
							Anggaran/Tahun														
							2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	
234.83	Aksi Peningkatan Serapan	A	Penanaman	A.1	Penanaman pada Areal Konservasi	KPH Ropang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	...Ha	180	...Ha	180	...Ha	180	...Ha	180	...Ha	180	...Ha	180	1260	
				A.2	Penanaman pada Areal KPH dan PIAPS	KPH Ropang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	...Ha	180	...Ha	180	...Ha	180	...Ha	180	...Ha	180	...Ha	180	1260	
				A.3	Penanaman pada Areal PBPH	KPH Ropang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	...Ha	180	...Ha	180	...Ha	180	...Ha	180	...Ha	180	...Ha	180	1260	
				A.4	Penanaman pada Areal APL HGU dan Non HGU	KPH Ropang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	...Ha	180	...Ha	180	...Ha	180	...Ha	180	...Ha	180	...Ha	180	1260	
		B	Pemeliharaan Tanaman	B.1	Pemeliharaan Tanaman pada Areal Konservasi	KPH Ropang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	...Ha	70	...Ha	70	...Ha	70	...Ha	70	...Ha	70	...Ha	70	490	
				B.2	Pemeliharaan Tanaman pada Areal KPH dan PIAPS	KPH Ropang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	...Ha	70	...Ha	70	...Ha	70	...Ha	70	...Ha	70	...Ha	70	490	

				B.3	Pemeliharaan Tanaman pada Areal PBPH	KPH Ropang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	...Ha	70	...Ha	70	...Ha	70	...Ha	70	...Ha	70	...Ha	70	490
				B.4	Pemeliharaan Tanaman pada Areal APL HGU dan Non HGU	KPH Ropang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	...Ha	70	...Ha	70	...Ha	70	...Ha	70	...Ha	70	...Ha	70	490
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				7000

Tabel Rencana Operasional (RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Ropang

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program		Kegiatan		PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
								Anggaran/Tahun														
								2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	
56144.85	Aksi pengurangan emisi	A	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	A.1	Sosialisasi kebakaran hutan dan lahan	KPH Ropang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK		Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420		
				A.2	Patroli kebakaran hutan dan lahan	KPH Ropang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI		Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	560		
				A.3	Kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin dan luar kawasan hutan	KPH Ropang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI		Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	560		
Aksi Mempertahankan Serapan	B	Pengamanan Hutan dan Lahan	B.1	Sosialisasi pengamanan hutan dan lahan	KPH Ropang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK		Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420			
			B.2	Patroli pengamanan hutan dan lahan	KPH Ropang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI		Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	560			
			B.3	Kegiatan pencegahan perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum di bebani izin dan luar kawasan hutan	KPH Ropang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI		Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	560			

				B.4	Penataan Batas Areal	KPH Ropang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK		Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
		C	Konservasi Kehati	C.1	Sosialisasi Konservasi Kehati	KPH Ropang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK		Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
				C.2	Identifikasi dan inventarisasi keanekaragaman hayati (Flora dan Fauna)	KPH Ropang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK		Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	560
				C.3	Survei Populasi Satwa, penyusunan dan pemantauan action plan konservasi Satwa	KPH Ropang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK		Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
				C.4	Identifikasi potensi Jasling dan Wisata Alam	KPH Ropang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Dinas Pariwisata		Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	560
				C.5	Upaya konservasi melalui HCVF	KPH Ropang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK		 Ha	40	 Ha	40	 Ha	40	 Ha	40	 Ha	40	 Ha	40	 Ha	40	280
				C.6	Rescue Satwa yang dilindungi	KPH Ropang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK		Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
				C.7	Pemantauan peredaran Flora dan fauna yang dilindungi	KPH Ropang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK		Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	560
				C.8	Menjaga koridor satwa	KPH Ropang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK		 Ha	70	 Ha	70	 Ha	70	 Ha	70	 Ha	70	 Ha	70	 Ha	70	490
	Aksi meningkatkan serapan	D	Penanaman dan Pengayaan tanaman	D.1	Kegiatan penanaman dan pengayaan tanaman pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin serta areal penggunaan lainnya pada areal hutan dan luar kawasan hutan.	KPH Ropang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI		Paket	70	Paket	70	Paket	70	Paket	70	Paket	70	Paket	70	Paket	70	490
	Kelembagaan	E	Pemberdayaan Masyarakat	E.1	Pendampingan dan Monev kegiatan perlindungan Keanekaragaman Hayati	KPH Ropang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK		Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	560
				E.2	Pembinaan MPA dan peningkatan SDM	KPH Ropang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK		Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	560
				E.3	Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra	KPH Ropang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK,		Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	560

						Disperindag															
			E.4	Pendampingan dan pembinaan kelembagaan KTH (Kelompok Tani Hutan	KPH Ropang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Disperindag, LITBANG		Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	560
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																					9940

BKPH SEJORONG MATAIYANG

Lampiran 14. Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Sejong Mataiyang

Tabel Rencana Operasional (RO 1 Pencegahan Deforestasi Mineral) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Sejong Mataiyang

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan		PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total
							Anggaran/Tahun																Anggaran
							2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
2,107.97	Aksi Pengurangan emisi	A. Pencegahan Kebakaran	A.1	Identifikasi Kawasan Rawan Kebakaran	KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70				
			A.2	Sosialisasi kawasan rawan kebakaran	KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140				
			A.3	Pengamanan Kawasan Rawan Kebakaran	KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat, Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350				
			A.4	Pelaksanaan Pembinaan MPA (masyarakat Peduli Api)	KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350				
			A.5	Penyediaan sarana Prasarana Pemadaman Kebakaran	KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175				
	B. Penanggulangan Kebakaran	B.1	Koordinasi & Komunikasi antar stakeholders terkait Pemadaman	KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70					
		B.2	Pembangunan Kanal Bloking	KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat, PU, Perkim	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140					
		B.3	Pemadaman Kebakaran	KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat, Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350					
	C. Penanganan Pasca Kebakaran	C.1	Monitoring dan Evaluasi Areal Pasca Kebakaran	KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	350					
	Aksi Mepertahankan Serapan	D. Pengamanan Kawasan Hutan	D.1	Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140				
D.2			Sosialisasi batas Kawasan Hutan	KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140					

				D.3	Identifikasi dan Inventarisasi SDH	KPH Sejongong Mataiyang, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	 Ha	20	 Ha	20	 Ha	20	 Ha	20	 Ha	20	 Ha	20	 Ha	20	140	
				D.4	Patroli terpadu	KPH Sejongong Mataiyang, Pemerintah setempat, TNI/POLRI	APBN/APBD/Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140	
		E.	Pengembangan RIL-C & Penegelolaan SILIN	E.1	Koordinasi dengan pemilik izin untuk pelaksanaan RIL-C dan SILIN	KPH Sejongong Mataiyang, Pemerintah setempat, PBPH terkait, KLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70	
				E.2	Sosialisasi pemanenan hutan dengan RIL-C dan Pengelolaan PBPH-HA dengan SILIN	KPH Sejongong Mataiyang, Pemerintah setempat, PBPH terkait, KLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140	
	Aksi meningkatkan Serapan	F.	Rehabilitasi	F.1	Rehabilitasi pada Areal Bekas Terbakar	KPH Sejongong Mataiyang, Pemerintah setempat, BPDAS, DLHK, KLHK	APBN/APBD/Donor	 Ha	2190	 Ha	2190	 Ha	2190	 Ha	2190	 Ha	2190	 Ha	2190	 Ha	2190	15330	
					F.2	Rehabilitasi pada Kawasan lahan kritis dan terdegradasi	KPH Sejongong Mataiyang, Pemerintah setempat, BPDAS, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	 Ha	2190	 Ha	2190	 Ha	2190	 Ha	2190	 Ha	2190	 Ha	2190	 Ha	2190	15330
					F.3	Rehabilitasi di lahan masyarakat (KBR, KBD, HR dll)	KPH Sejongong Mataiyang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	 Ha	2190	 Ha	2190	 Ha	2190	 Ha	2190	 Ha	2190	 Ha	2190	 Ha	2190	15330
	Kelembagaan	G.		G.1	Pelaksanaan Koordinasi antar Pemangku Kepentingan	KPH Sejongong Mataiyang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70	
			Penguatan Kelembagaan & Sosialisasi	G.2	Sosialisasi Perhutanan Sosial	KPH Sejongong Mataiyang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140	
				G.3	Pembentukan dan Pembinaan Perhutanan Sosial	KLHK, KPH Sejongong Mataiyang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350	
				G.4	Kerjasama Kemitraan antara PBPH-HA/ HT/ RE dengan masyarakat sekitar (KULIN KK)	KLHK, KPH Sejongong Mataiyang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140	
				G.5	Penyusunan, pembaharuan dan Pengesahan RPHJP	KLHK, KPH Sejongong Mataiyang, Pemerintah setempat, (NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK/Mitra KLHK)	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350	
				G.6	Pengadaan tenaga POLHUT dan Tenaga Penyuluh Kehutanan	KPH Sejongong Mataiyang, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, KLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210	
				G.7	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelaksana	KPH Sejongong Mataiyang, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210	
				G.8	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas masyarakat pengelola PS dan masyarakat sekitar kawasan kelola (Fasilitasi, Pendampingan dan Pembinaan)	KLHK, KPH Sejongong Mataiyang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210	
				G.9	Fasilitasi dan pelaksanaan pendampingan kelompok tani hutan & bimbingan teknis	KLHK, KPH Sejongong Mataiyang, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210	

					dalam pengelolaan PS															
			G.10	Pembangunan demplot Agroforestry	KLHK, KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350	
			G.11	Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan (Ekowisata, Jasa tata air, dan penyimpanan/ penyerapan karbon)	KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, KLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175	
			G.12	Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemanfaatan HHBK dan multi usaha kehutanan pada areal berizin	KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG	APBN/APBD/Donor	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	105	
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				51275

Tabel Rencana Operasional (RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Sejong Mataiyang

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total
						Anggaran/Tahun														Anggaran (Rp x 1.000.000)
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	
102.05	Aksi Peningkatan Serapan	A	Penanaman	A.1	Penanaman pada Areal KPH	KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	..Ha	102	..Ha	102	..Ha	102	..Ha	102	..Ha	102	..Ha	102	714
				A.2	Penanaman pada Areal PBPH	KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	..Ha	102	..Ha	102	..Ha	102	..Ha	102	..Ha	102	..Ha	102	714
				A.3	Penanaman pada Areal PS	KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	..Ha	102	..Ha	102	..Ha	102	..Ha	102	..Ha	102	..Ha	102	714
				A.4	Penanaman pada Areal PIAPS	KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	..Ha	102	..Ha	102	..Ha	102	..Ha	102	..Ha	102	..Ha	102	714
				A.5	Penanaman pada Areal HGU dan Non HGU	KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	..Ha	102	..Ha	102	..Ha	102	..Ha	102	..Ha	102	..Ha	102	714
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																			3570	

Tabel Rencana Operasional (RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Sejong Mataiyang

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
						Anggaran/Tahun																
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
37,875.57	Aksi pengurangan emisi	A Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	A.1	Sosialisasi kebakaran hutan dan lahan	KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK		Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	315			
			A.2	Patroli kebakaran hutan dan lahan	KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI		Paket	65	Paket	65	Paket	65	Paket	65	Paket	65	Paket	65	455			
			A.3	Kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin dan luar kawasan hutan	KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI		Paket	65	Paket	65	Paket	65	Paket	65	Paket	65	Paket	65	455			
Aksi Mempertahankan Serapan	B Pengamanan Hutan dan Lahan	B.1	Sosialisasi pengamanan hutan dan lahan	KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK		Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	315				
		B.2	Patroli pengamanan hutan dan lahan	KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI		Paket	65	Paket	65	Paket	65	Paket	65	Paket	65	Paket	65	455				
		B.3	Kegiatan pencegahan perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum di bebani izin dan luar kawasan hutan	KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI		Paket	65	Paket	65	Paket	65	Paket	65	Paket	65	Paket	65	455				
		B.4	Penataan Batas Areal	KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK		Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	315				
	C Konservasi Kehati	C.1	Sosialisasi Konservasi Kehati	KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK		Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	315				
		C.2	Identifikasi dan inventarisasi keanekaragaman hayati (Flora dan Fauna)	KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK		Paket	65	Paket	65	Paket	65	Paket	65	Paket	65	Paket	65	455				
		C.3	Survei Populasi Satwa, penyusunan dan pemantauan action plan konservasi Satwa	KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK		Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	Paket	45	315				
		C.4	Identifikasi potensi Jasling dan Wisata Alam	KPH Sejong Mataiyang, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait		Paket	65	Paket	65	Paket	65	Paket	65	Paket	65	Paket	65	455				

[illegible]

BKPH TAMBORA

Lampiran 15. Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di BKPH Tambora

Tabel Rencana Operasional (RO 1 Pencegahan Deforestasi Mineral) *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di BKPH Tambora

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan		PIC	Keterangan	Rencana Anggaran (Rp. 1.000.000,-)																Total
							Periode (Tahun)																Anggaran (Rp x 1.000.000)
							2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
2442.24	Aksi Pengurangan emisi	A. Pencegahan Kebakaran	A.1	Identifikasi Kawasan Rawan Kebakaran	KPH Tambora, Pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140		
			A.2	Sosialisasi kawasan rawan kebakaran	KPH Tambora, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280		
			A.3	Pengamanan Kawasan Rawan Kebakaran	KPH Tambora, Pemerintah setempat, Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI	APBN/APBD /Donor	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	3500		
			A.4	Pelaksanaan Pembinaan MPA (masyarakat Peduli Api)	KPH Tambora, Pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350		
			A.5	Penyediaan sarana Prasarana Pemadaman Kebakaran	KPH Tambora, Pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor					Paket	2000							Paket	2000	4000		
		B. Penanggulangan Kebakaran	B.1	Koordinasi & Komunikasi antar stakeholders terkait Pemadaman	KPH Tambora, Pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	35		
			B.2	Pembangunan Kanal Bloking	KPH Tambora, Pemerintah setempat, PU, Perkim	APBN/APBD /Donor	Paket	200	Paket	200	Paket	200	Paket	200	Paket	200	Paket	200	Paket	200	1400		
			B.3	Pemadaman Kebakaran	KPH Tambora, Pemerintah setempat, Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI	APBN/APBD /Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350		
		C. Penanganan Pasca Kebakaran	C.1	Monitoring dan Evaluasi Areal Pasca Kebakaran	KPH Tambora, Pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	350		
		Aksi Mepertahankan Serapan	D. Pengamanan Kawasan Hutan	D.1	Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	KPH Tambora, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280	
	D.2			Sosialisasi batas Kawasan Hutan	KPH Tambora, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280		
	D.3			Identifikasi dan Inventarisasi SDH	KPH Tambora, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	 Ha	200	 Ha	200	 Ha	200	 Ha	200	 Ha	200	 Ha	200	 Ha	200	1400		
	D.4			Patroli terpadu	KPH Tambora, Pemerintah setempat, TNI/POLRI	APBN/APBD /Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280		
	E. Pengembangan		E.1	Koordinasi dengan pemilik izin	KPH Tambora, Pemerintah setempat, PBPH terkait,	APBN/APBD	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	35		

[illegible]

[illegible]

Tabel Matriks Rencana Operasional (RO 3 Pencegahan Deforestasi di Konsesi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Tambora

	Aksi meningkatkan Serapan	D.	Rehabilitasi	D.1	Rehabilitasi area bekas tebangan dan pemeliharaan tegakan tinggal	KPH Tambora, pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH, BPDAS	APBN/APBD /Donor	...Ha	4000	...Ha	4000	...Ha	4000	...Ha	4000	...Ha	4000	...Ha	4000	...Ha	4000	28000
				D.2	Rehabilitasi dengan pola Agroforestry	KPH Tambora, pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH, BPDAS	APBN/APBD /Donor	...Ha	4000	...Ha	4000	...Ha	4000	...Ha	4000	...Ha	4000	...Ha	4000	...Ha	4000	28000
	Kelembagaan	E.	Pemberdayaan	E. 1	Pengembangan Multi Usaha Kehutanan	KPH Tambora, pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH, Disnakerja, Disperindag, LITBANG	APBN/APBD /Donor	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	105
				E. 2	Kerjasama Kemitraan Kehutanan (Kulin KK)	KPH Tambora, pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																						57575

Tabel Matriks Rencana Operasional (RO 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Tambora

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Anggaran (Rp. 1.000.000,-)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
						Periode (Tahun)																
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
105.50	Aksi Pengurangan Emisi	A. Pemulihan Ekosistem	A.1	Penentuan dan Penataan Areal Target Pemulihan Ekosistem	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK,	APBN/APBD/ Donor	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	700	
	Aksi mempertahankan serapan		A.2	Sosialisasi Kepada Masyarakat terkait kegiatan Reforestasi dan Rehabilitasi Lahan	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280	
			A.3	Fasilitasi, Pendampingan dan Pembinaan Masyarakat	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Disnakerja	APBN/APBD/ Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175	
	Aksi meningkatkan serapan	B. Reforestasi dan Rehabilitasi Lahan	B.1	Penanaman/Pengkayaan pada areal bekas tebangan	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350	
			B.2	Penanaman pada APL serta Kawasan Hutan yang meliputi HL, HPT, HP, dan KK	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD/ Donor	..Ha	90	..Ha	90	..Ha	90	..Ha	90	..Ha	90	..Ha	90	..Ha	90	630	
			B.3	Penanaman pada Areal PIAPS & PS	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD/ Donor	..Ha	90	..Ha	90	..Ha	90	..Ha	90	..Ha	90	..Ha	90	..Ha	90	630	
			B.4	Penanaman pada areal lahan terbuka & Tanaman Peneduh	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra	APBN/APBD/ Donor	..Ha	90	..Ha	90	..Ha	90	..Ha	90	..Ha	90	..Ha	90	..Ha	90	630	

			Penyusunan Rencana	D.2	Penyusunan Rencana Penebangan pada PBPH-HA/ HT	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD /Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350			
			Penyusunan Laporan	D.3	Penyusunan Laporan dan Monev Pengelolaan Hutan Lestari pada PBPH- HA/HT	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD /Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700			
			Peningkatan SDM	D.4	Pelatihan internal penerapan RIL dan RIL C pada PBPH-HA/ HT	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD /Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350	
				D.5	Peningkatan kapasitas SDM	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH, Disnakerja	APBN/APBD /Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350	
				D.6	Pembinaan masyarakat desa hutan pemanfaatan hasil hutan non-kayu	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH, Disnakerja, LITBANG	APBN/APBD /Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350	
				D.7	Pembinaan dan pendampingan PBPH	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD /Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350	
				D.8	Bimbingan teknis perhitungan nilai ekonomi karbon	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD /Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350	
				E	Pemberdayaan Masyarakat	E.1	Pengembangan Multi Usaha Kehutanan dan produksi HHBK bersama masyarakat pada PBPH-RE	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH, Disnakerja, Disperindag, LITBANG	APBN/APBD /Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50
			E.2			Pengembangan industry Primer Kehutanan berbasis non kayu	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH, DISTANBUN, LITBANG	APBN/APBD /Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
			Monev		E.3	Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan (KPH & PBPH)	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, PBPH	APBN/APBD /Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																						7630			

Tabel Rencana Operasional (RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Tambora

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Anggaran (Rp. 1.000.000,-)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
						Periode (Tahun)																
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	
15,173.70	Aksi Peningkatan Serapan	A	Penanaman	A.1	Penanaman pada Areal KPH	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	...Ha	9500	...Ha	9500	...Ha	9500	...Ha	9500	...Ha	9500	...Ha	9500	66500		
				A.2	Penanaman pada Areal PBPH	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	...Ha	9500	...Ha	9500	...Ha	9500	...Ha	9500	...Ha	9500	...Ha	9500	66500		
				A.3	Penanaman pada Areal PS	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	...Ha	9500	...Ha	9500	...Ha	9500	...Ha	9500	...Ha	9500	...Ha	9500	66500		

			A.4	Penanaman pada Areal PIAPS	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	...Ha	9500	...Ha	9500	...Ha	9500	...Ha	9500	...Ha	9500	...Ha	9500	66500
			A.5	Penanaman pada Areal HGU dan Non HGU	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	...Ha	9500	...Ha	9500	...Ha	9500	...Ha	9500	...Ha	9500	...Ha	9500	66500
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																			332500

Tabel Rencana Operasional (RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Tambora

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Anggaran (Rp. 1.000.000,-)														Total
						Periode (Tahun)														Anggaran (Rp x 1.000.000)
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
12322.66	Aksi Peningkatan Serapan	A Penanaman	A.1	Penanaman pada Areal Konservasi	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD /Donor	... Ha	9700	... Ha	9700	... Ha	9700	... Ha	9700	... Ha	9700	... Ha	9700	67900	
			A.2	Penanaman pada Areal KPH dan PIAPS	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD /Donor	... Ha	9700	... Ha	9700	... Ha	9700	... Ha	9700	... Ha	9700	... Ha	9700	67900	
			A.3	Penanaman pada Areal PBPH	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD /Donor	... Ha	9700	... Ha	9700	... Ha	9700	... Ha	9700	... Ha	9700	... Ha	9700	67900	
			A.4	Penanaman pada Areal APL HGU dan Non HGU	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD /Donor	... Ha	9700	... Ha	9700	... Ha	9700	... Ha	9700	... Ha	9700	... Ha	9700	67900	
		B Pemeliharaan Tanaman	B.1	Pemeliharaan Tanaman pada Areal Konservasi	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD /Donor	... Ha	4000	... Ha	4000	... Ha	4000	... Ha	4000	... Ha	4000	... Ha	4000	28000	
			B.2	Pemeliharaan Tanaman pada Areal KPH dan PIAPS	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD /Donor	... Ha	4000	... Ha	4000	... Ha	4000	... Ha	4000	... Ha	4000	... Ha	4000	28000	
			B.3	Pemeliharaan Tanaman pada Areal PBPH	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD /Donor	... Ha	4000	... Ha	4000	... Ha	4000	... Ha	4000	... Ha	4000	... Ha	4000	28000	
			B.4	Pemeliharaan Tanaman pada Areal APL HGU dan Non HGU	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD /Donor	... Ha	4000	... Ha	4000	... Ha	4000	... Ha	4000	... Ha	4000	... Ha	4000	28000	
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																		383600		

Tabel Rencana Operasional (RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Tambora

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Anggaran (Rp. 1.000.000,-)																Total
						Periode (Tahun)																Anggaran (Rp x 1.000.000)
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030										
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	
10,903.86	Aksi pengurangan emisi	A Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	A.1	Sosialisasi kebakaran hutan dan lahan	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	90	
			A.2	Patroli kebakaran hutan dan lahan	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	120	
			A.3	Kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin dan luar kawasan hutan	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	120	
	Aksi Mempertahankan Serapan	B Pengamanan Hutan dan Lahan	B.1	Sosialisasi pengamanan hutan dan lahan	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	90	
			B.2	Patroli pengamanan hutan dan lahan	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	120	
			B.3	Kegiatan pencegahan perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum di bebani izin dan luar kawasan hutan	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	120	
			B.4	Penataan Batas Areal	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	90	
		C Konservasi Kehati	C.1	Sosialisasi Konservasi Kehati	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	90	
			C.2	Identifikasi dan inventarisasi keanekaragaman hayati (Flora dan Fauna)	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	120	
			C.3	Survei Populasi Satwa, penyusunan dan pemantauan action plan konservasi Satwa	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	90	
			C.4	Identifikasi potensi Jasling dan Wisata Alam	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Dinas Pariwisata	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	120	
			C.5	Upaya konservasi melalui HCVF	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/ Donor	 Ha	5	 Ha	5	 Ha	5	 Ha	5	 Ha	5	 Ha	5	 Ha	5	30	
			C.6	Rescue Satwa yang dilindungi	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	90	
			C.7	Pemantauan peredaran Flora dan fauna yang dilindungi	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	120	

				C.8	Menjaga koridor satwa	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	 Ha	15	 Ha	15	 Ha	15	 Ha	15	 Ha	15	 Ha	15	 Ha	15	90
Aksi meningkatkan serapan	D	Penanaman dan Pengayaan tanaman	D.1	Kegiatan penanaman dan pengayaan tanaman pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin serta areal penggunaan lainnya pada areal hutan dan luar kawasan hutan.	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD/Donor	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	90
Kelembagaan	E	Pemberdayaan Masyarakat	E.1	Pendampingan dan Monev kegiatan perlindungan Keanekaragaman Hayati	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	120
			E.2	Pembinaan MPA dan peningkatan SDM	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	120
			E.3	Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Disperindag	APBN/APBD/Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	120
			E.4	Pendampingan dan pembinaan kelembagaan KTH (Kelompok Tani Hutan	KPH Tambora, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Disperindag, LITBANG	APBN/APBD/Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	120
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																						2070

BKPH TOFFO PAJO SOROMANDI

Lampiran 16. Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di BKPH Toffo Pajo Soromandi

Tabel Rencana Operasional (RO 1 Pencegahan Deforestasi Mineral) *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di BKPH Toffo Pajo Soromandi

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan		PIC	Keterangan	Rencana Anggaran (Rp. 1.000.000,-)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
							Periode (Tahun)																
							2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp								
3,034.33	Aksi Pengurangan emisi	A. Pencegahan Kebakaran	A.1	Identifikasi Kawasan Rawan Kebakaran	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350		
			A.2	Sosialisasi kawasan rawan kebakaran	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280		
			A.3	Pengamanan Kawasan Rawan Kebakaran	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Ha	50	Ha	50	Ha	50	Ha	50	Ha	50	Ha	50	Ha	50	350		
			A.4	Pelaksanaan Pembinaan MPA (masyarakat Peduli Api)	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350		
			A.5	Penyediaan sarana Prasarana Pemadaman Kebakaran	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor					Paket	2000							Paket	2000	4000		
	B. Penanggulangan Kebakaran	B.1	Koordinasi & Komunikasi antar stakeholders terkait Pemadaman	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	35			
		B.2	Pembangunan Kanal Bloking	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, PU, Perkim	APBN/APBD/ Donor	Paket	70	Paket	70	Paket	70	Paket	70	Paket	70	Paket	70	Paket	70	490			
		B.3	Pemadaman Kebakaran	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350			
	C. Penanganan Pasca Kebakaran	C.1	Monitoring dan Evaluasi Areal Pasca Kebakaran	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	350			
	Aksi Mepertahankan Serapan	D. Pengamanan Kawasan Hutan	D.1	Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280		
			D.2	Sosialisasi batas Kawasan Konservasi (KSA & KPA)	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280		
			D.3	Identifikasi dan Inventarisasi SDH	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra	APBN/APBD/ Donor	...Ha	80	...Ha	80	...Ha	80	...Ha	80	...Ha	80	...Ha	80	...Ha	80	560		

[illegible][illegible]

				B.4	Penanaman pada areal lahan terbuka & Tanaman Peneduh pada Turus dan Median Jalan	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD /Donor	Ha	10	Ha	10	Ha	10	Ha	10	Ha	10	Ha	10	70
				B.5	Penanaman areal dengan pola kemitraan	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD /Donor	Ha	10	Ha	10	Ha	10	Ha	10	Ha	10	Ha	10	70
				B.6	Rehab DAS	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD /Donor	Ha	10	Ha	10	Ha	10	Ha	10	Ha	10	Ha	10	70
	Kelembagaan	C.	Pengembangan Multi Usaha	C.1	Pengembangan multi usaha melalui pola agroforestry	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, LITBANG, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				1190

Tabel Rencana Operasional (RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Toffo Pajo Soromandi

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Anggaran (Rp. 1.000.000,-)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
						Periode (Tahun)																
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
7,837.43	Aksi Peningkatan Serapan	A	Penanaman	A.1	Penanaman pada Areal KPH	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	 Ha	5000	 Ha	5000	 Ha	5000	 Ha	5000	 Ha	5000	 Ha	5000	35000		
				A.2	Penanaman pada Areal PBPH	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	 Ha	5000	 Ha	5000	 Ha	5000	 Ha	5000	 Ha	5000	 Ha	5000	35000		
				A.3	Penanaman pada Areal PS	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	 Ha	5000	 Ha	5000	 Ha	5000	 Ha	5000	 Ha	5000	 Ha	5000	35000		
				A.4	Penanaman pada Areal PIAPS	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	 Ha	5000	 Ha	5000	 Ha	5000	 Ha	5000	 Ha	5000	 Ha	5000	35000		
				A.5	Penanaman pada Areal HGU dan Non HGU	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	 Ha	5000	 Ha	5000	 Ha	5000	 Ha	5000	 Ha	5000	 Ha	5000	35000		
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				175000		

Tabel Rencana Operasional (RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Toffo Pajo Soromandi

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Anggaran (Rp. 1.000.000,-)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
						Periode (Tahun)																
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
322.27	Aksi Peningkatan Serapan	A	Penanaman	A.1	Penanaman pada Areal Konservasi KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	 Ha	252	 Ha	252	 Ha	252	 Ha	252	 Ha	252	 Ha	252	 Ha	252	1764	
				A.2	Penanaman pada Areal KPH dan PIAPS KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	 Ha	252	 Ha	252	 Ha	252	 Ha	252	 Ha	252	 Ha	252	 Ha	252	1764	
				A.3	Penanaman pada Areal PBPH KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	 Ha	252	 Ha	252	 Ha	252	 Ha	252	 Ha	252	 Ha	252	 Ha	252	1764	
				A.4	Penanaman pada Areal APL HGU dan Non HGU KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	 Ha	252	 Ha	252	 Ha	252	 Ha	252	 Ha	252	 Ha	252	 Ha	252	1764	
		B	Pemeliharaan Tanaman	B.1	Pemeliharaan Tanaman pada Areal Konservasi KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	700	
				B.2	Pemeliharaan Tanaman pada Areal KPH dan PIAPS KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	700	
				B.3	Pemeliharaan Tanaman pada Areal PBPH KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	700	
				B.4	Pemeliharaan Tanaman pada Areal APL HGU dan Non HGU KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	700	
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																					9856	

Tabel Rencana Operasional (RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di BKPH Toffo Pajo Soromandi

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Anggaran (Rp. 1.000.000,-)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
						Periode (Tahun)																
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
38,776.08	Aksi pengurangan emisi	A Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	A.1	Sosialisasi kebakaran hutan dan lahan	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280	
			A.2	Patroli kebakaran hutan dan lahan	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280	
			A.3	Kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin dan luar kawasan hutan	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350	
	Aksi Mempertahankan Serapan	B Pengamanan Hutan dan Lahan	B.1	Sosialisasi pengamanan hutan dan lahan	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280	
			B.2	Patroli pengamanan hutan dan lahan	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280	
			B.3	Kegiatan pencegahan perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum di bebani izin dan luar kawasan hutan	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350	
			B.4	Penataan Batas Areal	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700	
		C Konservasi Kehati	C.1	Sosialisasi Konservasi Kehati	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280	
			C.2	Identifikasi dan inventarisasi keanekaragaman hayati (Flora dan Fauna)	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350	
			C.3	Survei Populasi Satwa, penyusunan dan pemantauan action plan konservasi Satwa	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350	

				C.4	Identifikasi potensi Jasling dan Wisata Alam	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Dinas Pariwisata	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
				C.5	Upaya konservasi melalui HCVF	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	350
				C.6	Rescue Satwa yang dilindungi	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
				C.7	Pemantauan peredaran Flora dan fauna yang dilindungi	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
				C.8	Menjaga koridor satwa	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	 Ha	100	700
	Aksi meningkatkan serapan	D	Penanaman dan Pengayaan tanaman	D.1	Kegiatan penanaman dan pengayaan tanaman pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin serta areal penggunaan lainnya pada areal hutan dan luar kawasan hutan.	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
	Kelembagaan	E	Pemberdayaan Masyarakat	E.1	Pendampingan dan Monev kegiatan perlindungan Keanekaragaman Hayati	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
				E.2	Pembinaan MPA dan peningkatan SDM	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
				E.3	Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Disperindag	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
				E.4	Pendampingan dan pembinaan kelembagaan KTH (Kelompok Tani Hutan	KPH Toffo Pajo Soromandi, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Disperindag, LITBANG	APBN/APBD/Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				7560

TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI (TNGR)

Lampiran 17. Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di Taman Nasional Gunung Rinjani

Tabel Rencana Operasional (RO 1 Pencegahan Deforestasi Mineral) *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR)

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Anggaran (Rp. 1.000.000,-)																Total
						Periode (Tahun)																Anggaran (Rp x 1.000.000)
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
15.57	Aksi Pengurangan emisi	A. Pencegahan Kebakaran	A.1	Identifikasi Kawasan Rawan Kebakaran	TNGR, Dinas Terkait, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700	
			A.2	Sosialisasi kawasan rawan kebakaran	TNGR, Dinas Terkait, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280	
			A.3	Pengamanan Kawasan Rawan Kebakaran	TNGR, Dinas Terkait, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210	
			A.4	Pelaksanaan Pembinaan MPA (masyarakat Peduli Api)	TNGR, Dinas Terkait, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	3500	
			A.5	Penyediaan sarana Prasarana Pemadaman Kebakaran	TNGR, Dinas Terkait, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor				Paket	2000						Paket	2000	4000			
		B. Penanggulangan Kebakaran	B.1	Koordinasi & Komunikasi antar stakeholders terkait Pemadaman	TNGR, Dinas Terkait, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210	
			B.2	Pembangunan Kanal Bloking	TNGR, Dinas Terkait, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PU	APBN/APBD /Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700	
			B.3	Pemadaman Kebakaran	TNGR, Dinas Terkait, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350	
C. Penanganan Pasca Kebakaran	C.1	Monitoring dan Evaluasi Areal Pasca Kebakaran	TNGR, Dinas Terkait, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	350			

Aksi Mepertahankan Serapan	D.	Pengamanan Kawasan Hutan	D.1	Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	TNGR, Dinas Terkait, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
			D.2	Sosialisasi batas Kawasan Konservasi	TNGR, Dinas Terkait, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
			D.3	Identifikasi dan Inventarisasi SDH	TNGR, Dinas Terkait, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Ha	100	Ha	100	Ha	100	Ha	100	Ha	100	Ha	100	Ha	100	700
			D.4	Patroli terpadu	TNGR, Dinas Terkait, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
Aksi meningkatkan Serapan	F.	Rehabilitasi	F.1	Rehabilitasi pada Areal Bekas Terbakar	TNGR, Dinas Terkait, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Ha	40	Ha	40	Ha	40	Ha	40	Ha	40	Ha	40	Ha	40	280
			F.2	Rehabilitasi pada Kawasan lahan kritis dan terdegradasi	TNGR, Dinas Terkait, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Ha	40	Ha	40	Ha	40	Ha	40	Ha	40	Ha	40	Ha	40	280
Kelembagaan	G.	Penguatan Kelembagaan & Sosialisasi	G.1	Pelaksanaan Koordinasi antar Pemangku Kepentingan	TNGR, Dinas Terkait, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70
			G.2	Pembentukan dan pembinaan Kemitraan Konservasi	TNGR, Dinas Terkait, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
			G.3	Penyusunan, pembaharuan dan Pengesahan RPJP	TNGR, Dinas Terkait, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
			G.4	Pengadaan tenaga POLHUT dan Tenaga Penyuluh Kehutanan	TNGR, Dinas Terkait, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	75	525
			G.5	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelaksana	TNGR, Dinas Terkait, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
			G.6	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas masyarakat sekitar kawasan kelola (Fasilitasi, Pendampingan dan Pembinaan)	TNGR, Dinas Terkait, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210

				G.7	Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan (Ekowisata, Jasa tata air, dan penyimpanan/ penyerapan karbon)	TNGR, Dinas Terkait, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700
				G.8	Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemanfaatan HHBK dan multi usaha kehutanan pada areal berizin	TN Gunung Rinjani, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG	APBN/APBD /Donor	Paket	250	Paket	250	Paket	250	Paket	250	Paket	250	Paket	250	1750
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				16495

TAMAN NASIONAL TAMBORA

Lampiran 18. Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) *Indonesia’s FOLU Net Sink* 2030 di Taman Nasional Tambora

Tabel Rencana Operasional (RO 1 Pencegahan Deforestasi Mineral) *Indonesia’s FOLU Net Sink* 2030 di Taman Nasional Tambora

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Anggaran (Rp. 1.000.000,-)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
						Periode (Tahun)																
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
17,359.38	Aksi Pengurangan emisi	A. Pencegahan Kebakaran	A.1 Identifikasi Kawasan Rawan Kebakaran	TN Tambora, Pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700		
			A.2 Sosialisasi kawasan rawan kebakaran	TN Tambora, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700				
			A.3 Pengamanan Kawasan Rawan Kebakaran	TN Tambora, Pemerintah setempat, Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI	APBN/APBD /Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210				
			A.4 Pelaksanaan Pembinaan MPA (masyarakat Peduli Api)	TN Tambora, Pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	3500				
			A.5 Penyediaan sarana Prasarana Pemadaman Kebakaran	TN Tambora, Pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor				Paket	3000						Paket	3000	6000				
		B. Penanggulangan Kebakaran	B.1 Koordinasi & Komunikasi antar stakeholders terkait Pemadaman	TN Tambora, Pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210		
			B.2 Pembangunan Kanal Bloking	TN Tambora, Pemerintah setempat, PU, Perkim	APBN/APBD /Donor	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	3500		
			B.3 Pemadaman Kebakaran	TN Tambora, Pemerintah setempat, Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI	APBN/APBD /Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350		
		C. Penanganan Pasca Kebakaran	C.1 Monitoring dan Evaluasi Areal Pasca Kebakaran	TN Tambora, Pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	paket	50	350		
		Aksi Mempertahankan Serapan	D. Pengamanan Kawasan Hutan	D.1 Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	TN Tambora, Pemerintah setempat, NGO terkait/Mitra KLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280	
	D.2 Sosialisasi batas Kawasan Konservasi			TN Tambora, Pemerintah setempat, NGO terkait/Mitra KLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280		
	D.3 Identifikasi dan Inventarisasi SDH			TN Tambora, Pemerintah setempat, NGO terkait/Mitra KLHK	APBN/APBD /Donor					Ha	500						Paket	500	1000			
	D.4 Patroli terpadu			TN Tambora, Pemerintah setempat, TNI/POLRI	APBN/APBD /Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280		
	Aksi	E. Rehabilitasi	E.1 Rehabilitasi pada Areal Bekas	TN Tambora, Pemerintah setempat,	APBN/APBD	Ha	28000	Ha	28000	Ha	28000	Ha	28000	Ha	28000	Ha	28000	Ha	28000	196000		

meningkatkan Serapan				Terbakar	BPDAS, DLHK, KLHK	/Donor															
			E.2	Rehabilitasi pada Kawasan lahan kritis dan terdegradasi	TN Tambora, Pemerintah setempat, BPDAS, KLHK, DLHK	APBN/APBD /Donor	Ha	28000	Ha	28000	Ha	28000	Ha	28000	Ha	28000	Ha	28000	Ha	28000	196000
Kelembagaan	F.	Penguatan Kelembagaan & Sosialisasi	F.1	Pelaksanaan Koordinasi antar Pemangku Kepentingan	TN Tambora, Pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	210	
			F.2	Pembentukan dan Pembinaan Kemitraan Konservasi	TN Tambora, Pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	280	
			F.3	Penyusunan, pembaharuan dan Pengesahan RPJP	TN Tambora, Pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	350	
			F.4	Pengadaan tenaga POLHUT dan Tenaga Penyuluh Kehutanan	KLHK, TN Tambora, Pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	525	
			F.5	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelaksana	KLHK, TN Tambora, Pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	210	
			F.6	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas masyarakat sekitar kawasan kelola (Fasilitasi, Pendampingan dan Pembinaan)	KLHK, TN Tambora, Pemerintah setempat, NGO terkait/Mitra KLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	210	
			F.7	Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan (Ekowisata, Jasa tata air, dan penyimpanan/ penyerapan karbon)	TN Tambora, Pemerintah setempat, NGO terkait/Mitra KLHK, KLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	700	
			F.8	Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemanfaatan HHBK dan multi usaha kehutanan pada areal berizin	TN Tambora, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG	APBN/APBD /Donor	Paket	250	Paket	250	Paket	250	Paket	250	Paket	250	Paket	250	1750		
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				413595	

Tabel Rencana Operasional (RO 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di Taman Nasional Tambora

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Anggaran (Rp. 1.000.000,-)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)	
						Periode (Tahun)															
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp		
4,714.78	Aksi Pengurangan Emisi	A. Pemulihan Ekosistem	A.1	Penentuan dan Penataan Areal Target Pemulihan Ekosistem	TN Tambora, Pemerintah Setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD /Donor	Ha	100	Ha	100	Ha	100	Ha	100	Ha	100	Ha	100	Ha	100	700
	Aksi mempertahankan serapan		A.2	Sosialisasi Kepada Masyarakat terkait kegiatan Reforestasi dan Rehabilitasi Lahan	TN Tambora, Pemerintah Setempat, NGO terkait/Mitra KLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280

				A.3	Fasilitasi, Pendampingan dan Pembinaan Masyarakat	TN Tambora, Pemerintah Setempat, NGO terkait/Mitra KLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	175
Aksi meningkatkan serapan	B.	Reforestasi dan Rehabilitasi Lahan	B.1	Penanaman/Pengkayaan pada areal bekas tebangan	TN Tambora, Pemerintah Setempat, NGO terkait/Mitra KLHK, BPDAS, KLHK	APBN/APBD /Donor	Ha	4000	Ha	4000	Ha	4000	Ha	4000	Ha	4000	Ha	4000	Ha	4000	28000	
			B.2	Penanaman pada Kawasan Hutan	TN Tambora, Pemerintah Setempat, NGO terkait/Mitra KLHK, BPDAS, KLHK	APBN/APBD /Donor	Ha	4000	Ha	4000	Ha	4000	Ha	4000	Ha	4000	Ha	4000	28000			
			B.3	Penanaman areal dengan pola kemitraan	TN Tambora, Pemerintah Setempat, NGO terkait/Mitra KLHK, BPDAS, KLHK	APBN/APBD /Donor	Ha	4000	Ha	4000	Ha	4000	Ha	4000	Ha	4000	Ha	4000	28000			
			B.4	Rehab DAS	TN Tambora, Pemerintah Setempat, NGO terkait/Mitra KLHK, BPDAS, KLHK	APBN/APBD /Donor	Ha	4000	Ha	4000	Ha	4000	Ha	4000	Ha	4000	Ha	4000	28000			
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																					113155	

Tabel Rencana Operasional (RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di Taman Nasional Tambora.

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Anggaran (Rp. 1.000.000,-)															Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
						Periode (Tahun)															
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp		
56,602.88	Aksi Peningkatan Serapan	A Pencegahan Kebakaran	A.1	Identifikasi Kawasan Rawan Kebakaran	TN Tambora, Pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Ha	200	...Ha	200	Ha	200	..Ha	200	Ha	200	Ha	200	Ha	200	1400
			A.2	Sosialisasi kawasan rawan kebakaran	TN Tambora, Pemerintah setempat, NGO terkait/Mitra KLHK	APBN/APBD /Donor	Ha	100	..Ha	100	Ha	100	..Ha	100	Ha	100	Ha	100	Ha	100	700
			A.3	Pengamanan Kawasan Rawan Kebakaran	TN Tambora, Pemerintah setempat, Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI	APBN/APBD /Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
			A.4	Pelaksanaan Pembinaan MPA (masyarakat Peduli Api)	TN Tambora, Pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	Paket	500	3500
			A.5	Penyediaan sarana Prasarana Pemadaman Kebakaran	TN Tambora, Pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor					Paket	3000							Paket	3000	6000
	B	Pemeliharaan Tanaman	B.1	Pemeliharaan Tanaman pada Areal Konservasi	TN Tambora, Pemerintah Setempat, BPDAS, KLHK, NGO terkait/Mitra KLHK	APBN/APBD /Donor	Ha	35000	Ha	35000	Ha	35000	Ha	35000	Ha	35000	Ha	35000	Ha	35000	245000

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan		PIC	Keterangan	Rencana Anggaran (Rp. 1.000.000,-)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
							Periode (Tahun)														
							2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	
			B.2	Pemeliharaan Tanaman pada Areal PBPH	TN Tambora, Pemerintah Setempat, NGO terkait/Mitra KLHK, BPDAS, KLHK, PBPH terkait	APBN/APBD /Donor	Ha	35000	Ha	35000	Ha	35000	Ha	35000	Ha	35000	Ha	35000	Ha	35000	245000
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																					501810

TAHURA NURAKSA

Lampiran 19. Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di Tahura Nuraksa

Tabel Rencana Operasional (RO 1 Pencegahan Deforestasi Mineral) *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di Tahura Nuraksa

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan		PIC	Keterangan	Rencana Anggaran (Rp. 1.000.000,-)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
							Periode (Tahun)														
							2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	
2.30	Aksi Pengurangan emisi	A. Pencegahan Kebakaran	A.1	Identifikasi Kawasan Rawan Kebakaran	TAHURA NURAKSA, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	Paket	10	Paket	Paket	10	Paket	Paket	10	Paket	Paket	10	Paket	10	30
			A.2	Sosialisasi kawasan rawan kebakaran	TAHURA NURAKSA, Pemerintah setempat, NGO terkait/Mitra KLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	Paket	10	Paket	Paket	10	Paket	Paket	10	Paket	Paket	10	Paket	10	30
			A.3	Pengamanan Kawasan Rawan Kebakaran	TAHURA NURAKSA, Pemerintah setempat, Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70
			A.4	Pelaksanaan Pembinaan MPA (masyarakat Peduli Api)	TAHURA NURAKSA, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70
			A.5	Penyediaan sarana Prasarana Pemadaman Kebakaran	TAHURA NURAKSA, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70
		B. Penanggulangan Kebakaran	B.1	Koordinasi & Komunikasi antar stakeholders terkait Pemadaman	TAHURA NURAKSA, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70
			B.2	Pembangunan Kanal Bloking	TAHURA NURAKSA, Pemerintah setempat, PU, Perkim	APBN/APBD/ Donor	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	105
			B.3	Pemadaman Kebakaran	TAHURA NURAKSA, Pemerintah setempat, Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	105
		C. Penanganan Pasca Kebakaran	C.1	Monitoring dan Evaluasi Areal Pasca Kebakaran	TAHURA NURAKSA, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70
	Aksi Mepertahanka n Serapan	D. Pengamanan Kawasan Hutan	D.1	Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	TAHURA NURAKSA, Pemerintah setempat, NGO terkait/Mitra KLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70
			D.2	Sosialisasi batas Kawasan Konservasi (KSA & KPA)	TAHURA NURAKSA, Pemerintah setempat, NGO terkait/Mitra KLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70
			D.3	Identifikasi dan Inventarisasi SDH	TAHURA NURAKSA, Pemerintah setempat, NGO terkait/Mitra KLHK	APBN/APBD/ Donor	 Ha	20	 Ha	20	 Ha	20	 Ha	20	 Ha	20	 Ha	20	 Ha	20	140
			D.4	Patroli terpadu	TAHURA NURAKSA, Pemerintah setempat, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70

Aksi meningkatkan Serapan	E. Pengembangan RIL-C & Penegelolaan SILIN	E.1	Koordinasi dengan pemilik izin untuk pelaksanaan RIL-C dan SILIN	TAHURA NURAKSA, Pemerintah setempat, PBPH terkait, KLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70
		E.2	Sosialisasi pemanenan hutan dengan RIL-C dan Pengelolaan PBPH-HA dengan SILIN	TAHURA NURAKSA, Pemerintah setempat, PBPH terkait, KLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140
	F. Rehabilitasi	F.1	Rehabilitasi pada Areal Bekas Terbakar	TAHURA NURAKSA, Pemerintah setempat, BPDAS, DLHK, KLHK	APBN/APBD/Donor	 Ha	6	 Ha	6	 Ha	6	 Ha	6	 Ha	6	 Ha	6	 Ha	6	42
		F.2	Rehabilitasi pada Kawasan lahan kritis dan terdegradasi	TAHURA NURAKSA, Pemerintah setempat, BPDAS, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	 Ha	6	 Ha	6	 Ha	6	 Ha	6	 Ha	6	 Ha	6	 Ha	6	42
		F.3	Rehabilitasi di lahan masyarakat (KBR, KBD, HR dll)	TAHURA NURAKSA, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	 Ha	6	 Ha	6	 Ha	6	 Ha	6	 Ha	6	 Ha	6	 Ha	6	42
	G. Penguatan Kelembagaan & Sosialisasi	G.1	Pelaksanaan Koordinasi antar Pemangku Kepentingan	TAHURA NURAKSA, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70
		G.2	Sosialisasi Perhutanan Sosial	TAHURA NURAKSA, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70
		G.3	Pembentukan dan Pembinaan Perhutanan Sosial	KLHK, TAHURA NURAKSA, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70
		G.4	Kerjasama Kemitraan antara PBPH-HA/ HT/ RE dengan masyarakat sekitar (KULIN KK)	KLHK, TAHURA NURAKSA, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70
		G.5	Penyusunan, pembaharuan dan Pengesahan RPHJP	KLHK, TAHURA NURAKSA, Pemerintah setempat, NGO terkait/Mitra KLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70
		G.6	Pengadaan tenaga POLHUT dan Tenaga Penyuluh Kehutanan	TAHURA NURAKSA, Pemerintah setempat, NGO terkait/Mitra KLHK KLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	140
		G.7	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelaksana	TAHURA NURAKSA, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG	APBN/APBD/Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70
		G.8	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas masyarakat pengelola PS dan masyarakat sekitar kawasan kelola (Fasilitasi, Pendampingan dan Pembinaan)	KLHK, TAHURA NURAKSA, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70
		G.9	Fasilitasi dan pelaksanaan pendampingan kelompok tani hutan & bimbingan teknis dalam pengelolaan PS	KLHK, TAHURA NURAKSA, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70
		G.10	Pembangunan demplot Agroforestry	KLHK, TAHURA NURAKSA, Pemerintah setempat, NGO terkait/Mitra KLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70

				G.11	Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan (Ekowisata, Jasa tata air, dan penyimpanan/ penyerapan karbon)	TAHURA NURAKSA, Pemerintah setempat, NGO terkait/Mitra KLHK, KLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70
				G.12	Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemanfaatan HHBK dan multi usaha kehutanan pada areal berizin	TAHURA NURAKSA, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG	APBN/APBD/ Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				2216

Tabel Rencana Operasional (RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di Tahura Nuraksa

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program		Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Anggaran (Rp. 1.000.000,-)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
							Periode (Tahun)																
							2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
2,721.05	Aksi Peningkatan Serapan	A	Penanaman	A.1	Penanaman pada Areal Konservasi	TAHURA NURAKSA, Pemerintah Setempat, BPDAS, KLHK, NGO terkait/Mitra KLHK PBPH	APBN/APBD/ Donor	Ha	2120	Ha	2120	Ha	2120	Ha	2120	Ha	2120	Ha	2120	14840			
				A.2	Penanaman pada Areal PS dan PIAPS	TAHURA NURAKSA, Pemerintah Setempat, NGO terkait/Mitra KLHK, BPDAS, KLHK, PBPH terkait, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Ha	2120	Ha	2120	Ha	2120	Ha	2120	Ha	2120	Ha	2120	14840			
				A.3	Penanaman pada Areal PBPH	TAHURA NURAKSA, Pemerintah Setempat, BPDAS, KLHK, NGO terkait/Mitra KLHK, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Ha	2120	Ha	2120	Ha	2120	Ha	2120	Ha	2120	Ha	2120	14840			
				A.4	Penanaman pada Areal APL HGU dan Non HGU	TAHURA NURAKSA, Pemerintah Setempat, NGO terkait/Mitra KLHK, BPDAS, KLHK, PBPH terkait, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Ha	2120	Ha	2120	Ha	2120	Ha	2120	Ha	2120	Ha	2120	14840			
	B	Pemeliharaan Tanaman	B.1	Pemeliharaan Tanaman pada Areal Konservasi	TAHURA NURAKSA, Pemerintah Setempat, NGO terkait/Mitra KLHK, BPDAS, KLHK, PBPH terkait, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Ha	850	Ha	850	Ha	850	Ha	850	Ha	850	Ha	850	5950				
			B.2	Pemeliharaan Tanaman pada Areal PS dan PIAPS	TAHURA NURAKSA, Pemerintah Setempat, NGO terkait/Mitra KLHK, BPDAS, KLHK, PBPH terkait, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Ha	850	Ha	850	Ha	850	Ha	850	Ha	850	Ha	850	5950				
			B.3	Pemeliharaan Tanaman pada Areal PBPH	TAHURA NURAKSA, Pemerintah Setempat, NGO terkait/Mitra KLHK, BPDAS, KLHK, PBPH terkait, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Ha	850	Ha	850	Ha	850	Ha	850	Ha	850	Ha	850	5950				
			B.4	Pemeliharaan Tanaman pada Areal APL HGU dan Non HGU	TAHURA NURAKSA, Pemerintah Setempat, NGO terkait/Mitra KLHK, BPDAS, KLHK, PBPH terkait, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Ha	850	Ha	850	Ha	850	Ha	850	Ha	850	Ha	850	5950				
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				83160			

BKSDA

Lampiran 20. Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di BKSDA

Tabel Rencana Operasional (RO 1 Pencegahan Deforestasi Mineral) *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program		Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
							Anggaran/Tahun																
							2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
705.61	Aksi Pengurangan emisi	A.	Pencegahan Kebakaran	A.1	Identifikasi Kawasan Rawan Kebakaran	BKSDA, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350	
				A.2	Sosialisasi kawasan rawan kebakaran	BKSDA, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280	
				A.3	Pengamanan Kawasan Rawan Kebakaran	BKSDA, Pemerintah setempat, Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210	
				A.4	Pelaksanaan Pembinaan MPA (masyarakat Peduli Api)	BKSDA, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280	
				A.5	Penyediaan sarana Prasarana Pemadaman Kebakaran	BKSDA, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor					Paket	500							Paket	500	1000	
		B.	Penanggulangan Kebakaran	B.1	Koordinasi & Komunikasi antar stakeholders terkait Pemadaman	BKSDA, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	70	
				B.2	Pembangunan Kanal Bloking	BKSDA, Pemerintah setempat, PU, Perkim	APBN/APBD/ Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700	
				B.3	Pemadaman Kebakaran	BKSDA, Pemerintah setempat, Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI	APBN/APBD/ Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210	
		C.	Penanganan Pasca Kebakaran	C.1	Monitoring dan Evaluasi Areal Pasca Kebakaran	BKSDA, Pemerintah setempat	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280	
		Aksi Mepertahankan Serapan	D.	Pengamanan Kawasan Hutan	D.1	Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	BKSDA, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
D.2	Sosialisasi batas Kawasan Konservasi (KSA & KPA)				BKSDA, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/ Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280		

			D.3	Identifikasi dan Inventarisasi SDH	BKSDA, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350
			D.4	Patroli terpadu	BKSDA, Pemerintah setempat, TNI/POLRI	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	210
		E.	Pengembangan RIL-C & Penegelolaan SILIN	E.1	Koordinasi dengan pemilik izin untuk pelaksanaan RIL-C dan SILIN	BKSDA, Pemerintah setempat, PBPH terkait, KLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	70
	Aksi meningkatkan Serapan	F.	Rehabilitasi	F.1	Rehabilitasi pada Areal Bekas Terbakar	BKSDA, Pemerintah setempat, BPDAS, DLHK, KLHK	APBN/APBD/Donor	Ha	735	Ha	735	Ha	735	Ha	735	Ha	735	Ha	5145
				F.2	Rehabilitasi pada Kawasan lahan kritis dan terdegradasi	BKSDA, Pemerintah setempat, BPDAS, KLHK, DLHK	APBN/APBD/Donor	Ha	735	Ha	735	Ha	735	Ha	735	Ha	735	Ha	5145
				F.3	Rehabilitasi di Kawasan Ekosistem Esensial	BKSDA, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Ha	735	Ha	735	Ha	735	Ha	735	Ha	735	Ha	5145
	Kelembagaan	G.		G.1	Pelaksanaan Koordinasi antar Pemangku Kepentingan	BKSDA, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	110
			Penguatan Kelembagaan & Sosialisasi	G.2	Pembentukan dan Pembinaan Kemitraan Konservasi	KLHK, BKSDA, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	230
				G.3	Penyusunan, pembaharuan dan Pengesahan RPHJP	KLHK, BKSDA, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	200
				G.4	Pengadaan tenaga POLHUT dan Tenaga Penyuluh Kehutanan	BKSDA, Pemerintah setempat, KLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	75	Paket	525
				G.5	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelaksana	BKSDA, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	210
				G.6	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas masyarakat di Sekitar Kawasan (Fasilitasi, Pendampingan dan Pembinaan)	KLHK, BKSDA, Pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	210
				G.7	Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan (Ekowisata, Jasa tata air, dan penyimpanan/ penyerapan karbon)	BKSDA, Pemerintah setempat, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, KLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	140
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																			21630

Tabel Rencana Operasional (RO 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
						Anggaran/Tahun																
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
6.57	Aksi Pengurangan Emisi	A. Pemulihan Ekosistem	A.1	Penentuan dan Penataan Areal Target Pemulihan Ekosistem	BKSDA, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK,	APBN/APBD /Donor	..Ha	50	..Ha	50	..Ha	50	..Ha	50	..Ha	50	..Ha	50	350			
	A 2		Sosialisasi Kepada Masyarakat terkait kegiatan Reforestasi dan Rehabilitasi Lahan	BKSDA, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420				
	A 3		Fasilitasi, Pendampingan dan Pembinaan Masyarakat	BKSDA, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Disnakerja	APBN/APBD /Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280				
	Aksi meningkatkan serapan	B. Reforestasi dan Rehabilitasi Lahan	B.1	Penanaman/Pengkayaan pada areal bekas tebangan	BKSDA, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD /Donor	 Ha	10	 Ha	10	 Ha	10	 Ha	10	 Ha	10	 Ha	10	70			
	B.2		Penanaman pada areal Kawasan Hutan Konservasi	BKSDA, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD /Donor	 Ha	10	 Ha	10	 Ha	10	 Ha	10	 Ha	60	 Ha	60	170				
	B.5		Penanaman areal dengan pola kemitraan	BKSDA, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD /Donor	 Ha	10	 Ha	10	 Ha	10	 Ha	10	 Ha	50	 Ha	50	150				
	B.6		Rehab DAS	BKSDA, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS	APBN/APBD /Donor	 Ha	10	 Ha	10	 Ha	10	 Ha	10	 Ha	60	 Ha	60	170				
Kelembagaan	C. Pengembangan Multi Usaha	C.1	Pengembangan multi usaha melalui pola agroforestry	BKSDA, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, LITBANG, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	350				
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																			1960			

Tabel Rencana Operasional (RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program		Kegiatan		PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
								Anggaran/Tahun														
								2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	
4,787.83	Aksi Peningkatan Serapan	A	Penanaman	A.1	Penanaman pada Areal Konservasi	BKSDA, Pemerintah Setempat, BPDAS, KLHK, NGO terkait	APBN/APBD/ Donor	...Ha	7500	...Ha	7500	...Ha	7500	...Ha	7500	...Ha	7500	...Ha	7500	52500		
				A.2	Penanaman pada kawasan Ekosistem Esensial	BKSDA, Pemerintah Setempat, BPDAS, KLHK, NGO terkait	APBN/APBD/ Donor	...Ha	7500	...Ha	7500	...Ha	7500	...Ha	7500	...Ha	7500	...Ha	7500	52500		
		B	Pemeliharaan Tanaman	B.1	Pemeliharaan Tanaman pada Areal Konservasi	BKSDA, Pemerintah Setempat, BPDAS, KLHK, NGO terkait	APBN/APBD/ Donor	...Ha	1500	...Ha	1500	...Ha	1500	...Ha	1500	...Ha	1500	...Ha	3000	13500		
				B.3	Pemeliharaan Tanaman pada Kawasan Ekosistem Esensial	BKSDA, Pemerintah Setempat, BPDAS, KLHK, NGO terkait	APBN/APBD/ Donor	...Ha	1500	...Ha	1500	...Ha	1500	...Ha	1500	...Ha	1500	...Ha	3000	13500		
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				132000		

Tabel Rencana Operasional (RO 12 Pengelolaan Mangrove) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program		Kegiatan		PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
								Anggaran/Tahun														
								2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	
91.04	Aksi Mengurangi emisi	A.	Pengamanan dan pencegahan kawasan dari kegiatan Konversi lahan	A.1	Sosialisasi Pelestarian kawasan Mangrove	DLHK, BKSDA Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerinth setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420		
				A.2	Patroli Pengamanan Hutan Mangrove	BKSDA, TNI Polri	APBN/APBD/Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420		
				A.3	Pencegahan dan penanggulangan kegiatan konversi lahan mangrove	BKSDA, pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280		
	Aksi peningkatan Seraya Emisi	B.	Penanaman	B.1	Penataan Batas Areal	BKSDA, pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280		
				B.2	Penanaman mangrove	BKSDA, pemerintah	APBN/APBD/Donor	...Ha	530	...Ha	530	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	1360

					setempat															
			B.3	Rehabilitasi dalam rangka pemulihan ekosistem mangrove	BKSDA, pemerintah setempat, BPDAS	APBN/APBD/Donor	...Ha	530	...Ha	530	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	1360	
		C.	Inventarisasi Mangrove	C.1	Inventarisasi dan identifikasi potensi mangrove	BKSDA, pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700		
				C.2	Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra	BKSDA, pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350		
Kelembagaan	D.	Pemberdayaan Masyarakat	D.1	Pemberdayaan masyarakat setempat/ sekitar hutan	BKSDA, pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD/Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420	
			D.2	Skema multiusaha kehutanan	BKSDA, pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350	
			D.3	Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah	BKSDA, pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350	
			D.4	Pembentukan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata)	BKSDA, pemerintah setempat	APBN/APBD/Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350	
	E.	Penyusunan Rencana	E.1	Penyusunan RPHJP dan RPHJPD	BKSDA, pemerintah setempat, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280	
			E.2	Penyusunan data potensi Mangrove	BKSDA, pemerintah setempat, DLHK	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280	
		F.	Peningkatan Kapasitas SDM	F.1	Peningkatan kapasitas POKDARWIS dan KKMD	BKSDA, pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
				F.2	Pembentukan dan Pendampingan MPA	BKSDA, pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD/Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																			7760	

ARAHAN PENGGUNAAN LAIN (APL)

Lampiran 21. Matriks Seluruh Rencana Operasional (RO) *Indonesia's FOLU Net Sink* TAHUN 2030 di Arahkan Penggunaan Lain (APL)

Tabel Rencana Operasional (RO) 1 *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di Arahkan Penggunaan Lain (APL)

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)																Total Anggaran (Rp x 1.000.000)	
						Anggaran/Tahun																	
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030					
Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp								
68,029.00	Aksi Pengurangan emisi	A. Pencegahan Kebakaran	A.1	Identifikasi Kawasan Rawan Kebakaran	Dinas Terkait, Pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	200	Paket	200	Paket	200	Paket	200	Paket	200	Paket	200	Paket	200	1400		
			A.2	Sosialisasi kawasan rawan kebakaran	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, (NGo terkait atau Mitra KLHK/DLHK/Mitra KLHK)	APBN/APBD /Donor	Paket	160	Paket	160	Paket	160	Paket	160	Paket	160	Paket	160	Paket	160	1120		
			A.3	Pengamanan Kawasan Rawan Kebakaran	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI	APBN/APBD /Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700		
			A.4	Pelaksanaan Pembinaan MPA (masyarakat Peduli Api)	Dinas Terkait, Pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	1050		
			A.5	Penyediaan sarana Prasarana Pemadaman Kebakaran	Dinas Terkait, Pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor					Paket	2000							Paket	2000	4000		
		B. Penanggulangan Kebakaran	B.1	Koordinasi & Komunikasi antar stakeholders terkait Pemadaman	Dinas Terkait, Pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	1050
			B.2	Pembangunan Kanal Bloking	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, PU, Perkim	APBN/APBD /Donor	Paket	300	Paket	300	Paket	300	Paket	300	Paket	300	Paket	300	Paket	300	Paket	300	2100
			B.3	Pemadaman Kebakaran	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI	APBN/APBD /Donor	Paket	200	Paket	200	Paket	200	Paket	200	Paket	200	Paket	200	Paket	200	Paket	200	1400
		C. Penanganan Pasca Kebakaran	C.1	Monitoring dan Evaluasi Areal Pasca Kebakaran	Dinas Terkait, Pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	1050
		Aksi Mepertahank an Serapan	D. Pengamanan Kawasan APL	D.1	Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Kawasan	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, (NGo terkait atau Mitra KLHK/DLHK/Mitra KLHK)	APBN/APBD /Donor	Paket	160	Paket	160	Paket	160	Paket	160	Paket	160	Paket	160	Paket	160	Paket	160
	D.2			Sosialisasi batas Kawasan	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, (NGo terkait atau Mitra KLHK/DLHK/Mitra KLHK)	APBN/APBD /Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700
	D.3			Identifikasi dan Inventarisasi Potensi Sumber Daya Alam	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, (NGo terkait atau Mitra KLHK/DLHK/Mitra KLHK)	APBN/APBD /Donor	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	1050
	D.4			Patroli terpadu	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, TNI/POLRI	APBN/APBD /Donor	Paket	200	Paket	200	Paket	200	Paket	200	Paket	200	Paket	200	Paket	200	Paket	200	1400
	E. Pengembangan RIL-C & Penegelolaan SILIN		E.1	Koordinasi dengan pemilik izin untuk pelaksanaan RIL-C dan SILIN	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, , PBPH terkait, KLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700
			E.2	Sosialisasi pemanenan dengan RIL-C dan Pengelolaan PBPH- HA dengan SILIN	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, , PBPH terkait, KLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700
	Aksi meningkatka n Serapan		F. Rehabilitasi	F.1	Rehabilitasi pada Areal Bekas Terbakar	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, BPDAS, DLHK, KLHK	APBN/APBD /Donor	Ha	7,000	Ha	7,000	Ha	7,000	Ha	7,000	Ha	7,000	Ha	7,000	Ha	7,000	Ha	7,000

				F.2	Rehabilitasi pada Kawasan lahan kritis dan terdegradasi	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, BPDAS, KLHK, DLHK	APBN/APBD /Donor	Ha	7,000	Ha	7,000	Ha	7,000	Ha	7,000	Ha	7,000	Ha	7,000	Ha	7,000	49,000
				F.3	Rehabilitasi di lahan masyarakat	Dinas Terkait, Pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Ha	7,000	Ha	7,000	Ha	7,000	Ha	7,000	Ha	7,000	Ha	7,000	Ha	7,000	49,000
	Kelembagaan	G.	Penguatan Kelembagaan & Sosialisasi	G.1	Pelaksanaan Koordinasi antar Pemangku Kepentingan	Dinas Terkait, Pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	1050
				G.2	Sosialisasi Perhutanan Sosial (Diluar kawasan hutan)	Dinas Terkait, Pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	1050
				G.3	Pembentukan dan Pembinaan Perhutanan Sosial	KLHK, Dinas Terkait, Pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700
				G.4	Kerjasama Kemitraan antara Perijinan dengan masyarakat sekitar (KULIN KK)	KLHK, Dinas Terkait, Pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	1050
				G.6	Pengadaan tenaga atau pegawai	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, (NGo terkait atau Mitra KLHK/DLHK/Mitra KLHK), KLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	1050
				G.7	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelaksana	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG	APBN/APBD /Donor	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	Paket	150	1050
				G.8	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas masyarakat pengelola PS dan masyarakat sekitar kawasan kelola (Fasilitasi, Pendampingan dan Pembinaan)	KLHK, Dinas Terkait, Pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	200	Paket	200	Paket	200	Paket	200	Paket	200	Paket	200	Paket	200	1400
				G.9	Fasilitasi dan pelaksanaan pendampingan kelompok tani hutan & bimbingan teknis dalam pengelolaan PS	KLHK, Dinas Terkait, Pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700
				G.10	Pembangunan demplot Agroforestry	KLHK, Dinas Terkait, Pemerintah setempat, (NGo terkait atau Mitra KLHK/DLHK/Mitra KLHK)	APBN/APBD /Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700
				G.11	Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan (Ekowisata, Jasa tata air, dan penyimpanan/ penyerapan karbon)	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, (NGo terkait atau Mitra KLHK/DLHK/Mitra KLHK), KLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700

				G.12	Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, DISTANBUN, LITBANG	APBN/APBD /Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																						176690

Tabel Rencana Operasional (RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di Arahkan Penggunaan Lain (APL)

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program		Kegiatan		PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total
								Anggaran/Tahun														Anggaran (Rp x 1.000.000)
								2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	
7,693.58	Aksi Peningkatan Serapan	A	Penanaman	A.1	Penanaman pada Areal Penggunaan Lain	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGo terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	7,693.58 Ha	5,000	7,693.58 Ha	5,000	7,693.58 Ha	5,000	7,693.58 Ha	5,000	7,693.58 Ha	5,000	7,693.58 Ha	5000	35,000		
				A.2	Penanaman pada Areal Perizinan	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGo terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	7,693.58 Ha	5,000	7,693.58 Ha	5,000	7,693.58 Ha	5,000	7,693.58 Ha	5,000	7,693.58 Ha	5,000	7,693.58 Ha	5000	35,000		
				A.3	Penanaman pada Areal PS (Diluar kawasan hutan)	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGo terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	7,693.58 Ha	5,000	7,693.58 Ha	5,000	7,693.58 Ha	5,000	7,693.58 Ha	5,000	7,693.58 Ha	5,000	7,693.58 Ha	5000	35,000		
				A.4	Penanaman pada Areal Penggunaan lain yang telah diberikan izin	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGo terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	7,693.58 Ha	5,000	7,693.58 Ha	5,000	7,693.58 Ha	5,000	7,693.58 Ha	5,000	7,693.58 Ha	5,000	7,693.58 Ha	5000	35,000		
				A.5	Penanaman pada Areal HGU dan Non HGU	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGo terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	7,693.58 Ha	5,000	7,693.58 Ha	5,000	7,693.58 Ha	5,000	7,693.58 Ha	5,000	7,693.58 Ha	5,000	7,693.58 Ha	5000	35,000		
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				175000		

Tabel Rencana Operasional (RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di Arahkan Penggunaan Lain (APL)

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)	
						Anggaran/Tahun															
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp		
28.36	Aksi Peningkatan Serapan	A	Penanaman	A.1 Penanaman pada Areal diluar kawasan Konservasi	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	..Ha	206	..Ha	206	..Ha	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	562
				A.2 Penanaman pada Areal Penggunaan lain yang tela diberikan izin	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/ Donor	Paket	206	Paket	206	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	562

				A.3	Penanaman pada Areal Perijinan	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	Paket	206	Paket	206	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	562				
				A.4	Penanaman pada Areal APL HGU dan Non HGU	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, BPDAS, PBPH	APBN/APBD/Donor	Paket	206	Paket	206	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	562				
				B	Pemeliharaan Tanaman	B.1	Pemeliharaan Tanaman pada Areal diluar kawasan Konservasi	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	Ha	30	Ha	30	Ha	30	Ha	30	Ha	30	Paket	30	Paket	30	210
				B.2		Pemeliharaan Tanaman pada Areal penggunaan lain yang telah diberikan izin	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	Ha	30	Ha	30	Ha	30	Ha	30	Ha	30	Paket	30	Paket	30	210	
				B.3		Pemeliharaan Tanaman pada Areal Perijinan	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	Ha	30	Ha	30	Ha	30	Ha	30	Ha	30	Paket	30	Paket	30	210	
				B.4		Pemeliharaan Tanaman pada Areal APL HGU dan Non HGU	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, PBPH	APBN/APBD/Donor	Ha	30	Ha	30	Ha	30	Ha	30	Ha	30	Paket	30	Paket	30	210	
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																				3088				

Tabel Rencana Operasional (RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di Arahkan Penggunaan Lain (APL)

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
						Anggaran/Tahun														
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	
1,694.94	Aksi pengurangan emisi	A Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	A.1 Sosialisasi kebakaran di kawasan APL	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGo terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700
			A.2 Patroli kebakaran hutan dan lahan	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD /Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700
			A.3 Kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran pada kawasan APL yang belum dibebani izin dan luar kawasan hutan	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD /Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420

	Aksi Mempertahankan Serapan	B Pengamanan Hutan dan Lahan	B.1	Sosialisasi pengamanan kawasan APL	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700
			B.2	Patroli pengamanan kawasan APL	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD /Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700
			B.3	Kegiatan pencegahan perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum di bebani izin dan luar kawasan hutan	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD /Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
			B.4	Penataan Batas Areal	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700
	C Konservasi Kehati		C.1	Sosialisasi Konservasi Kehati	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
			C.2	Identifikasi dan inventarisasi keanekaragaman hayati (Flora dan Fauna)	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
			C.3	Survei Populasi Satwa, penyusunan dan pemantauan action plan konservasi Satwa	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
			C.4	Identifikasi potensi Jasling dan Wisata Alam	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Dinas Pariwisata	APBN/APBD /Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
			C.5	Upaya konservasi melalui HCVF	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD /Donor	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	 Ha	50	350
			C.6	Rescue Satwa yang dilindungi	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	280
			C.7	Pemantauan peredaran Flora dan fauna yang dilindungi	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
			C.8	Menjaga koridor satwa	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD /Donor	 Ha	60	 Ha	60	 Ha	60	 Ha	60	 Ha	60	 Ha	60	420
	Aksi meningkatkan serapan	D Penanaman dan Pengayaan tanaman	D.1	Kegiatan penanaman dan pengayaan tanaman pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin serta areal penggunaan lainnya pada areal hutan dan luar kawasan	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, TNI/POLRI	APBN/APBD /Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350

				hutan.																	
Kelembagaan	E	Pemberdayaan Masyarakat	E.1	Pendampingan dan Monev kegiatan perlindungan Keanekaragaman Hayati	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	560
			E.2	Pembinaan MPA dan peningkatan SDM	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	560
			E.3	Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Disperindag	APBN/APBD /Donor	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	560
			E.4	Pendampingan dan pembinaan kelembagaan KTH (Kelompok Tani Hutan	Dinas Terkait, Pemerintah setempat, KLHK, DLHK, Disnakerja, NGO terkait atau Mitra KLHK/DLHK, Disperindag, LITBANG	APBN/APBD /Donor	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	560
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																					10080

Tabel Rencana Operasional (RO 12 Pengelolaan Mangrove) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di Arahkan Penggunaan Lain (APL)

Luasan (ha/ Ro)	Tujuan Program	Program	Kegiatan	PIC	Keterangan	Rencana Pembiayaan (Rp X 1000.000)														Total Anggaran (Rp x 1.000.000)
						Anggaran/Tahun														
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	
2,254.69	Aksi Mengurangi emisi	A. Pengamanan dan pencegahan kawasan dari kegiatan Konversi lahan	A.1	Sosialisasi Pelestarian kawasan Mangrove	DLHK, Dinas Terkait Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerinth setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700	
			A.2	Patroli Pengamanan Hutan Mangrove	Dinas Terkait, TNI Polri	APBN/APBD /Donor	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	700	
			A.3	Pencegahan dan penanggulangan kegiatan konversi lahan mangrove	Dinas Terkait, pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	..Ha	50	..Ha	50	..Ha	50	..Ha	50	..Ha	50	..Ha	50	350	
	Aksi peningkatan Seraya Emisi	B. Penanaman	B.1	Penataan Batas Areal	Dinas Terkait, pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	350	
			B.2	Penanaman mangrove	Dinas Terkait, pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	..Ha	5000	..Ha	5000	..Ha	5000	..Ha	5000	..Ha	5000	..Ha	5000	35000	
			B.4	Rehabilitasi dalam rangka pemulihan ekosistem mangrove	Dinas Terkait, pemerintah setempat, BPDAS	APBN/APBD /Donor	..Ha	5000	..Ha	5000	..Ha	5000	..Ha	5000	..Ha	5000	..Ha	5000	35000	

		C.	Inventarisasi Mangrove	C.1	Inventarisasi dan identifikasi potensi mangrove	Dinas Terkait, pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	560
				C.2	Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra	Dinas Terkait, pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD /Donor	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	560
	Kelembagaan	D.	Pemberdayaan Masyarakat	D.1	Pemberdayaan masyarakat setempat/ sekitar hutan	Dinas Terkait, pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD /Donor	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	560
				D.2	Skema multiusaha kehutanan	Dinas Terkait, pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	560
				D.3	Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah	Dinas Terkait, pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	Paket	80	560
				D.4	Pembentukan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata)	Dinas Terkait, pemerintah setempat	APBN/APBD /Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
		E.	Penyusunan Rencana	E.1	Penyusunan RPHJP dan RPHJPD	Dinas Terkait, pemerintah setempat, DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
				E.2	Penyusunan data potensi Mangrove	Dinas Terkait, pemerintah setempat, DLHK	APBN/APBD /Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
		F.	Peningkatan Kapasitas SDM	F.1	Peningkatan kapasitas POKDARWIS dan KKMD	Dinas Terkait, pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD /Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
				F.2	Pembentukan dan Pendampingan MPA	Dinas Terkait, pemerintah setempat, NGO terkait	APBN/APBD /Donor	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	Paket	60	420
Total Anggaran (Rp x 1.000.000)																					77000	

